



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2023**



**RKPD
2023**



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan sebagai pedoman :

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023; dan
- c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;

- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD Tahun 2023 juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

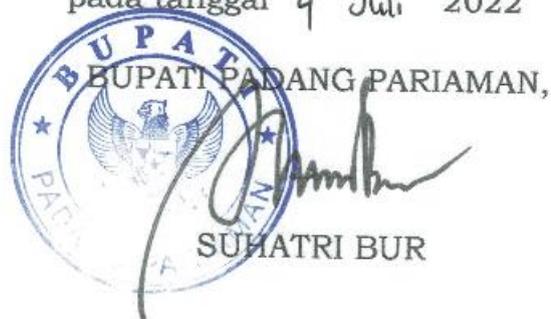
- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (2) Penjabaran RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

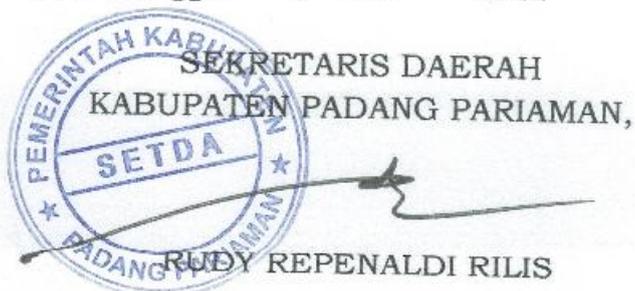
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 4 Juli 2022



Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 4 Juli 2022



KATA PENGANTAR

Ucapan Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 75 Permendagri No. 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyusunan RKPD mempedomani RPJMD.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2023 melalui beberapa tahapan, mulai dari konsinyir penyusunan draft Rancangan Awal RKPD, telaahan terhadap rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Konsultasi Publik.

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Tim penyusun RKPD Tahun 2023 dan seluruh stakeholder yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Parit Malintang, Juli 2022
BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.3.1 RKPD dan RKP Tahun 2023	I-9
1.3.2 RKPD dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2026	I-10
1.3.3 RKPD dengan Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS Tahun 2023	I-12
1.4 Maksud Dan Tujuan	I-12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-17
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-35
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-118
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD	II-131
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-132
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-2
3.1.1 Perkembangan Perekonomian Nasional	III-2
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	III-4
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat	III-6
3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-16
3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya	III-18

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

3.2.2 Proyeksi Keuangan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023	III-22
3.2.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-29
3.2.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-30
3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-33
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional 2023	IV-2
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	IV-6
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	IV-10
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV-19
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-19
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	IV-24
4.2.3 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	IV-25
4.2.4 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	IV-31
4.2.5 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	IV-39
4.2.6 Kebijakan Penurunan Stunting	IV-47
4.2.7 Kebijakan Responsif Gender	IV-47
4.2.8 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Padang Pariaman	IV-48
4.2.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah	IV-58
4.2.10 Inovasi Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah	IV-60
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan	V-1
5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan	V-10
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
6.1 Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023	VI-1
6.2 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2022.....	VI-3
BAB VII PENUTUP.....	VII-1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

LAMPIRAN.

1. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.
2. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kalender Perencanaan Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	I-3
Tabel 2.1.	Luas Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Nagari dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman	II-3
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-5
Tabel 2.3.	Jumlah, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Kecamatan 2021	II-5
Tabel 2.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017-2021	II-8
Tabel 2.5.	Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-21
Tabel 2.6.	Nilai dan Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Rp. Juta) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-22
Tabel 2.7.	Nilai dan Distribusi PDRB Atas Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Rp. Juta) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-24
Tabel 2.8.	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-29
Tabel 2.9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-30
Tabel 2.10.	Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-31
Tabel 2.11.	Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-32
Tabel 2.12.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia beserta Komponen Pembentuknya di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-33
Tabel 2.13.	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021	II-36
Tabel 2.14.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021	II-41
Tabel 2.15.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2021	II-50
Tabel 2.16.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2017-2021	II-54
Tabel 2.17.	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum	II-56

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

	dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021	
Tabel 2.18.	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017-2021	II-61
Tabel 2.19.	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.20.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021	II-67
Tabel 2.21.	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.22.	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.23.	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.24.	Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2021	II-76
Tabel 2.25.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2021	II-78
Tabel 2.26.	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021	II-80
Tabel 2.27.	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017-2021	II-85
Tabel 2.28.	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021	II-87
Tabel 2.29.	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017-2021	II-88
Tabel 2.30.	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2021	II-90
Tabel 2.31.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2021	II-93
Tabel 2.32.	Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2017-2021	II-93
Tabel 2.33.	Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2017-2021	II-94
Tabel 2.34.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2017-2021	II-95
Tabel 2.35.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2021	II-96
Tabel 2.36.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2017-2021	II-99
Tabel 2.37.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2021	II-102
Tabel 2.38.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017-2021	II-103
Tabel 2.39.	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017-2021	II-107
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017-2021	II-109
Tabel 2.41.	Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2017-2021	II-110
Tabel 2.42.	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017-2021	II-113
Tabel 2.43.	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2017-2021	II-115
Tabel 2.44.	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021	II-117
Tabel 2.45.	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2021	II-119
Tabel 2.46.	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017-2021	II-120
Tabel 2.47.	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2017-2021	II-121

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

Tabel 2.48.	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2017-2021	II-123
Tabel 2.49.	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021	II-125
Tabel 2.50.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-126
Tabel 2.51.	Kontribusi Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Total Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-127
Tabel 2.52.	Angka Kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-130
Tabel 2.53.	Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kabupaten Padang Pariaman	II-130
Tabel 2.54.	Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017-2021	II-133
Tabel 2.55.	Perincian Pendapatan Retribusi Saerah Tahun Anggaran 2019-2021	II-134
Tabel 2.56.	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang diTamatkan Tahun 2017-2021	II-135
Tabel 2.57.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021	II-136
Tabel 2.58.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Peringkat Kab/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2021	II-137
Tabel 2.59.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-138
Tabel 2.60.	Rekapitulasi Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018	II-141
Tabel 2.61	Rekapitulasi Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019	II-142
Tabel 2.62	Rekapitulasi Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020	II-144
Tabel 2.63	Rekapitulasi Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	II-144
Tabel 2.64	Rekapitulasi Inovasi Daerah Yang Dilaporkan Ke Kemendagri Dalam Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	II-145
Tabel 2.65	Daftar Rekapitulasi Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	II-149
Tabel 2.66	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-159
Tabel 3.1.	Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	III-4
Tabel 3.2.	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	III-9
Tabel 3.3	Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	III-12
Tabel 3.4	Sasaran Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	III-15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

Tabel 3.5	Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-17
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021 (%)	III-19
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-20
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-21
Tabel 3.9	Kontribusi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-22
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-22
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	III-25
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2023	III-27
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2023	III-28
Tabel 4.1.	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-7
Tabel 4.2.	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun	IV-13
Tabel 4.3.	Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	IV-24
Tabel 4.4.	Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	IV-32
Tabel 4.5.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	IV-34
Tabel 4.6.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	IV-39
Tabel 4.7.	Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Tahun 2023	IV-49
Tabel 4.8.	Keselarasn Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	IV-59
Tabel 4.9	Daftar Rencana Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2022	IV-67
Tabel 5.1.	Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	V-10
Tabel 6.1.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023	VI-1
Tabel 6.2.	Target Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	VI-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD	I-2
Gambar 1.2.	Pendekatan Secara Substansi Penyusunan RKPD Tahun 2023	I-4
Gambar 1.3.	Pendekatan Secara Proses Penyusunan RKPD Tahun 2023	I-5
Gambar 1.4.	Penggunaan Aplikasi SIPD Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2023	I-6
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman	II-2
Gambar 2.2.	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman	II-2
Gambar 2.3.	Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman menurut Kelompok Umur Tahun 2020	II-6
Gambar 2.4.	Penduduk berumur 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	II-7
Gambar 2.5.	Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga berlaku menurut Lapangan Usaha (Rp. Juta) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-18
Gambar 2.6.	Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Rp. Juta) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-26
Gambar 2.7.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021	II-20
Gambar 2.8.	Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-26
Gambar 2.9.	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-27
Gambar 2.10.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	II-28
Gambar 2.11.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-30
Gambar 2.12.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Padang Pariaman	II-33
Gambar 2.13.	Nilai Tukar Petani Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021	II-128
Gambar 2.14.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2017-2021	II-129
Gambar 2.15.	Piagam Penghargaan <i>Innovative Government Award</i> Peringkat II Tahun 2018 dari Kemendagri RI	VII-3
Gambar 2.16.	Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2020 meraih Kategori Kabupaten Sangat Inovatif tingkat Kabupaten	VII-9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

	dalam Penganugrahan Innovative Government Award 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri bulan Desember 2020	
Gambar 2.17.	Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 mendapatkan piagam atas partisipasi dalam Lomba Inovasi Daerah Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19	VII-9
Gambar 2.18.	Pada Tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman menerima penghargaan pelayanan public dalam kategori pelayanan prima tingkat Kabupaten	VII-10



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

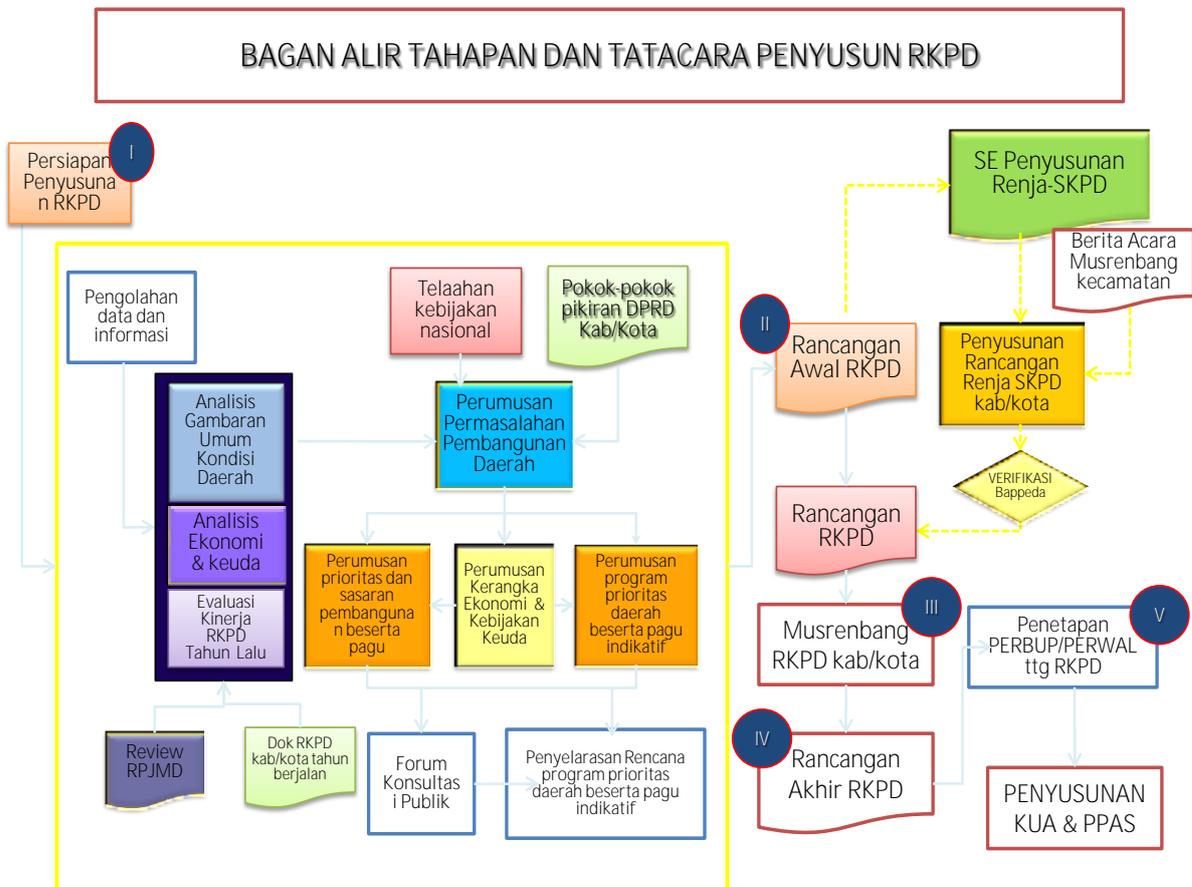
1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 disusun berpedoman pada dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 -2026 , Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Program Strategis Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan oleh Bupati Padang Pariaman terpilih dalam implementasi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut ini :

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD



Jadwal Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 dapat dilihat seperti tabel berikut ini

:

Tabel 1.1.
Kalender Perencanaan Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Persiapan Penyusunan RKPD - Pengumpulan data dan informasi - Penyusunan SK Tim Penyusunan RKPD	Des 2021 - Januari 2022
2.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD - Penyusunan Rancangan Awal RKPD - Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD - Pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan - Penyampaian Rancangan Awal RKPD dan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah - Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah - Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Januari 2022 - April 2022
3.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 - Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2023 - Penyampaian Surat Edaran Rancangan RKPD dan Jadwal Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	Maret-April 2022
4.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	Mei 2022
5.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 - Penyusunan Draft Rancangan Akhir RKPD - Pembahasan Rancangan akhir bersama Perangkat Daerah	Mei - Juni 2022
6.	Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD ke Bappeda Propinsi Sumbar	Juni 2022
7.	Penetapan RKPD Tahun 2023 - Penyempurnaan Rancangan RKPD Tahun 2023 - Penyusunan Rancangan Perbub RKPD - Penetapan Perbub RKPD Tahun 2023	Juli 2022
8.	Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 - Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah - Penetapan Renja Perangkat Daerah	Juli 2022

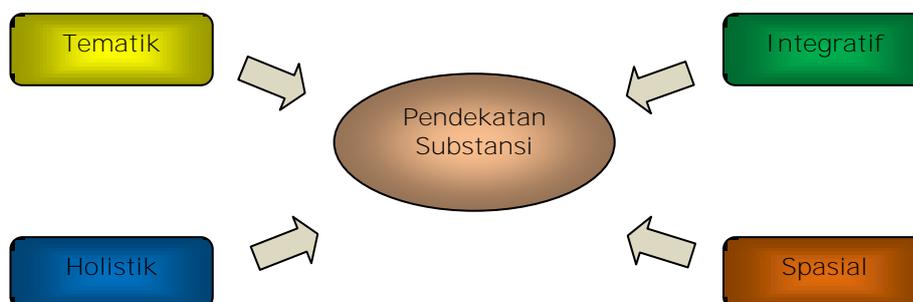
Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dilakukan secara terpadu antar Perangkat Daerah, sehingga memungkinkan untuk saling melengkapi dan memberi masukan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat menuju pencapaian

visi Bupati Padang Pariaman Tahun Tahun 2023 -2026 yaitu : “Padang Pariaman Berjaya” .

Proses penyusunan RKPD melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui inovasi kebijakan yang didasarkan pada kebijakan *money follows program*. Agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang sesuai dengan syarat teknis perencanaan serta memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya yang dilaksanakan melalui pendekatan secara substansi dan pendekatan secara proses.

Pendekatan secara substansi melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan spasial.

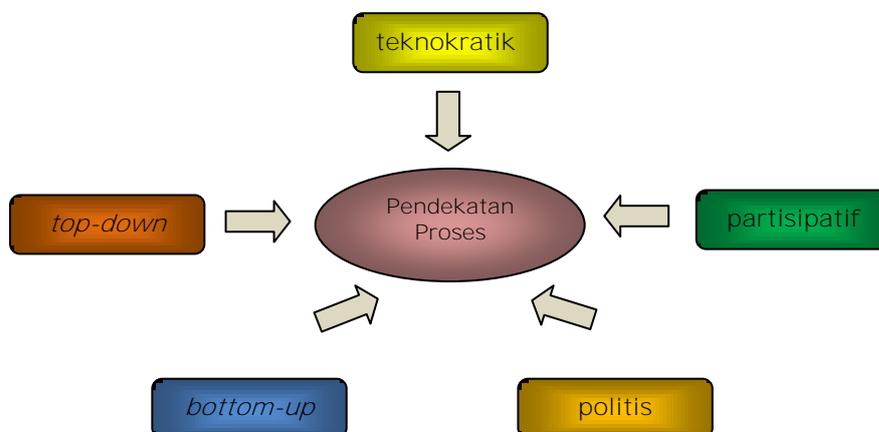
Gambar 1.2
Pendekatan Secara Substansi Penyusunan RKPD Tahun 2023



1. Pendekatan secara tematik adalah tema dan prioritas RKPD yang berdasarkan dari hasil evaluasi, capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun sebelumnya dan isu strategis yang berkembang di daerah.
2. Pendekatan secara holistik adalah pendekatan menyeluruh dan komprehensif dari hulu ke hilir
3. Pendekatan secara integratif adalah pembagian urusan dan kewenangan antara pusat dan daerah termasuk integrasi pendanaan seperti halnya bahwa perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD) integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD).
4. Pendekatan perencanaan spasial adalah keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi.

Disamping memenuhi pendekatan sebagaimana yang disebutkan di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 juga dilakukan melalui pendekatan proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down*.

Gambar 1.3
Pendekatan Secara Proses Penyusunan RKPD Tahun 2023



1. Pendekatan secara teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pendekatan secara partisipatif dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023
3. Pendekatan secara politis dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan pemerintah kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.
4. Pendekatan secara top down dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 -2026 dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 -2026 serah arahan dari pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
5. Pendekatan secara bottom up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari nagari dan kecamatan melalui Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan daerah.

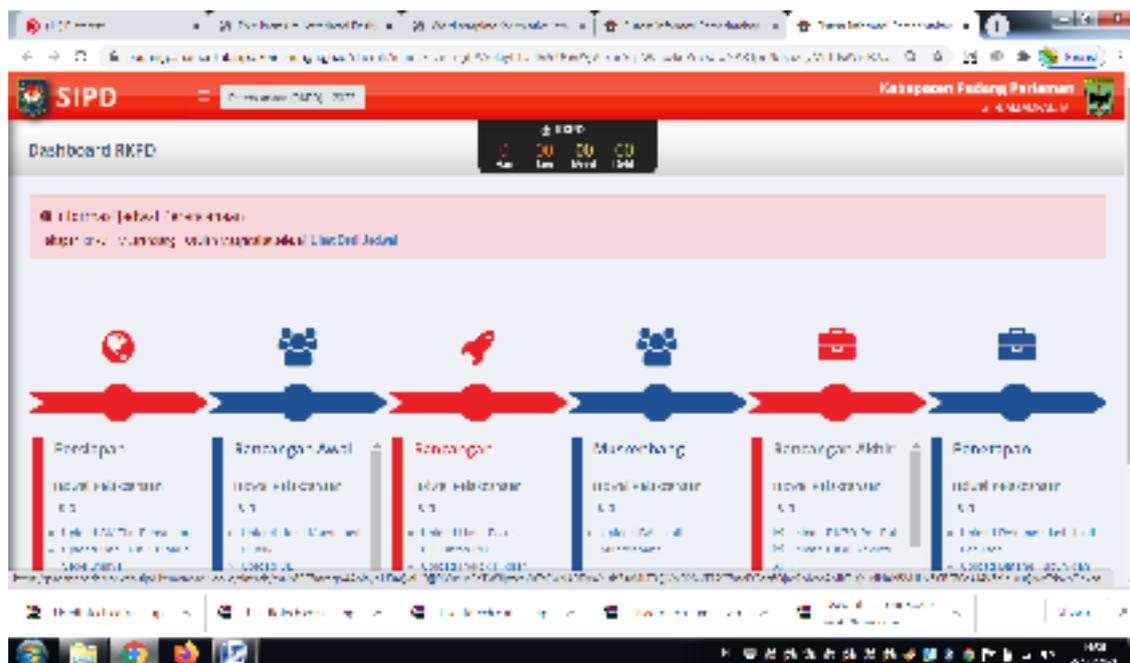
Berdasarkan pendekatan tersebut diatas maka ditetapkan Tema Pembangunan Padang Pariaman Tahun 2023 sebagai berikut :

"Percepatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat."
dengan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM;
2. Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasiskan lingkungan dan tata ruang;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing;
5. Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana;
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, dan demokratis;
7. Peningkatan pengamalan ABS SBK dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 disesuaikan dengan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dimana RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yang tersusun akan di *upload* kedalam Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD) yang difasilitasi oleh Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya diturunkan ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana RKPD Tahun 2023 untuk Pelaksanaan KUA-PPAS telah berpedoman pada keputusan tersebut dengan menggunakan Indikator Kinerja yang mengacu Pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 -2026.

Gambar 1.4.
Penggunaan Aplikasi SIPD Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2023



I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3946);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tanggal 27 Desember 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 - 2026;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

I.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen RKPD mempunyai keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), yang juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 serta Renstra masing - masing Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses yang sistematis, RKPD diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD juga akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah tahun 2023 serta dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023.

I.3.1 RKPD dan RKP Tahun 2023

Dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 mengacu pada prioritas RKP Tahun 2023 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Keterkaitan RKPD Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 terutama dalam perwujudan:

1. : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang berkualitas;
2. : Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan;
3. : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
4. : Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. : Memperkuat Infrastruktur Untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar;
6. : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 juga memperhatikan arah kebijakan kementerian/lembaga yang tercantum dalam Renstra Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

I.3.2 RKPD dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 -2026

Dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 -2026 untuk mewujudkan visi:

"Padang Pariaman Berjaya."

Visi dimaksud diatas merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan menjadi Kabupaten terdepan dari Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Visi diatas merupakan singkatan dan memiliki 4 (empat) kata kunci penting yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman kedepan sebagai berikut:

1. Unggul "BE" rkelanjutan memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. "R"eligius adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Se"JA"htera merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. Berbuda"YA" merupakan suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan "Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 -2026" adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman, ketertiban;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang;
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat;
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;

Selanjutnya, terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda, terjadi berbagai permasalahan dan hal tersebut mengharuskan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota mengambil kebijakan dan hal ini telah diintegrasikan dengan Tema RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yaitu :

"Percepatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat".

I.3.3 RKPD dengan Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS Tahun 2023

RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 memuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang merupakan representasi dari Renstra Perangkat Daerah tahun 2023 -2026. Renja Perangkat Daerah tahun 2023 memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023, hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, hasil Musrenbang serta disesuaikan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 merupakan dasar penyusunan rancangan KUA Tahun 2023 dan rancangan PPAS Tahun 2023 untuk dibahas dan disepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Penyusunan KUA-PPAS digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

I.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dimaksudkan untuk :

1. Sebagai arah pembangunan tahunan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 sesuai RPJMD periode tahun 2021-2026;
3. Sebagai tolok ukur tahunan keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
6. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS, beserta RAPBD tahun 2023 .

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Kabupaten Padang Pariaman, seluruh Kepala Perangkat Daerah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ;
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat;
5. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
6. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman; serta menyusun LKPJ, LPPD dan LKPD;
7. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Padang Pariaman;
9. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan pemerintah daerah lainnya;
10. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

I.5 Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian penjelasan latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun lalu, disamping itu juga

memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen Tahun berjalan sebagai acuan serta permasalahan pembangunan daerah. penjelasan gambaran umum daerah meliputi aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2021 meliputi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menurut urusan, program, kegiatan, realisasi target kinerja. permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang berhubungan dengan prioritas daerah dan layanan dasar serta pengelolaan potensi unggulan daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sub ini menguraikan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKP Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun rencana.

3.1.1. Kondisi ekonomi daerah tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023

Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup : PDRB, tingkat inflasi, sumbangan sektoral, tingkat investasi (PMA dan PMDN), Eksport, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman.

3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023 dan tahun 2024

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam sub ini menggambarkan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional 2023

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

4.2.4. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman

4.2.5. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman

4.2.6. Kebijakan Penurunan Stunting

4.2.7. Kebijakan Responsif Gender

4.2.8. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Padang Pariaman

4.2.9. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

4.2.10. Inovasi Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat termasuk pendanaan daerah.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat penjelasan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD))

BAB VII. PENUTUP

Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada bab-bab di atas, sehingga memberikan gambaran pemerintah daerah Kabupaten dalam penyusunan RKPD.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat, dengan Parit Malintang sebagai Ibukota Kabupaten. Secara geografi terletak antara 0° 19' 15,68" – 0° 48' 59,868" Lintang Selatan (LS) dan 99° 57' 43,325" – 100° 27' 28,94" Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

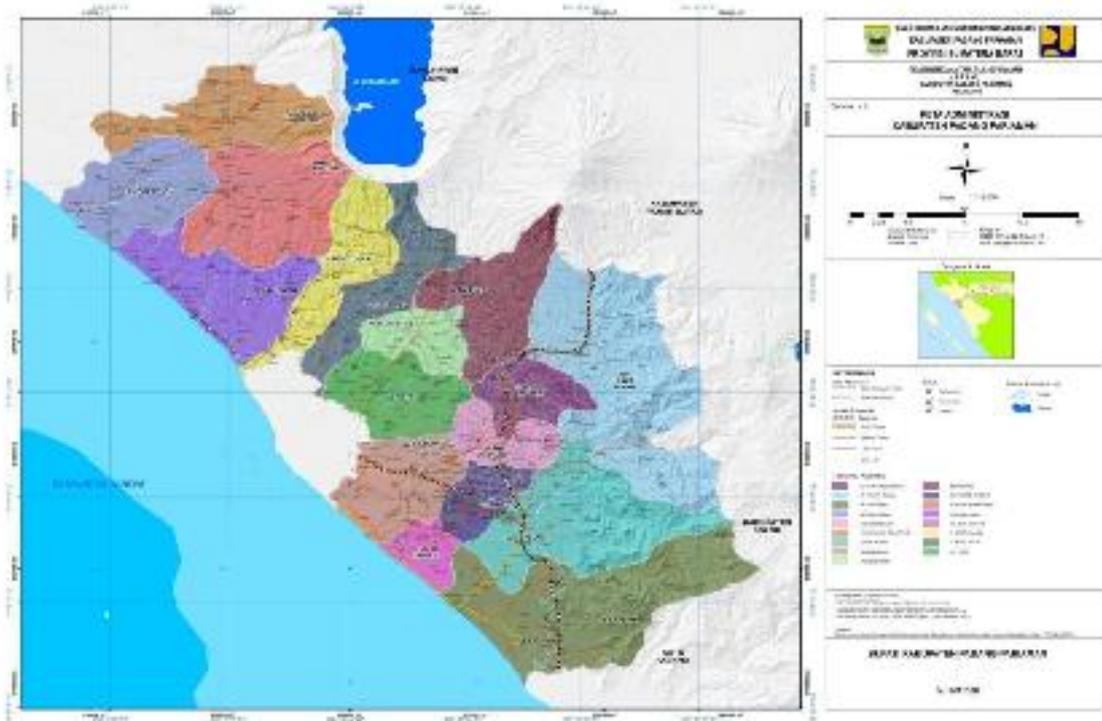
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam
- Sebelah Selatan dengan Kota Padang
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Barat dengan Kota Pariaman

Luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman kurang lebih 1.343,09 km² atau sekitar 3,2% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Membentang di pesisir barat pulau Sumatera, Kabupaten Padang Pariaman memiliki kontur wilayah yang beragam, mulai dari bibir pantai sampai dengan perbukitan. Sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi.

Kabupaten Padang Pariaman Memiliki panjang garis pantai 42,11 km, yang berada di 6 (enam) wilayah kecamatan, yakni kecamatan Batang Gasan (8,50 km); Kecamatan Sungai Limau (11,76 km); Kecamatan V Koto Kampung Dalam (0,35 km); Kecamatan Nan Sabaris (1,68 km); Kecamatan Ulakan Tapakis (8,38 km); dan Kecamatan Batang Anai (11,44 km). Meskipun memiliki garis pantai yang cukup panjang, Padang Pariaman tidak memiliki banyak pulau. Sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan mentawai sebagai pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 1999, tercatat hanya ada dua pulau kecil saja yang masih masuk ke wilayah Padang Pariaman. Dimana pulau tersebut berada di wilayah Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Ulakan Tapakis.

Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman dan luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Peta RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 2.2
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Administrasi Nagari, secara administratif Kabupaten Padang Pariaman memiliki 103 nagari dan 600 korong, dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Nagari dan Korong
di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Nagari	Jumlah Korong
1	Batang Anai	164,68	8	58
2	Lubuk Alung	124,77	9	46
3	Sintuak Toboh Gadang	32,65	5	29
4	Ulakan Tapakih	23,01	8	53
5	Nan Sabaris	66,21	9	46
6	2 x 11 Enam Lingkung	40,64	3	12
7	Enam Lingkung	34,28	5	27
8	2 x 11 Kayu Tanam	188,55	4	21
9	VII Koto	63,42	12	66
10	Patamuan	77,95	6	41
11	Padang Sago	34,93	6	24
12	V Koto Kampung Dalam	66,91	8	49
13	V Koto Timur	66,45	4	28
14	Sungai Limau	90,36	4	28
15	Batang Gasan	76,26	3	15
16	Sungai Geringging	107,73	4	27
17	IV Koto Aur Malintang	84,29	5	30
	Jumlah	1343,09	103	600

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

Secara topografi wilayah Kabupaten Padang Pariaman memiliki kontur wilayah yang beragam, mulai dari bibir pantai sampai dengan perbukitan. Sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi. Kabupaten Padang Pariaman Memiliki panjang garis pantai 42,11 km, yang berada di 6 (enam) wilayah kecamatan, yakni kecamatan Batang Gasan (8,50 km); Kecamatan Sungai Limau (11,76 km); Kecamatan V Koto Kampung Dalam (0,35 km); Kecamatan Nan Sabaris (1,68 km); Kecamatan Ulakan Tapakis (8,38 km); dan Kecamatan Batang Ana (11,44 km). Meskipun memiliki garis pantai yang cukup panjang, Padang Pariaman tidak memiliki banyak pulau. Sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan mentawai sebagai pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 1999, tercatat hanya ada dua pulau kecil saja yang masih masuk ke wilayah Padang Pariaman. Dimana pulau tersebut berada di wilayah Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Ulakan Tapakis.

Secara klimatologi Kabupaten Padang Pariaman termasuk beriklim tropis besar dengan rata-rata suhu udara 26,0 °C Dan rata-rata kelembaban

udara yang tinggi yaitu 85,0 %, dengan tekanan udara rata-rata berkisar 995,8 mb. Menurut data BPS Kabupaten Padang Pariaman (2021), rata-rata curah hujan pada tahun 2020 adalah 4.678 mm dengan jumlah hari hujan adalah 246 hari dalam setahun.

2.1.1.2. Kondisi pola ruang wilayah

Distribusi penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang RTRW yaitu diperuntukkan sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya. Proporsi rencana pola ruang penggunaan lahan tersebut sebesar 31.840 Ha untuk kawasan hutan lindung atau sekitar 23,7 % dari luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan untuk kawasan budidaya sebesar 102.469 Ha atau 76,3 %.

Kawasan peruntukkan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan pengelolannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Adapun yang termasuk ke dalam pembagian fungsi kawasan lindung yaitu:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung).
2. Kawasan perlindungan setempat (kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai).
3. Kawasan konservasi (kawasan suaka alam, kawasan perlindungan alam).
4. Kawasan rawan bencana
5. Kawasan lindung geologi (kawasan sempada mata air).
6. Kawasan ekosistem mangrove.

Kawasan peruntukan budidaya adalah kawasan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman di tetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan dengan fungsi budidaya sesuai dengan potensi pemanfaatan sumber daya alam. Kawasan budidaya meliputi:

1. Kawasan hutan produksi.
2. Kawasan pertanian.
3. Kawasan pertambangan.
4. Kawasan industri.
5. Kawasan pariwisata, dan
6. Kawasan permukiman.

2.1.1.3. Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Dari waktu ke waktu Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami peningkatan. Tahun 2021 Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman adalah 438.022 jiwa meningkat dari 430.626 jiwa pada tahun 2020. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tahun 2021 sebesar 99,73 %. Rincian perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2017 - 2021

Tahun	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
2017	202.400	208.603	411.003	0,59	96,40	309
2018	203.602	209.670	413.272	0,55	91,11	308
2019	214.735	216.489	431.224	4,34	97,13	309
2020	216.961	217.688	434.649	0,79	99,74	321
2021	218.717	219.305	438.022	0,78	99,73	326

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Tabel 2.3
Jumlah, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Batang Anai	26.776	26.263	53.039	101,95	322
Lubuk Alung	24.196	23.667	47.863	102,24	384
Sintuk Toboh Gadang	9.887	10.062	19.949	98,26	611
Ulakan Tapakis	10.319	10.410	20.729	99,13	901
Nan Sabaris	15.143	15.386	30.529	98,42	461
2 x 11 Enam Lingkung	9.306	9.571	18.877	97,23	464
Enam Lingkung	10.210	10.321	20.531	98,92	599
2 x 11 Kayu Tanam	14.285	14.282	28.567	100,02	152
VII Koto	18.108	18.552	36.660	97,61	578
Patamuan	8.808	8.867	17.675	99,33	227
Padang Sago	4.438	4.654	9.092	95,36	260
V Koto Kampung Dalam	12.161	12.004	24.165	101,31	361
V Koto Timur	7.515	7.542	15.057	99,64	227

Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Sungai Limau	15.084	15.050	30.134	100,23	333
Batang Gasan	5.754	5.594	11.348	102,86	149
Sungai Geringging	16.151	16.206	32.357	99,66	300
IV Koto Aur Malintang	10.577	10.874	21.451	97,27	254
Jumlah	218.718	219.305	438.022	99,73	326

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Berdasarkan hasil Sensus penduduk tahun 2021, Kecamatan Batang Anai memiliki jumlah terbanyak yakni 53.039 jiwa, dan Penduduk yang paling sedikit dengan jumlah 9.092 jiwa terdapat di Kecamatan Padang Sago. Sedangkan untuk sebaran kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Ulakan Tapakih menempati urutan pertama yakni 901 jiwa/km².

Gambar 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Menurut Kelompok Umur Tahun 2020



Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

Apabila dilihat secara komposisi pada gambar 2.3, kelompok penduduk usia muda lebih banyak jika dibandingkan dengan kelompok penduduk usia tua. Terutama usia pendidikan menengah (15 - 19 tahun) dan usia pendidikan tinggi (20 - 24 tahun) atau usia awal kerja. Artinya jumlah penduduk usia produktif relatif besar, kondisi merupakan modal dasar bagi pembangunan

daerah. Hal ini bisa terlihat dari bentuk piramida penduduk kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 yang cenderung mengerucut ke atas.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2021 terdiri dari 108.847 jiwa laki-laki dan 69.047 jiwa perempuan dengan jumlah total penduduk yang bekerja di Kabupaten Padang Pariaman 177.894 jiwa. Sedangkan Jumlah pengangguran pada tahun 2021 sebanyak 16.334 jiwa, yang terdiri dari 7.012 jiwa laki-laki dan 9.322 jiwa perempuan.

Gambar 2.4
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Kondisi ketenagakerjaan suatu daerah dapat dilihat menggunakan dua indikator yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Sedangkan TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, yang diharapkan dari kondisi dua indikator tersebut adalah TPAK yang naik dan TPT yang menurun. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 83,44 persen dan perempuan sebesar 51,88 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 menunjukkan kecenderungan yang positif dimana untuk pengangguran terbuka laki-laki sebesar 7,69 persen dan perempuan 8,78 persen. Untuk lebih jelasnya perkembangan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2016- 2020, dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 - 2021

Pendidikan yang Ditamatkan	TPAK		TPT	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Tidak Tamat SD	76,74	44,58	3,38	1,19
Sekolah Dasar (SD)	77,99	45,71	4,22	14,05
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	69,36	40,87	3,23	14,54
Sekolah Menengah Atas (SMA)	86,56	51,75	9,72	18,43
Diploma / Akademi	88,56	75,77	8,42	N/A
Universitas (DIV/S1/S-2/S-3)	88,60	84,09	6,10	10,41
Jumlah 2021	79,50	50,64	6,05	11,90
2020	83,44	51,88	7,69	8,78
2019	79,81	47,02	5,33	6,99
2018	81,14	50,42	6,24	7,95
2017	78,87	49,42	4,44	9,99

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, dan pariwisata dengan berpedoman kepada rencana tata ruang wilayah.

A. Potensi Kawasan Pertanian

Pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman lebih bersifat campuran karena pengusahaannya umumnya berupa pertanian rakyat, sehingga kalau dalam rencana peruntukan pertanian diarahkan untuk pemanfaatan tertentu. Artinya peruntukan tersebut lebih dominan dan lebih sesuai dengan karakteristik agroekologi dengan tidak menutup kemungkinan cocoknya untuk berbagai jenis pemanfaatan pertanian lainnya. Lahan yang diperuntukan untuk pertanian tanaman pangan yaitu seluas 19.091 ha yang tersebar di seluruh kecamatan, merupakan lahan pertanian sawah eksisting dan pengembangan lahan yang potensial. Pengembangan pertanian tanaman pangan secara ekstensifikasi masih dimungkinkan untuk ditingkatkan.

Kawasan campuran lahan kering dan hortikultura adalah kawasan yang dominan sesuai ditanami berbagai tanaman pangan lahan kering seperti jagung, ubi dan hortikultura buah-buahan atau sayur-sayuran. Khusus untuk kawasan pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan pada lahan yang bergelombang, berfungsi juga sebagai konservasi tata air dengan mengembangkan tanaman pepohonan yang mampu menjaga fungsi konservasi tata air, seperti tanaman hortikultura buah-buahan bernilai ekonomis dan

produksi khas daerah seperti manggis, lansek dan durian. Selain itu diarahkan juga budidaya tanaman kehutanan dan masih dimungkinkan budidaya perkebunan dengan vegetasi pohon seperti karet.

Kawasan hortikultura diarahkan pada hampir seluruh kecamatan dengan luas lahan 3.922 ha, meliputi Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Batang Anai, dan Kecamatan Enam Lingkung.

B. Potensi Kawasan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Padang Pariaman lebih kurang seluas 55.929 Ha. Peruntukan luas perkebunan umumnya berupa perkebunan rakyat. Peruntukan perkebunan tersebar di semua kecamatan. Zona Agroekologi perkebunan terdapat pada lahan yang berfungsi penyangga dengan kelerangan yang dominan 24 - 40 %. Tanaman perkebunan yang sesuai untuk dibudidayakan adalah tanaman dengan vegetasi yang dapat menjaga air dan erosi tanah.

C. Potensi Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan adalah merupakan gabungan dari sentra-sentra peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen pembangunan di wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya dan keberadaan infrastruktur penunjang. Pengembangan kawasan peternakan dimaksud untuk menjamin ketahanan pangan nasional, pengembangan dan penyediaan bahan baku bioindustri, serta penyediaan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan.

Untuk menuju kondisi ideal yang diharapkan dalam pengembangan kawasan peternakan, maka secara garis besar dapat dirumuskan langkah-langkah pengembangan kawasan, yaitu sebagai berikut :

- a. Penguatan perencanaan pengembangan kawasan
- b. Penguatan kerjasama dan kemitraan
- c. Penguatan sarana dan prasarana
- d. Penguatan sumber daya manusia
- e. Penguatan kelembagaan
- f. Percepatan adopsi teknologi bioindustri dan bioenergi
- g. Pengembangan industri hilir

Pengembangan Kawasan Peternakan, di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan, meliputi:

- a. Pengembangan sentra peternakan ternak besar dikembangkan berupa sapi dan kerbau di Kecamatan VII Koto, Padang Sago, Patamuan, Enam Lingkung, Sungai Geringging dan IV Koto Aur Malintang;

- b. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil berupa dikembangkan di Kecamatan Ulakan Tapakis, Nan Sabaris, 2 x 11 Kayu Tanam, Padang Sago, Enam Lingkung; IV Aur Malintang, Sungai Geringging
- c. Pengembangan sentra peternakan unggas di Kecamatan, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Batang Anai, kecamatan Patamuan, Sungai limau dan sungai geringging, 2 x 11 Kayu Tanam
- d. Pengembangan kawasan integrasi kambing dan kakao, sapi dan kakao di Enam Lingkung, Padang Sago, Sungai Geringging dan Kayu Tanam, IV Koto Aur Malintang.

D. Potensi Kawasan Perikanan

Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Padang Pariaman diarahkan pada budidaya air tawar, budidaya air payau dan rawa. Budidaya air tawar pada dasarnya dapat dilakukan di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Namun Secara khusus pengembangan kegiatan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- a. Perikanan tangkap di wilayah pesisir meliputi Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan V Koto Kampung, Kecamatan Sungai Limau, dan Kecamatan Batang Gasan.
- b. Perikanan budidaya air tawar di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Patamuan, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dan Kecamatan Sungai Geringging;
- c. Kegiatan Budidaya Air Payau dan Rawa, di sepanjang pesisir pada 6 (enam) kecamatan pesisir Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kegiatan budidaya air payau tersebut dapat dilakukan di Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris, V koto Kampung Dalam, Sungai Limau dan Kec. Batang.
- d. Kawasan sentra Perbenihan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 366/KEP/BPP-2015, dimana Kawasan Inti Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, kawasan Pengembangan di Kecamatan Patamuan, 2 x 11 Kayu Tanam dan Kec. 2 x 11 Enam Lingkung
- e. Kawasan Minapolitan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 315/KEP/BPP-2014, dengan Kawasan inti Nagari Sungai Asam Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, dan Kawasan Hinterland : Kecamatan Lubuk Alung, Enam Lingkung, Patamuan, VII Koto Sungai Sarik, 2 x 11 Kayu Tanam
- f. Kegiatan perikanan dapat diintegrasikan dengan padi sawah dengan program minapadi yang dapat dikembangkan di seluruh kecamatan

- g. Sarana penunjang kawasan perikanan meliputi:
 - 1) Pelabuhan perikanan serta sarana pendukungnya di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Ulakan Tapakis
 - 2) Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Ulakan Tapakis dan Sungai Limau sentra pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Limau

E. Potensi Kawasan Pertambangan dan Energi

Potensi tambang yang ada di kabupaten Padang Pariaman berupa mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan mineral batuan. Kawasan potensi pertambangan mineral logam berada di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan, Kecamatan Patamuhan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Geringging, dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Kawasan pertambangan mineral bukan logam berada di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Patamuhan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Geringging, dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Potensi pertambangan yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten berupa pertambangan mineral batuan meliputi:

- a. Tanah uruk berbatu yang terdapat di Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam, VII Koto Sungai Sarik, Patamuhan, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau, Sungai Geringging, dan IV Koto Aur Malintang;
- b. Obsidian atau batu gelas yang terdapat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan Kecamatan Sungai Geringging;
- c. Perlit terdapat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang
- d. Sirtukil yang terdapat di Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Nan Sabaris, 2x11 Enam Lingkung, 2x11 Kayu Tanam, VII Koto Sungai Sariak, Patamuhan, Padang Sago, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau dan tersebar di sepanjang sungai-sungai di Kabupaten Padang Pariaman.
- e. Andesit yang terdapat di Kecamatan Lubuk Alung, 2x11 Enam Lingkung, 2x11 Kayu Tanam, Patamuhan, dan VII Koto Sungai Sariak.
- f. Limau, Nan Sabaris, Ulakan Tapakis, Batang Anai dan Batang Gasan.
- g. Potensi batu kapur dan granit di bagian perbukitan timur Kabupaten.

F. Potensi Kawasan Perindustrian

Untuk mendukung fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman berpotensi untuk pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan industri manufaktur karena :

- Potensi hasil pertanian dan hasil hutan seperti manggis, coklat, kelapa dan lainnya membutuhkan peningkatan nilai ekonomi melalui pengolahan lebih lanjut bernilai tambah.
- Potensi pengolahan hasil laut
- Potensi hasil kerajinan penduduk
- Kabupaten Padang Pariaman berada pada posisi sentral di Provinsi Sumatera Barat dan dialui oleh jalan lintas tengah Sumatera memudahkan akses menuju outlet regional di pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau sehingga Kabupaten Padang Pariaman dapat menjadi sentra industri pengolahan hasil pertanian berorientasi ekspor Provinsi Sumatera Barat.

Lokasi kawasan industri memenuhi kriteria lokasi : berada pada jalur akses regional (arteri primer atau kolektor primer) dan memenuhi persyaratan tapak industri, seperti :

- a. Untuk industri yang produktif berjarak minimal 5 km dari kawasan permukiman.
- b. Tidak berada pada lahan relatif datar bukan lahan pertanian produktif, dan kalau pun ada perlu disiapkan lokasi pengganti lahannya.
- c. Tersedia sumber air baku yang mencukupi.

Rencana pengembangan kawasan industri dikembangkan dalam bentuk kawasan peruntukan industri, lingkungan industri kecil, maupun industri rumah tangga, dan berdasarkan skala berupa industri besar, industri sedang dan industri kecil. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Padang Pariaman seluas kurang lebih 465 Ha, berada di Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam. Terdiri dari :

- a. Kawasan industri Padang dengan jenis industri besar seluas 339 Ha
- b. Kawasan industri Padang Pariaman dengan lokasi berdekatan dengan PIP dengan jenis industri kecil dan menengah seluas 76 Ha.
- c. Sentra industri kecil dan menengah (SIKM) yang diarahkan pengembangannya sebagai berikut :
 1. Kawasan sentra industri coklat di Malibou Anai
 2. Sentra IKM Alsinta, alat industri pertanian di VII Koto
 3. Sentra IKM makanan ringan di Sungai Geringging, 2 x 11 Kayu Tanam, 2 x 11 Enam Lingkung
 4. Sentra IKM alas kaki di Sintuk Toboh Gadang

5. Sentra IKM industri bordir dan sulam di kawasan strategis PALAPA
6. Sentra IKM kakao produktif di Sungai Geringging, Padang Sago, Kampung Dalam
7. Kawasan peruntukan industri sedang berupa industri pengolahan hasil laut dikembangkan di Kecamatan Batang Gasan, Sungai Limau dan Ulakan Tapakis, Batang Anai dan Nan Sabaris
8. Pengembangan industri rumah tangga diarahkan sebagai industri penunjang industri besar, industri sedang dan kegiatan pariwisata yang tersebar pada kawasan permukiman.

G. Potensi Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan jenis wisata di Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas :

- a. Jenis wisata budaya dan sejarah terutama wisata religi di Kecamatan Lubuk Alung, Sintoga, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris, 2 x 11 Enam Lingkung, Enam Ligkung, VII Koto, Padang Sago, V Koto Timur, Sungai Limau, Sungai Geringging dan IV Koto Aur Malintang serta pengembangan wisata budaya lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Jenis wisata alam berupa wisata bahari, dan wisata landskape alam perbukitan dan pegunungan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Jenis wisata buatan meliputi pemandian Tirta Alami, Malibou Anai, Gelanggang Pacu Kuda di Kecamatan Lubuk Alung, 2 x 11 Kayu Tanam dan VII Koto.

Kawasan peruntukan pariwisata Kabupaten Padang Pariaman terbagi atas empat Kawasan Strategi Pariwisata Daerah (KSDP) yaitu :

- a. KSDP Ulakan Tapakis - Nan Sabaris dan sekitarnya sebagai kawasan wisata religi, kuliner, dan bahari, dengan program utama ;
 1. Pemantapan kawasan Makam Syech Burhanuddin sebagai kawasan wisata religi dan edukasi Islam di Sumatera Barat.
 2. Pemantapan Pantai Tiram sebagai kawasan rekreasi pantai keluarga dan kuliner.
 3. Mengembangkan kawasan Pulau Pieh sebagai daerah tujuan wisata bahari di Kabupaten Padang Pariaman.
 4. Pengembangan Kawasan Ulakan Tapakis - Nan Sabaris sebagai kawasan wisata ziarah dan sejarah.
- b. KSDP Batang Anai Lubuk Alung dan sekitarnya sebagai pintu gerbang Sumatera Barat, rekreasi alam dan *water-front resort*, dengan program utama ;
 1. Pemantapan Citra Kabupaten Padang Pariaman sebagai gerbang pintu masuk Sumatera Barat (Minangkabau Internasional Airport).

2. Pengembangan *Adventure Tourism* dan Rekreasi Wisata Alam Pegunungan Lubuk Alung dan sekitarnya.
3. Pencanaan kawasan Pantai Gosong sebagai kawasan Investasi *Water-Front Resort* berbasis *Eco-Lodge*.
- c. KSDP Kayu Tanam – Patamuhan dan sekitarnya sebagai kawasan rekreasi alam, dengan program utama ;
 1. Pengembangan Kawasan Malibou Anai Resort sebagai kawasan Rekreasi Alam.
 2. Pembangunan Rest Area dan Sentra Kuliner di sekitar kawasan Malibou Anai Resort.
 3. Pencanaan Kawasan Malibou Anai Resort sebagai kawasan MICE
 4. Mempersiapkan Kawasan Malibou Anai Rsort sebagai Jalur Distribusi *Cable Car* yang menghubungkan Padang Pariaman – Padang Panjang – Bukittinggi.
 5. Mengembangkan desa-desa di Kawasan Gunung Tigo sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata.
- d. KSDP Enam Lingkung dan sekitarnya sebagai kawasan wisata sejarah, pendidikan dan budaya. Pengembangan jalur wisata sejarah Enam Lingkung dan sekitarnya, dengan program utama ;
 1. Pengembangan Sarana Utilitas dan Infrastruktur penunjang di Kecamatan Enam Lingkung.
 2. Pengembangan Kawasan Enam Lingkung dan sekitarnya sebagai kawasan Pendidikan, Budaya dan Sejarah.
 3. Pengembangan Taman Wisata Kota di Enam Lingkung sebagai Ruang Terbuka Hijau Masyarakat.

Selain itu terdapat tiga Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu :

- a. KPPD Sungai Limau – Batang Gasan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata peisisir berbasis relaksasi keluarga, dengan program utama ;
 1. Pengembangan Pantai Arta Indah dan Pantai Arta Permai sebagai Pantai Rekreasi Keluarga dan *Outbound*.
 2. Pengembangan Pantai Baselona sebagai kawasan wisata pantai berbasis rekreasi.
 - b. KPPD Sungai Geringging – V Koto Kampung Dalam sebagai kawasan agrowisata dan ziarah, dengan program utama;
 1. Pengembangan Koto Aur Malintang Dalam sebagai kawasan Agrowisata.
 2. Pengembangan Jalur Wisata Ziarah dan Sejarah Sungai Geringging
 - c. KPPD Koto Timur – Sungai Sariak dan sekitarnya, dengan program utama ;
 1. Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Koto Timur – Sungai Sariak.
 2. Pengembangan Kawasan Wisata Agro-Culture.
-

2.1.1.5. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum berdasarkan karakteristik dan topografi wilayah Kabupaten Padang Pariaman sangat rentan akan bencana. Bencana yang dikategorikan tinggi di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan rawan bencana Tsunami dan Gelombang Ekstrim dan abarasi, meliputi seluruh kawasan pesisir pantai di Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau dan Batang Gasan.
- b. Kawasan rawan letusan gunung api meliputi Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Patamuan, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, V Koto Timur, Padang Sago, dan VII Koto, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam dan 2 x 11 Enam Lingkung.
- c. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Batang Gasan, Sungai Limau, V Koto Kampug Dalam, Nan Sabaris, Ulakan Tapakis, Batang Anai, VII Koto, Lubuk Alung dan Sintuk Toboh Gadang.

A. Wilayah Rawan Gempa

Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng, aktivitas sesar (patahan), aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan. Karakter bahaya berupa guncangan gempa yang dapat dirasakan di daerah pedataran dan perbukitan dengan percepatan gempa 0,25 - 0,60 g, yang akan mengancam seluruh wilayah yang merupakan areal terbangun datidak terbangun.

Wilayah Kabupaten Padang Pariaman merupakan zona gempa paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat, terutama di daerah Sungai Limau, ke Tikau Utara berbatasan dengan Sungai Geringging Bagian Barat serta seluruh daerah Pesisir Padang Pariaman. Adanya aktivitas gempa tersebut menyebabkan Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah rawan gempa. Hal ini dapat dilihat pada peta zona gempa, di mana Kabupaten Padang Pariaman merupakan zona gempa dengan skala intensitas menempati zona V dan VIII dengan *episentrum* yang relatif dangkal dan sedang.

Berdasarkan mikro zonasi gempa, gempa bumi dikelompokkan atas empat tingkatan klasifikasi berikut :

- a. Zona amplifikasi sangat tinggi (> 9 kali)
Adalah daerah yang memiliki kerentanan paling tinggi terhadap terjadinya kerusakan wilayah jika terlanda gempa bumi. Zona ini memiliki penguatan/amplifikasi getaran gempa bumi sangat tinggi (diatas 9 kali). Pada zona ini, lapisan sedimen lunaknya (*soft soil*) paling tebal.
- b. Zona aplifikasi tinggi (7-9 kali)
Adalah daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap terjadinya kerusakan wilayah jika terlanda gempa bumi. Zona ini memiliki

penguatan/amplifikasi getaran gempa bumi tinggi (7-9 kali). Pada zona ini, lapisan sedimen lunaknya (*soft soil*) tebal.

c. Zona amplifikasi sedang (4-6 kali)

Adalah daerah yang memiliki kerentanan sedang terhadap terjadinya kerusakan wilayah jika terlanda gempa bumi. Zona ini memiliki penguatan/amplifikasi getaran gempa bumi sedang (4-6 kali). Pada zona ini, lapisan sedimen lunaknya (*soft soil*) tidak terlalu tebal

d. Zona amplifikasi rendah (1-3 kali)

Adalah daerah yang memiliki kerentanan rendah terhadap terjadinya kerusakan wilayah jika terlanda gempa bumi. Zona ini memiliki penguatan/amplifikasi getaran gempa bumi rendah (1-3 kali).

B. Wilayah Rawan Bencana Tsunami, Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Ancaman dari tsunami dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi adalah seluruh wilayah pesisir. Kondisi Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai perairan di bagian barat merupakan salah satu wilayah yang diperkirakan akan mendapatkan bencana tsunami. Adapun prakiraan wilayah berdasarkan pengelompokan jangkauan tsunami sebagai berikut :

1. Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tinggi, adalah daerah yang memiliki resiko ancaman terhadap tsunami (dalam hal tinggi dan jangkauan genangan). Kawasan ini relatif memiliki potensi paling besar dalam hal kerusakan atau kehancuran aset yang akan ditimbulkan apabila terlanda tsunami serta memiliki ancaman terhadap resiko keselamatan penduduk lebih parah. Karakteristik pantai di kawasan ini sebagian merupakan pantai berpasir dengan morfologi landai dan relatif rendah dengan bentuk pantai lurus, sedangkan sebagian lagi merupakan pantai berbatu dengan morfologi tinggi dengan bentuk pantai berteluk. Permukiman dan aktivitas penduduk pada kawasan ini cukup padat dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50 meter dari garis pantai. Kawasan kerawanan tinggi meliputi sepanjang pantai di daerah penelitian dengan elevasi kurang dari 5 meter di atas permukaan laut.
2. Kawasan Rawan Bencana Tsunami Menengah adalah kawasan dengan potensi resiko tsunami lebih rendah dari kawasan tinggi. Kawasan ini relatif memiliki potensi kerusakan aset lebih kecil dibanding dengan di daerah kawasan kerawanan tinggi. Kawasan menengah meliputi daerah dengan garis ketinggian 5 meter hingga 7 meter di atas permukaan air laut dengan kemiringan lereng cukup terjal.
3. Kawasan Rawan Bencana Tsunami Rendah adalah daerah yang memiliki potensi kerusakan paling kecil dibandingkan kawasan lainnya. Rute evakuasi dan lokasi pengungsian sementara dapat diarahkan ke kawasan ini apabila terjadi tsunami. Kawasan rawan tsunami rendah meliputi daerah dengan garis ketinggian hingga 9 meter di atas

permukaan laut. Wilayah pesisir dengan morfologi curam dan relief tinggi termasuk ke dalam kawasan rawan tsunami rendah.

C. Wilayah Rawan Banjir

Penyebab dari bencana alam banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu dipengaruhi oleh curah hujan cukup tinggi, tipe dan karakter daerah, kondisi daerah tangkapan air sedikit, kurangnya kualitas dan kuantitas drainase dan kurangnya pengelolaan daerah konservasi. Secara umum bencana banjir yang terjadi adalah akibat kondisi drainase yang kurang baik sehingga saat hujan terjadi genangan serta terjadinya kerusakan hutan di hulu sungai yang mengakibatkan erosi dan banjir. Daerah rawan banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu di Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, Sintuk Toboh Gadang, Lubuk Alung, Nan Sabaris, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau, Batang Gasan, dan 2x11 Enam Lingkung.

D. Wilayah Rawan gunung Berapi

Potensi rawan bencana gunung api di Kabupaten Padang Pariaman adalah karena keberadaan Gunung Api Tandikek. Kawasan rawan bencana gunung Api tandikek di Kabupaten Padang Pariaman yaitu kecamatan Patamuhan berada di KRB II dengan radius 8 km yang berpotensi terlanda aliran awan panas, larva, dan lahar hujan, serta berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu (pijar). Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam berada di KRB I dengan radius 8 km berpotensi terhadap lahar hujan serta hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu (pijar). Selanjutnya Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan VII Koto, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung berpotensi terhadap aliran lahar hujan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan paripurna (*ultimate*) dari pembangunan suatu wilayah. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di berbagai bidang terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik (infrastruktur). Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial, dan (3) aspek kesejahteraan dengan fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam tata kelola pembangunan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi berkualitas menjadi *ultimate goal* yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pemerataan menjamin pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah agar dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin golongan masyarakat, tidak hanya terakumulasi di tangan segelintir

golongan. Hal ini kelak akan turut menimbulkan kestabilan dalam upaya membangun atau menumbuhkan kesejahteraan.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan ekonomi yang mengukur kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Mengukur peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran yang menghasilkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun perhitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar perhitungan), untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi atau melihat struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor harga.

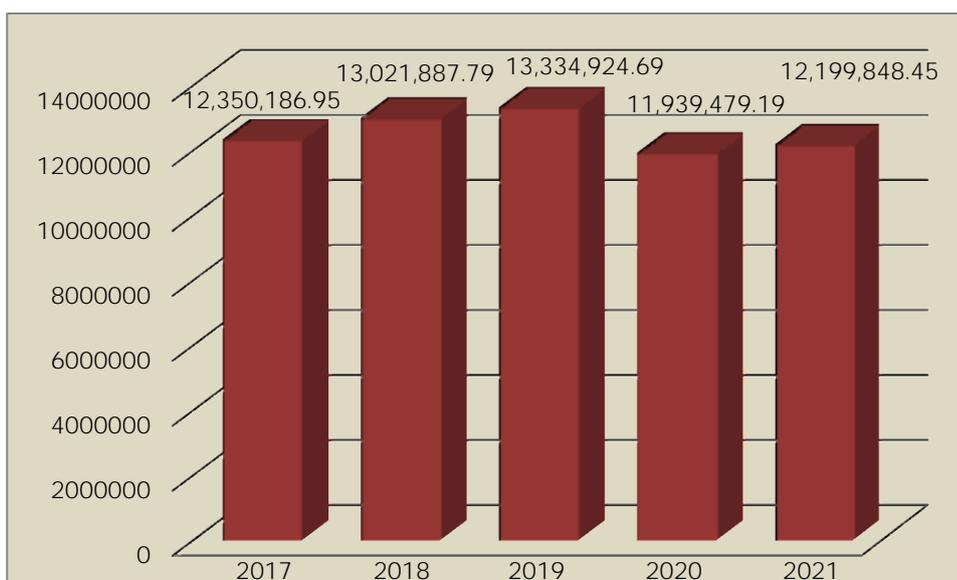
Gambar 2.5
Perkembangan PRDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Rp. Juta) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

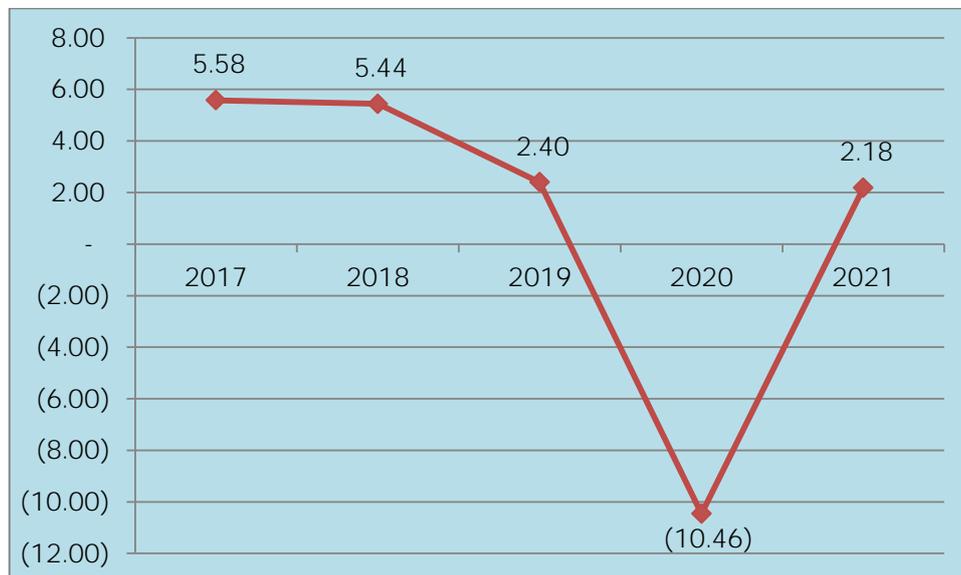
Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas Dasar harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan kembali meningkat pada tahun 2021, namun peningkatannya belum signifikan. Pada tahun 2021 Nilai PDRB Atas Dasar Harga berlaku meningkat sebesar Rp520.273,43 juta, dari Rp17.934.814,60 juta pada tahun 2020 menjadi Rp18.455.088,03 juta di tahun 2021. Begitu juga dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan, juga meningkat menjadi Rp12.199.848,45 juta di tahun 2021 dari Rp11.939.479,19 juta tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 2,18 persen. Namun peningkatan ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan penurunan PDRB yang terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar -10,46 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar 2.4 dan 2.5.

Gambar 2.6
Perkembangan PRDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
(Rp. Juta) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman sebesar 5,58 persen, terus mengalami penurunan menjadi 2,4 persen pada tahun 2019, dan menurun drastis di tahun 2020 yakni pada posisi -10,46 dan kembali meningkat sebesar 2,18 persen pada tahun 2021. Penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 tersebut disebabkan oleh lesunya kegiatan ekonomi pada semua sektor ekonomi terutama pada sektor transportasi udara, penurunan jumlah penumpang angkutan udara akibat adanya kebijakan PPKM di era pandemi covid-19 dan mahalnnya harga tiket. Namun dengan adanya pemulihan ekonomi pada beberapa sektor usaha pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan sebesar 12,64 persen.

Selanjutnya perkembangan pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.5, 2.6 dan 2.7.

Tabel 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 -2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,03	3,49	4,22	0,29	2,43
B	Pertambangan dan Penggalian	4,24	7,32	7,52	-1,76	3,28
C	Industri Pengolahan	2,71	0,57	1,48	-1,88	4,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,08	4,13	2,59	-5,20	3,49
E	Pengadaan Air; Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	4,04	3,92	9,79	3,58	3,12
F	Konstruksi	6,29	8,81	10,67	-4,28	3,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,41	5,16	6,95	-0,60	4,58
H	Transportasi dan Pergudangan	8,22	7,44	8,93	47,30	-10,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,46	7,46	10,6	-9,12	8,52
J	Informasi dan Komunikasi	6,87	6,93	9,36	8,78	7,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,85	1,54	3,36	1,10	8,20
L	Real Estate	3,99	4,57	6,68	1,12	1,75
M, N	Jasa Perusahaan	2,91	4,63	6,31	-1,34	1,03
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,41	6,02	6,82	-1,72	3,30
P	Jasa Pendidikan	9,42	8,27	9,19	5,53	4,20
Q	Jasa Kesehataan dan Kegiatan Sosial	8,62	7,34	8,82	6,99	8,72
R, S, T, U	Jasa Lainnya	6,6	8,23	9,08	-6,24	5,16
Produk Domestik Regional Bruto		5,58	5,46	2,51	-10,46	2,18

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Tabel 2.6

Nilai dan Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Rp. Juta) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha		2017		2018		2019		2020*		2021**	
		Rp.	%								
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.680.814,68	19,33	3.811.788,02	18,65	4.082.585,32	19,21	4.067.527,56	22,68	4.180.128,23	22,65
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.086.003,68	5,70	1.203.451,46	5,89	1.345.212,18	6,33	1.331.498,07	7,42	1.391.908,21	7,54
C.	Industri Pengolahan	1.942.610,48	10,20	1.968.276,09	9,63	1.987.526,86	9,35	2.007.600,23	11,19	2.205.039,82	11,95
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5.984,56	0,03	6.265,25	0,03	7.044,06	0,03	6.773,48	0,04	7.064,78	0,04
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.655,06	0,04	8.003,42	0,04	9.091,23	0,04	9.431,47	0,05	9.893,81	0,05
F.	Konstruksi	1.393.080,57	7,32	1.559.432,36	7,63	1.795.581,93	8,45	1.822.694,62	10,16	1.966.840,53	10,66
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.574.619,89	8,27	1.691.477,52	8,28	1.898.099,47	8,93	1.889.587,52	10,54	1.965.312,79	10,65
H.	Transportasi dan Pergudangan	6.361.932,39	33,42	6.916.021,94	33,84	6.424.522,86	30,23	2.920.906,12	16,29	2.503.861,52	13,57
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	158.917,85	0,83	174.482,98	0,85	202.157,67	0,95	187.959,41	1,05	208.694,51	1,13
J.	Informasi dan Komunikasi	475.495,84	2,50	526.310,19	2,58	606.293,19	2,85	658.822,73	3,67	731.240,43	3,96
K.	Jasa Keuangan dan Ausransi	254.488,06	1,34	268.299,06	1,31	287.166,69	1,35	293.781,91	1,64	326.362,44	1,77
L.	Real Estate	163.576,44	0,86	174.809,94	0,86	194.395,32	0,91	197.594,63	1,10	207.020,04	1,12
M, N	Jasa Perusahaan	12.827,42	0,07	13.733,18	0,07	15.045,48	0,07	15.121,66	0,08	15.383,23	0,08

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Lapangan Usaha		2017		2018		2019		2020*		2021**	
		Rp.	%								
O.	Administrasi Pemerintah, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	802.578,80	4,22	858.347,23	4,20	959.562,93	4,51	1.018.986,39	5,68	1.125.945,65	6,10
P.	Jasa Pendidikan	805.213,37	4,23	912.205,49	4,46	1.046.230,07	4,92	1.110.491,59	6,19	1.181.707,66	6,40
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95.238,26	0,50	122.393,23	0,60	115.669,67	0,54	126.682,06	0,71	141.586,20	0,77
R, S, T, U	Jasa Lainnya	217.351,21	1,14	243.021,11	1,19	279.288,42	1,31	269.355,16	1,50	287.098,17	1,56
PDRB		19.038.379,57	100	20.438.318,45	100	21.255.473,35	100	17.934.814,61	100	18.455.088,03	100

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

Tabel 2.7
Nilai dan Distribusi PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Rp. Juta) di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha		2017		2018		2019		2020*		2021**	
		Rp.	%								
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.580.351,20	20,89	2.670.435,17	20,51	2.783.135,46	20,87	2.791.280,42	23,38	2.858.994,62	23,43
B.	Pertambangan dan Penggalian	696.430,30	5,64	747.407,18	5,74	803.593,28	6,03	789.481,61	6,61	815.364,82	6,68
C.	Industri Pengolahan	1.593.125,86	12,90	1.602.162,49	12,30	1.625.801,46	12,19	1.595.271,93	13,36	1.674.630,16	13,73
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3.796,25	0,03	3.952,99	0,03	4.060,30	0,03	3.848,61	0,03	3.983,06	0,03
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.270,88	0,05	6.516,44	0,05	7.154,53	0,05	7.410,50	0,06	7.641,55	0,06
F.	Konstruksi	984.829,44	7,97	1.071.618,69	8,23	1.185.939,22	8,89	1.135.142,55	9,51	1.177.997,46	9,66
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.218.926,59	9,87	1.281.797,48	9,84	1.370.906,04	10,28	1.362.734,99	11,41	1.425.181,04	11,68
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.945.746,51	23,85	3.165.014,46	24,31	2.882.329,90	21,61	1.518.951,95	12,72	1.358.902,67	11,14
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.911,87	0,81	107.362,02	0,82	118.743,07	0,89	107.914,29	0,90	117.107,11	0,96
J.	Informasi dan Komunikasi	491.390,81	3,98	525.445,78	4,04	574.622,81	4,31	625.067,08	5,24	669.478,50	5,49
K.	Jasa Keuangan	190.686,78	1,54	193.816,91	1,49	200.335,04	1,50	202.547,56	1,70	219.164,59	1,80

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Lapangan Usaha		2017		2018		2019		2020*		2021**	
		Rp.	%								
	dan Ausransi										
L.	Real Estate	123.015,92	1,00	128.640,18	0,99	137.229,77	1,03	138.767,43	1,16	141.190,45	1,16
M, N	Jasa Perusahaan	10.252,83	0,08	10.727,21	0,08	11.404,48	0,09	11.252,22	0,09	11.367,92	0,09
O.	Administrasi Pemerintah, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	610.199,97	4,94	646.919,82	4,97	691.031,58	5,18	679.148,50	5,69	701.566,47	5,75
P.	Jasa Pendidikan	567.775,16	4,60	614.735,76	4,72	671.235,26	5,03	708.375,78	5,93	738.131,57	6,05
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	74.864,41	0,61	80.361,14	0,62	87.450,33	0,66	93.565,31	0,78	101.723,61	0,83
R, S, T, U	Jasa Lainnya	152.430,18	1,23	164.973,57	1,27	179.952,17	1,35	168.718,46	1,41	177.422,86	1,45
PDRB		12.350.186,9 5	100	13.021.887,7 9	100	13.334.924,7 0	100	11.939.479,1 9	100	12.199.848,4 5	100

Sumber : BPS Padang Pariaman, 2022

B. Laju Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dan sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Regional Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan).

Inflasi dapat disebabkan antara lain karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, maka inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Perhitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat diukur pada dua daerah yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Oleh sebab itu, tingkat inflasi Kabupaten Padang Pariaman secara spasial cenderung mengikuti tingkat inflasi dari Kota terdekat yaitu Kota Padang, karena sebagai kabupaten penyangga Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Untuk tingkat inflasi dalam lima tahun terakhir sangat fluktuatif. Secara umum, penurunan daya beli masyarakat akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan merosotnya sebagian besar sektor ekonomi masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat secara luas.

Gambar 2.8
Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

C. Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

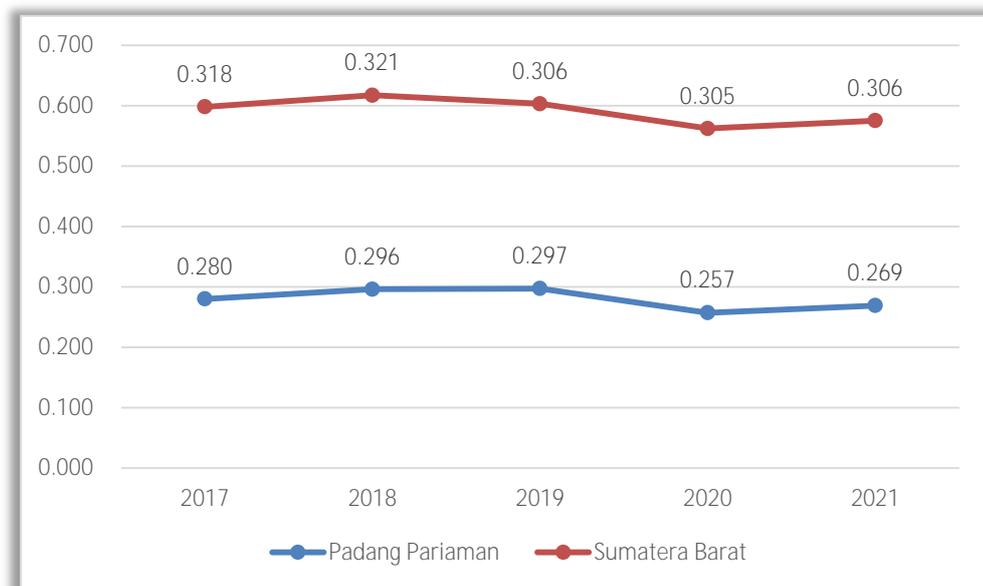
Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 sampai 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah

0,4 < GR < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)

GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Gambar 2.9
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Dari tahun 2017 Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Padang Pariaman cenderung berfluktuatif yakni pada angka 0,280 pada tahun 2017 menjadi 0,269 pada tahun 2021. Namun angka *Gini Ratio* ini masih berada di bawah angka *Gini Ratio* Provinsi Sumatera Barat yang berada pada kisaran 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang ada baik di Kabupaten Padang Pariaman maupun Provinsi Sumatera Barat berada pada kriteria rendah.

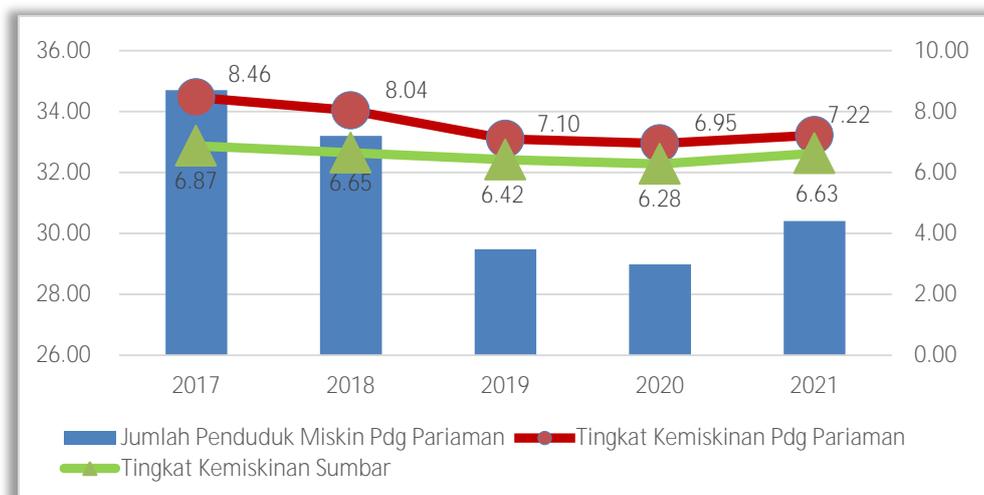
D. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multimedia dan tidak dapat secara mudah dilihat dari angka absolut. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan namun juga mencakup kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin, serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Selain koefisien gini (*Indeks Gini Ratio*), indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran perkapita. Metode penghitungan penduduk miskin melalui metode ini dilakukan dengan menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin Padang Pariaman sebesar 34,70 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,46%. Sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dimana penduduk miskin berkurang menjadi 28,98 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,95%, atau telah terjadi penurunan sebesar 24,28 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan data Provinsi, tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman relatif jauh lebih rendah dari rata-rata secara Provinsi Sumatera Barat. Namun, Pandemi Covid-19 kembali menambah jumlah penduduk miskin baru sebesar 1,43 ribu jiwa sehingga tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman menjadi 7,22%.

Gambar 2.10
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Tabel 2.8
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2017-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2017	385.736	34,70	8,46	1,13	0,23
2018	402.960	33,20	8,04	1,25	0,29
2019	411.182	29,48	7,10	1,06	0,21
2020	455.463	28,98	6,95	0,67	0,11
2021	475.342	30,41	7,22	0,81	0,16

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

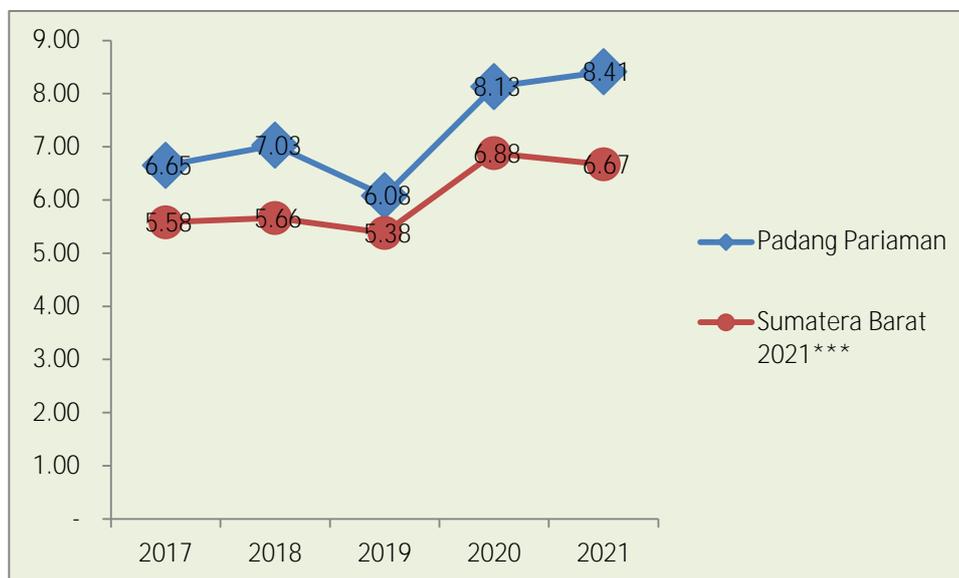
Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian. Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin saja, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin.

E. Tingkat Pengangguran

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian yang menjadi sektor ekonominya dominan masih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuatif dan berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Tingkat Pengangguran terbuka Padang Pariaman tahun 2017 berada di angka 6,65% dan mengalami penurunan di tahun 2019, namun kembali mengalami peningkatan menjadi 8.13 tahun 2020 dan 8.41 tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya efek covid-19 yang berimbas kepada dunia kerja, dimana masyarakat usia kerja banyak yang pulang kampung karena tempat mereka bekerja telah ditutup.

Gambar 2.11
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Padang Pariaman dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Tabel 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021

Tahun	TPT (%)	TPAK (%)
2017	6,65	64,12
2018	7,03	65,56
2019	6,08	63,23
2020	8,13	67,18
2021	8,41	67,56

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

Jika dilihat perkembangan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 mencapai 8,41% mengalami kenaikan yang tidak signifikan dibanding tahun 2020 yang mencapai 8,13%. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Padang Pariaman juga mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang berada pada 63,23 persen menjadi 67,56 persen pada tahun 2021.

Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), terdapat enam status pekerjaan secara sederhana yang dapat diidentifikasi dalam 2 kelompok utama terkait kegiatan ekonomi formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan, sementara sisanya termasuk kegiatan informal. Status pekerjaan utama dari 177.894 penduduk yang bekerja pada tahun 2021, yang terbanyak adalah berusaha sendiri yakni sebesar 46.819 orang atau 26,32 persen. Diikuti pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai dan berusaha

dibantu buruh tidak tetap masing-masing sebesar 42.965 orang (24,15 persen) dan 31.731 orang (17,83 persen), sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar sebesar 3.809 orang (2,14 persen). Hal ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019. Akibatnya banyak buruh/karyawan/pegawai yang dirumahkan dan memilih untuk membuka usaha sendiri. Adapun komposisi penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Padang Pariaman selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021

No	Status Pekerjaan Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Berusaha sendiri	38.362 (22,60%)	35.816 (20,63%)	37.296 (21,87%)	46.474 (25,29%)	46.819 (26,32%)
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	34.318 (20,21)	41.688 (24,01%)	31.440 (18,44%)	35.757 (19,46)	31.731 (17,83%)
3	Berusaha dibantu buruh tetap	5.312 (3,13%)	6.454 (3,72%)	5.539 (3,25%)	4.272 (2,33%)	3.809 (2,14%)
4	Buruh/Karyawan /Pegawai	45515 (26,81%)	48.460 (27,91%)	50.753 (29,76%)	46.994 (25,58%)	42.965 (24,15%)
5	Pekerja Bebas di Pertanian	16.226 (9,56%)	11.418 (6,58%)	17.399 (10,20%)	14.729 (8,02%)	12.761 (7,17%)
6	Pekerja bebas di non Pertanian	10.758 (6,34%)	9.441 (5,44%)	9.925 (5,82%)	9.604 (5,23%)	15.977 (8,98%)
7	Pekerja keluarga	19.278 (11,36%)	20.331 (11,71%)	10.757 (6,31%)	25.901 (14,10%)	23.832 (13,40%)
	TOTAL	169.769 (100%)	173.608 (100%)	170.516 (100%)	183.731 (100%)	177.894 (100%)

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

Sementara itu, penyerapan tenaga kerja di Padang Pariaman hingga tahun 2021 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah dengan rincian tidak tamat Sekolah Dasar (SD) 32,405 persen, tamatan Sekolah Dasar 34,454 persen, tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 32,087 persen dan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) 56,109 persen. Sedangkan, penduduk bekerja berpendidikan tinggi diploma dan Universitas masing-masing 6,043 persen dan 9,44 persen. Berikut disajikan perkembangan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama periode tahun 2017-2021 pada tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Pendidikan yang Ditamatkan di Kab. Padang Pariaman Tahun 2017-2021

No.	Status Pekerjaan Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tidak Tamat SD	47.176 (27,79%)	42.265 (24,35%)	42.421 (24,88%)	33.962 (18,76%)	32.405 (18,21%)
2	Sekolah Dasar (SD)	31.888 (18,78%)	31.898 (18,37)	32.584 (19,11%)	39.871 (22,00%)	34.454 (19,37%)
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	31.251 (18,41%)	33.454 (19,27%)	34.958 (20,50%)	36.426 (20,12%)	32.087 (18,04%)
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	42.152 (24,83%)	47.267 (27,23%)	43.545 (25,54%)	51.480 (28,44%)	56.109 (31,54%)
5	Diploma / Akademi	3.628 (2,14%)	4.818 (2,78%)	4.569 (2,68%)	5.995 (3,31%)	6.043 (3,40%)
6	Universitas (DIV/S-1/S-2/S-3)	16.374 (8,05%)	13.906 (8,01%)	12.439 (7,29%)	13.297 (7,35%)	16.796 (9,44%)
	TOTAL	169.769 (100%)	173.608 (100%)	170.516 (100%)	181.031 (100%)	177.894 (100%)

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

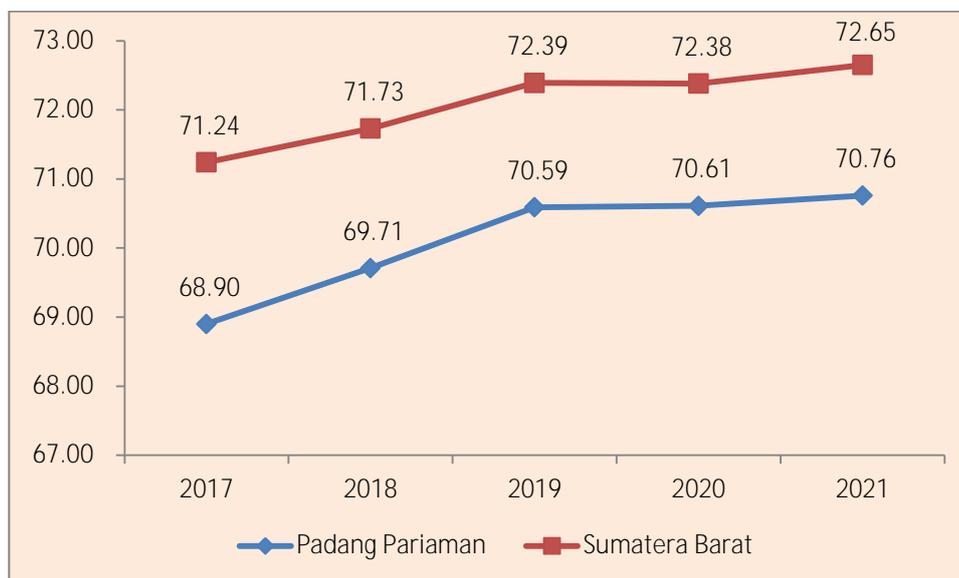
Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi kepada masyarakatnya yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*).

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam hal pembangunan manusia adalah IPM atau *Human Development Indeks I* (HDI). Dengan demikian, IPM menggambarkan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan dalam upaya memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Keberhasilan pembangunan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman terpresentasikan cari capaian IPM Padang Pariaman.

Gambar 2.12
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021



Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka dan Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, capaian IPM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 adalah sebesar 68,90 dan terus mengalami peningkatan menjadi 70,76 di tahun 2021. Capaian IPM tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian IPM Provinsi dan masih termasuk dalam kategori sedang. Untuk meningkatkan posisi IPM di Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan terobosan dan kerja keras secara simultan dan terus menerus terutama pada pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, karena variabel utama dalam penghitungan IPM sangat ditentukan oleh keberhasilan peningkatan kualitas manusia dari segi pendidikan dan kesehatan, dan ditunjang dengan pendapatan perkapita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Tabel 2.12
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia beserta Komponen
Pembentuknya di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,90	69,71	70,59	70,61	70,76
- Angka Usia Harapan Hidup	67,96	68,23	68,58	68,79	68,97

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,21	7,5	7,86	7,87	7,88
- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,56	13,57	13,62	13,67	13,68
- Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu)	931.572	1.042.944	1.071.430	1.084.305	1.157.738

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Jika diperhatikan dari komponen pembentuknya, semua unsur komponen tersebut juga mengalami peningkatan. Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman dari Tahun ke tahun meskipun tidak signifikan terus mengalami peningkatan menjadi 68,97 pada tahun 2021.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani. Standar UNDP adalah minimal 10 tahun dan maksimal 15 tahun. Meskipun masih tergolong rendah, namun rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman sudah menunjukkan perbaikan. Tercatat rata-rata lama sekolah 7,21 tahun 2017 menjadi 7,88 di tahun 2021. Faktor yang mendukung meningkatnya lama sekolah antara lain dapat ditekannya angka putus sekolah melalui bantuan dari berbagai lembaga seperti bantuan biaya sekolah dari BOS, dan lembaga beasiswa lainnya, serta semakin meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah.

Harapan lama sekolah, meskipun terbilang lambat, namun telah mengalami perbaikan dari 13,56 tahun 2017 menjadi 13,68 tahun 2021. Ini menunjukkan adanya optimisme masyarakat di Padang Pariaman terhadap pendidikan kedepannya. Begitupun dengan capaian pengeluaran perkapita yang disesuaikan di Padang Pariaman pada tahun 2021 yang mencapai Rp.1.157.738 perkapita/tahun.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Sebagai daerah penyangga Ibukota Provinsi Sumatera Barat, masyarakat Kabupaten Padang Pariaman cenderung lebih heterogen dan multikultural. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Padang Pariaman, perbedaan tingkat kesejahteraan berbasis ekonomi, perbedaan tingkat pendidikan dalam masyarakat, perbedaan orientasi dan gaya hidup anggota masyarakat, dan efek pembangunan fisik. Di tengah

perbedaan yang begitu menggejala, karakteristik umum masyarakat Padang Pariaman masih dominan berbasis Adat Minangkabau dan praktek ajaran Agama Islam. Namun demikian, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman tetap menjunjung dan menghargai nilai-nilai seni dan budaya Minangkabau. Hal ini terlihat dari aktivitas keseharian masyarakat dan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman yang berbasis kebudayaan. Pariwisata budaya ini bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kebudayaan ranah minang, tidak hanya bagi masyarakat lokal dan nusantara tetapi juga para pendatang atau wisatawan dari mancanegara.

Salah satu aktivitas dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya adalah dengan penyelenggaraan festival seni budaya di Kabupaten Padang Pariaman, meskipun *event* ini belum mampu menembus pasar wisata manca negara secara luas. Oleh sebab itu, berbagai upaya terus dilakukan agar bisa berkontribusi lebih banyak terhadap sektor pariwisata khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Kesadaran akan pentingnya seni, budaya dan olahraga memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta menciptakan iklim kondusif dan harmonis. Kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan bermuara pada pembangunan kepemudaan. Pembangunan kepemudaan dan olahraga dapat mendorong peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik, olahraga dan budaya.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembahasan terhadap aspek ini meliputi hasil pembangunan dari setiap urusan yang mencakup layanan urusan wajib dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan selama periode tahun 2017-2021.

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Urusan Pendidikan

Menurut Elfindri (2014), Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka kualitas sumber daya manusia juga akan semakin meningkat. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang

Pariaman memiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

Perkembangan indikator pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2017-2021 antara lain diukur berdasarkan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SLB, APM SMP/SMPLB, Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK) PAUD, APK SD/SDLB/Paket A, APK SMP/SMPLB/Paket B, Rasio Guru/Murid, Rasio ruang kelas/rombel, Fasilitas Pendidikan, Angka Putus Sekolah SD dan SMP, Mutu Pendidikan yang diukur dari Angka Kelulusan SD dan SMP, Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK, Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Perkembangan indikator capaian urusan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.13 berikut :

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pendidikan
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PENDIDIKAN						
Pendidikan dasar:						
Rasio guru/murid	13,28	12,35	15,67	14,24	13,00	RPJMD 2021- 2026
Angka partisipasi murni SD/SDLB	87,71	101,42	83,58	87,49	63,00	
Angka partisipasi kasar SD/SDLB/paket A	101,29	116,45	98,70	100,08	97,40	
Angka partisipasi murni SMP/SMPLB	56,51	87,39	52,05	58,38	61,00	
Angka partisipasi kasar SMP/SMPLB/paket B	74,10	115,44	67,77	87,12	84,00	
Rasio ruang kelas/rombel	0,94	1,17	0,99	1,00	0,99	
Fasilitas Pendidikan:						
Sekolah SD/SDLB kondisi bangunan baik	97,00	90,47	93,00	99,00	54,15	RPJMD 2021- 2026
Sekolah SMP/SMPLB kondisi bangunan baik	86,00	82,61	96,00	95,00	77,47	
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):						

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Angka partisipasi kasar PAUD	70,07	30,55	23,50	20,45	56,00	RPJMD 2021-2026
Angka Putus Sekolah :						
Angka Putus Sekolah SD	0,12	0,10	0,00	0,25	0,51	RPJMD 2021-2026
Angka Putus Sekolah SMP	0,08	0,16	0,76	0,80	1,90	
Mutu Pendidikan :						
Angka Kelulusan (AL) SD	100,00	99,61	100,00	100,00	100,00	RPJMD 2021-2026
Angka Kelulusan (AL) SMP	99,89	98,10	98,20	100,00	100,00	
Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	99,50	98,40	93,20	99,00	80,00	
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	N/A	N/A	N/A	N/A	91,00	
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94,00	91,88	93,21	93,26	92,42	
Standar Pelayanan Minimal (SPM) :						
Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	72,11	94,00	67,81	72,92	63,70	RPJMD 2021-2026
Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	N/A	N/A	1,50	2,80	119,00	
Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam	39,90	33,30	38,06	37,02	22,40	

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
pendidikan PAUD						

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK dihitung dari perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK bertujuan untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan dan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 untuk tingkat pendidikan dasar yakni sebesar 97,40 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah pada tingkat pendidikan dasar. Sedangkan untuk APK pada tingkat sekolah menengah adalah sebesar 84,00 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan APK pendidikan dasar karena adanya beberapa siswa yang tidak melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP. Sama halnya dengan APK PAUD sebesar 56,00 persen pada tahun 2021. Angka ini justru lebih rendah dibandingkan APK pendidikan dasar dan menengah, karena masih rendahnya partisipasi orangtua dalam menyekolahkan anak pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Capaian APM di Kabupaten Padang Pariaman pada jenjang pendidikan dasar lebih besar dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Pada tahun 2021 capaian APM tingkat SD/SDLB sebesar 63,00 persen, sedangkan tingkat SMP/SMPLB sebesar 61,00 persen. Artinya hanya 63 persen penduduk di Kabupaten Padang Pariaman yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD dan 61 persen penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SMP.

Salah satu penunjang keberhasilan program pendidikan dapat dilihat dari ketersediaan tenaga pengajar/guru. Perbandingan jumlah guru dan murid dapat dijelaskan oleh besaran rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Pada tahun 2021 rasio guru/murid adalah sebesar 13,00. Artinya satu orang guru pada pendidikan dasar mendidik 13 murid. Ini

mengindikasikan ketercapaian jumlah kebutuhan guru pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, untuk SD atau yang sederajat 20:1. Namun demikian perlu juga memperhatikan pemerataan guru di setiap daerah.

Selanjutnya juga dapat dilihat perkembangan Fasilitas Pendidikan berupa bangunan sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB dalam kondisi baik yang cenderung menurun pada tahun 2021 yakni sebesar 54,15 persen dan 77,47 persen dari yang sebelumnya sebesar 99,00 persen dan 95,00 persen pada tahun 2020.

Angka Putus Sekolah (APS) menunjukkan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Perkembangan APS SD dan SMP dari tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 APS SD adalah 0,00 persen meningkat menjadi 0,25 persen pada 2020 dan turun meningkat hingga tahun 2021 APS SD Kabupaten Padang Pariaman sebesar 0,51 persen. Artinya dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 1 anak yang putus sekolah. Sedangkan APS SMP sebesar 1,90 persen, menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 2 anak yang putus sekolah, angka ini meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar 0,80 persen.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP yang telah mencapai target sebagaimana yang ditetapkan. Angka kelulusan SD dari tahun 2017 hingga 2021 tercapai 100,00 persen kecuali tahun 2018 sebesar 99,61 persen. Disamping itu Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP hanya sebesar 80,00 persen, artinya secara rata-rata dari 100 siswa yang lulus pada tingkat SD hanya 80 siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP, sedangkan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA adalah sebesar 91,00 persen yang menggambarkan bahwa terdapat 91 siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA dari 100 siswa yang lulus pada tingkat SMP.

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten yang bersangkutan
- b. Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)

- c. Menghitung persentase jumlah anak (poin b) dibagi dengan jumlah anak (poin b)

Pada tahun 2021 capaian pemenuhan SPM Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) adalah sebesar 63,70 persen. Artinya sebesar 63,70 persen warga negara usia 7-15 tahun di Kabupaten Padang Pariaman telah berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dari total jumlah warga negara usia 7-15 tahun sebanyak 75.879 jiwa.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten yang bersangkutan
- b. Menghitung jumlah anak usia 5 (Lima) sampai dengan 6 (Enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Satuan PAUD
- c. Menghitung persentase jumlah anak (poin b) dibagi dengan jumlah anak (poin b)

Pada tahun 2021 capaian pemenuhan SPM Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD adalah sebesar 22,40 persen. Artinya terdapat 22,40 persen warga negara usia 5-6 tahun yang belajar PAUD atau sebanyak 3.367 warga negara dari 15.083 warga negara usia 5-6 tahun yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada kabupaten yang bersangkutan
- b. Menghitung jumlah anak usia 7 (Tujuh) sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan
- c. Menghitung persentase jumlah anak (poin b) dibagi dengan jumlah anak (poin b)

Pada tahun 2021 capaian pemenuhan SPM Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan adalah sebesar 119,00 persen. Pemenuhan jumlah pendidik pada Pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
- b. Kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor; dan
- c. Jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program.

B. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal

tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang terwujudnya kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Permasalahan yang seringkali dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan yaitu ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum optimal, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat belum maksimal sesuai dengan SPM kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023. Capaian pembangunan kesehatan selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada indikator-indikator berikut :

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
KESEHATAN						
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,83	99,16	102,72	88,50	100,00	RPJMD 2021- 2026
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	87,05	82,80	82,60	27,50	60,00	
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	74,70	78,00	85,90	21,30	55,00	
Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar dari RS (Net Death Rate=NDR= Angka kematian neto) 2.5%	3,50	3,10	1,26	0,15	0,25	
Waktu Tunggu pasien di rawat jalan \leq 60 menit	20,00	50,00	15,00	15,00	50,00	
Angka kematian Umum untuk setiap 1.000 penderita keluar RS (Gross Death Rate=GDR 4.5%)	22,90	6,00	2,95	0,30	0,45	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%)	70,00	70,00	80,00	85,00	58,98	
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien ($\geq 90\%$)	90,00	90,00	90,00	95,00	100,00	
Persentase limbah cair & padat RS yang memenuhi baku mutu (BOD <30 mg/l, COD <80 mg/l, TSS < 30 mg/l dan PH 6 -9) mencapai (100%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Angka pemanfaatan Tempat Tidur RS (Bed occupancy Rate=BOR) (60% - 85%)	29,24	55,00	62,69	49,44	34,83	
Rasio posyandu per satuan balita	22,88	19,86	19,12	1,99		
Rasio puskesmas per satuan penduduk	0,06	0,06	0,06	0,06		
Rasio pustu per satuan penduduk	0,165	0,19	0,19	0,20	0,20	
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Jumlah Seluruh Rumah Tangga	62,49	66,50	71,86	71,95		
Persentase Rumah tangga Bersanitasi Layak	66,61	63,15	61,66	99,79	65,83	
Rasio polindes/poskesri per satuan penduduk x 1000	0,146	0,20	0,21	0,22	0,22	
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk x 1000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	0,08	0,117	0,122	0,079	0,079	
Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	1,10	1,21	1,23	1,61	1,61	
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	86,00	89,67	96,00	69,00	82,40	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
kebidanan						
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100,00	132,00	37,00	100,00	
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui pengembangan jamkesmas dan jemkesda	82,67	133,87	73,80	74,99	73,60	
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	99,27	108,18	95,00	95,00	95,00	
Cakupan kunjungan bayi	95,02	92,71	98,90	91,30	89,90	
Cakupan puskesmas	143,36	143,36	143,53	143,53	143,53	
Cakupan pembantu puskesmas	39,08	39,08	39,08	39,08	39,08	
Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan					73,60	
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2,63	2,47	1,16	3,21	5,00	
Angka kelangsungan hidup bayi (Jumlah Kelahiran Hidup)	998,23	993,00	999,96	993,81	991,61	
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup					4,00	
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup					53,00	RPJMD 2021-2026
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup					11,00	
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar					28,00	
Prevalensi Balita Stunting					10,55	
Cakupan Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat					100,00	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
makanan tambahan						
Persentase Balita Kurus yang Mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan					100,00	
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap					60,70	
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk					3,00	
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cakupan penemuan dan pengobatan TB	65,54	68,77	87,40	34,60	55,00	
Case Notifikasi Rate TB per 100.000 penduduk	182,00	176,00	203,00	137,00	181,00	
Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	9,98	2,80	7,70	3,70	7,60	
Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate)	87,98	80,56	80,24	96,30	84,20	
Penemuan kasus DBD per 100.000 pddk (Insiden Rate)	18,73	23,50	31,80	9,10	0,48	
Persentase tatalaksanaan Diare sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Penemuan kasus malaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0002	
Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,007	0,008	0,015	0,016	0,036	
Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cakupan Pelayanan Kunjungan Nifas Lengkap (KF3)	88,92	86,70	88,40	80,40	82,15	
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	39,50	37,90	34,90	25,00	26,31	
Cakupan Balita yang mendapatkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Pemberian Makanan Tambahan						
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ter akreditasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119 sebanyak 25 Puskesmas	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	
Persentase Korong dengan Stop Buang Air Besar	8,25	8,25	9,03	13,25	17,55	
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Alkes yang sesuai standar permenkes	N/A	N/A	N/A	N/A	64,57	
Jumlah Kecamatan Sehat	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	
Indeks Keluarga Sehat	N/A	N/A	N/A	N/A	0,10	
Persentase Rumah Tangga PHBS	71,34	70,40	70,90	71,00	72,00	
Jumlah IRTP yang diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	60,00	
Standar Pelayanan Minimal (SPM) :						
Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	80,60	88,90	81,40	82,20	82,40	
Persentase Orang terduga TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TB sesuai dengan Standar	88,30	100,00	100,00	34,60	49,40	
Persentase Orang usia 15-59 Tahun Mendapatkan skreening kesehatan sesuai	75,70	76,00	74,80	47,80	81,35	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
standar						
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	48,50	17,90	56,90	23,20	67,37	
Persentase Penderita Hypertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	62,00	37,80	100,00	39,90	66,65	
Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62,00	37,80	100,00	71,30	88,45	
Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68,40	100,00	85,70	98,90	99,77	
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	84,60	95,30	77,90	86,60	89,89	
Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar	82,70	89,30	81,90	80,20	85,63	
Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	71,50	64,60	80,90	73,40	69,56	
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93,90	99,60	72,00	23,20	57,98	

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Salah satu faktor pendukung capaian kinerja pada urusan kesehatan yang adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai sehingga dapat memberikan jaminan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, diantaranya seperti : posyandu, pustu, polindes/poskesri, dan rumah sakit. Pada RPJMD Tahun 2021-2026, beberapa indikator baru pada urusan kesehatan telah ditetapkan dan beberapa indikator lainnya tidak lagi digunakan sebagai indikator kinerja pada urusan kesehatan. Salah satu indikator yang baru adalah

Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan. Pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang tercatat sebagai peserta dalam sistem jaminan sosial adalah 73,6 persen.

Pembangunan bidang kesehatan dapat diukur dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Jumlah Kelahiran Hidup), Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 terdapat 5 kasus kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Padang Pariaman. Ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Padang Pariaman masih rendah.

Pada tahun 2021 persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan yang sesuai standar hanya tercapai sebanyak 28,00 persen dari target yang ditetapkan sebesar 35,00 persen. Hal ini karena kurangnya jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang harus terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019. Adapun persyaratan ketenagaan di Puskesmas yang harus dipenuhi meliputi : dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik. Beberapa upaya yang dilakukan untuk memenuhi jumlah ketenagaan di Puskesmas ini diantaranya adalah dengan melakukan permintaan tenaga nusantara sehat melalui Kementerian Kesehatan RI dan melakukan perekrutan tenaga swakelola yang ditanggung melalui dana DAK non fisik.

Untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit salah satunya adalah melalui peningkatan imunisasi yang dilihat dari cakupan desa *Universal Child Immunization* (UCI). Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa/nagari dimana 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa/nagari tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Capaian indikator ini pada tahun 2021 adalah sebesar 60,00 persen dari target yang ditetapkan sebesar 79,30 persen. Ini menunjukkan masih rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Diantara faktor penyebabnya adalah :

1. Adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelayanan imunisasi di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan terhenti.
2. Penerapan protokol kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan membuat masyarakat enggan dan takut untuk membawa anaknya memperoleh imunisasi.
3. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi dasar yang lengkap bagi bayi mereka.

Capaian target pada indikator cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan pada tahun 2021 telah terpenuhi 100,00 persen. Artinya seluruh kasus bayi gizi buruk telah tertangani seluruhnya pada tahun 2021. Indikator cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan dilihat dari ibu hamil dengan resiko kekurangan energi kronik (KEK)

yang ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 23,5 cm, Indeks Massa Tubuh kurang dari 18,5 atau mengalami penurunan berat badan. Beberapa faktor penyebab ibu hamil yang mengalami gejala ini adalah kurangnya asupan makanan sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, usia kehamilan yang terlalu muda, banyaknya aktivitas yang dilakukan dan adanya penyakit bawaan yang diderita oleh ibu hamil. Pada tahun 2021 capaian target pada indikator ini telah tercapai 100,00 persen. Artinya semua kasus ibu hamil dengan resiko kurang energi kronik (KEK) telah tertangani dengan pemberian makanan tambahan secara berkala. Demikian juga dengan indikator persentase balita kurus yang mendapatkan pemberian makanan tambahan telah tercapai sebesar 100,00 persen. Ini menunjukkan bahwa telah dilakukan aksi pemberian makanan tambahan terhadap semua kasus balita dengan kategori berat badan rendah. Sementara itu capaian indikator Non polio AFP rate per 100.000 penduduk pada tahun 2021 adalah sebesar 3,00 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,00 persen. Ini didorong oleh peningkatan promosi kesehatan terkait pentingnya imunisasi polio kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri dari 12 jenis layanan dasar diantaranya adalah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV.

Pada tahun 2021 capaian SPM pada indikator Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar adalah sebesar 82,40 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Capaian indikator ini dihitung dari jumlah ibu hamil yang menjadi sasaran objek pelayanan persalinan yang sesuai standar sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusdatin Kemenkes. Ketidaktercapaian target pada indikator ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya data terkait jumlah ibu hamil sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusdatin Kemenkes. Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin dalam kurun waktu satu tahun. Untuk persentase orang terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tuberkulosis (TBC) Sesuai Standar adalah sebesar 49,40 persen pada tahun 2021 menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 100,00 persen. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dan edukasi. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan di

tetapkan oleh Kepala Daerah. Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, yakni berupa pemeriksaan gejala dan tanda tertular TBC.

Selanjutnya Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar pada tahun 2021 adalah 81,35 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar 47,80 persen. Artinya terjadi peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penduduk usia produktif berupa edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Selain itu juga terdapat indikator Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar yang memperoleh capaian sebesar 67,37 persen. Capaian indikator ini juga meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 23,20 persen. Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan pada warga negara usia lanjut dalam bentuk skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar selama 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2018 capaian indikator ini adalah 100,00 persen dan menurun pada tahun berikutnya yakni sebesar 39,90 persen, namun pada tahun 2021 kembali meningkat yakni 66,65 persen. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan dan edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat. Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu satu tahun. Selanjutnya Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 88,45 persen pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 sebesar 71,30 persen. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi pengukuran gula darah yang dilakukan minimal satu kali sebulan di seluruh fasilitas kesehatan, dan melakukan edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi.

Selanjutnya capaian persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar adalah sebesar 99,77 persen pada tahun 2021. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 98,90 persen pada tahun 2020. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. Pencapaian pemenuhan SPM Urusan Kesehatan pada indikator Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar pada tahun 2021 adalah 89,89 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100,00 persen. Hal ini disebabkan oleh jumlah bayi lahir tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk capaian persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar adalah 85,63 persen pada tahun 2021 meningkat dari 80,20 persen pada tahun 2020.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah setiap tahunnya agar dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 Tahun 2014 urusan wajib/pelayanan dasar PU yaitu Sumber daya air/pengairan (bidang infrastruktur pengairan/irigasi, termasuk operasional/pemeliharaan), Jalan dan Jembatan (Bidang infrastuktur jalan dan jembatan, termasuk pemeliharaan), Cipta Karya (Bidang Infrastruktur jaringan air bersih/air minum, sanitasi/MCK, Bangunan Gedung, Drainase, dan Jalan Lingkung) dan Penataan Ruang (Bidang Perencanaan/Pengendalian Ruang Kawasan) jalan merupakan faktor pendukung utama pembangunan, baik pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya maupun infrastruktur lain. Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kabupaten/kota, serta kecamatan hingga nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Jaringan jalan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Sampai dengan tahun 2021 terdapat panjang jalan 2.251,74 Km yang terdiri dari jalan Negara 83,57Km, jalan Provinsi 95,77 Km, jalan Kabupaten 2.072,4 Km.

Sejak tahun 2019 dalam rangka mengantisipasi perkembangan volume lalu lintas yang ditandai dengan bertambah padatnya arus lalu lintas pada jalur jalan Negara Padang- Bukittinggi setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merintis pembangunan jalan lingkar dari Duku - Sicincin dan Sicincin - Malalak, serta pembangunan jalan Tol Padang - Pekan Baru. Dalam rangka mengantisipasi arus lalu lintas Ibu Kota Kabupaten - Kota Pariaman - Bandara Internasional Minangkabau (BIM) maka dilakukan pelebaran jalan terutama dari Pakandangan menuju Sicincin dan Pasar Usang menuju Bandara Internasional Minangkabau. Disamping itu untuk meningkatkan lingkungan permukiman yang tertata, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan pembangunan dan pembenahan jalan lingkungan termasuk saluran lingkungannya. Adapun capaian kinerja pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat beberapa indikator baru yang diukur diantaranya dijelaskan pada tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PEKERJAAN UMUM						
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	46,71	62,28	63,68	67,00	63,63	RPJMD 2021-2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	42,45	62,84	65,98	75,00	69,30	
Panjang jalan dilalui Roda 4	1.878 Km	1.878 Km	1.878 Km	1.666 Km		RPJMD 2016-2021
Persentase Jalan Mantap (%)	59,47	62,28	63,68	64,28	63,63	
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40)KM/Jam)	968,02 Km	1.053,75 Km	1.274,06 Km	701,7 Km		
Rasio Jaringan Irigasi (%)	43,00	47,12	55,26	66,47	69,30	
Panjang Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (M)	55,00	55,10	55,10	2.417,28	N/A	
Persentase Gedung Kantor yang terbangun di kawasan Ibukota Kabupaten	0,46	0,56	0,57	0,57	N/A	
Persentase Ketaatan terhadap RTRW	N/A	N/A	N/A	N/A	60,39	RPJMD 2021-2026
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	1,24	
Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	55,00	55,10	55,10	N/A	39,98	
Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	N/A	N/A	N/A	N/A	21,74	
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan	N/A	N/A	N/A	N/A	33,33	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
peta digital						
Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan rencana tata ruang	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	N/A	N/A	N/A	N/A	95,4	
Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	N/A	N/A	N/A	N/A	23,49	
Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	N/A	N/A	N/A	N/A	79,59	
Standar Pelayanan Minimal (SPM) :						
Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	N/A	N/A	N/A	N/A	72,05	
Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	N/A	N/A	N/A	N/A	79,59	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan DLHPKPP, 2022

Dari tabel diatas dapat realisasi pada indikator persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 72,05 persen dan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 79,59 persen. Kedua indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan dimana masing-masing target indikator ini adalah 88,00 persen

dan 81,00 persen. Ini terjadi karena ada rasionalisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Selanjutnya kondisi jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang mencapai 63,63 persen dari target 65,30 persen. Hal ini disebabkan oleh tingkat kerusakan jaringan jalan lebih cepat dibandingkan dengan laju pembangunan jaringan jalan, sering terjadinya bencana alam, dan adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19. Disamping itu jika dilihat capaian indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik telah mencapai 69,30 persen dari target 54,82 persen. Ketercapaian indikator ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data melalui aplikasi e-paksi yang merupakan aplikasi survey berbasis android yang digunakan untuk pengambilan data survey, aset jaringan irigasi, aset non jaringan irigasi dan kinerja irigasi, serta pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 5 Angka 2 menyatakan bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam SPM Pekerjaan Umum yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Pada tahun 2021 ditargetkan 88,00 persen rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Padang Pariaman, namun realisasinya adalah 72,05 persen. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Masih rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah;
- b. Isu air minum dan sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran;
- c. Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi;
- d. Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat;
- e. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM terkait dengan pengelolaan;
- f. Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan;
- g. Belum optimalnya peran lembaga di nagari terhadap penyediaan air minum;
- h. Tingkat kebocoran PDAM masih tinggi;

Sedangkan untuk target jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah 81,00 persen, namun capaian realisasinya adalah 79,59 persen. Diantara faktor penghambatnya adalah :

- a. Masih rendahnya sistem pengolahan limbah cair domestik yang berbentuk cairan yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti air sabun mandi, detergen cuci, minyak, dan industri-industri kecil lainnya;
- b. Masih rendahnya SDM terkait dengan pengolahan limbah cair domestik tersebut;

D. Urusan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pemenuhan akan kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terus diupayakan oleh pemerintah dengan jalan memberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya serta membina agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat berlangsung dengan tertib. Pembangunan perumahan pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri, namun demikian pemerintah tetap berkewajiban dan terus mengupayakan keterlibatan dan peranan yang lebih aktif baik melalui swasta, koperasi, lembaga swadaya maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat dilihat dengan adanya anggaran melalui dana APBD untuk membantu pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak tahun 2016-2020. Disamping itu pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu berupaya untuk meraih program pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan agar semakin besar lapisan masyarakat yang dapat menempati rumah dengan lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi yang dilengkapi dengan sarana pelayanan dasar seperti air bersih dan listrik. Adapun capaian kinerja pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PERUMAHAN						
Persentase rumah tangga pengguna listrik	95,6	99,07	99,09	99,11	130,00	RPJMD 2016- 2021
Lingkungan pemukiman kumuh (Ha)	3.996,1 5	3.996,1 5	886,77	886,85	864,68	
Persentase luas pemukiman yang tertata	22,00	24,00	26,00	27,00	N/A	
Rumah tangga pengguna air bersih	62,49	66,50	71,86	71,95	N/A	
Terbangunnya jaringan air bersih	43,00	47,12	55,26	66,70	N/A	
Rumah tangga bersanitasi layak	60,70	62,67	63,26	63,78	N/A	
Rasio rumah layak huni	60,10	62,30	65,50	63,10	N/A	RPJMD 2021- 2026
Persentase areal kawasan kumuh	N/A	N/A	N/A	0,0001 6	0,0001 6	
Luas Ruang Terbuka	N/A	N/A	15,00	0,00	43,27	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Hijau						
Rasio permukiman layak huni	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	N/A	N/A	N/A	92,80	92,80	
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Persentase pemukiman yang tertata	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Persentase Pengembang Perumahan yang telah tersertifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Persentase Pengembang Perumahan yang telah teregistrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Timbulan sampah yang tertangani	N/A	N/A	51.684,25	N/A	65.584,25	
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Persentase cakupan area pelayanan	0,00	0,00	31.452,00	0,00	41.136,00	
Persentase penanganan sampah	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Standar Pelayanan Minimal (SPM) :						
Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni						

Sumber : DLHPKPP, 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis pelayanan dasar bidang Perumahan, yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. Pada saat masa pasca bencana;
- b. Surat penetapan bencana dari kepala daerah;
- c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Sementara untuk pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam rangka mendukung :

- a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya".

Implementasi Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021, belum terlaksana secara efektif, karena belum terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2021.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17.

Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Tahun					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
KETENTRAMAN,						

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Tahun					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Persentase Penegakan Perda	80	55	94,12	90	68,25	RPJMD 2021- 2026
Penurunan Jumlah Tindak Pidana	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	
Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	74,45	75,36	100,00	100,00	100,00	
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (MWK)	17	18	17	17	15,00	
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cakupan patroli petugas Satpol PP	2,12	2,12	2,12	2,12	0,53	
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	80	55	100,00	100,00	100,00	
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	94,23	100,00	100,00	81,54	81,54	
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	6	5,00	5,00	5,00	5,00	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Tahun					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65	
Nagari tangguh bencana	0,00	2,00	2,00	14,00	15,00	
Persentase sarana dan prasarana kebencanaan yang ramah bencana	36,00	38,75	38,75	39,06	41,84	
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)					15,00	
Standar Pelayanan Minimal (SPM) :						
Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada					0,00	
Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					100,00	
Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	N/A	N/A	100,00	97,00	30,25	
Persentase warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	

Indikator Kinerja Daerah	Tahun					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
terhadap bencana						
Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	N/A	N/A	98,09	100,00	99,90	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pencapaian pemenuhan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada sub bidang satpol pp dan damkar terdapat 2 jenis layanan dasar yakni :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikatornya adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan indikatornya adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Indikator sasaran Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dengan tingkatan capaian 0 persen dengan interpretasi tidak ada kejadian kerusakan materi dan cedera selama melakukan Penegakan Perda/Perkada. Faktor pendukung kinerja ini adalah :

- a. Kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Satpol PP dengan TNI/Polri/Kejaksaan
- b. Tim Pengamanan Perda yang meliputi pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturaan kepala daerah di wilayah kabupaten padang pariaman

Indikator sasaran jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan tingkatan capaian 100% dengan interpretasi sangat berhasil. Program yang mendukung peran tersebut adalah :

- a. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencegah bahaya kebakaran yang mengancam keselamatan warga Negara melalui Penanggulangan Bahaya Kebakaran di seluruh wilayah Kab. Padang Pariaman. Target pada tahun 2021 untuk penyelesaian bahaya kebakaran dalam kegiatan ini adalah 60 kejadian. Sedangkan realisasinya adalah 60 Kejadian dalam WMK, dengan kata lain tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah 100 %
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana Bahaya Kebakaran
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pencegahan bahaya kebakaran yang mengancam keselamatan warga Negara melalui

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 5 Unit Mobil Pemadam kebakaran yang layak di seluruh wilayah Kab. Padang Pariaman.

Sedangkan pemenuhan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada sub bidang penanggulangan bencana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 (tiga) jenis layanan dasar bidang kebencanaan yakni :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Capaian pemenuhan indikator warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana adalah sebesar 30,25 persen. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 20,00 persen, namun demikian capaian ini masih tergolong rendah karena dapat diinterpretasikan bahwa hanya 30,35 persen warga negara di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Untuk indikator warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2021 tercapai 100,00 persen dan warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 99,90 persen. Namun demikian masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya alat sarana dan prasarana salah satunya adalah mobil rescue, sehingga dapat menghambat dalam mendukung proses penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

F. Urusan Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana.

Hasil capaian kinerja bidang urusan sosial tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.18. berikut ini :

Tabel 2.18.
Capaian Kinerja Urusan Sosial
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
SOSIAL						
Tingkat kemiskinan	8,46	8,04	7,10	6,95	7,22	RPJMD 2021- 2026
Persentase PPKS Mandiri	30,00	35,00	40,00	16,00	0,00	
Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	N/A	N/A	N/A	59,76	82,00	
Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	
Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	N/A	N/A	N/A	N/A	82,00	
Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	75,00	79,00	80,00	59,76	82,00	
Persentase korban bencana yang menerima	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
bantuan sosial selama masa tanggap darurat						
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Standar Pelayanan Minimal (SPM) :						
Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase anak telantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Warga Negara	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial						

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengatakan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

Untuk tahun 2021 seluruh capaian pemenuhan SPM pada seluruh indikator pelayanan dasar pada SPM sosial daerah Kabupaten Padang Pariaman telah tercapai 100,00 persen.

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, produktifitas dan berdaya saing tinggi melalui pelatihan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan harkat, martabat dan kemampun keterampilan berorientasi penempatan dan kemandirian tenaga kerja. Hal ini sebagai upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas dan peningkatan kinerja kelembagaan.

Isu strategis dalam urusan tenaga kerja yaitu masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Padang Pariaman sebagai dampak lesunya ekonomi karena adanya pandemi covid-19, rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja, kurangnya kompetensi pencari kerja serta masih banyaknya pencari kerja yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pencari kerja sehingga perlu diadakan program pelatihan berbasis keterampilan bagi pencari kerja untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing serta menumbuhkan jiwa wirausaha yang baru. Adapun perkembangan capaian kinerja urusan tenaga kerja Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut ini :

Tabel 2.19.
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Tenaga Kerja						
Angka partisipasi angkatan kerja	64,51	67,58	48,90	52,25	70,90	RPJMD 2016- 2021
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	69,57	40,00	6,00	8,00	5,00	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1,6	2,56	2,65	1,85	1,90	
Pencari kerja yang ditempatkan	60,02	65,00	65,00	5,10	1,00	
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,25	7,15	5,97	5,97	8,41	
Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	58,26	50,00	58,25	57,70	58,23	
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tingkat produktivitas tenaga kerja	80,25	80,65	81,95	83,24	65,44	RPJMD 2021- 2026
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	2.800	2.801	2.557	3.175	1.636	
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	52,01	58,26	57,77	51,11	40,00	
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100,00 (7 kasus)	100,00 (4 kasus)	100,00 (6 kasus)	100,00 (8 kasus)	100,00	
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	60,02	65,00	4,40	5,40	4,80	
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	62,00	65,00	64,75	72,60	80,42	
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	144,00	496,00	752,00	320,00	336,00	
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis	16,00	16,00	17,00	0,00	0,00	

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
masyarakat						
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60,00	120,00	120,00	90,00	96,00	
Rasio lulusan S1/S2/S3	75,96	9,83	11,32	N/A	59,70	
Rasio penduduk yang bekerja	74,72	70,87	81,06	70,15	85,10	
Persentase pengangguran/mencari pekerjaan	16,00	15,05	13,75	12,05	19,44	
Rasio daya serap tenaga kerja	80,00	95,00	97,00	98,65	112,00	
Jumlah tenaga kerja yang terserap	1.975	2.065	20.615	3.050	N/A	

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. TPAK merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode tahun 2017-2020 cenderung menurun. Namun pada tahun 2021 meningkat sebesar 2,44 persen poin menjadi 8,41 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 5,97 persen. Kondisi ini merupakan dampak dari Covid-19 yang menyebabkan PHK di berbagai sektor usaha sehingga menjadi penyebab meningkatnya angka pengangguran tersebut. Sementara itu pada capaian indikator keselamatan dan perlindungan tenaga kerja menunjukkan angka 58,23 persen pada tahun 2021 meningkat dari 57,70 persen pada tahun 2020. Ini memberikan gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berkomitmen untuk menjamin hak-hak dasar terhadap pekerja atau buruh demi mewujudkan kesejahteraan mereka.

Pada RPJMD tahun 2016-2021, beberapa indikator baru pada urusan tenaga kerja telah ditetapkan, diantaranya tingkat produktivitas tenaga kerja yang didefinisikan sebagai tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk yang menunjukkan adanya kaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Pada tahun 2021 tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman adalah 65,44 persen. Sementara itu, jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.636 orang. Jumlah ini tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan yakni sebanyak 2.400 orang karena dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan lapangan pekerjaan kurang tersedia dan tidak adanya kecocokan antara lowongan pekerjaan yang ada

dengan latar belakang pendidikan. Sementara itu dilihat dari indikator jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mencapai 40,00 persen dari target yang ditetapkan sebesar 51,00 persen. Hal ini karena masih belum optimalnya pembinaan, sosialisasi, dan monitoring yang dilakukan tentang pentingnya suatu perusahaan untuk menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) bagi seluruh buruh/pekerja. Selanjutnya adalah rasio pertumbuhan wirausaha yang berskala mikro di Padang Pariaman dengan capaian sebesar 1,80 persen. Capaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Adanya program dari pemerintah pusat salah satunya bantuan produktivitas usaha mikro terhadap pelaku usaha dan pedagang kaki lima (PKL) pada tahun 2020 dan 2021.
2. Adanya pendampingan dan pelatihan yang diberikan terhadap wirausaha pemula.
3. Adanya himbauan dan dukungan dari kepala daerah untuk menciptakan *entrepreneurship* baru yang berdaya saing untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman.

Pada tahun 2021 angka sengketa pengusaha-pekerja hanya tercatat sebanyak 5 (lima) kasus dari target sebanyak 10 (sepuluh) kasus. Hal ini didukung dengan telah dibentuknya Lembaga Kerja Sama Tripartit yaitu forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh yang mempunyai tugas dan fungsi mencegah terjadinya kasus perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, serta penutupan perusahaan.

B. Urusan dan Perlindungan Anak

Dalam Inpres No.9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender (PUG) didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan-kebijakan dan program-program dan kebutuhan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penganggaran dari semua kebijakan, program dan kegiatan disemua bidang kehidupan. Untuk memperkuat Inpres No. 9 tahun 2000 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah. Dalam Kepmendagri ini, ditegaskan bahwa pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga pemerintahan di Propinsi, Kabupaten dan Kota yang pengaturan lebih lanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah di semua tingkatan hingga Kelurahan/Desa.

Demikian pula dalam rangka menjalankan fungsi keluarga yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak sesuai dengan hak dan martabatnya diterbitkan undang undang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah menjamin dan melindungi anak dan haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2, UU Nomor 23 Tahun 2002). Adapun perkembangan pelayanan Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut ini :

Tabel 2.20.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,5	6,62	14,28	14,28	74,00	RPJMD 2021-2026
Rasio KDRT	0,77778	0,00	0,00	0,7778	0,00	
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	28 orang	18 orang	26 orang	26 orang	46 orang	RPJMD 2016-2021
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,79	93,07	92,92	92,69	92,78	
Persentase keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	RPJMD 2021-2026
Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	N/A	N/A	N/A	0,020	0,030	
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	1 orang	1 orang	1 orang	0,00	0,00	
Partisipasi	N/A	N/A	22,79	N/A	39,00	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
perempuan di lembaga swasta						
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur					0,00	
Partisipasi angkatan kerja perempuan	52,00	49,42	60,83	N/A	38,80	
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cakupan perempuan dan anak korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

Dari tabel 2.20 diatas dapat dilihat bahwa persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah tahun 2021 sebesar 74,00 persen. Artinya dari segi jumlah keterwakilan wanita dalam pemerintahan termasuk dalam kategori tinggi. Sementara itu, dalam RPJMD 2021-2026 telah ditetapkan beberapa indikator baru pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Dan sebaliknya semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 92,78 persen. Artinya capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Padang Pariaman sudah hampir setara. Demikian juga jika dilihat dari Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mencapai 38,80 persen. Angka ini menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja di Padang Pariaman.

Sementara itu, capaian pada indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dan mendapatkan bantuan hukum telah terlaksana sebesar 100,00 persen. Demikian juga cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan telah direalisasi sebesar 100,00 persen, karena penanganan yang dilakukan sesuai dengan kasus yang dilaporkan.

C. Pangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan

secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pangan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berikut capaian kinerja urusan pangan Kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2017-2021 :

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Pangan
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PANGAN						
Nilai PDRB Sektor Pertanian	2.601.857,26	2.624.737,11	2.704.567,07	2.668.793,70	2.608.426,60	RPJMD 2016-2021
Persentase Nilai Tukar Petani	96,97	95,31	95,99	100,58	107,60	
Regulasi Ketahanan Pangan	1,00	1,00	0,00	0,00	N/A	
Ketersediaan pangan utama kg/1000 pddk	695.430,89	656.413,95	709.848,01			
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	5,26	4,51	4,75	4,77	4,56	
Distribusi sektor pertanian Tan. Pangan terhadap PDRB (%)	19,33	18,65	19,19	22,66		RPJMD 2021-2026
Jumlah Produksi beras (Ton)	174.550,00	152.620,00	159.334,00	283.127,00	137.262,72	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,20	87,50	88,00	88,10	79,20	

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Ketersediaan energi (Kkal/Kap/Hari)	2.856	2.856	2.875	2.431	2.440	
Ketersediaan protein (Gram/kap/Hari)	56,17	56,17	72,63	54,04	55,65	
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2022

Berdasarkan tabel diatas jumlah produksi beras (ton) selama 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah produksi beras mencapai 137.262,72 ton menurun dari capaian tahun 2020 sebesar 283.127 ton. Dalam RPJMD tahun 2021-2026 terdapat indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Pada tahun 2021 skor PPH Kabupaten Padang Pariaman sebesar 79,20 atau tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 88,50. Hal ini karena terjadinya ketidakseimbangan keragaman konsumsi pangan masyarakat disebabkan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat karena kondisi pandemi covid-19 yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir.

D. Pertanian

Untuk melihat capaian kinerja pada urusan pertanian dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PERTANAHAN						
Penyelesaian Izin Lokasi	100,00	100,00	N/A	N/A	0,00	RPJMD 2021- 2026
Penyelesaian kasus tanah Negara	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	
Persentase luas lahan milik Pemda bersertifikat					9,16	
Cakupan penyelesaian ganti					0,00	

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan						
Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee					0,00	
Cakupan pelayanan pengelolaan izin membuka tanah					0,00	

Sumber : DLHPKPP, 2022

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan kepemilikan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah lahan milik Pemerintah Daerah yang sudah bersertifikat mencapai 9,16 persen dari yang ditargetkan sebelumnya sebesar 8,80 persen atau sebanyak 12 sertifikat. Sementara itu, untuk kasus sengketa tanah negara telah 100 persen terselesaikan dan tidak ada ganti kerugian maupun santunan tanah untuk pembangunan. Sedangkan untuk indikator lain seperti cakupan pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dan cakupan pelayanan pengelolaan izin membuka tanah belum dapat dilakukan perhitungan karena terkendala ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan terkait.

E. Lingkungan Hidup

Dalam urusan lingkungan hidup yang terkait dalam hal ini adalah Pengukuran Indeks Kualitas Air, Pengukuran Indeks Kualitas Udara, Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL, Pengawasan pengelolaan LB3, Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH, dan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. Adapun perkembangan capaian kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut :

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
LINGKUNGAN HIDUP						
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL	34,00	30,00	28,00	31,00	0,00	RPJM D 2021-2026
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	47,60	48,70	49,80	55,42	58,95	
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	97,83	97,83	94,42	93,32	93,54	
Persentase penanganan sampah	43,00	44,95	60,85	55,90		RPJM D 2016-2021
Pencemaran status mutu air yang ditangani	80,33	81,17	82,83	N/A		
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	78,91	78,8	79,37	75,77		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terpelihara	48,00	48,00	48,00	48,00	56,67	
Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	37,00	46,00	48,78	48,00		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	N/A	62,58	67,38	68,76	RPJM D
Tersusunnya RPPLH	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	2021-

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	2026
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	
Persentase Keanekaragaman Hayati yang dikelola	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penetapan hak MHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	
Terfasilitasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
penyediaan sarana / prasarana						
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Terlaksana a	Terlaksana a	Terlaksana a	Terlaksana a	Terlaksana a	
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Terlaksana a	Terlaksana a	Terlaksana a	Tidak	Ada	
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penegakan hukum lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sumber : DLHPKPP, 2022

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara pada tahun 2021 menunjukkan angka 93,54, yang mengindikasikan bahwa kualitas udara di Kabupaten Padang Pariaman termasuk ke dalam kategori sedang. Sedangkan Indeks Kualitas Air menunjukkan angka 58,95. Artinya kualitas air di Padang Pariaman sudah memenuhi standar baku mutu. Selanjutnya cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan telah dilakukan 100,00 persen. Demikian juga dengan capaian persentase keanekaragaman hayati yang dikelola telah 100,00 persen dilaksanakan. Namun beberapa indikator lain tidak dapat terealisasi karena tidak adanya dukungan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan terkait, diantaranya fasilitasi pendampingan pengakuan MHA, verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, penetapan hak MHA, fasilitas kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan penyediaan sarana dan prasarana.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan. Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23/2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian. Adapun perkembangan capaian indikator administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Persentase Kepemilikan KTP elektronik	80,00	95,00	98,00	98,68	99,80	RPJMD 2016-2021
Persentase Kepemilikan akte kelahiran	71,00	83,03	87,14	91,73	97,05	
Persentase ketersediaan elemen data per NIK pada database kependudukan	80	80	80	85		
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	B	B	B	A	A	
Persentase penerbitan akta kematian	78,00	77,00	100,00	100,00	100,00	RPJMD 2021-2026

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Penerbitan KTP EL					99,80	
Persentase Penerbitan KK					100,00	
Persentase Penerbitan KIA					36,38	
Persentase penerbitan akta kelahiran					97,05	
Persentase penerbitan akta perkawinan					100,00	
Persentase database kependudukan yang disusun					100,00	
Jumlah buku laporan data kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan					3,00	
Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk					3:2	
Rasio bayi berakte kelahiran					1:1	
Rasio pasangan berakte nikah					1:2	
Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi					Ada	
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK					Sudah	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator yang tidak ditampilkan data realisasinya pada tahun 2021 karena indikator tersebut sudah tidak menjadi indikator kinerja daerah lagi. Adapun capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 pada indikator jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang telah memiliki KTP elektronik mencapai 99,80 persen, penerbitan akta kelahiran tercapai sebesar 97,05 persen dari target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 93,00 persen. Demikian juga dengan indikator penerbitan KK, akta perkawinan, akta

kematian, dan penyusunan database kependudukan telah 100 persen tercapai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman juga menerbitkan laporan data kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk buku data profil kependudukan dan buku agregat kependudukan yang diterbitkan per semester dan per tahun. Artinya semua target indikator yang ditetapkan telah berhasil tercapai selama tahun 2021.

Ini merupakan keberhasilan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memberi kemudahan akses dan pelayanan untuk mengurus administrasi kependudukan. Keberhasilan ini tentunya didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman melalui pelayanan *online*, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Disdukcapil. Layanan *online* ini juga menjadi solusi dalam menjalani aturan protokol kesehatan yang diterapkan akibat adanya pandemi *covid-19*.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Berikut ini capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat tahun 2017-2021 di Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	70,00	90,00	100,00	95,00	103,00	RPJMD 2016-2021
Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Swadaya terhadap Program pemberdayaan masyarakat	35,00	35,00	33,00	45,00	50,00	
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	0,70	0,70	0,70	0,75	0,77	
Persentase peningkatan kemampuan Nagari dan Pengurus Nagari	20,00	20,00	19,00	50,00	53,00	
Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yang	20,00	61,00	18,00	55,00	60,00	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
terbentuk dan berfungsi dengan baik						
Posyandu Purnama dan Mandiri	42,48	70,72	82,35	81,50	85,00	
Persentase PKK Aktif	51,28	70,00	68,60	75,00	100,00	
Persentase Posyandu aktif	70,70	70,70	68,50	70,00	70,70	
Indeks Desa Membangun	10,00	8,00	8,00	4,00	2,00	
Persentase Nagari yang tertata	56,00	50,00	60,00	63,00	70,00	
Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama	45,00	50,00	52,00	55,00	70,00	
Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	55,00	57,00	60,00	65,00	70,00	
Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	65,00	70,00	75,00	80,00	91,00	RPJMD 2021-2026
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	70,00	70,00	72,00	73,00	75,00	
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	71,00	90,00	93,00	95,00	100,00	
Persentase LPM aktif	67,00	67,00	68,00	70,00	72,00	
Persentase LPM Berprestasi	20,00	30,00	10,00	57,00	68,00	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian posyandu aktif pada tahun 2021 adalah sebesar 70,70 persen dan pelaksanaan kegiatan PKK telah . Sementara itu dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 terdapat indikator indeks desa membangun yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Pada tahun 2021 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Padang Pariaman adalah 2,00 atau termasuk dalam kategori Desa Mandiri atau Desa Madya. Namun untuk realisasi capaian persentase nagari yang tertata tercapai 70,00 persen dari target sebesar 100,00 persen karena keterbatasan anggaran untuk penataan dan pembangunan kantor nagari. Demikian juga persentase nagari yang telah melakukan kerjasama terealisasi sebesar 70,00 persen dari target 100,00 persen karena belum terbentuknya kerjasama BUMNAG pada 33 nagari dari total 103 nagari yang ada.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana menurut Undang-Undang No 52 Tahun 2009 (tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya pendewasaan usia perkawinan, upaya pengaturan kelahiran, upaya pembinaan ketahanan keluarga, dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, melalui suatu usaha untuk menjarangkan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. Berikut dijelaskan capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021 :

Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,59	2,48	2,46	1,19		RPJMD 2016-2021
Cakupan peserta KB aktif	64,38	66,10	95,97	65,56	65,69	
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	27,52	25,42	23,46	23,64	N/A	
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,59	0,55	4,34	0,79	0,74	RPJMD 2021-2026
Rasio akseptor KB	64,38	66,10	95,07	65,56	65,69	
Total Fertility Rate (TFR)	2,59	2,48	3,13	3,13	2,28	
Rata-rata usia kawin pertama wanita	N/A	N/A	20,00	24,786	25,44	
Persentase Pemakaian alat kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate = CPR)	N/A	N/A	N/A	N/A	65,69	
Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	N/A	N/A	N/A	N/A	6,31	
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui	N/A	N/A	N/A	N/A	74,00	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Kampung KB						
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	
Rata-rata jumlah anak perkeluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	2,50	
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	N/A	N/A	N/A	N/A	15,55	
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	N/A	N/A	N/A	N/A	17,90	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	N/A	N/A	N/A	N/A	23,70	
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	N/A	N/A	N/A	N/A	51,12	
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	N/A	N/A	N/A	N/A	41,36	
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	N/A	N/A	N/A	N/A	40,47	
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	435,00	
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling remaja/Mahasiswa	N/A	N/A	N/A	N/A	337,00	
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	16,50	
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	N/A	N/A	N/A	N/A	9,70	
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	219,40	
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh	N/A	N/A	N/A	N/A	52,08	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan						
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	N/A	N/A	N/A	N/A	25,00	
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	N/A	N/A	N/A	N/A	71,50	
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	63,40	
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	N/A	N/A	N/A	N/A	22,00	
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	N/A	N/A	N/A	N/A	0,78	

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 sebesar 0,74 persen. Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total menunjukkan angka 2,28, artinya setiap perempuan (usia 15-49 tahun) di Kabupaten Padang Pariaman secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia subur. Penghitungan TFR digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Untuk Persentase pemakaian alat kontrasepsi (Contraception

Prevalence Rate /CPR) pada tahun 2021 sebesar 65,59 persen, yang menunjukkan perbandingan antara PUS (Pasangan Usia Subur) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS yang ada. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran dan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.

Di Kabupaten Padang Pariaman tercatat rata-rata usia kawin pertama wanita adalah pada usia 25 tahun. Namun demikian, masih terdapat Angka Kelahiran Remaja Perempuan (usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR) sebesar 6,31 yang menginterpretasikan bahwa dalam 1.000 orang remaja perempuan terdapat 6 (enam) angka kelahiran dalam suatu periode tertentu. Angka ini diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran remaja. Semakin tinggi angka kelahiran remaja maka akan semakin tinggi resiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan kependudukan, pemerintah daerah melalui instansi terkait diwajibkan ikut berperan aktif dalam pembangunan kampung KB, dimana pada tahun 2021 tercatat 74,00 persen perangkat daerah terkait telah ikut berperan aktif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendayagunakan PKB/PLKB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk. Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2021 adalah sebesar 16,50 persen dan tidak mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan sebesar 44,37 persen. Hal ini disebabkan belum semua kecamatan mempunyai tenaga penyuluh KB lapangan karena keterbatasan anggaran.

I. Perhubungan

Urusan perhubungan di Kabupaten Padang Pariaman mulai tahun 2016, pelayanannya hanya ditekankan pada layanan transportasi darat menyangkut layanan angkutan jalan raya. Penyelenggaraan urusan perhubungan ini juga didorong oleh letak Kabupaten Padang Pariaman yang strategis berada pada jalur lalu lintas jalan negara yang dilalui oleh Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), disamping Angkutan Desa dan Angkutan Kota lainnya. Guna mendukung kelancaran angkutan tersebut penyediaan terminal orang dan terminal barang yang layak serta kondisi jalan yang baik yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas yang memadai merupakan suatu keharusan yang mesti disediakan oleh Pemerintah Padang Pariaman. Adapun perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PERHUBUNGAN						
Jumlah arus penumpang angkutan umum	5.178.951,02,00	5.204.846,00	5.803.000,00	5.995.318,00	54.889,00	RPJMD 2021-2026
Rasio ijin trayek	38,00	38,00	48,00	17,00	2,80	
Jumlah uji kir angkutan umum	5.433,00	6.309,00	5.510,00	4.093,00	7.016,00	
Jumlah Terminal Bis	2,00	3,00	2,00	2,00	3,00	
Jumlah Pelabuhan Laut	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	
Jumlah Bandar Udara (Bandara)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Pemasangan Rambu-rambu	445,00	558,00	900,00	975,00	0,00	
Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100%	16,00	16,00	16.70	17,20	40,00	
Kepemilikan KIR angkutan umum	2700,00	2.132,00	2.800,00	3.282,00	34,53	
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) dan berlaku selama 6 bulan	1,00	1,00	1,00	20,00	20,00	
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	70.000,00	
Rasio Konektivitas Kabupaten	1:46	1:47	1:49	1:54	1:54	RPJMD 2021-2026
Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	40,00	45,00	50,00	60,00	88,24	
Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	5,00	6,00	5,00	4,00	5,00	
Persentase layanan angkutan udara	N/A	N/A	N/A	N/A	43,00	
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	2.805,00	2.971,00	3.164,00	3.262,00	5.600,00	
Rasio panjang jalan per	0,3585	0,3585	0,35870	0,35877	0,3589	

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
jumlah kendaraan	38	52	0	0	70	
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	5.696.879	5.179.287	5.803.000	5.995.318,6	10.630,00	
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	2.193.074	4.139.728	3.073.637	1.271.716	1.078.520,00	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum menurun dari 5.995.318 pada tahun 2020 menjadi 54.889 pada tahun 2021. Penurunan ini karena adanya penerapan protokol kesehatan selama terjadinya pandemi covid-19 yang tidak memperbolehkan kegiatan kerumunan atau keramaian dan bepergian ke luar daerah. Jumlah angkutan umum yang melakukan uji keur sebanyak 7.016 pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 sebanyak 4.093. Terminal yang ada di Padang Pariaman adalah sebanyak 3 terminal yaitu Terminal Kasang, Terminal Sicincin, dan Terminal Sungai Limau dan dikategorikan sebagai terminal tipe C.

Disamping perhubungan angkutan jalan raya sebagaimana tersebut di atas, di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2006 sudah ditunjang dengan adanya pelabuhan udara Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dengan persentase layanan angkutan udara pada tahun 2021 sebesar 43,00 persen. Sementara itu jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun nya adalah sebanyak 1.078.520,00 pada tahun 2021.

J. Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, perusahaan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan LSM.

Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Padang Pariaman yang mewadahi pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika terus berupaya mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan dan urusan pemerintahan. Berikut ini dijelaskan capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun 2017-2021 :

Tabel 2.28.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Rasio wartel terhadap penduduk 10000	1,00	1,00	1,00	1,00		RPJMD 2016-2021
Rasio warnet terhadap penduduk 10000	7,00	7,00	7,00	7,00		
Jumlah surat kabar nasional/lokal	0.03	0.03	0.03	0,03		
Jumlah jaringan komunikasi	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	RPJMD 2021-2026
Website milik pemerintah daerah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Indeks E-Government/SPBE	1,20	1,50	1,80	1,90	2,60	
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	
Cakupan Layanan Telekomunikasi	20,00	30,00	40,00	50,00	55,00	
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	50,00	50,00	65,00	75,00	76,00	
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	10,00	15,00	20,00	35,00	36,00	
Jumlah Penyiaran Radio Lokal	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 semua target capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat terpenuhi. Indeks E-Government/SPBE yang ditargetkan sebesar 2,15 dapat terealisasi sebesar 2,60. Demikian juga cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar 41,00 persen. Namun angka ini masih tergolong rendah, sehingga diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat meningkatkan capaian indikator ini pada masa mendatang. Cakupan layanan telekomunikasi yang dapat terjangkau saat ini masih 55,00 persen dengan pengguna sarana telekomunikasi sebesar 76,00 persen dari total jumlah penduduk. Demikian juga proporsi rumah tangga

dengan akses internet tercapai sebesar 36,00 persen. Sementara hingga tahun 2021 terdapat 3 (tiga) jumlah penyiaran radio lokal di Padang Pariaman.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat 10 (sepuluh) indikator yang menjadi ukuran kinerja urusan ini. Berikut dijelaskan capaian indikator kinerja pada urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah pada tabel 2.29 berikut :

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Persentase koperasi aktif	60,65	75,00	40,00	75,51	33,33	RPJMD 2021- 2026
Jumlah UMKM	11.656	13.061	12.936	38.050	47.802	
Jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom	51,00	31,00	31,00	50,00	31,00	
Persentase koperasi sehat	60,65	54,00	40,00	61,45	57,33	
Koperasi mampu melaksanakan RAT tepat waktu	50,00	43,00	86,00	55,00	57,33	
Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	60,65	54,00	40,00	73,33	57,33	
Persentase UMKM	97,92	97,90	97,88	98,01	30,00	
Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0,80	0,95	1,07	1,78	1,80	
Jumlah BPR/LKM	18,00	18,00	10,00	0,00	0,00	
Jumlah BUMNAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase koperasi aktif pada tahun 2021 sebesar 33,33 persen menurun dari tahun 2020 sebesar 75,51 persen. Hal ini disebabkan oleh :

1. Dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan banyaknya tunggakan atau hutang anggota di koperasi dan tidak optimalnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena penerapan protokol kesehatan

yang ketat sehingga tidak diperbolehkan melakukan pengumpulan anggota.

2. Koperasi banyak menggantungkan dana (bantuan) dari luar saja, sehingga kegiatan operasional belum berjalan optimal.

Selanjutnya jumlah UMKM yang ada pada tahun 2021 adalah sebanyak 47.802 orang pelaku usaha. Angka ini melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 11.297 orang pelaku usaha UMKM. Ini didukung oleh adanya Bantuan Presiden Produktivitas Usaha Mikro (BPPUM) melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk pelaku usaha di masa pandemi serta banyaknya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK). Sementara itu jumlah koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom hanya tercatat sebanyak 31 unit koperasi. Jumlah ini tidak sesuai dengan target sebanyak 49 unit koperasi karena masih banyak koperasi yang belum memiliki NPWP. Dalam pengurusan izin simpan pinjam koperasi dibutuhkan beberapa persyaratan wajib salah satunya adalah kepemilikan NPWP. Untuk indikator jumlah BPR/LKM dan jumlah BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari) tidak lagi termasuk dalam capaian kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah karena BPR saat ini tidak berbentuk koperasi lagi karena termasuk dalam lembaga keuangan dan berada dibawah pengawasan OJK. Demikian juga dengan BUMNAG yang tidak lagi dikelola oleh bidang koperasi karena dananya telah dikelola sendiri oleh dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

L. Penanaman Modal

Salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya investasi diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun perkembangan capaian kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PENANAMAN MODAL						
Rasio daya serap tenaga kerja	100,00	70,87	75,28	100,00	120,00	RPJMD 2016- 2021
Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	1.983	1.983	2.577	3.039	3.100	
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	45,00	52,00	73,00	117,00	337,00	RPJMD 2021- 2026
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	183,00	272,50	318,20	1.330,30	997,00	
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi	57,00	51,00	16,80	318,07	333,00	
Lama Proses Perizinan (Rata-rata lama proses perizinan)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Penyusunan Rencana umum Penanaman Modal Daerah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	N/A	N/A	N/A	N/A	1/0	
Indeks Kepuasan Masyarakat perangkat daerah	72,90	77,24	80,70	88,52	83,75	
Jumlah Objek Perizinan dan Non Perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	87,00	91,00	115,00	96,00	103,00	
Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Jumlah Perda yang mendukung iklim investasi	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang melakukan investasi di Padang Pariaman adalah sebanyak 45

investor. Jumlah ini terus meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 337 investor. Adapun beberapa faktor pendukung ketercapaian indikator ini adalah :

1. Sistem perizinan telah dilakukan dengan berbasis elektronik menggunakan aplikasi OSS/OSS-RBA sehingga dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mengakses dan memproses izin secara mandiri/langsung
2. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang sistem pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal/investasi di daerah
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan di lapangan kepada pelaku usaha.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2021 sebesar 997 milyar rupiah menurun dari realisasi capaian tahun 2020 sebesar 1,330 trilyun rupiah. Hal ini disebabkan oleh :

1. Belum efektifnya penggunaan sistem perizinan OSS berbasis RBA, sehingga berdampak pada terkendalanya penyampaian LKPM oleh beberapa pelaku usaha
2. Pelaksanaan koordinasi ke beberapa perusahaan/investor tidak berjalan efektif karena dampak pandemi covid-19
3. Permasalahan kesesuaian tata ruang pada beberapa rencana investasi yang akan dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman

Namun demikian capaian realisasi nilai investasi ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 365,10 milyar rupiah. Beberapa faktor pendukung ketercapaian indikator ini adalah :

1. Terlaksananya kegiatan Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2021 yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik
2. Berjalannya proyek nasional di daerah seperti pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin dan lainnya
3. Peningkatan kegiatan usaha sektor perumahan, industri, dan distribusi Bahan Bakar Minyak

Dalam mewujudkan integritas dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2032 yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan arah penanaman modal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kegiatan ini telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan karena didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah telah terbentuknya SK Tim Tenaga Ahli (dari pihak akademisi) dan Tim Penyusun (dari OPD teknis terkait) dan tersedianya data teknis yang dibutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan pelaksanaan kegiatan promosi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali dan menerbitkan 1 (satu) dokumen promosi investasi. Kegiatan promosi investasi tidak dapat terlaksana karena penerapan protokol kesehatan selama pandemi covid-19 yang tidak memperbolehkan pelaksanaan

kegiatan promosi investasi dilakukan secara langsung/tatap muka sehingga semua agenda promosi investasi yang telah direncanakan sebelumnya harus dibatalkan dan adanya *refocussing* anggaran kegiatan terkait untuk penanganan covid-19 sehingga Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat mengikuti kegiatan promosi investasi pada akhir tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu untuk target 1 (satu) dokumen promosi investasi telah terlaksana sesuai dengan target yakni berupa 1 (satu) dokumen audio visual promosi investasi. Terlaksananya kegiatan ini didukung oleh beberapa hal diantaranya karena telah tersedianya dokumen cetak peluang investasi daerah yang telah disusun sebelumnya dan dukungan dari *stakeholder* terkait dalam memberikan informasi terkait dengan sektor potensi investasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam upaya meningkatkan kemudahan layanan perizinan, pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian telah mengembangkan 1 (satu) aplikasi untuk pengurusan perizinan yang juga didukung oleh aplikasi OSS-RBA dari pemerintah pusat. Dengan adanya aplikasi ini tentunya akan mempersingkat waktu proses pengurusan perizinan. Rata-rata lama proses perizinan pada tahun 2021 adalah 5 (lima) hari kerja dari yang ditargetkan selama 7 (tujuh) hari kerja. Ini juga didukung oleh sistem pelayanan yang cepat dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan SOP perizinan dan non perizinan berdasarkan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pembinaan terhadap urusan pemuda dan olahraga. Capaian urusan kepemudaan dan olahraga secara umum tergambar sebagaimana tabel 2.45 dibawah ini. Jumlah lapangan olahraga pada tahun 2021 adalah sebanyak 246 lapangan. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebanyak 279 lapangan. Ini disebabkan banyaknya lapangan olahraga yang tidak dimanfaatkan lagi oleh masyarakat karena kurangnya dana pemeliharaan lapangan olahraga. Sementara jumlah atlet berprestasi mencapai 367 orang atlet. Ini didukung oleh adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan KONI dalam penganggaran, pembinaan, serta pengadaan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan prestasi olahraga. Disamping itu persentase organisasi pemuda yang aktif hanya sebesar 18,87 persen karena tidak tersedianya anggaran serta fasilitas untuk peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan. Selanjutnya persentase wirausaha muda hanya tercapai sebesar 0,13 persen. Capaian ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena beberapa faktor penghambat yakni kurangnya pengembangan kreatifitas dan inovasi wirausaha muda, kurangnya sosialisasi tentang pengembangan wirausaha muda, dan keterbatasan anggaran pemda untuk pengembangan wirausaha muda.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
Jumlah organisasi pemuda	52,00	52,00	52,00	10,00	10,00	RPJMD 2016-2021
Jumlah organisasi olahraga	41,00	35,00	35,00	36,00	36,00	
Jumlah kegiatan kepemudaan	18,00	22,00	20,00	2,00	2,00	
Jumlah kegiatan olahraga	10,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	108,00	110,00	112,00	112,00	112,00	
Rasio klub olahraga/penduduk	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	
Lapangan olahraga	270,00	279,00	279,00	246,00	246,00	RPJMD 2021-2026
Jumlah atlet berprestasi	350,00	367,00	367,00	367,00	367,00	
Persentase organisasi pemuda yang aktif	18,86	18,86	18,86	18,86	18,87	
Persentase wirausaha muda	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	
Cakupan pembinaan olahraga	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, 2022

N. Statistik

Untuk melihat capaian kinerja urusan statistik dapat dilihat dari pencapaian kinerja pada tabel berikut :

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Statistik
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
STATISTIK						
Buku Kabupaten Dalam Angka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	RPJMD 2021-2026
Buku PDRB Kabupaten	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Capaian kinerja urusan statistik di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan pencapaian 100 persen, dimana setiap tahunnya indikator ini ditargetkan untuk menerbitkan buku Padang Pariaman Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten masing-masing sebanyak 1 buku, dan semua data yang tersedia telah terintegrasi kedalam sistem informasi.

O. Persandian

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	
PERSANDIAN						
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	9,09	15,91	RPJMD 2021-2026

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Realisasi capaian kinerja indikator pada urusan persandian yakni persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah pada tahun 2021 adalah sebesar 15,91 persen.

P. Kebudayaan

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal, pemerintah berkewajiban membuat kebijakan - kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian daerah. Dalam pembangunan bidang kebudayaan, Kabupaten Padang Pariaman memprioritaskan Program pengembangan nilai budaya yaitu Pembinaan, Pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya. Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan melalui memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan lokal dalam acara-acara baik yang berskala kecamatan, kabupaten maupun nasional. Dari tabel 2.34 berikut dapat dilihat perkembangan capaian kinerja urusan kebudayaan dari tahun 2017-2021 :

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
KEBUDAYAAN'						
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Kali)	0,00	4,00	57,00	5,00	5,00	RPJMD 2016- 2021
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3,00	3,00	19,00	4,00	8,00	
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25,00	24,00	25,00	45,00	4,00	
Rasio grup kesenian/10.000 penduduk	0,50	1,20	1,35	1,05	0,71	
Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	RPJMD 2021- 2026
Rasio pengembangan kebudayaan masyarakat pelakunya	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Rasio pengembangan kesenian tradisional masyarakat pelakunya	N/A	N/A	N/A	N/A	10,00	
Rasio pelestarian dan pengelolaan/penetapan Cagar Budaya	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Pada tahun 2021 penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya terselenggara sebanyak 5 (lima) kali. Capaian ini menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang terselenggara sebanyak 57 kali festival seni dan budaya. Ini merupakan salah satu dampak pandemi covid-19 yang melarang segala bentuk kerumunan termasuk penyelenggaraan festival seni dan budaya. Selanjutnya jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

pada tahun 2021 meningkat menjadi 8 unit jika dibandingkan dengan 2020 hanya sebanyak 4 unit. Namun peningkatan jumlah sarana dan prasana ini belum sebanyak capaian pada tahun 2019 yakni sebanyak 19 unit. Ini karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk penanganan covid-19 yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir. Demikian juga halnya dengan jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan hanya dapat direalisasikan sebanyak 4 situs cagar budaya dari yang ditargetkan sebanyak 25 situs cagar budaya yang ada.

Q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis dan mengelolanya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh pemakainya. Namun, saat ini pengertian tradisional dan paradigma lama mulai tergeser seiring perkembangan berbagai jenis perpustakaan, variasi koleksi dalam berbagai format memungkinkan perpustakaan secara fisik tidak lagi berupa gedung penyimpanan koleksi buku. Banyak kalangan terfokus untuk memandang perpustakaan sebagai sistem, tidak lagi menggunakan pendekatan fisik. Sebagai sebuah sistem perpustakaan terdiri dari beberapa unit kerja atau bagian yang terintegrasikan melalui sistem yang dipakai untuk pengolahan, penyusunan dan pelayanan koleksi yang mendukung berjalannya fungsi-fungsi perpustakaan. Adapun perkembangan urusan perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PERPUSTAKAAN						
Jumlah perpustakaan	1 Pustaka daerah, 103 pustaka nagari, 5 Perpustakaan TBM, 7 Perpustakaan Pesantren, 6 Perpustakaan	65 (1 Perpustakaan Daerah; 54 Perpustakaan Nagari; 10 TBM)	85 (1 perpustakaan daerah; 64 perpustakaan nagari; 10 TBM, 10 perpustakaan sekolah)	85 (1 perpustakaan daerah; 74 perpustakaan nagari; 10 TBM)	117 (1 pustaka daerah; 99 pustaka sekolah; dan 17 pustaka nagari)	RPJMD 2021-2026

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	kaan mesjid, 20 Perpustakaan Sekolah					
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	1,70	3,00	4,00	5,00	10,38	
Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	15,60	24,17	42,86	53,00	0,54	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	1,84	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	76,85	80,00	82,50	90,17	91,93	
Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	1,60	
Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	10,38	
Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	N/A	N/A	N/A	0,04	0,58	
Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	0,34	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Perpustakaan						
Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/ terdaftar	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	
Rasio perpustakaan per satuan penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	0,27	
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	5.217,00	9.206,00	12.275,00	15.344,00	51.320,00	
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5.490,00	5.500,00	5.547,00	5.809,00	6.784,00	
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada terjadi peningkatan jumlah perpustakaan setiap tahunnya di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2020 hanya terdapat 85 perpustakaan meningkat menjadi 117 perpustakaan pada tahun 2021 yang terdiri dari 1 perpustakaan daerah, 99 perpustakaan sekolah, dan 17 perpustakaan nagari. Ini berdampak terhadap persentase pengunjung perpustakaan per tahun yang meningkat. Jumlah pengunjung yang dihitung merupakan akumulasi dari pengunjung secara online maupun offline. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan hanya 5,00 persen dari total seluruh penduduk meningkat menjadi 10,38 persen pada tahun 2021 atau rata-rata sebanyak 51.320 orang pengunjung.

Pada RPJMD Tahun 2021-2026, beberapa indikator baru pada urusan perpustakaan telah ditetapkan, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang merupakan suatu instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk

mencapai budaya literasi masyarakat, dimana pada tahun 2021 capaian indikator ini adalah sebesar 1,84. Ini disebabkan oleh perpustakaan nagari yang belum terakreditasi, dan belum adanya tenaga pustakawan di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam perhitungan nilai capaian indikator ini menggunakan gabungan dari nilai rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk, persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui aplikasi INLISLite capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan di Padang Pariaman sebesar 91,93. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat sebesar 10,38 persen melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,40 persen. Dalam perhitungan capaian ini menggunakan beberapa indikator diantaranya jumlah kunjungan seluruh perpustakaan daerah, perpustakaan nagari, dan perpustakaan keliling dengan mengabaikan jumlah kunjungan pustaka sekolah. Sedangkan rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk adalah sebesar 0,58. Ini mengindikasikan bahwa kebutuhan tenaga pustakawan di Padang Pariaman belum tercukupi, maka untuk memenuhi kebutuhan ini setiap pengelolaan pustaka diharuskan dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pustakawan yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah.

R. Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan dipastikan dapat menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Mengingat arti pentingnya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan. Hal ini terbukti dengan diperlukannya beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang kearsipan. Adapun perkembangan Urusan Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada table 2.36.berikut ini :

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
KEARSIPAN						
Persentase Pengelolaan arsip secara	2,72	4,76	6,8	8,84	N/A	RPJMD 2016-2021

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
baku						RPJMD 2021- 2026
Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	8,00	20,00	30,00	40,00		
Indeks Kearsipan Eksternal	33,49	37,63	68,07	73,48	(B)	
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	2,72	4,76	6,80	8,84	4,00	
Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	6,00	
Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	20,00	25,00	30,55	55,55	46,37	
Persentase Peningkatan Arsip Daerah yang dialih mediakan	N/A	25,00	33,55	38,05	33,22	
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2022

Dari tabel capaian diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 Indeks Kearsipan Eksternal mendapatkan perolehan nilai B. Secara keseluruhan Kabupaten Padang pariaman memperoleh predikat ke 2 untuk tingkat Sumatera Barat dan predikat ke 43 untuk tingkat nasional. Penilaian capaian kinerja indikator ini cukup berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dasar penilaian hanya terfokus pada lembaga kearsipan daerah (LKD) saja sedangkan

tahun 2021 penilaian dilakukan pada LKD dan perangkat daerah. Capaian indikator persentase perangkat daerah yang memiliki laporan audit kearsipan internal yang baik hanya tercapai sebesar 4,00 persen. Artinya dari 27 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman hanya 1 yang mencapai nilai BAIK yaitu Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sedangkan 26 perangkat daerah lainnya hanya memperoleh nilai CUKUP.

Realisasi capaian indikator persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan sebesar 6,00 persen. Sedangkan persentase peningkatan arsip statis yang terselamatkan sebesar 46,37 persen melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 45,00 persen. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan aksi jemput arsip ke OPD oleh tim Lembaga Kearsipan Daerah. Selain itu persentase peningkatan arsip daerah yang di alih mediakan mencapai 33,22 persen dari target sebesar 33,00 persen, karena didukung oleh peningkatan jumlah tenaga kearsipan pada tahun 2021.

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mempunyai peran cukup penting dalam pembangunan ekonomi. Pariwisata terkait dengan hampir semua sub sektor ekonomi seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri. Pengembangan industri pariwisata mempunyai pengaruh yang kuat dalam pengembangan wilayah pada daerah di sekitar objek wisata. Besarnya potensi destinasi wisata di Kabupaten Padang Pariaman, apabila dikelola dengan baik akan dapat menjadi sektor yang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini dimungkinkan karena sektor pariwisata dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Sehingga Pengelolaan pariwisata secara baik dan professional dapat meningkatkan pendapatan asli masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus memberikan perhatian terutama pada pariwisata alternatif, seperti pariwisata khusus dan pariwisata yang berbasis komunitas seperti *adventure travel*, *cultural travel* dan *ecotourism*. Pengembangan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan adanya peningkatan promosi wisata juga faktor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Adapun capaian indikator kinerja urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut :

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PARIWISATA						
Nilai PDRB sektor Pariwisata	7.012.354,04	7.012.354,04	7.095.497,65	7.095.497,65	2.712.556,03	RPJMD 2016-2021
Jumlah Kunjungan Wisata	156.445,00	183.600,00	396.790,00	208.872,00	152.207,00	RPJMD 2021-2026
Jumlah Destinasi Wisata sesuai Standar	2,00	2,00	3,00	4,00	4,00	
Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	N/A	N/A	N/A	41,00	72,00	
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	4,00	32,00	32,00	36,00	36,00	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2022

Capaian urusan pilihan Pariwisata pada tahun 2017-2021 menunjukkan kenaikan dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Padang Pariaman yang disebabkan oleh Pandemi covid -19 yang masih terjadi hingga 2 (dua) tahun terakhir. Ini berdampak pada penutupan sementara setiap daerah tujuan wisata, pembatasan jumlah kunjungan wisata, pemberlakuan syarat dan ketentuan khusus seperti vaksin bagi setiap pengunjung sehingga menyebabkan menurunnya minat wisatawan untuk melakukan kunjungan ke setiap destinasi wisata yang ada. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisata adalah sebesar 156.445 wisatawan meningkat hingga 396.790 wisatawan pada tahun 2019, namun menurun pada tahun 2020 menjadi 208.872 wisatawan hingga pada tahun 2021 hanya sebanyak 152.207 kunjungan wisatawan. Sementara itu, jumlah pelaku pariwisata yang tersertifikasi adalah sebanyak 72,00 orang pada tahun 2021. Ini didukung oleh adanya dana DAK Non Fisik melalui kegiatan pelatihan selam yang merupakan lanjutan dari pelatihan selam tahun sebelumnya.

B. Pertanian

Urusan Sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Sektor pertanian bukan merupakan komoditi utama pembentuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman, kontribusi sektor pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Ini terlihat dari capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017 sebesar 9,74 persen meningkat menjadi 11,07 persen pada tahun 2018 hingga 14,13 persen pada tahun 2021 dengan nilai

sebesar 2.608.426,60 juta rupiah. Sementara itu untuk capaian produktivitas pangan utama (padi) pada tahun 2021 menunjukkan tren yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2020 capaian indikator ini adalah sebesar 5,15 ton/ha menurun pada tahun 2021 hingga 4,54 ton/ha atau sebesar 252.723,26 ton.

Adapun capaian indikator kinerja urusan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2017-2021 dapat dijelaskan pada tabel 2.38 berikut :

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PERTANIAN						
Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	3,20			3,54		RPJMD 2016- 2021
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita			N/A	48,19		
Tumbuhnya kelembagaan ekonomi petani			N/A	70,00		
Produktivitas pangan utama (padi) per hektar	5,26	4,51	4,75	4,77	4,56	RPJMD 2021- 2026
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	9,74	11,07	11,07	11,07	14,13	
Distribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	13,67	12,84	12,72	14,88	14,13	
Regulasi ketahanan pangan	1,00	1 (Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 27 Tahun	0,00	0,00	0,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman				
Ketersediaan pangan utama (kg/1000 pddk)	695.430,89	656.413,95	709.848,01	708.310,82	N/A	
Jumlah produksi beras (Kg)	174.550,00	152.562,14	159.334,11	150.134,40	137.262,70	
Nilai PDRB sektor pertanian (Rp. Jutaan)	2.624.586,70	3.812.952,29	4.082.657,32	2.736.277,17	2.608.426,60	
Produksi tanaman pangan (padi) per tahun	321.376,00	280.892,00	293.360,31	283.127,00	252.723,36	
Cakupan bina kelompok petani	N/A	N/A	N/A	N/A	46,77	
Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	190.297,60	199.738,38	199.654,40	232.175,46	236.818,50	
Jumlah Populasi ternak besar (sapi, kerbau)	52.496	55.528	56.588	58.582	55.759	
Jumlah Populasi ternak kecil (kambing)	32.479	33.840	34.090	35.005	36.608	
Jumlah populasi ternak unggas (ayam, itik, puyuh)	9.639.196	9.041.301	9.361.982	9.361.982	15.861.757,00	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah produksi hasil ternak					18.667.624,00	
Jumlah produksi telur	16.741.966	17.058.354	18.989.389	21.939.874	29.596.599,00	
Jumlah produksi susu	N/A	N/A	N/A		52.620,00	
Persentase peningkatan fasilitasi sarana peternakan	N/A	N/A	N/A	2,05	0,00	
Persentase peningkatan fasilitasi prasarana peternakan	N/A	N/A	N/A	6,00	41,00	
Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	N/A	N/A	N/A	25,00	190,00	
Jumlah pelayanan kesehatan hewan	N/A	N/A	N/A	350,00	1.050,00	
Jumlah ternak/hewan yang di vaksin	N/A	N/A	N/A	300,00	548,00	
Jumlah penurunan kejadian penyakit jembrana, SE, AI, Rabies	N/A	N/A	N/A	300,00	297,00	
Pendapatan peternak (Rp. Ribu)	N/A	N/A	N/A	6,15	6,27	
Persentase pelayanan perizinan bidang peternakan	N/A	N/A	N/A	100,00	0,00	
Persentase peningkatan kelas kelompok	N/A	N/A	N/A	0,30	1,47	

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
tani Peternak						

Sumber : Distan KP dan Disnakkeswan, 2022

Realisasi capaian pada indikator kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 adalah sebesar 236.818,50 juta rupiah, dengan capaian jumlah populasi ternak besar (sapi, kerbau) sebanyak 55.759 ekor, jumlah populasi ternak kecil (kambing) sebanyak 36.608 ekor dan jumlah populasi ternak unggas (ayam, itik, puyuh) sebanyak 15.861.757 ekor unggas. Seluruh populasi ini menghasilkan 18.667.624 ton daging per tahunnya, produksi telur sebanyak 29.596.599 ton dan produksi susu sebanyak 52.620 liter. Sementara persentase peningkatan fasilitas prasarana peternakan tercapai sebesar 41,00 persen dari target sebesar 12,00 persen. Namun demikian, capaian ini masih tergolong rendah mengingat belum adanya pembangunan Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman.

C. Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Sektor perdagangan di Kabupaten Padang Pariaman lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung dan eceran tradisional dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil usaha kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik dengan didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestik. Berikut dijelaskan perkembangan capaian kinerja urusan perdagangan pada tabel 2.39 berikut :

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PERDAGANGAN						
Rata-rata ratio koefisien variasi harga komoditi tertentu	5,71	5,54	5,54	5,54	5,54	RPJM D 2016-2021
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,45	8,45	8,50	8,55	10,65	RPJM D 2021-2026
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	67,05	60,00	60,00	67,25	67,25	
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	N/A	N/A	N/A	35,37	45,00	
Jumlah pasar yang kondusif	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00	
Jumlah pasar yang diawasi	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00	
Jumlah Pengusaha ekspor yang tumbuh	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Pasar tertib ukur	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
Terwujudnya pasar BANA	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00	
Ekspor Perdagangan bersih (Rp Juta)	19.609.096	18.664.569	N/A	19.229.279	3.245.685,33	

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

Dari tabel diatas terlihat bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2021 sebesar 10,65 persen. Capaian ini meningkat sebesar 2,01 persen dimana pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 8,55 persen. Selanjutnya cakupan bina kelompok pedagang/uairsaha informal telah terlaksana sebesar 67,25 persen dari total seluruh kelompok pedagang. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kendala diantaranya adalah sulitnya mendapatkan pedagang dengan jenis usaha yang tetap, disebabkan banyak pedagang dan pelaku usaha kecil menengah yang melakukan alih usaha dan bahkan gulung tikar karena daya beli masyarakat yang rendah selama pandemi covid-19.

Sementara itu persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) tercapai sebesar 45,00 persen. Hasil capaian ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 60,00 persen karena beberapa pelaku usaha yang mengajukan izin usaha perdagangan tidak memenuhi persyaratan sehingga izin usaha tidak bisa diterbitkan. Selanjutnya indikator yang diukur adalah jumlah pasar yang kondusif, yang didefinisikan sebagai pasar yang sesuai dengan standar SNI pasar rakyat. Pasar rakyat yang sesuai standar SNI memuat sejumlah kriteria atau persyaratan yaitu diantaranya terkait dengan lokasi pasar, kebersihan dan kesehatan, keamanan dan kenyamanan, spesifikasi bangunan fisik pasar, dan manajemen pengelolaan pasar. Penetapan standar SNI ini bertujuan sebagai pedoman dalam mengelola dan membangun pasar rakyat, serta memberdayakan komunitas pasar rakyat sehingga diharapkan produk yang beredar di dalam pasar sesuai dengan ketentuan yang pada akhirnya dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Disamping itu pasar rakyat yang dikelola secara lebih profesional diharapkan dapat menjadi sarana perdagangan yang kompetitif terhadap pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, plasa, maupun pusat perdagangan lainnya. Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) pasar yang memenuhi standar SNI di Kabupaten Padang Pariaman yakni Pasar Batu yang berada di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

D. Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan industri kecil menengah yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing berbasiskan agroindustri diukur dengan beberapa indikator kinerja berikut :

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Tahun 2021-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PERINDUSTRIAN						
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	10,2	9,63	9,34	11,9	2,51	RPJMD 2021- 2026
Pertumbuhan Industri	0,1	3,9	1,1	1,92	1,92	
Pengembangan sentra-sentra industri potensial	N/A	N/A	N/A	N/A	0,70	
Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah yang bersertifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	Sertifikasi	
Tersedianya data dan informasi tentang industri kecil dan menengah	N/A	N/A	N/A	N/A	0,70	
Cakupan bina kelompok pengrajin	N/A	N/A	N/A	N/A	155,00	

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Perindustrian, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2021 sebesar 2,51 mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yakni sebesar 11,90 persen. Penurunan ini tentunya juga berdampak terhadap pertumbuhan sektor industri. Pada tahun 2021 pertumbuhan industri sebesar 1,92 persen dan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 2,40 persen. Ini terjadi akibat adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan sebagian besar pelaku usaha IKM tidak dapat melakukan kegiatan produksi. Dalam upaya melakukan pengembangan sentra sentra industri potensial, pemerintah daerah telah menargetkan pembangunan 1 (sentra) potensial yakni sentra IKM coklat. Pada tahun 2021 proses pembangunan telah dilaksanakan dengan bobot fisik sebesar 70,00 persen.

Selanjutnya indikator yang diukur adalah peningkatan jumlah industri kecil dan menengah yang bersertifikasi. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 82 IKM yang telah bersertifikat. Sedangkan untuk ketersediaan data dan informasi tentang industri kecil dan menengah berupa Dokumen Ranperda mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Padang Pariaman masih dalam proses harmonisasi dengan pihak Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat atau telah terealisasi sebesar 70,00 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen.

E. Perikanan

Urusan Perikanan merupakan salah satu sektor yang ikut menjadi penggerak perekonomian yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pembangunan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi peikanan, dan peningkatan pendapatan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya melalui peningkatan teknologi dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan serta meningkatkan usaha penanganan dan pengolahan ikan sehingga mutu terjamin dan nilai tambah produk perikanan meningkat, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Adapun perkembangan capaian kinerja urusan perikanan dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.41 berikut :

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Perikanan
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PERIKANAN						
Produksi Perikanan tangkap	25.472,20	23.080,10	22.298,90	26.339,05	18.112,50	RPJMD 2021- 2026
Produksi perikanan budidaya	57.239,70	58.211,18	54.079,33	62.911,63	53.112,74	
Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	32,78	36,06	40,60	35,00	43,85	
Produksi ikan olahan	206,78	213,87	220,29	204,98	178,01	
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,198	5,346	5,978	7,199	7,974	
Produksi benih ikan (ekor/tahun)	904.480.720	922.560.000	847.385.934	687.828.935	694.692.000	
Persentase lubang larangan yang diawasi	30,00	33,33	33,33	33,33	33,33	
Cakupan pembinaan pokmaswas (%)	32,5	37,5	36,5	24,3	19,51	
Cakupan bina kelompok nelayan	40,00	38,46	44,64	42,37	42,19	
Produksi perikanan kelompok nelayan	15.79215,76	16.724,23	15.163,25	12.487,44	13.402,50	
Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan	84,80	39,08	39,29	15,78	25,48	
Jumlah unit pengolah ikan	212	215	218	218	193,00	

Sumber : Dinas Perikanan, 2022

Dari tabel diatas terlihat kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 adalah sebesar

7,97 persen. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan yakni 7,35 persen, hal ini didukung oleh produksi benih ikan yang meningkat secara signifikan dan melebihi target yaitu sebanyak 694.692.000 ekor benih ikan. Namun demikian jumlah produksi ikan baik perikanan tangkap maupun budidaya mengalami penurunan yang cukup signifikan diantaranya produksi perikanan tangkap sebesar 18.112,50 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 53.112,74 ton per tahunnya dari yang sebelumnya pada tahun 2020 jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 26.339,05 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 62.911,63 ton. Diantara beberapa faktor penyebabnya adalah :

1. Pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap iklim usaha sektor perikanan budidaya sehingga menurunkan tingkat produksi akibat terjadinya kenaikan harga pakan yang cukup signifikan
2. Perubahan iklim atau cuaca ekstrim
3. Biaya operasional melaut yang cukup tinggi
4. Sarana dan prasarana nelayan untuk melaut yang masih kurang memadai

Selanjutnya realisasi capaian pada indikator persentase lubuk larangan yang diawasi sebesar 33,33 persen. Ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yakni sebesar 60,00 persen karena belum maksimalnya pengawasan lubuk larangan pada saat panen, rendahnya kesadaran kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) untuk melaporkan hasil panen ke Dinas Perikanan, sehingga hanya 30,00 persen pokmaswas yang melaporkan hasil panen lubuk larangan tersebut. Hal ini juga disebabkan kurangnya pembinaan yang dilakukan terhadap pokmaswas perikanan. Pada tahun 2021 cakupan pembinaan pokmaswas hanya terealisasi sebesar 19,51 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Ini terjadi karena kurangnya anggaran untuk pendampingan dan pembinaan pokmaswas, rendahnya tingkat partisipasi lembaga nagari, adat, dan tokoh masyarakat lainnya dalam pengawasan lubuk larangan, minimnya sarana dan prasarana unit perairan umum, dan belum lengkapnya SDM pokmaswas di tingkat nagari.

Konsumsi ikan yang ditargetkan sebesar 43,95 kg/kapita/tahun pada tahun 2021 hanya tercapai sebesar 43,85 kg/kapita/tahun. Beberapa faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja ini adalah :

1. Turunnya *supply* ikan yang mengakibatkan harga ikan meningkat sehingga masyarakat beralih ke sumber protein lain yang harganya lebih murah
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan, karena kurangnya sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan

Sementara itu untuk produksi ikan olahan pada tahun 2021 tercapai sebesar 178,01 ton dari target yang ditetapkan sebesar 179,82 ton per tahun. Beberapa faktor penyebabnya adalah rendahnya kemampuan permodalan pelaku usaha pengolah hasil perikanan selama masa pandemi covid-19 yang berakibat menurunnya volume produksi olahan hasil perikanan dan sulitnya

memasarkan produk olahan hasil perikanan karena daya beli masyarakat yang menurun. Sedangkan untuk realisasi capaian kinerja pada indikator cakupan bina kelompok nelayan sebesar 42,19 persen dari target sebesar 24,59 persen. Pembinaan ini dilakukan terhadap kelompok nelayan yang berada pada daerah kawasan pesisir pantai berupa pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana penangkapan ikan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, dan DAK serta DAU. Kegiatan ini sangat bermanfaat terutama dalam upaya peningkatan produksi perikanan kelompok nelayan. Pada tahun 2021 jumlah produksi perikanan kelompok nelayan mencapai 13.402,50 ton dari target yang ditetapkan sebesar 12.909,33 ton.

2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan merupakan embrio dari semua pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perencanaan adalah basis dalam mencapai suatu tujuan karena perencanaan merupakan arahan dan pedoman kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Rencana pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan yang memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal yang dalam pelaksanaannya menggunakan 5 pendekatan yaitu : teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dimana prioritas pembangunan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu memperkuat sistem perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam semua bidang pemerintahan dengan mewujudkan sistem perencanaan yang berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang lebih mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Mekanisme penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan penyelenggara pemerintahan terbawah sampai pada tingkatan kabupaten merupakan proses penggalian gagasan atau ide dari seluruh komponen masyarakat dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam mewujudkan *Good Governance*.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Nomor 2 Tahun 2010 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan RPJMD Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 yang merupakan periode terakhir dari RPJPD. Sementara itu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional, yang ditetapkan setiap tahunnya melalui Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam hal ini ukuran capaian kinerja perencanaan pembangunan pada suatu daerah dapat dilihat dari ketersediaan dokumen Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan pada daerah tersebut, baik dokumen perencanaan bersifat jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Adapun dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.42 berikut ini :

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1,00	1,00	1,00	Ada	Ada	RPJMD 2021-2026
Tersedianya Dokumen	1,00	2,00	2,00	Ada	Ada	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA						
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	1,00	1,00	1,00	Ada	Ada	
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	98,60	100,00	100,00	93,00	0,00	
Persentase Peningkatan kualitas musrenbang	80,00	85,00	93,00	93,00	0,00	
Kesesuaian program kerja RKPD dengan RPJMD	92,00	95,00	93,00	93,00	0,00	
Indeks kualitas perencanaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	
Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	92,00	96,63	95,07	97,62	97,96	

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022

Pada urusan Perencanaan Pembangunan rata-rata pencapaian kinerja tetap stabil sesuai indikator yang diukur. Dalam RPJMD 2021-2026 terdapat 2 (dua) indikator baru pada urusan ini yakni Indeks kualitas perencanaan dengan capaian sebesar 100,00 persen dan persentase sinergitas, konsistensi, dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan mencapai 97,96 persen. Ini menunjukkan adanya keterkaitan antar dokumen perencanaan, dimana dalam penyusunan RKPD sudah mengacu pada RPJMD.

B. Keuangan

Capaian Kinerja Urusan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Keuangan
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
KEUANGAN						
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	RPJM D 2021-2026
Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Jumlah perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun	3,00	3,00	2,00	2,00	8,00	
Rasio belanja modal terhadap APBD	25,95	20,60	18,88	30,20	10,34	
Persentase kenaikan pajak dan retribusi daerah	36,84	-16,00	15,01	10,01	5,71	
Rasio PAD terhadap penerimaan APBD	10,18	8,12	6,04	9,72	8,57	
Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD	9,99	7,94	6,95	9,87	8,81	
Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	20/11/2017	20/11/2018	20/11/2019	20/11/2020	30/11/2021	
Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Kualitas Laporan Keuangan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Peningkatan PAD	93,95	-40,20	20,24	4,21	10,40	
Persentase Pencapaian Target PAD	89,36	78,24	101,35	94,39	95,18	
Persentase Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat	87,03	87,51	92,06	84,47	84,09	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2022

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* dari BPK untuk LKPD Tahun 2021. Capaian ini didukung oleh perencanaan anggaran yang tepat waktu dan pengelolaan kas daerah yang akurat karena telah sesuai dengan juknis yang ditetapkan dalam peraturan penetapan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) Perda yaitu Perda tentang APBD 2022, Perda tentang Perubahan APBD 2021 dan penambahan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 yang terdapat pada bidang Akuntansi. Demikian juga dengan Perbup tentang APBD Tahun 2022 yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 8 (delapan) Perbup. Sementara itu dilihat dari realisasi rasio belanja modal terhadap APBD pada tahun 2021 sebesar 10,34 persen. Ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 20,50 persen karena sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk penanganan covid-19.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 sebesar 67,00 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 78,00 atau termasuk dalam kategori Rendah. Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019, Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target pada indikator ini antara lain : tingkat profesionalisme aparatur yang rendah; pelaksanaan tata kelola organisasi pemerintahan yang belum akuntabel, minimnya jumlah jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang spesifik; penataan ASN belum dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah; kompetensi ASN yang masih rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan instansinya; serta *database* dan sistem informasi ASN belum mutakhir dan tidak terintegrasi.

Dilihat dari capaian persentase peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek sebesar 83,00 persen pada tahun 2021, juga belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 93,00 persen. Demikian juga peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN hanya mencapai 69,00 persen dari penetapan target sebesar 73,00 persen. Hasil capaian kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel 2.44 berikut :

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
KEPEGAWAIAN SERTA PERNDIDIKAN DAN						

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PELATIHAN						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	67,00	RPJMD 2021- 2026
Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	N/A	N/A	N/A	N/A	83,00	
Persentase peningkatan terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	N/A	N/A	N/A	N/A	82,00	
Persentase peningkatan dokumen ASN yang terarsipkan	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	
Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN (Kepegawaian)	N/A	N/A	N/A	N/A	69,00	
Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN (Diklat)	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	
Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial	28,18	37,33	44,03	N/A	45,15	
Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis	N/A	N/A	N/A	N/A	49,00	
Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3	N/A	N/A	N/A	N/A	77,65	
Tingkat penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai	70,45	80,00	50,00	100,00	90,00	
Persentase tingkat kehadiran ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00	
Persentase prestasi ASN berdasarkan masa kerja	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00	
Persentase penerbitan SK tepat waktu	88,26	115,13	108,32	85,60	77,00	
Persentase pengisian jabatan sesuai formasi dan kompetensi	96,08	91,27	97,61	92,35	94,12	
Persentase record data kepegawaian yang akurat	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	
Indeks kepuasan pelayanan administrasi	70,61	76,69	78,90	77,24	85,00	

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
kepegawaian						

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

D. Penelitian dan Pengembangan

Urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah pada Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian kelitbangan tersebut diharapkan bermanfaat dalam perumusan kebijakan, program/kegiatan pembangunan daerah agar kebijakan lebih tepat sasaran. Realisasi capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut :

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	60,00	75,00	89,00	90,00	60,00	RPJMD 2021- 2026
Jumlah Kerjasama Penelitian	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	0,00	31,82	40,91	27,27	55,56	
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	98,51	

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 hasil kajian kelitbangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan sebesar 60,00 persen, yang terdiri dari 2 (dua) hasil kajian yakni terkait pengembangan pendidikan dan sektor pariwisata di Padang Pariaman, melalui kerjasama penelitian dengan 2 (dua) lembaga pendidikan tinggi di Sumatera Barat yakni

Universitas Andalas dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Dharma Bakti (STKIP YDB) Lubuk Alung. Sementara itu, Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah tercapai sebesar 55,56 persen dengan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah sebesar 98,51 persen.

E. Pengawasan

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel 2.46 berikut :

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan
Tahun 2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
PENGAWASAN						
Nilai SAKIP pemerintah daerah hasil evaluasi kementerian RB	B	B	B	B	B	RPJMD 2021-2026
Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 2+	Level 2+	Level 2+	Level 2	
Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
Persentase pengawasan yang dilakukan	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	
Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilakukan	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	50,00	50,09	62,97	94,50	80,00	
Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	14,00	
Jumlah OPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja	12,00	26,00	26,00	24,00	40,00	

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
sesuai nilai akuntabilitas kinerja Pemda						
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	93,98	96,19	96,21	93,00	70,00	
Jumlah OPD yang memperoleh level maturitas sesuai level maturitas Pemda	10,00	7,00	12,00	12,00	24,00	

Sumber : Inspektorat Daerah, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB memperoleh nilai B. Sementara itu tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tahun 2021 masih berada pada level 2. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurang maksimalnya pencegahan terhadap kasus terkait pembebasan taman kehati untuk jalan tol. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten padang pariaman pada tahun 2021 adalah B, dimana OPD yang juga memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan nilai akuntabilitas Pemda adalah sebanyak 40 OPD.

F. Sekretariat Dewan

Capaian kinerja sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel 2.47 berikut :

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD
Tahun 2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
SEKRETARIAT DPRD						
Jumlah produk peraturan daerah yang dihasilkan	10,00	10,00	8,00	11,00	6,00	
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	Ada	RPJMD 2021-2026
Tersusun dan terintegrasinya	N/A	N/A	N/A	N/A	Ada	

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)						
Keputusan DPRD yang ditindaklanuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persetujuan DPRD terhadap ranperda APBD dan APBD perubahan yang dilakukan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	72,00	77,00	80,00	80,00	100,00	
Cakupan kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	81,00	83,00	85,00	85,00	93,38	

Sumber : Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel diatas dilihat bahwa pada tahun 2021 semua program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) telah terlaksana dan terintegrasi melalui upaya koordinasi berupa Rapat Kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bersama mitra kerja mengenai evaluasi anggaran tahun lalu dan tahun berjalan. Sementara indikator terkait keputusan DPRD yang ditindaklanjuti, persetujuan DPRD terhadap ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu, serta capaian aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD mencapai 100,00 persen, karena semua keputusan yang ditetapkan DPRD baik internal dan eksternal telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dan pelaksanaan reses pada 1 (satu) tahun dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali masa sidang.

G. Sekretariat Daerah

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Tahun 2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
SEKRETARIAT DAERAH						
Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	3,1217	3,0475	3,127	2,990	3,0562	RPJMD 2021- 2026
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	N/A	N/A	N/A	N/A	26,00	
PDRB/Income Per Kapita ADHB	46,32	49,45	51,14	41,65	42,62	
Indeks Pelayanan Publik	C	C	B	B	A	
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	B	B	B	B	B	
Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	N/A	N/A	N/A	N/A	1.281,00	
Indeks reformasi birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	54,32	
Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	N/A	N/A	N/A	N/A	75,31	
Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	N/A	N/A	N/A	N/A	8,52	
Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	95,00	
Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	
Persentase efisiensi belanja barang dan jasa	N/A	N/A	N/A	N/A	1,62	

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
melalui E-Procurement terhadap APBD						
Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	95,00	
Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	79,00	
Persentase Laporan Realisasi kegiatan Perangkat Daerah yang tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00	
Persentase peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	
Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	
Persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	
Persentase kerjasama informasi dengan mass media	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	

Sumber : Sekretariat Daerah, 2022

Capaian kinerja Sekretariat Daerah pada indikator Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah pada tahun 2021 sebesar 26,00 persen dengan Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa sebanyak 1.281 orang. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai A, ini di dukung oleh banyaknya inovasi-inovasi yang dihasilkan terkait dengan pelayanan publik sehingga sangat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan, diantaranya terkait layanan jasa pendidikan, pemeliharaan kesehatan, kependudukan, penyelenggaraan transportasi dan lainnya. Selanjutnya pada indikator persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolan telah mencapai 80,00 persen sesuai dengan target yang ditetapkan, demikian juga dengan kerjasama informasi dengan media massa telah mencapai target sebesar 80,00 persen.

H. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum diletakkan dalam suatu arah kebijakan dan prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik dan hukum. Pembangunan Unsur Pemerintahan Umum ditujukan untuk memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat. Adapun Capaian kinerja unsur pemerintahan umum dapat dilihat pada tabel 2.49 berikut :

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum
Tahun 2021

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	RPJMD 2021-2026
Persentase laporan pertanggungjawaban partai politik tepat waktu	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Persentase ormas / kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	93,00	96,00	98,00	100,00	100,00	
Persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	
Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	90,00	92,00	94,00	95,00	100,00	

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik , 2022

Secara umum capaian indikator kinerja unsur pemerintahan umum telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana semua potensi gangguan keamanan telah dapat diredam 100,00 persen. Sementara itu laporan pertanggungjawaban partai politik yang tepat waktu telah mencapai 90,00 persen meskipun belum sesuai target 100,00 persen.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dihitung menggunakan komponen pengeluaran rata-rata per kapita yakni biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu tahun tertentu. Di Kabupaten Padang Pariaman komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Artinya sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman maupun produk (impor) yang berasal dari luar wilayah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga. Total konsumsi rumah tangga dan rata-rata konsumsi per kapita di Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.50 berikut :

Tabel 2.50
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Total Konsumsi Rumah Tangga (Juta Rp)					
ADHB (Juta Rp)	9.083.251, 71	9.815.945, 68	10.869.391, 64	10.692.026, 71	11.110.265, 92
ADHK 2010 (Juta Rp)	6.502.421, 77	6.867.518, 06	7.175.326,3 6	7.067.745,1 2	7.197.143,2 2
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	47,71	48,03	51,14	59,62	60,20
Rata-rata Konsumsi per Kapita (Ribuan Rp)					
ADHB (Juta Rp)	22,10	23,75	26,15	24,83	25,36
ADHK 2010 (Juta Rp)	15,82	16,62	17,26	16,41	16,43
Pertumbuhan konsumsi RT per Kapita (% ADHK)	4,42	5,05	3,85	-4,92	0,12
Jumlah Penduduk	411.003	413.272	415.613	430.626	438.022

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode 2017-2021 proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 47,71 persen meningkat hingga 60,20 persen pada tahun 2021. Namun secara rata-rata konsumsi per kapita cukup berfluktuasi baik menurut Atas Dasar

Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Pada tahun 2019 rata-rata konsumsi per kapita di Kabupaten Padang Pariaman yakni sebesar 26,15 juta pertahun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 23,75 juta. Namun pada tahun 2020 menurun sebesar 24,83 juta sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga per kapita menjadi -4,92 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada akhir 2019 sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya pengeluaran, yang secara tidak langsung menunjukkan menurunnya pendapatan masyarakat.

Pandemi covid-19 juga berdampak terhadap struktur pengeluaran masyarakat pada kelompok komoditas makanan dan non makanan. Selama 5 (lima) tahun terakhir pengeluaran konsumsi masyarakat Padang Pariaman pada kelompok komoditas makanan cenderung menurun, dan pengeluaran untuk komoditas non makanan cenderung meningkat. Namun pada tahun 2020 terjadi hal yang sebaliknya yakni pengeluaran masyarakat pada kelompok komoditas makanan meningkat dan penurunan pengeluaran masyarakat pada kelompok komoditas non makanan. Sementara itu, jika dilihat dari proporsinya tergambar bahwa pengeluaran pada komoditas makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk non makanan. Pada tahun 2021 pengeluaran untuk makanan sebesar 55,38 persen sedangkan untuk non makanan 44,62 persen. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Padang Pariaman lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan dan minuman, rokok, dan konsumsi lainnya dibandingkan kebutuhan non makanan seperti perumahan, fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pajak dan asuransi serta keperluan pesta lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman masih rendah karena menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Pada tingkat pendapatan yang rendah pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Berikut data kontribusi pengeluaran kelompok makanan dan non makanan disajikan pada tabel 2.51 berikut :

Tabel 2.51
Kontribusi Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Total
Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021

Kelompok Pengeluaran	Capaian Kinerja				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Konsumsi Rumah Tangga (%)					
Makanan	58,53	55,55	53,63	57,10	55,38

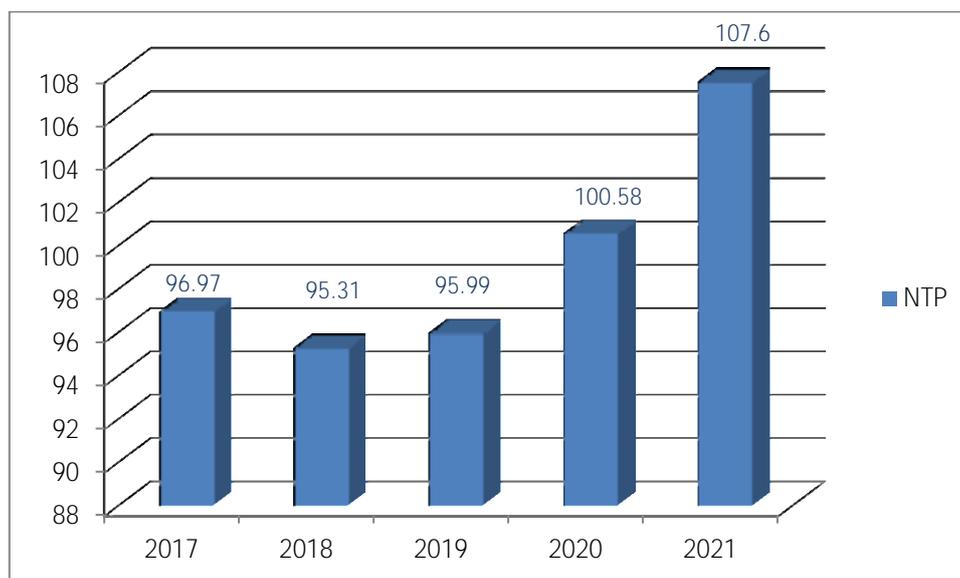
Non Makanan	41,47	44,45	46,37	42,90	44,62
-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani dengan Indeks Harga Yang dibayar Petani.

Gambar 2.13
Nilai Tukar Petani Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2017-2021



Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1. Luas Wilayah Terkena Banjir

Penyebab bencana alam banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu dipengaruhi oleh curah hujan cukup tinggi, tipe dan karakter daerah, kondisi daerah tangkapan air sedikit, kurangnya kualitas dan kuantitas drainase dan kurangnya pengelolaan daerah konservasi. Secara umum bencana banjir yang terjadi adalah akibat kondisi drainase yang kurang baik sehingga saat hujan terjadi genangan serta terjadinya kerusakan hutan di hulu sungai yang mengakibatkan erosi dan banjir. Total luas lahan terkena banjir bervariasi dengan frekuensi/lama genangan antara 6-18 hari pertahun. Daerah rawan banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu di Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, Sintuk Toboh Gadang, Lubuk Alung, Nan Sabaris, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau, Batang Gasan dan 2 x 11 Enam Lingkung.

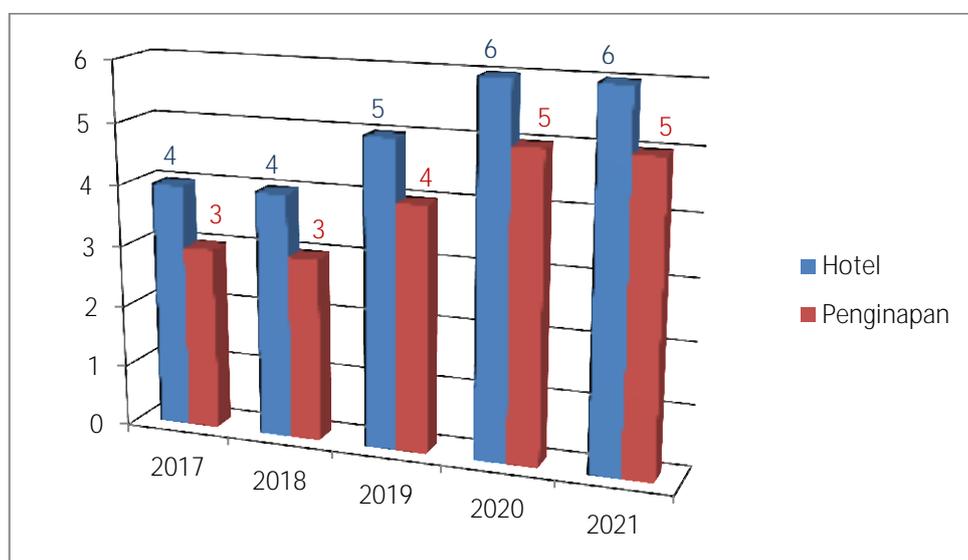
2.1.4.2.2. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Pada tahun 2021 di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 74 restoran/rumah makan yang terdata dan tersebar di beberapa kawasan. terutama disepanjang pesisir pantai Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata. Keberagaman dan keunikan kuliner yang dimiliki Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu potensi terbesar untuk menarik wisatawan karena akan menjadi daya tarik tersendiri jika dibandingkan daerah lain di Indonesia.

2.1.4.2.3. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Pada tahun 2021 terdapat 6 hotel dan 5 penginapan/wisma/losmen yang terdata dan tersebar diseluruh Kabupaten Padang Pariaman. Keberadaan penginapan tersebut tentunya diharapkan mampu mendorong datangnya berbagai kelas turis baik domestik maupun asing sehingga dapat meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Perkembangan jumlah hotel dan penginapan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2017-2021 dapat dilihat dari diagram berikut :

Gambar 2.14
Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel
Tahun 2017-2021



Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1. Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas (*crime rate*) merupakan jumlah kejadian kejahatan yang terjadi di suatu daerah pada satu tahun tertentu. Artinya dalam satu tahun rata-rata berapa tindak kriminalitas yang terjadi untuk berbagai jenis tindak pidana seperti pencurian,

penipuan, penganiayaan, kejahatan seksual, kasus narkoba, dan sebagainya. Angka kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.52 berikut :

Tabel 2.52
Angka Kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tindak Kriminal	528	586	627	596	453
Jumlah Penduduk	411.003	413.272	415.613	430.626	438.022
Angka Kriminalitas	12,85	14,18	15,09	13,84	10,34

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman relatif rendah. Pada tahun 2021 angka kriminalitas sebesar 10,34 artinya setiap 10.000 orang penduduk tindak kriminalitas yang terjadi adalah sebanyak 10 kasus. Angka ini turun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 15 kasus.

2.1.4.3.2. Lama Proses Perizinan

Proses perizinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam memajukan iklim investasi, pemerintah daerah dan masyarakat harus berkomitmen dalam berbagai hal salah satunya kemudahan dalam pengurusan administrasi perizinan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya optimalisasi pelayanan proses perizinan ialah dengan menerbitkan dasar hukum terkait standar waktu pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPTP melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 161/KEP/BPP/2018 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman. Berikut ini dijelaskan Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kabupaten Padang Pariaman dalam tabel 2.53 :

Tabel 2.53
Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Jenis Perizinan / Non Perizinan	Hari Selesai	
		Berkas Lengkap	Survey dan Rekomendasi
1.	Izin Operasional Sekolah	5 Hari	30 Hari
2.	Izin Pendirian Kursus	5 Hari	30 Hari
3.	Izin Taman Bacaan Masyarakat	5 Hari	30 Hari

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

No.	Jenis Perizinan / Non Perizinan	Hari Selesai	
		Berkas Lengkap	Survey dan Rekomendasi
4.	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	5 Hari	30 Hari
5.	Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Hari	30 Hari
6.	Izin Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Hari	30 Hari
7.	Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah	5 Hari	14 Hari
8.	Izin Kerja dan Izin Praktek Tenaga Kesehatan	3 Hari	14 Hari
9.	Izin Apotek / Apotek Rakyat	3 Hari	14 Hari
10.	Izin Toko Obat	3 Hari	14 Hari
11.	Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga	3 Hari	14 Hari
12.	Izin Fisioterapi	3 Hari	14 Hari
13.	Izin Balai Pengobatan / Rumah Bersalin / Klinik	3 Hari	14 Hari
14.	Izin Lingkungan	-	14 Hari
15.	Izin Lokasi	-	14 Hari
16.	Izin Instalasi Genset	3 Hari	14 Hari
17.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	5 Hari	30 Hari
18.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 Hari	14 Hari
19.	Izin Usaha Produksi Benih	7 Hari	4 Hari
20.	Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Pertokoan dalam 1 (Satu) Daerah	-	14 Hari
21.	Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu Wilayah Operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	-	14 Hari
22.	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan Dilembaga Kearsipan Daerah	3 Hari	14 Hari
23.	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	3 Hari	14 Hari
24.	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	3 Hari	14 Hari
25.	Tanda Daftar Usaha Jasa Trnsportasi Wisata	3 Hari	14 Hari
26.	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	3 Hari	14 Hari
27.	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	3 Hari	14 Hari
28.	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	3 Hari	14 Hari
29.	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	3 Hari	14 Hari
30.	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan Perjalan Insentif, Konferensi dan Pameran	3 Hari	14 Hari
31.	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	3 Hari	14 Hari

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

No.	Jenis Perizinan / Non Perizinan	Hari Selesai	
		Berkas Lengkap	Survey dan Rekomendasi
32.	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	3 Hari	14 Hari
33.	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	3 Hari	14 Hari
34.	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	3 Hari	14 Hari
35.	Tanda Daftar Usaha Spa	3 Hari	14 Hari
36.	Izin Penyelenggaraan Pos	-	14 Hari
37.	Izin Pendirian Jasa Titipan untuk Kantor Agen	-	14 Hari
38.	Izin Warung Internet (Warnet)	-	14 Hari
39.	Izin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	3 Hari	14 Hari
40.	Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator	-	14 Hari
41.	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi	-	14 Hari
42.	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi	-	14 Hari
43.	Izin Galian Kabel Telekomunikasi (Dalam Satu Kabupaten)	3 Hari	14 Hari
44.	Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi	-	14 Hari
45.	Izin Prinsip Penanaman Modal	3 Hari	7 Hari
46.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 Hari	7 Hari
47.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3 Hari	7 Hari
48.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	14 Hari
49.	Izin Reklame	-	7 Hari
50.	Izin Gangguan *Ho) dan Non Ho (Situ)	3 Hari	14 Hari
51.	Izin Pangkalan Minyak Tanah/Gas Elpiji	5 Hari	14 Hari
52.	Izin Usaha Industri	3 Hari	10 Hari
53.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 Hari	-
54.	Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 Hari	-
55.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	-	10 Hari
56.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	-	14 Hari
57.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	-	14 Hari
58.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)	-	14 Hari
59.	Izin Penggunaan Racun Api	3 Hari	14 Hari
60.	Izin Prinsip	-	14 Hari
61.	Izin Mendirikan Panti Asuhan	3 Hari	14 Hari
62.	Izin Operasional Panti Asuhan	3 Hari	14 Hari

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Perindustrian, 2022

2.1.4.3.3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman meliputi : (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran dan Rumah Makan; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak

reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian C; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Bawah Tanah; (9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan retribusi daerah meliputi : (1) Retribusi Jasa Umum; (2) Retribusi Jasa Usaha; (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Berikut perincian pendapatan pajak daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019-2021 pada tabel 2.54 :

Tabel 2.54
Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun Anggaran 2019-2021

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2019	Realisasi Pendapatan Tahun 2020	Realisasi Pendapatan Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak Hotel	204.686.983,00	101.143.514,00	142.644.605,00
2	Pajak Restoran dan Rumah Makan	3.565.516.571,00	1.519.389.638,00	1.779.113.278,00
3	Pajak Hiburan	306.899.850,00	138.797.000,00	179.795.500,00
4	Pajak Reklame	813.594.680,00	984.380.375,00	1.122.892.677,00
5	Pajak Penerangan Jalan	17.745.000.000,00	16.710.615.735,00	17.386.213.695,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	2.874.340.172,00	3.784.863.927,95	3.643.616.500,56
7	Pajak Parkir	19.769.021.400,00	998.928.700,00	954.436.564,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	373.380.163,00	391.000.058,00	366.510.405,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.983.275.604,00	8.829.891.991,00	9.796.389.925,00
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	11.458.048.854,00	8.365.525.917,50	8.960.535.297,00
	Jumlah	65.515.697.131,00	41.824.536.856,45	44.332.148.446,56

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2022

Pajak penerangan jalan memiliki proporsi terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Padang Pariaman yakni sebesar Rp17.386.213.695 pada tahun 2021 atau 39,29 persen dari seluruh total penerimaan pajak daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pajak BPHTB yang semula merupakan pajak pemerintah pusat, telah beralih menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Hal ini

diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat membiayai pembangunan daerahnya.

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah kabupaten padang pariaman meliputi : (1) Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; (2) Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum. Berikut dijelaskan perincian pendapatan retribusi daerah pada tabel 2.55 :

Tabel 2.55
Perincian Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2019-2021

No	Uraian	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran
		2019	2020	2021
		Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	927.946.500,00	1.121.540.500,00	1.424.048.006,00
2	Retribusi Jasa Usaha	358.694.340,00	285.323.780,00	242.246.840,00
3	Retribusi Perizinan tertentu	1.364.101.797,00	778.669.742,00	523.789.508,00
	Jumlah	2.650.742.637,00	2.185.534.022,00	2.190.084.354,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp2.190.080.354 dengan komponen terbesar yakni berasal dari retribusi jasa umum sebesar Rp1.424.048.006.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja sangat berkaitan erat dengan kualitas SDM untuk mengisi kebutuhan kesempatan kerja. Kualitas SDM sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan oleh setiap penduduk di suatu daerah maka akan semakin tinggi kualitas SDM begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan yang

ditamatkan oleh setiap penduduk maka akan semakin rendah kualitas SDM daerah tersebut. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh setiap penduduk usia kerja, maka kualitas tenaga kerja juga akan semakin meningkat. Berikut disajikan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Padang Pariaman menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan periode tahun 2017-2021 pada tabel 2.56 :

Tabel 2.56
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Tahun 2017-2021

Pendidikan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tidak Tamat SD	47.176	42.265	43.374	34.803	N/A
Sekolah Dasar (SD)	31.888	31.898	33.434	41.209	70.493
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	31.251	33.454	37.253	38.785	34.711
Sekolah Menengah Atas (SMA)	42.152	47.267	48.395	62.404	64.372
Diploma / Akademi	3.628	4.818	4.729	7.913	N/A
Universitas (D-IV/S-1/S-2/S-3)	13.674	13.906	14.159	14.871	24.652
Jumlah	169.769	173.608	181.344	199.985	194.228

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir jumlah angkatan kerja di kabupaten padang pariaman terus mengalami peningkatan, demikian juga kualitas angkatan kerja yang dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2017 jumlah angka kerja yang tidak tamat pendidikan dasar lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada jenjang pendidikan lainnya yakni sebanyak 47.176 orang dibandingkan dengan angkatan kerja yang menamatkan jenjang universitas (D-IV/S-1/S-2/S-3) sebanyak 13.674 orang. Namun kualitas angkatan kerja Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah lulusan D-IV/S-1/S-2/S-3 sebanyak 14.871 orang pada tahun 2020 begitu juga dengan lulusan Diploma sebanyak 7.913 orang dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 24.652 orang. Sedangkan jumlah angkatan kerja yang tidak tamat pendidikan dasar terus mengalami penurunan hingga 34.803 orang pada tahun 2020. Namun demikian, angkatan kerja kabupaten padang pariaman masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni sebanyak 62.404 orang pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 64.372 orang pada tahun 2021. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa kualitas angkatan kerja di Kabupaten Padang Pariaman relatif masih rendah. Artinya pemerintah harus menggalakkan pendidikan dan pelatihan berbasis

keterampilan sehingga mampu meningkatkan kualitas angkatan kerja yang berdaya saing.

2.1.4.4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman termasuk rendah di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Padang Pariaman sebesar 70,76 dan berada pada peringkat ke-11 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya atau berada dibawah rata-rata provinsi sebesar 72,65. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak indikator sumber daya manusia yang belum terpenuhi baik pada indikator pendidikan, indikator kesehatan, maupun indikator ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan capaian IPM Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.57 berikut ini:

Tabel 2.57
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kep. Mentawai	59,25	60,28	61,26	61,09	61,35
2.	Pesisir Selatan	68,74	69,40	70,08	69,90	70,03
3.	Solok	67,86	68,60	69,08	69,08	69,24
4.	Sijunjung	66,60	66,97	67,66	67,74	67,86
5.	Tanah Datar	70,37	71,25	72,14	72,33	72,46
6.	Padang Pariaman	68,90	69,71	70,59	70,61	70,76
7.	Agam	71,10	71,70	72,37	72,46	72,57
8.	Lima Puluh Kota	68,69	69,17	69,67	69,47	69,68
9.	Pasaman	64,94	65,60	66,46	66,64	66,77
10.	Solok Selatan	67,81	68,45	68,94	69,04	69,23
11.	Dharmasraya	70,40	70,86	71,52	71,51	71,76
12.	Pasaman barat	66,83	67,43	68,21	68,49	68,76
13.	Padang	81,58	82,25	82,68	82,82	82,90
14.	Kota Solok	77,44	77,89	78,38	78,29	78,41
15.	Sawahlunto	71,13	71,72	72,39	72,64	72,88
16.	Padang Panjang	77,01	77,30	78,00	77,93	77,97
17.	Bukittinggi	79,80	80,11	80,71	80,58	80,70
18.	Payakumbuh	77,91	78,23	78,95	78,90	79,08
19.	Pariaman	75,71	76,26	76,70	76,90	77,07
	Provinsi Sumatera Barat	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

Tabel 2.58
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Peringkat Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat
1	Padang	82,90	1
2	Bukittinggi	80,70	2
3	Payakumbuh	79,08	3
4	Kota Solok	78,41	4
5	Kota Padang Panjang	77,97	5
No	Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat
6	Kota Pariaman	77,07	6
7	Sawahlunto	72,88	7
8	Agam	72,57	8
9	Tanah Datar	72,46	9
10	Dharmasraya	71,76	10
11	Padang Pariaman	70,76	11
12	Pesisir Selatan	70,03	12
13	Lima Puluh Kota	69,68	13
14	Kab Solok	78,41	14
15	Solok Selatan	69,23	15
16	Pasaman Barat	68,76	16
17	Sijunjung	67,86	17
18	Pasaman	66,77	18
19	Kepulauan Mentawai	61,35	19

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2.1.4.4.3. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk muda yang belum produktif karena secara ekonomis masih ditanggung oleh orang tua, sedangkan penduduk berusia diatas 64 tahun juga dianggap tidak produktif karena sudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun merupakan usia kerja yang dianggap produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017-2021 disajikan pada tabel 2.59 berikut :

Tabel 2.59
Rasio ketergantungan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	128.324	128.037	127.690	110.831	111.305
2	Jumlah Penduduk Usia >64 tahun	31.463	32.450	33.616	34.109	41.323
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	159.787	160.487	161.306	144.940	152.628
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	251.216	252.785	254.307	285.686	289.325
5	Rasio ketergantungan total (3)/(4)	63,61	63,49	63,43	50,73	52,75
6	Rasio ketergantungan muda (1)/(4)	51,08	50,65	50,21	38,79	38,47
7	Rasio ketergantungan tua (2)/(4)	12,52	12,84	13,22	11,94	14,28
8	Jumlah Penduduk	411.003	413.272	415.613	430.626	438.022

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2022

Rasio ketergantungan Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir paling tinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 63,61 yang merupakan akumulasi dari rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 51,08 dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 12,52. Rasio ketergantungan di Kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 52,75, artinya setiap 100 orang penduduk berusia kerja (dianggap produktif) di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 mempunyai tanggungan sebanyak 53 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Jika dilihat dari proporsi ketergantungan penduduk, rasio ketergantungan muda lebih besar dari rasio ketergantungan tua. Ini menunjukkan bahwa beban tanggung jawab penduduk usia kerja lebih besar terhadap penduduk usia muda dibandingkan dengan penduduk usia tua.

2.1.5. Inovasi Daerah

Inovasi merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi serta dalam rangka pengembangan daya saing daerah. Terjadinya pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge base economic*). Kecenderungan perubahan/perkembangan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi. Dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi terdapat 3 fokus utama yang perlu diperhatikan yaitu penciptaan kegiatan ekonomi terintegrasi dan sinergis antar kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan daya tahan

perekonomian nasional, serta mendorong penguatan sistem inovasi nasional menuju "*innovation driven economic*".

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pada 14 September 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda) sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan inovasi daerah. PP ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 390 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemda. Agar tujuan tersebut tercapai, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing daerah.

Selanjutnya, bentuk inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola Pemda, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan kriteria inovasi daerah meliputi mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah/masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi.

Inovasi daerah lahir sebagai bentuk solusi dari segala permasalahan /kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Inovasi daerah berfungsi sebagai katalisator dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki "penyakit-penyakit" di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta cultural set aparatur). Inovasi juga menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi

birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat. Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari entitas pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan berbasis inovasi tersebut (*innovation-driven development*) untuk menunjang konsep pembangunan berkelanjutan. Saat ini konsep pembangunan dengan pengembangan perekonomian dengan mengandalkan keunggulan komparatif saat ini sudah mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan pembangunan dengan mengandalkan keunggulan komparatif berdasarkan sumber daya alam suatu saat akan mengalami penurunan karena sifatnya yang terbatas dan menyebabkan eksternalitas negatif terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu pengembangan perekonomian berbasis inovasi suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Pariaman memiliki komitmen untuk selalu melakukan pengembangan inovasi daerah. Pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten dimulai pada tahun 2009, dimana pada saat itu daerah ini baru saja dilanda gempa berkekuatan 8,9 skala richter yang menyebabkan kehancuran pada seluruh sendi - sendi kehidupan. Selain menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah, sektor yang paling terdampak adalah sektor perekonomian.

Untuk membangun kembali Kabupaten Padang Pariaman pasca gempa tersebut dibutuhkan upaya yang sungguh - sungguh dari segenap pemangku kepentingan beserta seluruh masyarakat. Pemerintah daerah mulai menata kembali sektor - sektor yang hancur tersebut dengan memunculkan cara - cara yang inovatif. Hal ini dibuktikan dengan salah satunya adalah cepatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan terutama pada sarana dan prasana baik perumahan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu Padang Pariaman juga memperoleh penghargaan perekaman e-KTP tercepat dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011.

Gambar 2.15
Piagam Penghargaan *Innovative Government Award* Peringkat II Tahun
2018 dari Kemendagri RI



Pengorganisasian berbagai inovasi daerah Kabupaten Padang Pariaman mulai terlihat pada tahun 2018 melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi inovasi daerah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pada tahun 2018 tersebut merupakan untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengikuti lomba penilaian inovasi daerah melalui ajang *Innovative Government Award (IGA)* yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tercatat jumlah inovasi yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri pada ajang tersebut berjumlah 75 Inovasi Daerah yang terdiri dari : 47 Pelayanan Publik, 7 Tata kelola pemerintahan , dan 21 Bentuk lainnya. Dalam ajang IGA 2018 tersebut, Kabupaten Padang Pariaman berhasil meraih predikat sebagai Kabupaten Terinovatif peringkat-II (kedua) tingkat nasional.

Tabel 2.60
Rekapitulasi Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018

No	OPD	Inovasi			Jumlah
		Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan	Bentuk Lainnya	
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	0	0	19
2	Dinas Kesehatan	8	0	0	8

3	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	8	0	0	8
4	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	1	0	1
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	3	14	19
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2			2
7	Diskominfo	2	2	1	5
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	5	5
9	Dinas Perhubungan	0	0	1	1
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2			2
11	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1	0	0	1
12	BPKD	0	1		1
13	Kec. Enam Lingsung	2	0	0	2
14	RSUD	1	0	0	1
	Jumlah	47	7	21	75

Dalam perkembangannya, jumlah inovasi Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tahun berikutnya. Tercatat di dalam ajang *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2019, jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah 130 Inovasi daerah, yang terdiri dari : 91 Pelayanan Publik, 61 Tata kelola pemerintahan, 23 Bentuk lainnya. Namun demikian nilai yang diperoleh dalam ajang tersebut tidak berbanding lurus dengan pertambahan jumlah inovasi daerah yang telah dilaporkan. Nilai indeks inovasi daerah (IID) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 adalah 27.500. Berdasarkan hasil penilaian tersebut posisi Kabupaten Padang Pariaman dalam ajang IGA tahun 2019 mengalami kemunduran dengan raihan hasil sebagai Kabupaten Terinovatif peringkat - 7 (ketujuh) tingkat nasional.

Tabel 2.61
Rekapitulasi Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

No.	OPD	Inovasi			Jumlah
		Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan	Bentuk Lainnya	
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	0	0	20
2	Dinas Kesehatan	24	0	0	24

3	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	12	0	0	12
4	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	1	0	1
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	3	14	19
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	6	0	0	6
7	Diskominfo	5	7	1	13
8	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	1	0	2	3
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	0	0	4
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	5	5
11	Dinas Perhubungan	0	0	1	1
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	0	0	2
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2	0	0	2
14	Badan Pengelola Keuangan Daerah	0	5	0	5
15	Dinas Perikanan	4	0	0	4
16	Dinas Sosial P3A	1	0	0	1
17	Kec. Enam Lingkung	2	0	0	2
18	RSUD	6	0	0	6
	Jumlah	91	16	23	130

Dari hasil evaluasi inovasi daerah tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai koordinator dalam pengembangan inovasi daerah diketahui bahwa banyak diantara inovasi daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri pada tahun tersebut tidak dilengkapi *evidence* untuk indikator dari sebuah inovasi daerah (sesuai aturan Kemendagri). Pada tahun tersebut inovasi daerah Kabupaten Padang Pariaman hanya berkembang dari sisi kuantitas, tapi tidak berkembang dari segi kualitas.

Hasil capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam ajang Anugerah *Innovative Government Award (IGA)* terus mengalami tren penurunan pada tahun 2020. Dimana jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2020 adalah 71 (tujuh puluh satu) inovasi yang terdiri dari 59 inovasi pelayanan publik, 3 inovasi tata kelola pemerintahan, dan 9 inovasi daerah bentuk lainnya. Pada tahun 2020 ini posisi Kabupaten Padang Pariaman dalam ajang penilaian *Innovative Government Award (IGA)* berada pada peringkat - 13 (tiga belas) dengan nilai indeks yang berhasil diperoleh adalah 7.035 (predikat :sangat inovatif).

Tabel 2.62
Rekapitulasi Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

No.	OPD	Jumlah Inovasi	Inovasi			Nilai Total Kematangan	Nilai Rata2 Kematangan
			Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan	Bentuk Lainnya		
1	BPBD	3	3	0	0	354	118
2	Dinkes	9	9	0	0	1.115	124
3	Disdagnakerkop & UKM	3	1	0	2	113	38
4	Disdukcapil	23	23	0	0	4.557	198
5	Dishub	1	1	0	0	0.00	0
6	Diskominfo	6	1	3	2	648	108
7	Disnakkeswan	2	2	0	0	259	130
8	Disparpora	3	0	0	3	0	0
9	DistanKP	2	0	0	2	47	24
10	DPMPTP	11	11	0	0	1.929	175
11	DPPKB	4	4	0	0	599	150
12	RSUD	4	4	0	0	751	188
	Jumlah	71	59	3	9	10.372	1.252

Pada penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) dalam ajang pemberian *Innovative Government Award* (IGA) tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaporkan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) inovasi daerah. Inovasi daerah yang telah di-entry-kan melalui website <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> tersebut terdiri dari 3 (tiga) inovasi daerah berbentuk tata kelola pemerintahan, 57 (lima puluh tujuh) inovasi daerah berbentuk pelayanan publik dan sebanyak 7 (tujuh) inovasi daerah berbentuk inovasi bentuk lainnya yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 2.63
Rekapitulasi Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

No	OPD	Jumlah Inovasi	Inovasi			Nilai Kematangan Total	Nilai Rata - Rata Kematangan
			Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan	Bentuk Lainnya		
1	Bapelitbangda	1		1		95,00	95,00
2	BPBD	3	3			273,00	91,00
3	Dinkes	9	9			954,00	106,00
4	Disdagnakerkop & UKM	3	1		2	141,00	47,00
5	Disdukcapil	21	21			2.945,00	140,24
6	Dishub	1	1			15,00	15,00
7	Diskearpus	1	1			85,00	85,00
8	Diskominfo	1		1		106,00	106,00
9	Disnak Keswan	2	2			172,00	86,00
10	Disparpora	4	1		3	226,00	56,50

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

11	Distan KP	2			2	94,00	47,00
12	DPMPTP	12	12			1.560,00	130,00
13	DPPKB	4	4			404,00	101,00
14	Inspektorat	3	2	1		172,00	57,33
	Jumlah	67	57	3	7	7.242	1.163,07

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2020), jumlah inovasi daerah yang dilaporkan pada tahun ini (2021) mengalami penurunan jumlah. Dimana pada tahun 2020, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan berjumlah 71 (tujuh puluh satu) inovasi. Terjadinya penurunan jumlah pelaporan inovasi daerah ini tidak terlepas dari regulasi baru yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2021 ini. Dimana inovasi daerah yang dinilai dalam ajang IGA pada tahun ini adalah inovasi yang diterapkan mulai 1 Januari 2019 sampai Desember 2020. Hal ini mengakibatkan banyak inovasi daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dilaporkan pada tahun - tahun sebelumnya tidak lagi dinilai pada tahun ini (inovasi tersebut dipindahkan kedalam arsip inovasi).

Pada tahun 2021 ini, raih nilai Kabupaten Padang Pariaman pada ajang *Innovative Government Award (IGA)* semakin merosot. Dimana secara nasional Kabupaten Padang Pariaman berada pada peringkat ke-188 dengan skor nilai 40.64 (kategori : Inovatif). Kemerosotan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Padang Pariaman yang terjadi dari tahun ke tahun ini tentu saja bukanlah hasil yang diharapkan. Perlu ada upaya yang harus dilakukan agar penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Padang Pariaman kembali bergairah. Hal ini haruslah menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan untuk kembali membangkitkan inovasi daerah sehingga semangat ini menjadi budaya birokrasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.64
Rekapitulasi Inovasi Daerah Yang Dilaporkan Ke Kemendagri
Dalam Penilaian Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Padang Pariaman

Tahun	Jumlah Inovasi Daerah			Jumlah	Skor Total	Peringkat IGA
	Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan	Lainnya			
2018	47	7	21	75	23.330	2
2019	91	16	23	130	27.500	7
2020	59	3	9	71	7.035	13
2021	57	3	7	67	40,64	188

Salah satu upaya untuk membangkitkan dan menjaga semangat berinovasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil menerapkan inovasi daerah di instansinya dengan baik. Sejak tahun 2018 hingga saat ini, setiap tahunnya selalu diadakan agenda pemberian

penghargaan kepada Perangkat Daerah Terinovatif berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, penilaian Perangkat Daerah Terinovatif dilakukan oleh Tim Penilai Perangkat Daerah Terinovatif (yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 312/KEP/BPP/2021 tanggal 10 Juni 2021). Keputusan tentang Perangkat Daerah Terinovatif tahun 2021 tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 355/KEP/BPP/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Penetapan Perangkat Daerah Terinovatif Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. Berdasarkan SK tersebut telah ditetapkan perangkat daerah terinovatif yaitu : 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, 3) Dinas Kesehatan, 4) Rumah Sakit Umum Daerah, dan 5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Gambar 2.16

Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 meraih Kategori Kabupaten Sangat Inovatif tingkat Kabupaten dalam penganugerahan Innovative Government Award 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri bulan Desember 2020



Gambar 2.17

Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 mendapatkan piagam atas partisipasi dalam Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19



Gambar 2.18

Pada Tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman menerima Penghargaan Pelayanan Public dalam Kategori Pelayanan Prima Tingkat Kabupaten



Pada Tabel 2.65 berikut disajikan beberapa inovasi yang telah dilaksanakan daerah dari tahun 2019 sampai tahun 2021 pada Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021.

Tabel 2.65

DAFTAR REKAPITULASI INOVASI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiator	Urusan Pemerintah	OPD	Tahapan Inovasi
1	Inovasi Daerah Pencegahan Covid - 19 Pada Sektor Pariwisata	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Masyarakat	Pariwisata	Disparpora	Penerapan
2	Penginapan Sehat dan Nyaman Dalam Menghadapi New Normal Life Di Padang Pariaman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Masyarakat	Pariwisata	Disparpora	Penerapan
3	Transaksi aman di Pasar Modern dalam Menghadapi New Normal Life di Padang Pariaman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Masyarakat	Perdagangan	Disdagnakerkop UKM	Penerapan
4	Belanja Aman di Pasar Rakyat dalam Menghadapi New Normal Life di Padang Pariaman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	OPD	Perdagangan	Disdagnakerkop UKM	Penerapan

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

5	Tetap ELOK (Efektif, Lancar, Optimal, dan Konsisten) Melayani dalam Menghadapi New Normal Life di Padang Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Penanaman Modal	DPMPTP	Penerapan
6	Lapau Nasi Sehat dan Aman dalam Menghadapi New Normal Life di Padang Pariaman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Masyarakat	Pariwisata	Disparpora	Penerapan
7	Nyaman dan Aman di Transportasi Umum dalam Menghadapi New Normal Life di Padang Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Perhubungan	Dishub	Penerapan
8	GERNIS PAPA (GERAKAN NIKAH SEHAT PADANG PARIAMAN)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Kesehatan	Dinkes	Penerapan
9	NAGARI BEBAS STUNTING	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Kesehatan	Dinkes	Penerapan
10	PENSIL (PENDAMPING SETIA IBU HAMIL)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Kesehatan	Dinkes	Penerapan
11	Serentak Menggarab Kampung KB (SERGAB KAKAB)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB	Penerapan
12	Komprehensif Online Penyajian Inovasi Data Akurat (KOPI DARAT)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB	Penerapan

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

13	PADI PUTIAH PAPANAI	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	OPD	Pertanian	Distan KP	Penerapan
14	SIMUNA	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	BPBD	Penerapan
15	PAPA SADAR BANA	Inovasi pelayanan publik	Digital	Kepala Daerah	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	BPBD	Penerapan
16	PATAKA	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	BPBD	Penerapan
17	Pelepasan Veretas Durian Kunik dan Talantam	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	OPD	Pertanian	Distan KP	Inisiatif

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

18	NAGITA (NAGARI DIGITAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
19	ADIK (ANJUNGAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
20	PAK PERWIRA (PELAYANAN AKTA PERKAWINAN DI GEREJA)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
21	POHON IMPIAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
22	SI-BIMO (Bisa Melayani On The Spot)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
23	SI-PRETI (SISTEM PEREKAMAN DATA SEJAK DINI)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

24	SEMEN PADANG PAK YAN (SEKALI MENIKAH DAPAT SEGUDANG PAKET LAYANAN)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
25	BERE- BERE	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB	Penerapan
26	CAKAU	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB	Penerapan
27	SIRUSA PAPA (SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT PADANG PARIAMAN)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Kesehatan	RSUD	Penerapan
28	CERIA TARUIH (CEGAH ANTRIAN DENGAN ANTAR OBAT SAMPAI RUMAH)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Kesehatan	RSUD	Penerapan
29	PEDANG AKSI	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Tenaga Kerja	Disdagnakerkop UKM	Penerapan
30	BULAT SEDAP (IBU SELAMAT BAYI SEHAT AKTA DI DAPAT)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Kesehatan	RSUD	Penerapan
31	SICENTIL (SIGAP CEPAT DAN TINDAKLANJUTI)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Pertanian	Disnak Keswan	Penerapan
32	KAMPUNG LIMOUSIN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Pertanian	Disnak Keswan	Penerapan

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

33	PALANTA (PELAYANAN LANGSUNG TUNTAS)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Penanaman Modal	DPMPTP	Penerapan
34	SISTEM INFORMASI APLIKASI PERSURATAN KANTOR (SIAPKAN)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	OPD	Komunikasi Dan Informatika	Diskominfo	Penerapan
35	TANDA TANGAN ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN (SKBT)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	OPD	Kepegawaian	Inspektorat	Penerapan
36	IBU CANTIK (Ikuti Buka Cermati Buku KIA Pilihan Ibu Bijak)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Kesehatan	Dinkes	Penerapan
37	SILENTING (akSI bersama Lintas program dan lintas sektor ENTaskan stunTING)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Kesehatan	Dinkes	Penerapan
38	SIKDA GENERIK	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Kesehatan	Dinkes	Penerapan
39	TdS (Tunggu di rumah Saja)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
40	MIKI MOS (MITRA KIRIMAN MELALUI POS)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

41	BERKAH ONLINE (kolanBorasi pElayanan adminstRasi Kependudukan dan pernikaHan) Online	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
42	PRISMA NAGARI (PUSAT RISET STATISTIK dan MANAJEMEN DATA KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL) NAGARI	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
43	CERMIN HATI (CERAI ADMINISTRASI SEHARI JATI DIRI JADI)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
44	LAYANAN MH730 (Melayani 7 Hari Seminggu dan Rata-Rata 30 Hari Sebulan, Khusus Pelayanan KTP-el)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
45	PAK YAN ONLINE (PAKET LAYANAN) ONLINE	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
46	MUSLIMAH (DATAMU BERMASALAH TUNGGU DIRUMAH)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

47	BULAN MADU BERSAMA KPU (SEBULAN MEREKAM KTP UNTUK PEMILU)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
48	ADM (ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
49	SIDAK PAPA (Sistem Informasi Data dan Akuntabilitas Kinerja Padang Pariaman)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	OPD	Perencanaan	Bapelitbangda	Penerapan
50	PANGLING DIMAS (PANGGUNG LITERASI PENGEMBANGAN DIRI MASYARAKAT)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Perpustakaan	Diskearpus	Penerapan
51	Layanan MANANTI BABUKO (MAasyarakat NAgari seNang haTI Bersama Beres Urus administrasi kependudukan Oke)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
52	LAYANAN 4T (Layanan Terlengkap, Terluar, Terdepan dan Tersulit)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
53	APLIKASI PADANG PARIAMAN TOURISM DESTINATION (PADATI)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Pariwisata	Disparpora	Penerapan

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

54	KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN DAN PENGADUAN (INI KAWAN)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Fungsi Penunjang Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Penerapan
55	Portal Whistle Blowing System (WBS) Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Fungsi Penunjang Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Penerapan
56	BEDAH DADAKU (BANTU PERMASALAHAN PINDAH DATA-DATAKU)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
57	LAPAO TANAMO (LAYANAN PELAPORAN ONLINE KEGIATAN PENANAMAN MODAL)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Penanaman Modal	DPMPTP	Penerapan
58	MENJALIN MOU DENGAN PT. POS INDONESIA (LIMOU POS)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Penanaman Modal	DPMPTP	Penerapan
59	PENGADUAN MASYARAKAT TERPANTAU OLEH INSPEKTORAT	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Penanaman Modal	DPMPTP	Penerapan

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

60	PERIZINAN LANGSUNG JADI (PADI)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Penanaman Modal	DPMPTP	Penerapan
61	CONSULTASI LAYANAN INVESTASI PENDAMPINGAN KEGIATAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Penanaman Modal	DPMPTP	Penerapan
62	ADN (ANJUNGAN DUKCAPIL NAGARI)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Penerapan
63	AKAN LARIZ (AKHIR PEKAN ADA LAYANAN PERIZINAN)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Penanaman Modal	DPMPTP	Penerapan
64	APLIKASI PERIZINAN DI ANDROID	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Penanaman Modal	DPMPTP	Penerapan
65	CEPRON PAPA (Cek Proses Izin Padang Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Penanaman Modal	DPMPTP	Penerapan
66	Tetap ELOK (Efektif, Lancar, Optimal, dan Konsisten) Melayani dalam Menghadapi New Normal Life di Padang Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Penanaman Modal	DPMPTP	Penerapan
67	LAYANAN ANTAR JEMPUT PERIZINAN (LAJUR)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Penanaman Modal	DPMPTP	Penerapan

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan yang dievaluasi adalah pelaksanaan program tahun anggaran 2022, berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan dengan capaian realisasi anggaran dan kinerja per program. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2022 berdasarkan urusan dan perangkat daerah pelaksana dapat dilihat pada lampiran 1 dari Dokumen RKPD ini.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Tabel 2.66

Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Prioritas	Sasaran	Permasalahan
1.	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Sektor Pertanian, Pariwisata, dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata b. Berkurangnya jumlah penduduk miskin c. Kemandirian Nagari d. Peningkatan daya beli masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan b. Belum optimalnya produksi hasil perikanan karena kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah c. Peningkatan pendapatan petani/peternak d. Penerapan Pola Pangan Harapan (PPH) e. Belum optimalnya pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan f. Hilirisasi produk komoditi unggulan yang sangat terbatas g. Diversifikasi pangan h. Rendahnya daya saing destinasi pariwisata Kabupaten Padang Pariaman b. Rendahnya daya saing produk pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) c. Jumlah penduduk miskin semakin meningkat d. Belum optimalnya pemanfaatan potensi nagari dalam pembangunan daerah

No.	Prioritas	Sasaran	Permasalahan
2.	Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah b. Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman 	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya promosi investasi b. Belum optimalnya integrasi investasi dengan pola ruang c. Belum optimalnya penggalian potensi dan pengembangan pajak dan retribusi daerah d. Kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan covid-19 terhadap penganggaran dan realisasi APBD
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi b. Meningkatkan infrastruktur Sumber Daya Air c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman d. Meningkatkan pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi seperti sarana prasarana lalu lintas keamanan transportasi meliputi fasilitas perlengkapan jalan/rambu, halte, trotoar, penerangan jalan umum, dan terminal b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal c. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah masih rendah d. Pemenuhan sarana prasarana pengelolaan sampah belum optimal e. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana objek wisata unggulan f. Masih banyak ditemui perumahan dan permukiman kumuh g. Belum optimalnya penggunaan lahan yang sesuai dengan perencanaan tata ruang
4.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat b. Peningkatan Mutu Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mutu pendidikan yang masih tergolong rendah b. Mutu tenaga pendidik masih rendah (masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi) c. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah

No.	Prioritas	Sasaran	Permasalahan
		<p>c. Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing</p> <p>d. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah</p>	<p>d. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah</p> <p>e. Kurangnya jumlah guru atau tenaga pendidik yang berstatus ASN</p> <p>f. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>g. Belum optimalnya layanan kesehatan</p> <p>h. Masih ditemukannya kasus stunting di Kabupaten Padang Pariaman</p> <p>i. Rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH)</p> <p>j. Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi serta gizi buruk</p> <p>k. Masih tingginya tingkat perkawinan usia muda</p> <p>l. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</p> <p>m. Masih rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja</p>
5.	Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana	<p>a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat</p> <p>b. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk</p> <p>c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum</p> <p>d. Peningkatan pengelolaan air limbah domestik</p> <p>e. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni</p> <p>f. Penguatan layanan kebencanaan</p> <p>g. Pengurangan resiko kebakaran</p> <p>h. Peningkatan</p>	<p>a. Masih kurangnya regulasi dan koordinasi penanggulangan kebencanaan</p> <p>b. Kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kebencanaan yang belum optimal</p> <p>c. Pengembangan nagari tangguh bencana yang belum optimal</p> <p>d. Pengelolaan kasus abrasi pantai yang belum optimal</p>

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

No.	Prioritas	Sasaran	Permasalahan
		kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat i. Peningkatan penanganan masalah sosial	
6.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis	a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel b. Birokrasi yang kapabel c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal b. Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah yang belum optimal c. Belum optimalnya peningkatan kualitas manajemen keuangan daerah d. Belum optimalnya peningkatan kualitas manajemen kinerja instansi pemerintah e. Kualitas Pelayanan Publik yang masih rendah f. Belum optimalnya pengembangan e-gov dan implementasi smart city Kabupaten Padang Pariaman
7.	Peningkatan pengamalan ABS SBK dalam kehidupan bermasyarakat	a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya b. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. Masih rendahnya kualitas kehidupan beragama b. Lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan belum berperan aktif dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah c. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kerukunan dalam upaya menjaga dan mempertahankan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat d. Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya daerah e. Masih maraknya penyakit masyarakat dan permasalahan

No.	Prioritas	Sasaran	Permasalahan
			sosial

2.3.2. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan pada urusan pendidikan diantaranya meliputi :

- a. Belum meratanya kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Kekurangan Guru SD yang berstatus ASN (Guru Kelas, Guru Penjasorkes, dan Guru Agama) serta Guru SMP pada mata pelajaran tertentu (BP, Keterampilan/TIK, Prakarya) dan kekurangan ini akan terus bertambah karena ada beberapa guru yang akan pensiun dan berhalangan tetap (tidak bisa mengajar).
- c. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang dilihat dari Persentase Sekolah SD/SDLB kondisi bangunan baik sebesar 54,15 persen dan Persentase Sekolah SMP/SMPLB kondisi bangunan baik sebesar 77,47 persen pada tahun 2021.
- d. Banyaknya masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun yang disebabkan oleh faktor ekonomi, minat sekolah rendah, dan kurangnya perhatian orang tua sehingga angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman berada pada rangking ke 17 dibandingkan dengan semua kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- e. Masih adanya kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat.
- f. Pandemi covid-19 yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir menyebabkan kualitas belajar dan mengajar siswa menurun dimana Proses Tatap Muka disekolah dibatasi dan dilakukan pembelajaran daring (*online*) namun sebagian daerah belum terjangkau jaringan internet (*blank spot*) dan faktor ekonomi orangtua yang belum mampu menyediakan fasilitas seperti telepon genggam bagi siswa.
- g. Efek pandemi covid-19 juga membuat pelatihan SDM pendidikan menjadi tidak efektif, karena banyaknya prosedur yang harus dipatuhi jika bepergian sehingga pelatihan dilakukan secara daring (*online*).

b. Urusan Kesehatan

- a. Rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) dimana tahun 2021 sebesar 68,97 tahun. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 69,59 tahun.
- b. Belum optimalnya layanan kesehatan pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan (belum sesuai standar).
- c. Kualitas dan kuantitas SDM kesehatan yang relatif masih terbatas.

- d. Tenaga kesehatan belum tersebar secara merata diseluruh wilayah kerja Padang Pariaman.
 - e. Masih ditemukannya kasus stunting di Kabupaten Padang Pariaman.
 - f. Belum optimalnya pelaksanaan upaya promotif dan preventif, seperti pelaksanaan posyandu, pelaksanaan Nagari Siaga aktif, pembinaan RT PHBS, penyuluhan kesehatan melalui media elektronik (radio/TV), media cetak/spanduk/baliho, penyuluhan di masyarakat, sosialisasi germas, implementasi germas dan pemanfaatan tenaga SBH dalam penyuluhan kesehatan
 - g. Belum tercapainya Open Defecation Free (ODF) Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang dilihat dari pencapaian korong STBM yang terbentuk adalah sebanyak 309 (51,67 persen) korong dari 598 korong yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Ini disebabkan oleh belum optimalnya penganggaran dana untuk pendampingan kegiatan Pamsimas dan STBM serta kurangnya dukungan dari lintas sektor terkait dengan pelaksanaan dan capaian kegiatan STBM.
 - h. Belum tercapainya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan.
 - i. Belum tercapainya *Universal Health Coverage* Jaminan Kesehatan Nasional, dimana pada tahun 2020 sebesar 74,99 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen.
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Belum optimalnya pemanfaatan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital.
 - b. Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jaringan jalan kabupaten sehingga menyebabkan tingginya biaya pembangunan, operasional, dan pemeliharaan yang harus dianggarkan.
 - c. Masih rendahnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah.
 - d. Masih banyak ditemui kendala pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur sehingga upaya percepatan pembangunan infrastruktur menjadi terhambat.
 - e. Belum tercapainya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan sehingga output yang diharapkan juga tidak tercapai.
 - b. Masih banyak ditemui perumahan dan permukiman kumuh.
 - c. Masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni.
 - d. Belum adanya program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman

- sementara masih banyak usulan/proposal dari masyarakat yang belum tertangani.
- e. Belum adanya *data base* rumah layak huni dan rumah tidak layak huni dalam skala Kabupaten Padang Pariaman yang berupa data masuk dalam aplikasi e-RTLH maupun SIBARU.
 - f. Belum adanya rencana aksi penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman.
 - g. Masih terdapat masyarakat/rumah tangga yang belum mendapat akses terhadap air bersih yang layak.
 - h. Masih banyak rumah tangga yang belum memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang layak.
 - i. Belum tercapainya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan rayat dan kawasan permukiman.
 - j. Belum adanya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta SE Dirjen Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2021 tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK.
 - k. Belum adanya rencana aksi penanganan kawasan kumuh yang dibiayai oleh APBD kabupaten padang pariaman.
- e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Belum adanya rencana induk sistem pemadam kebakaran sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran sebagai Pelayan Masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
 - b. Masih banyaknya anggota terutama THL yang tidak paham dengan SOP dalam menjalankan kegiatan di lapangan sehingga kadang terjadi kesalahan komunikasi dalam penindakan dan menyebabkan hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan rencana target.
 - c. Peningkatan kapasitas personil damkar belum berbanding lurus dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya.
 - d. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebencanaan sehingga berpengaruh terhadap penurunan resiko bencana.
 - e. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - f. Keterbatasan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana yang belum memadai.
 - g. Belum tercapainya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

- f. Urusan Sosial
 - a. Belum optimalnya penerapan regulasi pengentasan kemiskinan.
 - b. Masih kurangnya fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.
 - c. SDM penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan yang masih terbatas.
 - d. Belum optimalnya penanganan kenakalan remaja dan LGBT.
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - f. Belum tercapainya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial.

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

- a. Urusan Tenaga Kerja
 - a. Masih rendahnya daya saing dan produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh tenaga kerja relatif masih rendah yakni pada tingkatan SMA (Sekolah Menengah Atas).
 - b. Terbatasnya kesempatan kerja.
 - c. Belum optimalnya program pengembangan kewirausahaan (*entrepreneur*) pemuda milenial sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja;
 - d. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik yang muncul karena ketidaksesuaian antara spesifikasi lapangan kerja dengan ketersediaan sumber daya;
 - e. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja terutama hak jaminan kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan pensiun;
 - f. Belum optimalnya jaringan kerjasama tenaga kerja ke luar daerah dan luar negeri.
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.
 - c. Kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan masih belum memadai.
 - d. Belum optimalnya peran P2TP2A Kabupaten Padang Pariaman.
 - e. Belum optimalnya pemenuhan terhadap hak-hak anak di Kabupaten Padang Pariaman.

- f. Belum maksimalnya gerakan menuju Kabupaten Layak Anak karena rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap kota layak anak.
- c. Urusan Pangan
 - a. Kurangnya diversifikasi dan intensifikasi pangan.
 - b. Masih rendahnya Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan dalam upaya Peningkatan Ketahanan Pangan;
 - c. Belum tercapainya target Kabupaten Padang Pariaman sebagai kabupaten sumber benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Belum optimalnya Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) guna meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Belum optimalnya penerapan Pola Pangan Harapan (PPH).
 - f. Kurangnya Keamanan Pangan Segar yang merupakan suatu hal yang sangat perlu untuk diterapkan karena kurangnya pengawasan oleh Stake Holder yang bersangkutan;
 - g. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah yang belum proporsional;
 - h. Belum optimalnya penerapan pola konsumsi makanan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga dapat mengurangi balita yang kurang gizi /stunting.
- d. Urusan Pertanahan
 - a. Masih banyaknya kepemilikan lahan pemda yang belum bersertifikat.
 - b. Masih tingginya konflik-konflik yang terjadi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum.
 - c. Belum optimalnya penataan administrasi dan inventarisasi pertanahan milik Pemda.
- e. Urusan Lingkungan Hidup
 - a. Belum mebudayanya perilaku ramah lingkungan masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan potensi SDA.
 - b. Belum kuatnya komitmen pelaku usaha atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.
 - d. Terjadinya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar pengguna.
 - e. Belum optimalnya peningkatan kinerja aparatur dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Belum maksimalnya pemanfaatan database kependudukan untuk pengambilan kebijakan

- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional terutama dalam hal peralatan operasional penunjang pelayanan keliling di lapangan, seperti mobil pelayanan serta peralatan pendukung lainnya.
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur seperti ruangan kantor, terutama ruangan penyimpanan arsip dan persediaan barang.
 - d. Terbatasnya anggaran dalam menunjang pelayanan sehingga tidak semua daerah terpencil bisa dikunjungi untuk dilakukan pelayanan secara langsung.
 - e. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, terutama PNS/ASN Tenaga Teknis (Administrator, Operator SIAK, serta Teknisi Komputer)
- g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun, bahkan menganggap bahwa pembangunan adalah tugas Pemerintah.
 - b. Masih belum berfungsi BUMNag sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat.
 - c. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam penguasaan Teknologi Tepat Guna sehingga belum mampu menunjang penguatan ekonomi masyarakat.
 - d. Pemanfaatan teknologi masih terbatas pada beberapa Nagari yang relatif dekat dengan pusat-pusat fasilitas seperti kecamatan, kabupaten sedangkan nagari dan kelurahan yang relatif jauh dari pusat fasilitas berbagai usaha masih di tangani secara konvensional/tradisional.
- h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Permasalahan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya adalah :
- a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain : masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders, masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK, pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB.
 - b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB antara lain : angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) masih tinggi, tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (*drop out*) masih tinggi, penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (MKJP) terus meningkat, rendahnya kesertaan ber-KB pria.

- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain : angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, masih banyaknya perkawinan usia muda, terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), Tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan remaja berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi, pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah, cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.
- i. Urusan Perhubungan
 - a. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
 - b. Minimnya ketersediaan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang jelas.
 - c. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana/fasilitas lalu lintas untuk keselamatan dan keamanan transportasi seperti fasilitas perlengkapan jalan/rambu, halte, trotoar, penerangan jalan umum, dan terminal.
 - d. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi.
 - e. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan.
 - f. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.
 - g. Masih tingginya angka kecelakaan yang berada di daerah ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan daerah rawan kecelakaan lainnya (tanjakan, penurunan, dan tikungan).
 - h. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
 - i. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - j. Masih banyaknya angkutan umum seperti angdes di Kabupaten Padang Pariaman yang belum mengurus uji keur kendaraan, sehingga banyak trayek yang tidak layak beroperasi.
- j. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Kurangnya ketersediaan anggaran yang menyebabkan terbatasnya sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi pemerintah daerah.
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan teknologi komunikasi dan informasi.

- c. Pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap budaya kerja organisasi.
 - d. Masih rendahnya nilai indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman (predikat Kurang).
- k. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- a. Belum optimalnya pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing.
 - b. Kurangnya pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM.
 - c. Efek pandemi covid-19 yang menyebabkan turunnya volume usaha.
 - d. Masih kurangnya inovasi pada produk sehingga daya saing produk rendah.
 - e. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi dan usaha kecil menengah terutama dalam penggunaan teknologi informasi
- l. Urusan Penanaman Modal
- a. Belum adanya dasar hukum yang mengatur terkait dengan partisipasi perusahaan dalam penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR) di Padang Pariaman.
 - b. Masih rendahnya kesadaran perusahaan terhadap kewajiban penyampaian Laporan Koordinasi Penanaman Modal (LKPM).
 - c. Belum selesainya perencanaan pembangunan sentra coklat Padang Pariaman.
 - d. Belum selesainya perencanaan pembangunan kawasan industri Kabupaten Padang Pariaman.
- m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- a. Belum tersedianya/terpenuhinya sarana prasarana olahraga yang representatif milik pemerintah.
 - b. Kurangnya koordinasi organisasi kepemudaan dan keolahragaan terhadap Disparpora sehingga kurangnya pemantauan kegiatan di organisasi tersebut.
 - c. Belum terbentuknya satuan kegiatan olahraga sehingga sulitnya mengidentifikasi atlit-atlit yang berprestasi.
 - d. Masih minimnya *event* yang bermuatan kompetisi kepemudaan.
- n. Urusan Statistik
- a. Belum optimalnya pemanfaatan data daerah.
 - b. Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) daerah Kabupaten Padang Pariaman masih dalam proses sehingga implementasi SDI Tingkat daerah belum berjalan dengan optimal.
 - c. Belum adanya SDM tenaga JFT statistik yang sesuai dengan kompetensi pendidikannya.
- o. Urusan Kebudayaan

- a. Kurangnya pemahaman sejarah, seni tradisional dan warisan budaya masyarakat.
- p. Urusan Perpustakaan
Permasalahan pada urusan perpustakaan, diantaranya adalah :
 - a. Masih kurangnya variasi koleksi buku perpustakaan untuk dapat meningkatkan minat baca yang mana bisa meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan.
 - b. Belum tersedianya ruangan baca perpustakaan yang representatif serta belum memiliki ruang Tandom dan ruangan Pengolahan Bahan Pustaka.
 - c. Belum optimalnya penyelenggaraan perpustakaan nagari dan operasioanl mobil perpustakaan keliling.
 - d. Masih rendahnya akses baca masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan jauhnya lokasi Gedung Perpustakaan Daerah dari tempat tinggal masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.
- q. Urusan Kearsipan
 - a. Keterbatasan sarana dan prasana penunjang kearsipan seperti belum adanya depo/tempat penyimpanan arsip yang sesuai dengan standar tata kelola kearsipan yang baku serta belum memiliki kendaraan operasional khusus untuk pengelolaan dan penataan arsip ke SKPD, Kecamatan dan Nagari.
 - b. Masih kurangnya arsiparis yang melakukan pengelolaan kearsipan.
 - c. Kurangnya informasi mengenai sejarah lengkap tentang Kabupaten Padang Pariaman serta kurangnya pemeliharaan dan perhatian terhadap situs/cagar yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
 - d. Belum seimbangnnya antara volume arsip di Kabupaten Padang Pariaman dengan sarana penyimpanan kearsipan di LKD maupun SKPD.
 - e. Kurang seriusnya perhatian pimpinan SKPD, Kecamatan dan Nagari terhadap pendataan, penataan arsip serta masih sedikitnya penyerahan arsip statis ke LKD.
 - f. Kurangnya pendidikan dan pelatihan kearsipan sehingga kompetensi pengelola kearsipan masih rendah.

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

- a. Urusan Pariwisata
 - a. Lemahnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan dan pemanfaatan produk wisata, meskipun Kabupaten Padang Pariaman memiliki daya tarik tersendiri dengan orisinalitas tinggi serta keragaman daya tarik lainnya.
 - b. Belum meratanya pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Padang Pariaman.
 - c. Lemahnya informasi produk pariwisata Kabupaten Padang Pariaman secara komprehensif dan akurat.

- d. Kurangnya koordinasi antara pelaku wisata dan stakeholder lainnya dalam upaya pengembangan sektor pariwisata di Padang Pariaman.
- e. Kurangnya kemampuan pelaku ekonomi kreatif.
- b. Urusan Pertanian
 - a. Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dalam pengembangan usaha pertanian, baik di On farm maupun Off Farm.
 - b. Belum optimalnya Pengawasan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam upaya menekan konversi lahan ke non pertanian.
 - c. Kurangnya penataan usaha pertanian melalui penerapan perizinan di sektor pertanian.
 - d. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui tingkat pendapatan petani/peternak.
- c. Urusan Perdagangan
 - a. Masih minimnya sarana dan prasarana di pusat perdagangan.
 - b. Terjadinya peningkatan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
 - c. Operasi pasar/ pasar murah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - d. Belum optimalnya sosialisasi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) kepada masyarakat.
- d. Urusan Perindustrian
 - a. Masih rendahnya tingkat penjualan produk hasil IKM.
 - b. Kurangnya daya saing produk karena kurangnya inovasi dalam menghasilkan produk.
 - c. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah.
- e. Urusan Perikanan
 - a. Sarana dan prasarana nelayan masih semi tradisional dan terbatas sehingga hasil tangkapan tidak optimal atau mengalami penurunan.
 - b. Masih adanya penangkapan ilegal (*illegal fishing*) yang berdampak terhadap kerusakan ekosistem dan sumber hayati laut.
 - c. Belum adanya Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang memiliki Surat Keterangan Asal Induk Ikan (SKAI) sehingga kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah.
 - d. Harga pakan yang cenderung mahal dan tidak seimbang dengan harga jual ikan.
 - e. Masih rendahnya mutu olahan hasil perikanan karena kualitas SDM yang masih rendah.
 - f. Rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk mengurus legalitas usaha.
 - g. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perikanan.
 - h. Kemandirian pelaku usaha perikanan masih rendah.

2.3.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Fungsi Perencanaan
 - a. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan;
 - b. Adanya ego sektoral antar instansi sehingga sinergitas dalam pelaksanaan program perencanaan belum maksimal;
 - c. Belum optimalnya pengintegrasian, perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT;
 - d. Menurunnya kepercayaan masyarakat akibat rendahnya pemanfaatan hasil musrenbang untuk penganggaran pembangunan daerah;
 - e. Kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
 - f. Konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal;
 - g. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur perencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan.

- b. Fungsi Keuangan
 - a. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah berbasis IT yang terintegrasi;
 - b. Belum adanya perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset yang terorganisir;
 - c. Belum optimalnya penggalan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Implementasi aplikasi SIPD terkait pengelolaan keuangan daerah yang masih terkendala dalam penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.
 - e. Kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan covid-19 yang berdampak terhadap penganggaran dan realisasi APBD.

- c. Fungsi Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Belum adanya sistem terpadu terkait dengan manajemen kepegawaian;
 - b. Belum tersedianya ruangan untuk menyimpan data kepegawaian secara utuh;
 - c. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Padang Pariaman;
 - d. Masih banyaknya Aparatur yang tidak profesional;
 - e. Pemanfaatan dan pengetahuan IT oleh aparatur yang masih sangat terbatas;
 - f. Minimnya informasi ASN terhadap jabatan fungsional;

- d. Fungsi Penelitian dan Pengembangan
 - a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) peneliti di Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Terbatasnya kesempatan untuk mengikuti diklat penelitian karena beban kerja yang diemban.
- e. Fungsi Pengawasan

Permasalahan pada urusan pengawasan, diantaranya adalah :

 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya.
 - b. Jumlah dan kualitas aparat pengawasan yang profesional belum memadai. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan tugas pemeriksaan masih melibatkan pejabat struktural dan staf sehingga sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan.
 - c. Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - d. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.
 - e. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja. Sarana komputer dan printer yang sangat minim. Kondisi ini tentu saja menghambat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Mobil operasional yang minim juga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pemeriksaan di lapangan.
- f. Sekretariat Dewan
 - a. Belum optimalnya dukungan SDM (jumlah dan kompetensi), Sarana Prasarana Sekretariat DPRD terhadap upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dalam rangka peningkatan kinerja DPRD;
 - b. Belum optimalnya kinerja DPRD dalam pelaksanaan Tupoksinya;
 - c. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
 - d. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya;
 - e. Perubahan peraturan perundangan, pedoman dan kebijakan yang berdampak penyusunan produk hukum daerah, tata tertib dan keuangan DPRD dan mekanisme pelaksanaan anggaran daerah;
 - f. Belum optimalnya kemampuan merencanakan kebutuhan penganggaran yang berbasis kinerja dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

- g. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan DPRD mengharuskan Sekretariat DPRD harus jeli dan efektif dalam merencanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan DPRD;
 - h. Dinamika Politik : adanya perbedaan pandangan dan perpecahan/dualisme yang dapat membuat banyak keputusan tidak bisa diambil yang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan teknis administrasi;
 - i. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berbasis kinerja sesuai dengan Nawacita Presiden RI;
 - j. Masih kurangnya disiplin aparatur dan anggota DPRD;
 - k. Bercampurunya kepentingan politis dengan teknis terkadang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan teknis administrasi.
- g. Seretariat Daerah
- a. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 1. Terbatasnya anggaran menyebabkan tidak optimalnya pembinaan ke sekolah atau pelaksana UKS.
 2. Kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji tidak dapat dilaksanakan karena Pemerintah Arab Saudi tidak membuka akses bagi jamaah haji dari negara manapun akibat pandemi covid-19.
 3. Data jumlah anak yang belum mempunyai akte kelahiran karena orangtua yang belum membuat akte kelahiran disebabkan ketidakpahaman mereka tentang prosedurnya.
 4. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak belum terpenuhi karena faktor ekonomi.
 - b. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
 1. OPD relatif kurang serius menindaklanjuti rumusan atau hasil rapat koordinasi.
 2. Banyaknya OPD yang tidak berkoordinasi terkait adanya kerja sama antar daerah.
 3. Kurangnya perhatian dan keseriusan OPD dalam menyiapkan dan menyajikan data dan dokumen pendukung untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
 - c. Bagian Hukum
 1. Lambatnya Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil perbaikan SK, Perbup dan Perda sehingga membuat terhambatnya/lambatnya pekerjaan.
 2. Lambatnya perangkat daerah menyerahkan arsip/dokumen asli produk hukum ke bagian hukum sehingga berdampak lambatnya administrasi dan terhambatnya proses pengiriman data.
 3. Masih kurangnya respon dari beberapa OPD terkait pengumpulan data Ranham dan Kabupaten Kota Peduli HAM.

- d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 1. Masih adanya perangkat daerah yang belum tertib administrasi dalam penginputan dokumen RUP dan Sirup.
 2. Masih banyaknya perangkat daerah yang belum menginput paket non tender.
 3. Keterbatasan anggaran menyebabkan peserta Bimtek Pembinaan PBJ jadi terbatas.

- e. Bagian Administrasi Pembangunan
 1. OPD tidak memperhatikan untuk permintaan penomoran kontrak, sehingga pengendalian administrasi kontrak menjadi tidak efektif.
 2. Perlu dilakukan tambahan dana bimbingan pembuatan laporan seperti Simbangda dan TEPRRA, kemudian bagian pelaporan masing-masing OPD diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan diberi insentif karena semua laporan sampai ke staf kepresidenan.
 3. Adanya OPD yang masih kurang tanggap terhadap permintaan laporan realisasi kegiatan.
 4. Masih banyaknya OPD yang belum mematuhi aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.

- f. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 1. Kelangkaan pajak subsidi yang dialami petani Padang Pariaman, sehingga menyebabkan penurunan produksi hasil pertanian.
 2. Harga sembako cenderung tidak stabil sehingga menyebabkan meningkatnya inflasi.
 3. Terjadinya *covid-19* menyebabkan tidak terlaksananya *event* promosi.

- g. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 1. Masih kurangnya SDM yang ahli dalam bidang administrasi dan pengarsipan, sehingga berkas di Bagian Humas dan Protokol belum teratur.
 2. Masih kurangnya SDM dibidang keprotokolan dan kehumasan, sehingga dalam pengaturan tempat acara maupun penghormatan kepada pejabat yang hadir di suatu acara masih belum dilaksanakan secara maksimal.
 3. Masih adanya intervensi dari berbagai pihak saat acara/upacara berlangsung sehingga terkadang membuat petugas keprotokolan kewalahan dalam mengambil sikap/tindakan yang terbaik saat itu.
 4. Belum adanya koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, baik Forkopimda maupun OPD.
 5. Dalam kegiatan keprotokolan ada beberapa OPD dan kecamatan tidak mengutus peserta Bimtek yang memiliki kompetensi dibidang keprotokolan, sehingga pembekalan ilmu tidak berlangsung dengan baik dan berkesinambungan.

6. Kurangnya SDM yang berkompetensi pada bidang pembuatan naskah pidato pemerintah daerah.
 7. Pemanfaatan aplikasi klipng digital belum maksimal, sehingga kegiatan pemerintah daerah dan pimpinan belum tersosialisasi secara optimal dan pembuatan klipng masih bersifat konvensional.
 8. Penggunaan aplikasi lapor span belum terlaksana secara maksimal karea sosialisasi ke admin penghubung belum optimal.
 9. Terbatasnya anggaran untuk pembuatan majalah saiyo sakato.
 10. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
- h. Bagian Perencanaan dan Keuangan
1. Masih rendahnya pemahaman pejabat pengelola keuangan yang ada di lingkungan sekretariat daerah kabupaten padang pariaman terhadap perencanaan, proses penganggaran maupun tentang pengelolaan keuangan daerah.
 2. Belum terkoordinasinya perencanaan bagian-bagian pada lingkungan sekretariat daerah kabupaten padang pariaman secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan perencanaan yang bersifat mandiri menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya dampak dari program kegiatan yang tidak maksimal.
 3. Masih lemahnya koordinasi dengan bagian-bagian dan OPD yang terkait.
 4. Kurang tertibnya administrasi proses perencanaan penganggaran yang dilaksanakan oleh seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap bagian perencanaan dan keuangan sebagai *leader* dalam hal perencanaan penganggaran.
 5. Masih lambatnya sosialisasi terhadap perubahan aturan, kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan.
 6. Proses perencanaan belum terlalu mengarah kepada skala prioritas dan indikator kinerja utama.
- i. Bagian Umum
1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM di Bagian Umum dan Perlengkapan.
 2. Terbatasnya sarana dan prasarana di Bagian Umum dan Perlengkapan.
 3. Terjadinya rasionalisasi terhadap anggaran akibat terbatasnya anggaran.
- j. Bagian Organisasi
1. Pandemi *covid 19* yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan Reformasi Birokrasi.
 2. Belum adanya pedoman penyusunan atau perbandingan Ranperbup penerapan komponen pelayanan prima.

3. Ranperbup tata naskah dinas elektronik belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
- h. Unsur Pemerintahan Umum
 - a. Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
 - b. Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Belum terciptanya etika dan budaya politik yang demokratis.
 - d. Belum terwujudnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.
 - e. Maraknya pola kebebasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi.
 - f. Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur) dalam pemantapan wawasan kebangsaan.
 - g. Kurangnya program pembinaan karakter bangsa.
 - h. Belum banyaknya program-program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat mempresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Salah satu sinkronisasi yang dilakukan pada RKPD 2023 ini merupakan akibat munculnya wabah pandemi Covid-19 yang melanda secara luas seluruh negara di dunia, yang saat ini memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan termasuk di Kabupaten Padang Pariaman. Padang Pariaman sebagai salah satu bagian dari entitas kehidupan masyarakat dunia dan Indonesia, sangat perlu melakukan penyesuaian perencanaan secara terstruktur dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk membangun keseimbangan kehidupan baru masyarakat (*new normal*).

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 secara detail mendeskripsikan kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman serta arah kebijakan Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun 2023.

Analisis kerangka keuangan dan pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka hasil pada bab ini terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan terhadap realisasi APBD dan laporan keuangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

Selain itu terkait juga dengan pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan pengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi

kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*).

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Perkembangan Perekonomian Nasional

Persebaran pandemi COVID-19 hingga tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya perkembangan varian baru. COVID-19 varian Delta dan varian Omicron menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan kasus hingga memunculkan gelombang baru, yang membatasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Meski demikian, ekonomi global diperkirakan telah mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara, terjadinya peningkatan permintaan dan volume perdagangan, serta pemulihan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah mengalami pemulihan ekonomi, tecermin dari level PDB riil yang telah melampaui level prapandemi. Pemulihan yang relatif lebih cepat juga dialami oleh negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dalam upaya mencapai *herd immunity*.

Aktivitas perdagangan dunia mengalami peningkatan tinggi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena didorong oleh pemulihan permintaan global yang terjadi pada tahun 2021. Hal ini tecermin dari peningkatan yang tinggi pada *Baltic Dry Index* (BDI). Namun, gangguan rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Meski demikian, volume perdagangan dunia diperkirakan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 10,8 dan 4,7 persen, setelah berkontraksi hingga 5,3 persen pada tahun 2020. Di sisi lain, *Purchasing Managers' Index* (PMI), baik *Manufacturing* maupun *Services* mampu bertahan di zona ekspansi di atas level 50 sepanjang tahun 2021.

Perkonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, pada tahun 2021 ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi, menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, di tahun 2021 PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US\$4.349,5. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang

belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia.

Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi COVID-19 mendorong fenomena terjadinya "*pent up demand*" pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang terutama nonmigas yang mencapai 27,5 persen (*yoy*). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9 persen terhadap PDB.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, dan industri furnitur.

Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan *real estate* tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 dan 2,8 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu,

berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9 persen secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih kembali.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

3.1.2.1. Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$4.720-4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*. Adapun rincian Sasaran makro ekonomi nasional untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No.	Uraian	Realisasi 2021	Outlook 2022	Sasaran 2023	
				RPJMN	RKP
1	Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	3,7	5,0 - 5,5	5,7 - 6,0	5,3 - 5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,4-6,0	4,0 - 4,6	5,3 - 6,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5 - 9,0	7,0 - 7,5	7,5 - 8,5
4	Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376-0,378	0,374 - 0,377	0,375 - 0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,67-72,69	74,774	73,31 - 73,49

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2023

Stabilitas makroekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0-4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00-Rp15.000,00 per US\$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3-6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375-0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,3-73,49.

Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

3.1.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (*herd immunity*) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

1) Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat *trajectory* tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (*within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

2) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

3) Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

3.1.3.1. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menekan laju pertumbuhan perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%. Pertumbuhan PDRB per kapita pun berkontraksi ke angka Rp. 30,64 juta dari tahun 2019 pada angka Rp. 31,67 juta. Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29%. Hingga data terkini di triwulan I 2022 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat pada angka 3,64% jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi dalam 4 triwulan terakhir dibandingkan dengan 4 triwulan sebelumnya mencapai angka 4,25%.

Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *Gini Ratio* walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir justru mengalami tren positif yang menurun 0,001 poin ke angka 0,300 pada tahun 2021 yang lalu. Pandemi COVID-19 justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,381 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga ketimpangan wilayah ini bertahan di angka 0,315.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, kondisi pandemi COVID-19 menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%. Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%. Secara umum berdasarkan karakteristik wilayah kemiskinan cenderung berada di kawasan perdesaan dan pengangguran berada di kawasan perkotaan. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lebih berdampak di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan angka pengangguran lebih tinggi dari peningkatan angka kemiskinan. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,04% dan angka pengangguran menjadi 6,52%. Perkembangan awal tahun 2022 di bulan Februari tercatat tingkat pengangguran kembali turun ke angka 6,17%.

3.1.3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara berdampak terhadap terkoreksinya pertumbuhan ekonomi secara global. Prediksi awal pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 sedikit membaik dibandingkan 2019 yang kinerjanya melemah. Faktanya pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan tumbuh 2,5 persen, pada tahun 2020 ini terkoreksi menjadi -4,3 persen, lebih dari 2 setengah kali lipat dari penurunan selama krisis keuangan global tahun 2009. Kondisi ini tentu sangat berdampak besar bagi aktivitas perekonomian dunia secara umum dan Indonesia pada khususnya. Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 cukup menjanjikan walaupun dalam perkembangannya terdapat beberapa varian baru virus Covid-19. Beberapa Lembaga keuangan dunia menilai pertumbuhan ekonomi global mencapai angka 5,4% di Tahun 2021 lalu.

Sementara itu PBB memperingatkan bahwa dampak sosio-ekonomi yang menghancurkan dari pandemi COVID-19 akan dirasakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Pemulihan akibat pandemi sangat dipengaruhi oleh kecepatan proses vaksinasi untuk mencapai *herd immunity*. Laporan PBB bertajuk *World Economic Situation and Prospects* menggarisbawahi bahwa pemulihan berkelanjutan dari pandemi akan bergantung tidak hanya pada besaran stimulus dan peluncuran vaksin yang cepat, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas langkah-langkah ini untuk membangun ketahanan terhadap guncangan di masa depan. Menghindari hal itu, dibutuhkan investasi cerdas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan iklim untuk memastikan pemulihan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan.

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,69 persen. *Outlook* ekonomi Indonesia tahun 2022 memperkirakan ekonomi Indonesia akan *bounceback* dengan pertumbuhan 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 akan ditopang oleh kebijakan vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai angka 100% dari target sasaran vaksinasi meningkat dari kondisi di akhir 2021 yang mencapai angka 75%.

Sementara itu konsumsi pemerintah pada tahun 2023 diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus PEN yang direncanakan masih besar. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Kinerja impor diperkirakan masih lemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan.

Pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kasus harian COVID-19. Walaupun sempat menurun diakhir tahun 2021, jumlah kasus harian kembali meningkat di awal tahun 2022. Hal ini senada dengan mobilitas masyarakat yang tertahan di akhir tahun 2021, justru meningkat di awal tahun 2022. *Outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2022 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,4%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2022 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 3,4%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 3,29%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 5,2%. Proyeksi yang lebih rendah ini merujuk kepada proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional. Sampai dengan kondisi bulan Desember 2021 proses vaksinasi di Sumatera Barat baru mencapai angka 69%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang positif ditunjukkan dari pencapaian triwulan I 2022 yang meningkat 3,64% dari periode yang sama ditahun 2021. Dengan angka tersebut dan pola pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam 10 tahun terakhir, maka diprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan mencapai angka 4,72%, lebih tinggi dari prediksi awal dalam RKPD 2022.

Berdasarkan hasil Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumatera Barat periode Februari 2022 yang dilakukan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, antara lain yakni masih dimungkinkannya muncul risiko adanya beberapa varian baru COVID-19 sehingga dikhawatirkan akan munculnya kembali pengetatan kebijakan aktifitas luar ruang yang akan berdampak kepada aktifitas ekonomi, belum ada satu pihak pun yang mampu menjamin berakhirnya pandemic Covid atau turun status menjadi endemic serta disamping itu juga semakin berkurangnya kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap protokol COVID yang membuka peluang risiko masih berlanjutnya status pandemi di tahun 2022 masih dimungkinkan, adanya Konflik Ukraina-Rusia memburuk yang memberikan tekanan kepada perekonomian global, termasuk inflasi yang lebih tinggi serta proyek konstruksi khususnya JJTS Padang-Sicincin kembali ditunda karena progress pembebasan lahan yang minim kemajuan.

Untuk tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2023 diperkirakan berada pada angka 4,2 - 5,2 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Sektor Pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Pemerintah daerah juga telah mencanangkan *Visit Beautiful West Sumatra 2023* yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didasarkan pada pencapaian ekonomi triwulan I 2022, sehingga diprediksi mencapai angka 4,65%.

Tingkat pengangguran diharapkan bisa turun ke angka 6,15% dan secara bertahap di tahun 2023 bisa kembali ke angka sebelum pandemi. Sementara itu kinerja penurunan angka kemiskinan berjalan baik walaupun dalam kondisi pandemi. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu mewaspadaikan anomali pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan diharapkan mampu turun ke angka 5,70% di tahun 2022 dan secara bertahap turun ke angka 5,37% di tahun 2023.

Sementara itu tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah diharapkan mampu berkurang secara signifikan pasca pandemi. Gini Rasio diprediksi turun ke angka 0,298 di tahun 2022 dan berkurang ke angka 0,296 di tahun 2023. Tingkat ketimpangan wilayah juga diprediksi turun ke angka 0,208 di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi dan diharapkan mampu bertahan di angka yang sama 0,213 di tahun 2023. Secara lengkap proyeksi indikator makro daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,6	3,29	4,72	4,65
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,58	32,47	33,58
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,41	47,13	48,86
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,88	6,52	6,15	5,72

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

5	Indeks Pembangunan Manusia	72,38	72,65	72,95	73,46
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,47	69,59	69,79	69,97
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,09	14,26	14,43
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,07	9,16	9,25
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10,733	10,79	10,841	10,997
6	Kemiskinan	6,56	6,04	5,7	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	364,79	339,92	321,86	306,71
8	Gini Rasio	0,301	0,3	0,298	0,296
9	Indeks Williamson	0,311	0,315	0,208	0,213

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Pevinsi Sumatera Barat 2022

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2023 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2022 dan 2023 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Secara makro ekonomi kondisi perekonomian Kabupaten Bangka diimplementasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didalamnya memuat berbagai indikator ekonomi baik secara pendekatan output maupun menurut penggunaannya, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi (PE) serta tingkat inflasi, mupun indikator lainnya yang memiliki

keterkaitan langsung dengan kinerja perekonomian seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan. lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021

No.	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,85	5,44	2,40	-10,46	2,18
2	PDRB ADHK (Rp. Juta)	12.350.186,95	13.021.887,79	13.334.921,66	11.939.479,19	12.199.848,45
	PDRB ADHB (Rp. Juta)	19.038.379,57	20.438.318,45	21.252.415,30	17.934.814,60	18.455.088,03
3	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	30,05	31,51	32,08	28,58	28,17
	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	46,32	49,45	51,14	42,95	42,65
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	68,90	69,71	70,59	70,61	70,76
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	67,96	68,23	68,58	68,79	68,97
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,21	7,50	7,86	7,87	7,88
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,56	13,57	13,62	13,67	13,68
	- Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	931.572	1.042.944	1.071.430	1.084.305	1.157.738
5	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6,65	7,03	6,08	8,13	8,41
6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,46	8,04	7,10	6,95	7,22
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,13	1,25	1,02	0,67	0,81
	- Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	34,70	33,20	29,48	28,98	30,41
7	Indeks Rasio Gini	0,280	0,296	0,297	0,257	0,269

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami tren penurunan, terutama tahun 2020 mengalami penurunan drastis hingga berada pada titik -10,46%. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang secara drastis di tahun 2020 ini dipengaruhi karena merebaknya pandemi virus covid-19. Menyebabkan Pemerintah harus mengambil tindakan pembatasan pergerakan masyarakat serta mahalnnya harga tiket penerbangan mengakibatkan lesunya arus lalu lintas udara.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 dan 2021 nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp.1.395.446,48 juta dari Rp.13.334.921,66 juta pada tahun 2020 menjadi Rp.11.939.475,18 juta di tahun 2019. Begitu juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang juga mengalami penurunan, tahun 2019 sebesar Rp.13.334.921,66 juta menjadi Rp.11.939.475,18 juta.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun global. Tingkat inflasi di Padang Pariaman pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi covid-19 yang juga sangat berdampak pada inflasi di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Pada tahun 2021 laju inflasi Kabupaten Padang Pariaman di bulan Desember sebesar 0,48 sedangkan di tahun 2019 mencapai 1,72.

Sasaran pembangunan daerah 2023 tidak hanya difokuskan pada pembangunan ekonomi saja, namun tetap memperhatikan pencapaian sasaran pembangunan lainnya yang akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan daya saing daerah. Pembangunan daerah tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam konteks pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian khusus termasuk penyediaan akses yang berkualitas terutama terkait pelayanan dasar. Untuk melihat tingkat keberhasilan maka juga dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang secara umum dianalogikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman termasuk rendah di Provinsi Sumatera Barat. Namun kondisi ini sudah cukup menggemberikan karena terdata cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Padang Pariaman mencapai 70,76 dan berada di posisi 11 dari tingkat IPM di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa 3 komponen indikator utama penghitungan IPM (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) masih sangat perlu membutuhkan kerja keras Pemerintah Kabupaten

Padang Pariaman untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Padang Pariaman.

a) Komponen indikator Pendidikan

Pada tahun 2021, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai angka 13,68 tahun justru tidak diiringi dengan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang hanya berada pada angka 7,88 tahun.

b) Komponen Indikator Kesehatan

Capaian angka Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2021 sebesar 68,97 masih berada di bawah angka UHH Provinsi Sumatera Barat 69,59. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Padang Pariaman akan kesehatan dan pola hidup sehat.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2020, persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin Padang Pariaman sebesar 34,70 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,46%. Sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dimana penduduk miskin berkurang menjadi 28,98 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,95%, atau telah terjadi penurunan sebesar 24,28 ribu jiwa. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami sedikit penambahan sebesar 1.43 poin menjadi 30,41 ribu jiwa atau 7,22%.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuatif dan berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Tingkat Pengangguran terbuka Padang Pariaman tahun 2017 berada di angka 6,65% dan mengalami penurunan di tahun 2019, namun kembali mengalami peningkatan menjadi 8.13 tahun 2020 dan 8.41 tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya efek covid-19 yang berimbas kepada dunia kerja.

Sebagai stimulus dalam perekonomian daerah, implementasi investasi diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, mendorong berkembangnya sektor ekonomi daerah dan mempersempit kesenjangan antara wilayah dan antar pendapatan masyarakat yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Salah satu ukuran dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan melihat ketimpangan pendapatan masyarakat *Gini Ratio*. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Padang Pariman pada tahun 2021 tergolong rendah pada angka 0,269. Hal ini berarti bahwa untuk pemerataan pendapatan Kabupaten Padang Pariaman sudah tergolong baik.

Tabel 3.4
Sasaran Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Indikator Makro Pembangunan	Realisasi 2021	Outlook 2022	Sasaran 2023	
			RPJMD	RKPD
Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,18	5,44	7,82	7,82
PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	28,17	31,59	32,08	32,08
PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	42,65	46,98	51,14	51,14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	70,76	70,97	72,19	72,19
- Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,97	69,19	69,63	69,63
- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,88	7,89	14,12	14,12
- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,68	13,97	8,16	8,16
- Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	1.157.738	1.186.000	11.382.000	11.382.000
Tingkat Pengangguran terbuka (%)	8,41	7,52	7,68	7,68
Tingkat Kemiskinan (%)	7,22	6,48	6,87	6,87
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	30,41	30,15	29,83	29,83
Indeks Rasio Gini	0,269	0,3	0,294	0,294

Pandemi *Covid-19* menyebabkan proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman menjadi lebih kompleks. Dengan berkurangnya pendapatan, tentu saja juga akan berdampak pada target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Walaupun begitu, di samping menopang ketahanan ekonomi nasional dan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, tentu dengan keoptimisan proyeksi Ekonomi Makro akan tetap dipertahankan dengan memperhatikan capaian-capaian pada tahun sebelumnya.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan 3. untuk menopang ketahanan ekonomi nasional :

1. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro.
2. Potensi kedua adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech (financial technology)* dan *e-commerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat melalui model koperasi yang pada dasarnya menganut prinsip *sharing economy* akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik. Potensi-potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam.

3. Potensi ketiga terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) Jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan laut, (5) Rel kereta api, dan (6) Terminal bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2020 mendatang.

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian daerah yang ada, serta dalam rangka memperkuat fundamental perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, maka untuk tahun 2023 pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan daya dukung melalui sektor pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian dan ekowisata. Adapun rincian arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan petani
2. Penguatan ketahanan pangan masyarakat
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap
4. Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya
5. Peningkatan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan
6. Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB Kabupaten Padang Pariaman
7. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB
8. Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi
9. Peningkatan infrastruktur kepariwisataan dan ekonomi kreatif
10. Pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif yang sesuai dengan karakteristik wilayah padang Pariaman
11. Peningkatan Keahlian pelaku usaha perekonomian masyarakat
12. Peningkatan perekonomian desa sesuai dengan potensi desa
13. Intensifikasi dan diversifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
14. Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT
15. Peningkatan promosi dan kemitraan investasi
16. Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut UU Nomor UU Nomor 23 tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, Kemampuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak terlalu jauh mengalami perubahan. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Kemampuan Fiskal Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2021

Tahun	Nilai	Kategori
2019	0,756	Sedang
2020	0,581	Rendah
2021	0,506	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan bapelitbangda, 2022

Dari tabel terlihat bahwa, kemampuan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman tergolong sangat rendah, dan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Maka dari itu, dalam misi ke-VII dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2026, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam lima tahun ke depan untuk mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan dengan arah kebijakan intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Sebelumnya

Analisis kinerja pelaksanaan APBD pada RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah/realisasi APBD sesuai dengan PP Kinerja pelaksanaan APBD berhubungan dengan Penerimaan Daerah dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan.

Struktur APBD terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Komponen belanja terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.2.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sesuai PP 12 Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.4 Berikut :

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021 (%)

URAIAN	2019		2020		2021		RATA-RATA PROPORSI
	REALISASI	PROPORSI	REALISASI	ROPORSI	REALISASI	PROPORSI	
PENDAPATAN	1.510.528.680.350,01		1.305.720.742.442,99		1.363.454.281.993,95		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.607.521.617,01	6,73	105.893.926.039,99	8,11	116.902.688.648,95	8,57	8,01
Pajak Daerah	48.301.645.277,00	3,20	41.824.536.856,45	3,20	44.350.536.152,56	3,25	3,09
Retribusi Daerah	2.650.742.637,00	0,18	2.185.534.022,00	0,17	2.190.084.354,00	0,16	0,37
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.368.010.478,00	0,42	6.860.844.053,00	0,53	5.884.534.467,00	0,43	0,45
Lain-lain PAD yang Sah	44.287.123.225,01	2,93	55.023.011.108,54	4,21	64.495.921.381,39	4,73	4,09
PENDAPATAN TRANSFER	1.314.502.195.990,00	87,02	1.037.562.389.473,00	79,46	1.179.715.146.177,00	86,52	85,85
Transfer Pemerintah Pusat	1.257.566.273.241,00	83,25	987.851.221.910,00	75,66	1.115.655.117.434,00	81,83	81,76
Dana Perimbangan	1.139.643.299.241,00	75,45	973.687.956.910,00	74,57	1.015.949.189.434,00	74,51	76,76
Dana Insentif Daerah (DID)	22.884.576.000,00	1,52	14.163.265.000,00	1,08	-	0,00	1,51
Dana Desa	95.038.398.000,00	6,29	-	0,00	99.705.928.000,00	7,31	3,49
Transfer Antar Daerah	56.935.922.749,00	3,77	49.711.167.563,00	3,81	64.060.028.743,00	4,70	4,09
Pendapatan Bagi Hasil	56.935.922.749,00	3,77	49.711.167.563,00	3,81	62.560.028.743,00	4,59	3,89
Bantuan Keuangan	-	0,00	-	-	1.500.000.000,00	0,11	0,20
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	94.418.962.743,00	6,25	162.264.426.930,00	12,43	66.836.447.168,00	4,90	6,14
Pendapatan Hibah	94.408.997.743,00	6,25	95.747.453.771,00	7,33	7.462.975.000,00	0,55	4,24
Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.965.000,00	0,00	66.516.973.159,00	5,09	59.373.472.168,00	4,35	1,90

Sumber : LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Berikut disajikan target dan realisasi pendapatan daerah serta tingkat perkembangan pertumbuhan dari tahun 2019-2022.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
1	2019	1.520.643.679.559,00	1.510.528.680.350,01	99,33		
2	2020	1.348.174.651.961,00	1.305.720.742.442,99	96,85	-11,34	-13,56
3	2021	1.409.406.176.435,00	1.363.453.039.825,95	96,74	4,54	4,42
	Rata-Rata	1.407.161.771.491,75	1.090.875.778.159,09	76,63	-3,66	-31,89

Sumber : LKPD Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2019-2022 didominasi oleh sumber dalam bentuk pendapatan transfer dengan porsi rata-rata 85,85%, disusul oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,01% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 6,14%. Dari Tabel 3.8 terlihat baik target maupun realisasi Pendapatan Daerah cenderung berfluktuasi, terutama tahun 2020 target pendapatan sangat jauh berkurang dari tahun sebelumnya 2019. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 Pemerintah Pusat memotong langsung Dana Alokasi Umum dan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan *Refocusing* Anggaran pada setiap Belanja Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan merealokasi pada Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan *covid-19*.

Tahun 2021 target Pendapatan Daerah kembali dapat ditingkatkan, namun peningkatan tersebut belum terlaksana secara maksimal, karena Kabupaten Padang Pariaman belum bisa dikatakan bebas dari pandemi *covid-19*. Menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

3.2.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Kelompok belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kelompok belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan kelompok belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Belanja operasi terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal terdiri dari; belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan belanja transfer terdiri dari Belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang realisasi dari kebijakan pembelanjaan yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang, dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pertumbuhan %
2019	1.035.969.283.307,00	1.262.747.805.742,70	121,89	1,65
2020	1.220.855.094.205,16	1.169.422.356.101,00	95,79	-7,39
2021	1.409.808.204.605,00	1.326.677.897.165,67	94,10	13,45
Rata-Rata	1.222.210.860.705,72	1.252.949.353.003,12	103,93	2,57

Sumber : LKPD Kab. Padang Pariaman 2019-2021

Pertumbuhan realisasi belanja Padang Pariaman selama periode 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 3.15. Belanja daerah mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi Rp.1.326.677.897.165,67,- setelah terjadi penurunan 7,39% di tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar Rp.1.169.422.356.101,-.

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk belanja daerah tahun 2019-2021, belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman didominasi untuk pemenuhan belanja operasi dengan proporsi rata-rata sebesar 71,33%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah sebagian besar masih diarahkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa lainnya.

Tabel 3.9
Kontribusi Komponen Belanja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Uraian Belanja	Proporsi Belanja Daerah (%)			
	2019	2020	2021	Rata-rata
Belanja Operasi	79,07	82,52	76,19	79,26
Belanja Modal	20,84	15,59	10,34	15,59
Belanja Tidak Terduga	0,09	1,89	0,05	0,68
Belanja Transfer	14,40	14,90	13,43	14,24

Sumber : LKPD Kab. Padang Pariaman 2019-2021

3.2.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk tahun 2021.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pertumbuhan (%)
2019	15.579.272.363,15	8.988.256.555,15	57,69	-308,39
2020	48.088.415.244,16	37.956.336.410,01	78,93	322,29
2021	402.028.170,00	9.723.632.079,15	2418,64	-74,38
Rata-Rata	21.356.571.925,77	18.889.408.348,10	851,76	123,95

Sumber : LKPD Kab. Padang Pariaman Tahun 2019-2021

3.2.2. Proyeksi Keuangan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,

sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Analisis kerangka pendanaan daerah tetap senantiasa memperhatikan perkembangan realisasi komponen-komponen terkait pada tahun 2019-2021 dan APBD tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus mengambil kebijakan berupa rasionalisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026. Hal ini didasarkan pada perubahan terhadap target-target pembangunan akibat wabah Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dan tentu akan mempengaruhi capaian-capaian indikator ekonomi makro pada perencanaan awal di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan pendapatan daerah kabupaten Padang Pariaman. Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun anggaran 2023 diasumsikan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target tahun anggaran 2020.

Pada tahun anggaran 2023, struktur pendapatan daerah sudah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah diasumsikan mengalami penurunan sebesar 0,42% apabila dibandingkan dengan target APBD tahun 2022, penurunan tersebut bersumber diantaranya dari PAD yang ditargetkan turun sebesar 0,69%, dana transfer turun dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan sebesar 0,77%.

3.2.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya; kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya ekstensifikasi dan

intensifikasi PAD, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Akun	URAIAN	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Proyeksi Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2023
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	105.893.926.039,99	116.902.688.648,95	128.499.880.200,00	117.175.380.200,00
1.1.1	Pajak Daerah	41.824.536.856,45	44.332.148.446,56	55.550.000.000,00	45.727.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	2.185.534.022,00	2.190.084.354,00	2.562.500.000,00	2.337.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	6.860.844.053,00	5.884.534.467,00	6.450.000.000,00	5.800.000.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	55.023.011.108,54	64.495.921.381,39	63.937.380.200,00	63.311.380.200,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.037.562.389.486,00	1.179.715.146.177,00	1.206.922.697.812,00	1.207.105.030.812,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	973.687.956.910,00	1.115.655.117.434,00	1.152.684.263.000,00	1.152.866.596.000,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	0,00	1.015.949.189.434,00	1.056.594.298.000,00	0,00
1.2.1.2	Dana Transfer Daerah (DID)	14.163.265.013,00	0,00	1.317.667.000,00	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	0,00	99.705.928.000,00	94.772.298.000,00	0,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.711.167.563,00	64.060.028.743,00	54.238.434.812,00	54.238.434.812,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi hasil	49.711.167.563,00	62.560.028.743,00	54.238.434.812,00	0,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	162.264.426.930,00	66.836.447.168,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	95.747.453.771,00	7.462.975.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	66.516.973.159,00	59.373.472.168,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.305.720.742.455,99	1.363.454.281.993,95	1.350.422.578.012,00	1.339.280.411.012,00

Dari tabel di atas lihat bahwa target pendapaan pendapatan tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.339.280.411.012,- mengalami penurunan sebesar Rp.10.941.167.000,- jika dibandingkan dengan target pendapatan ditahun 2022 yakni sebesar Rp.1.350.221.578.012,- hal ini disebabkan karena adanya pengurangan beberapa target pendapatan sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, sehingga juga ikut mempengaruhi objek yang menjadi target pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

3.2.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

Peningkatan total proyeksi Belanja untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.631.202.021.147 jika dibandingkan dengan proyeksi belanja pada RPJMD 2021-2026 untuk tahun 2023 sebesar Rp.190.250.472.623,-.

Dari proyeksi belanja yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2023 jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun 2023 yang sebesar Rp1.339.280.411.012,00. Masih terdapat defisit sebesar Rp.(291.921.610.135).

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2023

Akun	URAIAN	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Operasi	964.954.189.152,00	1.010.763.428.005,67	1.068.103.576.890,00	1.176.112.360.219,00
2.1.1	Belanja Pegawai	650.205.096.055,00	710.253.561.401,67	747.708.033.676,00	729.979.858.905,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.771.881.195,00	290.925.383.194,00	307.298.714.214,00	429.775.632.244,00
2.1.3	Belanja Hibah	66.652.211.902,00	9.529.483.410,00	11.688.829.000,00	14.261.869.070,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	3.325.000.000,00	55.000.000,00	1.408.000.000,00	2.095.000.000,00
2.2	Belanja Modal	182.335.821.634,00	137.156.605.722,00	157.819.992.963,00	276.220.899.523,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2.071.300.000,00	0,00	0,00	12.025.000.000,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.180.087.288,00	41.764.570.225,00	29.721.218.800,00	29.358.685.103,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.494.532.194,00	39.598.237.372,00	37.125.173.650,00	62.293.964.400,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.774.575.610,00	51.222.179.171,00	84.252.542.406,00	172.491.250.020,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.815.326.542,00	4.571.618.954,00	6.721.058.107,00	52.000.000,00
2.2.3	Belanja Tidak Terduga	22.132.345.315,00	618.675.500,00	7.393.508.656,00	7.500.000.000,00
2.2.3.1	Belanja Tidak Terduga	22.132.345.315,00	618.675.500,00	7.393.508.656,00	7.500.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	174.254.722.752,00	178.139.187.938,00	172.478.602.100,00	171.473.752.100,00
2.4.1	Belanja Hasil	4.315.046.981,00	4.722.352.138,00	5.811.250.000,00	4.806.400.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	169.939.675.771,00	173.416.835.800,00	166.667.352.100,00	166.667.352.100,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.343.677.078.853,00	1.326.677.897.165,67	1.405.795.680.609,00	1.631.307.011.842,00

3.2.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dan selanjutnya selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran daerah akan menjadi pembiayaan netto.

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2020-2023

URAIAN	JUMLAH			
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.763.140.359,16	17.031.494.709,15	70.373.102.597,00	76.249.777.262,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	55.533.362.784,16	17.031.494.709,15	70.373.102.597,00	56.249.777.262,00
Pencairan Dana Cadangan	3.101.000.000,00	-	0	20.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.612.493.788,00	7.461.000.000,00	15.000.000.000,00	35.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	3.862.493.788,00	-	-	20.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	750.000.000,00	7.461.000.000,00	15.000.000.000	15.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	55.150.646.571,16	9.570.494.709,15	55.373.102.597,00	41.249.777.262,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	17.194.310.161,15	46.346.870.233,43	0,00	(250,667,932,873)

Adapun rincian proyeksi pembiayaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan dalam bentuk sisa lebih penghitungan tahun anggaran sebelumnya Rp.56.249.777.262,- dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp.20.000.000.000,-. Sehingga total proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 adalah Rp.76.249.777.262,-.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk : (a) pembentukan dana cadangan untuk Persiapan Hibah Pemilukada sebesar Rp.20.000.000.000,- dan (b) hibah penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp.15.000.000.000,-, sehingga total pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp.35.000.000.000,-

3. Selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang selanjutnya disebut pembiayaan Netto tahun 2023 adalah sebesar Rp.41.249.777.262,-

Dari sisa pembiayaan netto sebesar Rp.41.249.777.262,- dapat diasumsikan akan dipergunakan untuk menutupi defisit yang sebesar Rp.(292.026.600.830,00), sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan yang harus dirasionalkan pada pembahasan selanjutnya adalah sebesar (Rp.250.776.823.568,-).

3.2.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Musrenbang tahun 2022, maka pada tahun 2023 kebijakan pendapatan daerah dilaksanakan melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Kebijakan peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan potensi dan penyuluhan kepada masyarakat, disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan asa keadilan (*equality*), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.
- b) Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha mencapai efisiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan.
- c) Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB perkapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Rencana tindak peningkatan pendapatan daerah (*local government revenue improvement action plan*) adalah program terencana dan terpadu untuk : a) mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada; b) mengidentifikasi tindakan-tindakan yang

diperlukan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah.

Rencana peningkatan penerimaan daerah merupakan program yang bersifat *self corrected*. Yang berarti bahwa, selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang ada (realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang rencana pembelanjanya telah ditetapkan secara baku dalam cakupan anggaran satu tahun.

Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Pendapatan transfer tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

3.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pendekatan ini guna menghasilkan *output* dan *input* yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja daerah diprioritaskan bagi program kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kebijakan untuk belanja daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Total Anggaran Belanja Operasi Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.1.631.202.021.147,- meliputi :

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp.729.962.208.905,-. Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.

2. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp.352.671.684.129,-. Digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp.14.261.869.070,- digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp.2.095.000.000,- digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Belanja modal Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2023 direncanakan dengan total anggaran sebesar Rp.353.233.606.943,- yang meliputi :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp.12.025.000.000,-. Digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp.29.304.946.041,-. Digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp.62.689.332.400,-. Digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp.249.162.328.502,-. Digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta memiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp.52.000.000,-. Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya, yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga untuk tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.7.500.000.000,-. Digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga daerah berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer yang dianggarkan sebesar Rp.171.473.752.100,- tahun 2023 digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya yang mencakup :

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dianggarkan sebesar Rp.4.806.400.000,-. Digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp.166.667.352.100,-. Diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 direncanakan penganggarannya diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut antara lain :

- a) Mengalokasikan anggaran pendidikan dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS), sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siste Pendidikan Nasional.

- b) Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan yang digunakan untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka indkes kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif.
- c) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah khususnya di daerah tertinggal, dan pusat-pusat pertumbuhan.
- d) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintah nagari yang bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- e) Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dengan prioritas menekan angka kemiskinan.
- f) Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- g) Mengoptimalkan tata guna, tata kelola, dan tata produksi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- h) Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana dasar, khususnya di daerah pedesaan dan perbatasan.
- i) Memantapkan diversifikasi energi melalui peningkatan konservasi energi sebagai pilar manajemen energi regional dan pemanfaatan energi.
- j) Mendorong pengembangan pariwisata yang megakomodasi konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.
- k) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost* dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu :
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet dan *service* kendaraan dinas).
 - b. Pengalokasi kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian evaluasi dan perencanaan.
 - c. Pengalokasi kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen pemerintah.

3.2.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut

urusan Pemerintah Daerah, bidang urusan Pemerintah Daerah, organisasi, kelompok, jenis, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada Perangkat Daerah selaku SKPKD.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan digunakan untuk mencatat SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah, antara lain :

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Pencairan Dana Cadangan, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada kebijakan umum APBD Tahun 2023 adalah :

1. Pembentukan dana cadangan, digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut belum melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
3. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tahun 2025, yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDGs dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa Laba/Dividen dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dirumuskan dalam rangka untuk pencapaian target pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya.

Substansi dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Keselarasan arah kebijakan, prioritas Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam prioritas pembanguana nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.
2. Sasaran pembangunan dan arah kebijakan tahun ketiga sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2023.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam RPJMD Kabupate Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Padang Pariaman juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP. Disamping itu, prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya Pilar Pertama kelembagaan politik dan hukum yang mantap, Pilar Kedua kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, Pilar Ketiga struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, dan Pilar Keempat terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024, RPJMN Tahun 2020-2024 menetapkan Visi Presiden yaitu :
"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong"

Dalam mencapai Visi RPJMN 2020-2024 ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam sembilan poin Nawacita yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai arahan Presiden, dalam melaksanakan Misi Nawacita dan upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang (UU) yaitu UU Cipta Lapangan kerja dan UU Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi

Memperioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural)

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2020-2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yakni sebagai berikut ::

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- 3) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 4) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- d. Membangun Kebudayaan dan karakter bangsa.
- Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui :
- 1) Memperkuat ketahanan budaya bangsa;
 - 2) Memajukan kebudayaan;
 - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
 - 5) Meningkatkan budaya iliterasi.
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
 - 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :
- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
 - 3) Pembangunan rendah karbon.
- g. Memperkuat Stabilitas Pohukam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memerikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan mengakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yan baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui :
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
 - 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di laur negeri.

Berdasarkan hasil evaluasi RKP Tahun 2021 terhadap kinerja pencapaian sasaran prioritas nasional sampai dengan triwulan III, sebagian besar prioritas nasional memiliki kinerja baik, dengan pencapaian kinerja di atas 90%. Namun demikian, masih tetap dilakukan upaya untuk memastikan tercapainya target pada akhir tahun 2021. Prioritas Nasional yang memiliki kinerja efektivitas terbaik adalah PN 7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" dengan pencapaian kinerja sebesar 98,41 persen. Sementara itu, PN 1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan" memiliki kinerja efektivitas terendah, yaitu sebesar 85,43 persen.

Rendahnya pencapai efektivitas PN 1 salah satunya dipengaruhi oleh adanya pandemi Vovid-19. Pengaruh pandemi Covid-19 ini tampak sangat nyata pada pencapaian sasaran PN 1 tersebut. Dimana pandemi Covid-19 telah memicu Pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan *Refocusing* anggaran, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama pada kegiatan fisik, dan dilakukannya penyesuain target pembangunan dalam RKP dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2021.

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdaoatnya *scars* akibat krisis Covid-19 yaitu *learningloss*, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan asih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui 3 (tiga) pilar yaitu: (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan *legacy* pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek ganda terhadap perekonomian dan

peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Untuk mengejar *gap* pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari *mdle-income trap*, maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

Dengan memperhatikan hal tersebut, berdasarkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, dinamika pandemi Covid-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian, maka Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah : "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam RKP tahun 2023 adalah :

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangua manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksesntuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %.
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebsar 27,02 %.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %.
4. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378.
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35.
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 %.
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103 – 105.
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105 – 107.

4.1.2. Tujuan dan Saran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026. Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu :

"Terwujudnya Sumatera Barat Mandani, Unggul dan berkelanjutan"

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yan ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka

perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya kualitas pendidikan
		Meningkatnya daya saing masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syara' - syara' basandi kitabullah	Mewujudkan ABS dan SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya budaya literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan petani hutan
Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis	mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan	Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN
digital	berdaya saing	Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi Kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
		Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran Misi pertama, "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing" terkait dengan isu strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan yang tetap mengedepankan karakter madani, serta berpengetahuan dan memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi kedua, " "Mewujudkan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sebagai falsafah kehidupan masyarakat" terkait

dengan isu strategis peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi ketiga, "Mewujudkan kesejahteraan petani" terkait dengan isu strategis meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirisasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi keempat, "Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing" terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap guncangan ekonomi serta mampu bersaing di tingkat global.

Tujuan dan sasaran Misi kelima, "Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian Sumatera Barat" terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi keenam, "Terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata" terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketahanan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi selanjutnya.

Tujuan dan sasaran Misi ketujuh, "Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas" terkait dengan isu strategis peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut, dengan memperhatikan dampak dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami kontraksi di tahun 2020, ketidakpastian penyelesaian akan wabah covid-19 baik di tingkat global maupun domestik, serta dukungan terhadap pencapaian tema pembangunan RKP tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat :

"Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi"

Peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan industri kecil menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Pertimbangan yang mendasari adalah karena peningkatan produktivitas sektor strategis di Tahun 2021 lalu, yakni :

1. Sektor pertanian tumbuh 5,86%
2. Sektor industri pengolahan tumbuh 12,46%
3. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 5,80%.

Ketiga sektor ini termasuk 5 (lima) besar lapangan usaha yang peningkatan produktivitasnya tertinggi tahun 2021 lalu, di bawah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa lainnya. Secara keseluruhan, produktivitas total di Sumatera Barat meningkat 4,45% dari 93,74 juta menjadi 97,91 juta.

Selanjutnya ketiga sektor strategis dimaksud juga merupakan sektor unggulan pada berbagai program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya, sehingga diharapkan peningkatan produktivitas sektor strategis ini berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor tersebut.

Sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor di atas dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi covid-19 yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 18 dan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diupayakan akan tercapai seluruhnya di tahun 2023 melalui penyusunan RKPD, disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan, serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Barat di tahun bersangkutan. Adanya pandemi covid-19 tahun 2020 membuat tahun 2023 memiliki arti strategis untuk dapat mendorong pemulihan dampak covid-19 terutama di bidang ekonomi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pembangunan daerah. Untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, maka penyusunan RKPD

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu; (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up), serta (5) pendekatan perencanaan dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain; (1) kesesuaian dengan dokumen perencanaan, (2) urgensi penanganan isu, (3) prioritas kebijakan Bupati dan Wakil bupati. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan pula dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, (2) isu strategis, dan (3) prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun tingkat Nasional.

Adapun yang menjadi Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sebagai tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah :

"Padang Pariaman Berjaya"

Visi di atas merupakan singkatan dan memiliki empat kata kunci yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman ke depan, yaitu :

Unggul berkelanjutan, memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Religius, adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sejahtera, merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencaapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

Berbudaya, merupakan suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.

3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam rangka mencapai sesuatu yang dicita-citakan dalam masa akhir jabatan sesuai dengan Visi Misi yang dicanangkan dan untuk mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan misi yang telah disusun, perlu tujuan dari setiap misi dan diwujudkan dalam tolok ukur kinerja terukur yang tertuang dalam sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Padang Pariaman

VISI : Padang Pariaman Berjaya						
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN
Misi 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabulla serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	1300 Orang	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	28%
					Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	38%
		Penurunan Jumlah Tindak Pidana	482	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	persentase penegakkan perda	67,50%
					persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	100%
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94
Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	37%					

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN
MISI 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang	Terwujudnya infrastruktur berwawasan lingkungan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	64,70%	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat	persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69%
					Rasio Konektivitas kabupaten	1:59
				Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62,72%
					Rasio Luas Kawasan Permukiman yang terlindungi Wilayah Sungai (WS)	7,95%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	70%		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,09		
			Persentase areal kawasan kumuh	0,33%		
			Luas Ruang Terbuka Hijau	856 Ha		
		Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan rencana tata ruang	9	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	52%
					Persentase Ketaatan terhadap RTRW	70,00%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN	
					Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya	62,50%	
					Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	9%	
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi	7,82	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	2.862.238,58	
					Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	7,65	
					Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8,60	
					Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	13,3	
					Jumlah Kunjungan Wisata	265.890	
					Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan (%)	6,87
					Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita ADHB (Rp Juta)	49,46
					Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan pengetahuan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,19	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,88
				Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	Harapan lama sekolah	14,12
					Rata-rata lama sekolah	8,16
				Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,68
				Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	170 Orang
Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang					
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	63	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
					Tingkat Kapabilitas APIP	level 3
					Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	level 3
					Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	BB
					Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	12%
					Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	2,800 (tinggi)

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN
				Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks Profesionalitas ASN	82
					Indeks E-Government /SPBE	2,76
					Indeks Kearsipan	63,95
				Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4,57
Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	76,33	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,63 Tahun
				Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,29%
				Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92%
				Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87%
				Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	0,15
				Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	17

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN
				Pengurangan resiko kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	14,1 Menit
				Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	Persentase PPKS Mandiri	27%
				Peningkatan penanganan masalah sosial	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	76%
Misi 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	Persentase Tingkat ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat	89,30%	Peningkatan penerimaan pendapatan daerah asli	Persentase peningkatan PAD	4%
	Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	445.400.000 (Ribu)	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	445.400.000 (Ribu)

Sumber : RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Tiga puluh satu sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penganggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk Tahun 2023 yakni :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dilaksanakan melalui strategi :
 - Penguatan sistem jaminan sosial
 - Percepatan modernisasi pertanian
 - Peningkatan pemerataan pembangunan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi isu kesehatan dan pendidikan.
Dilaksanakan melalui strategi :
 - Penguatan sistem kesehatan nasional
 - Peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter)
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan dengan peningkatan *decent job*.
Dilaksanakan melalui strategi : Perluasan penyediaan lapangan usaha
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
Dilaksanakan melalui strategi :
 - Percepatan revitaliasi pariwisata
 - Memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
Dilaksanakan melalui strategi :
 - Percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri
 - Penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
Dilaksanakan melalui strategi :
 - Mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon
 - Percepatan transmisi energi
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
Dilaksanakan melalui strategi :
 - Peningkatan penyediaan air bersih sanitasi
 - Percepatan pemerataan infrastruktur digital
 - Percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas
8. Pembangunan IKN Nusantara akan berupa fasilitas dasar IKN.
Dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas dasar di IKN

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya daya duung dan kualitas sumber daya ekonomu sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan 9a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, 9i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor ril barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI
- (2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI

PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut :

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan 9a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah
- (3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi *stunting* pada balita, (d) menurunkan insidensi *tuberculosis*, (e) meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah
- (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
- (5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif
- (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut :

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong 9a) peningkatan indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
- (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
- (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat
- (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama

- (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan
- (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian nilai Budaya Literasi

PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
- (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara
- (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan
- (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (Kwh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton)
- (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G)

PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB

- (3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) pesentase penurunan intensitas emisi GRK

PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya demokrasi yang terkosolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026. Namun demikian, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 juga adaptif dan responsif terhadap dampak pandemi covid-19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transpormasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui sektor strategi daerah, yakni kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (perdagangan, UMKM dan industri kecil menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Ketiga sektor strategis ini juga tergambar dalam program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya.

Adapun penyeselarasan antara Prioritas Nasional Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Agenda / Prioritas nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Keterangan
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

No.	Agenda / Prioritas nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Keterangan
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	Prioritas 5
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 1
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syara' - syara' basandi kitabullah	Prioritas 2
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
7	Memperkuat stabilitas polhukam dan transpormasi pelayanan publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 7

4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 disusun berdasarkan isu strategis daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pencapaian kinerja RKPD 2021, prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan tantangan global, nasional dan regional.

Berdasarkan hasil analisa situasi lingkungan strategis eksternal dan internal, serta permasalahan permasalahan pembangunan daerah yang ada, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 menjadi 6 (enam) isu strategis sebagai berikut :

1. Pembangunan Kebudayaan

Tata kehidupan masyarakat Minangkabau telah terpola dengan sebuah filosofi sosial yaitu *adaik basandi syara'-syara' basandi kitabullah*. Khazanah budaya Minangkabau, agama dan budaya merupakan dua dimensi nilai inti yang saling bertautan satu sama lain. Kedua dimensi nilai inilah yang membentuk karakter masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan nilai utama yang diharapkan mampu melahirkan harmonisasi antara kehidupan yang agamais dan kehidupan yang berbudaya dan berbudaya. Dalam konteks dan dimensi budaya, keterbukaan wilayah berakibat masuknya pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu eksistensi dan peran kelembagaan adat pada tingkat nagari masih lemah dan bahkan semakin memudar, hal ini dapat kita lihat dari masih kurangnya peran mamak terhadap kemenakan, berkurangnya musyawarah dan mufakat adat dan kaum dalam pengambilan kebijakan, serta masih seringnya terjadi tingkah laku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan falasah ABS SBK tersebut. Rendahnya pengamalan dan aplikasi nilai-nilai ajaran agama dan akhlaq masyarakat, apalagi dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perubahan pola dan tingkah laku masyarakat sehingga tidak sejalan lagi dengan ajaran dan kaedah agama serta norma-norma adat istiadat Minangkabau. Pembangunan jati diri masyarakat melalui pendidikan agama dan wawasan kebangsaan guna mengatasi dampak negatif dan infiltrasi budaya global dan krisis global.

Isu penting lainnya terkait kerukunan, ketentraman dan ketertiban selama lima tahun kedepan diperhadapkan pada sejumlah tantangan berupa peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Selain itu juga tantangan ke depan yang dihadapi adalah kecenderungan munculnya bentuk kerawanan/kejahatan baru yang dipicu oleh terbukanya wilayah dalam rangka pembangunan ekonomi yang memudahkan mobilitas barang dan manusia seperti penggunaan obat-obatan psiktropika. Dengan demikian, diperlukan langkah antisipatif dan koordinatif pada bidang ketentraman dan ketertiban untuk mencegah dan menekan akses pembangunan ekonomi terhadap munculnya tindak kriminal.

Isu lainnya terkait pembangunan kebudayaan adalah kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan isu dalam pembangunan kualitas perempuan, dimana masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak.

2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sarana

dan prasarana publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah terkait infrastruktur transportasi darat, infrastruktur sumber daya air (infrastruktur irigasi, sumber air baku dan infrastruktur pengendalian banjir), memenuhi fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan dan kemandirian wilayah. Selain itu juga dihadapkan pada penyediaan air bersih, irigasi, listrik dan telekomunikasi guna mendukung lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat.

Isu penting lainnya yang perlu memperoleh perhatian, yaitu : (i) konektifitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi, (ii) meningkatnya produksi persampahan membutuhkan respon terhadap peningkatan cakupan pelayanan sampah dengan pembangunan TPA, dan pengolahan sampah berbasis teknologi. Pengelolaan sampah menjadi perhatian kabupaten, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang.

3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata dan Ekowisata

Pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dihadapkan dengan sejumlah isu-isu strategis. Pertama, gejolak harga komoditas pertanian sangat menentukan terhadap kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai tukar petani. Nilai tukar petani pada tahun 2020 dan 2021 sedikit diatas 100, tepatnya 100,59. Namun antara 2017-2019 berada dibawah 100, yaitu dari 95,31 pada tahun 2017 hingga 95,99 pada tahun 2019. Nilai tukar petani yang rendah (< 100) terjadi pada subsektor hortikultura dan tanaman pangan, nilai tukar petani yang tinggi (>100) terjadi pada peternakan dan perikanan, perkebunan rakyat berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Begitupula dengan tingginya tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan dan lebih banyaknya rumahtangga pertanian yang miskin menimbulkan kompleksitas permasalahan yang menyertainya, sehingga isu-isu ini dapat direspon dalam kebijakan pembangunan secara umum, khususnya pada sektor pertanian.

Pembangunan sektor pertanian Kabupaten Padang Pariaman berhadapan pula dengan alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, baik untuk perumahan maupun komersial. Fragmentasi atau ukuran lahan yang semakin menyempit karena semakin panjang waris tanah akan mempengaruhi skala keekonomian usaha tani. Untuk itu, strategi pembangunan pertanian dapat diarahkan dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan melakukan diversifikasi kegiatan pertanian atau non-pertanian bagi petani berlahan sempit guna mengoptimalkan curahan waktunya. Peningkatan produktivitas melalui transformasi pertanian dari tanaman pangan ke campuran bahkan pertanian komersial terspesialisasi membutuhkan kebijakan yang bertahap dan terukur yang membutuhkan komitmen kuat dalam mengenalkan bibit

unggul, pengolahan lahan secara produktif, dan penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian.

Peningkatan produktivitas maupun produksi tidak serta merta diiringi dengan peningkatan pendapatan petani. Berlimpahnya produksi justru menyebabkan jatuhnya harga beberapa komoditi pertanian. Kenaikan harga barang konsumsi rumahtangga yang lebih tinggi dibanding harga hasil pertanian yang diterima petani juga menyumbang bagi rendahnya nilai tukar petani. Untuk meningkatkan secara signifikan harga yang diterima petani, peningkatan kualitas hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan agroindustri skala kecil pada sentra hasil-hasil pertanian membutuhkan perhatian yang memadai.

Sentra-sentra produksi pertanian belum dikelola dengan optimal dan secara jumlah masih belum mencukupi. Sentra-sentra produksi pertanian sangat bermanfaat sebagai *collective action* (tindakan bersama) untuk meningkatkan daya tawar petani dalam daya dukung transportasi, maupun keuntungan dalam biaya transportasi dan pemenuhan kebutuhan pasar. Sektor pertanian berhadapan ketidakpastian berkaitan dengan lingkungan hidup, berupa bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan hama. Mitigasi bencana alam dan pengembangan lahan pertanian semakin membutuhkan pertimbangan terhadap kerawanan bencana alam, termasuk banjir maupun longsor.

Sejumlah isu-isu penting terkait dengan produk pertanian yang juga perlu memperoleh perhatian, yaitu: (a) meningkatnya tuntutan kepada produk pertanian berkualitas, berstandar dan bersertifikasi, termasuk produk pertanian yang sehat dari pertanian organik, (b) mulai tumbuhnya pola konsumsi sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian berupa buah-buahan, sayuran, tanaman obat. Diikuti pula perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian seperti kopi, teh, dan susu segar, (c) tumbuhnya angkatan kerja pedesaan yang harus disikapi dengan penciptaan agroindustri pedesaan, regenerasi petani menjadi petani muda atau milenial, dan pengembangan kewirausahaan pertanian di daerah pedesaan.

Sektor perikanan dihadapkan pada terbatas sarana dan prasarana perikanan tangkap. Pengolahan hasil perikanan yang telah berkembang masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai komoditas untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi oleh sektor perikanan budidaya, pengembangan cepat budidaya udang vaname sepanjang pesisir, maupun kesehatan hewan dan ternak dari penyakit mewabah.

Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman berhadapan dengan trend tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan elektronik melalui berbagai aplikasi belanja daring dengan berbagai strategi promosi dan pemasarannya dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Kabupaten Padang

Pariaman. Pada saat bersamaan juga dapat menjadi peluang bila dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk lokal. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku usaha perdagangan termasuk UMKM dalam memasarkan produknya merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing. Terlebih bila mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan mengembangkan aplikasi belanja daring lokal.

Akses permodalan dalam meningkatkan skala ekonomi usaha perdagangan dan UMKM masih menjadi prasyarat perlu. Namun akses permodalan saja tidak mencukupi bila belum didukung oleh peningkatan kemampuan manajerial melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan usaha.

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan milenial merupakan isu penting untuk menumbuhkan dan mencetak memfasilitasi start up, wirausahawan milenial, women entrepreneur dalam berbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Untuk itu, kebijakan untuk memfasilitasi kepada akses pengetahuan bersamaan, akses permodalan, serta pengembangan kolaborasi dapat menjadikan wirausahawan milenial ini menjadi pilar perekonomian di masa-masa mendatang.

Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman diperlukan ekspose yang lebih luas. Hal ini karena pasar pariwisata Kabupaten Padang Pariaman yang masih lokal. Kebutuhan pariwisata yang semakin meningkat berhadapan dengan pengelolaan objek destinasi wisata dengan penyediaan sarana prasarana dan utilitas serta atraksi.

Pengembangan pariwisata berhadapan dengan isu daya dukung dan akses infrastruktur menuju dan sarana prasarana objek destinasi wisata. Daya dukung dan manfaat sosial masyarakat sekitar kawasan pariwisata perlu menjadi perhatian penting. Perkembangan pariwisata juga perlu didukung dengan penciptaan ekosistem ekonomi kreatif dan peningkatan inovasi (kuliner, fashion, kerajinan tangan) dan standarisasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

4. Pembangunan Manusia

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia melalui pembangunan manusia, sejumlah isu-isu strategis pada bidang kesehatan yaitu pandemi covid-19 yang mulai mereda masih tetap mengancam kondisi kesehatan dan risiko kematian bagi penduduk, namun berhadapan dengan mulai melonggarnya penerapan protokol kesehatan meskipun pelaksanaan vaksinasi telah mulai meluas, menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan *test, tracing dan treatment* (pengujian, pelacakan, dan penyembuhan).

Peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan antar kecamatan masih menjadi persoalan yang membutuhkan upaya yang lebih giat. Relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk

Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan perlunya peningkatan layanan kesehatan untuk semua penduduk, baik bagi ibu, anak, remaja, pemuda dan lanjut usia. Perlindungan dan penanganan wabah penyakit tidak hanya dari penyakit tidak terduga seperti covid-19, flu burung, namun juga berbagai penyakit terkait pola hidup yang tidak sehat, seperti penyakit jantung, diabetes, tuberculosis, juga HIV/AIDS. Pendekatan preventif melalui pola hidup bersih dan sehat serta kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat membutuhkan semakin giatnya promosi upaya kesehatan masyarakat.

Disamping itu, pada tahun 2020 masih ditemukan kasus stunting di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 3988 orang, yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Secara umum permasalahan pendidikan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja pendidikan berupa angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah pada semua jenjang pendidikan, kualitas guru, proses belajar mengajar, ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Berkaitan dengan permasalahan pendidikan tersebut, maka pembangunan pendidikan selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada tantangan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan pendidikan khususnya pada wilayah-wilayah yang potensial jumlah peserta didiknya dan belum tersedia fasilitas sekolah. Disamping itu juga diperhadapkan pada upaya-upaya dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas dan perbaikan tata kelola pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Dengan demikian maka pembangunan pendidikan lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan proses belajar mengajar, meningkatkan sarana prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru) untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang semakin meningkat serta meningkatkan luaran pendidikan SD dan SLTP.

5. Tata kelola pemerintahan

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal, efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan birokrasi. Jika berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, setidaknya sudah menuju ke arah upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Jadi keberhasilan reformasi birokrasi akan mewujudkan pada tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih,

sehingga upaya pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten

Tata kelola pelayanan publik yang efisien dan efektif serta perkembangan terkini berkonsekuensi kebutuhan untuk melakukan transformasi digitalisasi dan otomatisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan publik lebih terbuka, keterbukaan dan penyampaian informasi publik.

Tata kelola pelayanan publik juga mensyaratkan pengendalian dan pengawasan bagi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Untuk itu dibutuhkan kapasitas dan SDM pemerintahan dalam adopsi dan implementasi pelayanan publik secara eelektronik. Begitupula pemanfaatan beragam media termasuk kanal sosial media bagi keterbukaan informasi publik dan kegiatan pemerintahan.

6. Optimalisasi Pelayanan Dasar

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan dampak program pembangunan. Pelayanan dasar lain adalah pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat serta penanganan masalah sosial.

7. Peningkatan PAD dan Investasi Daerah

Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel makro ekonomi. Ada beberapa indikator makro ekonomi yang secara teoritis mempengaruhi PAD, diantaranya: (1) struktur ekonomi daerah; (2) investasi (PMDN dan PMA); dan (3) pengeluaran pemerintah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam lima tahun ke depan untuk mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan dengan dengan arah kebijakan Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir (2016-2020) adalah sebesar 15,61 persen. Padahal, untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, optimalisasi pajak ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, pajak juga menjadi perhatian khusus untuk dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam peningkatan investasi daerah.

4.2.4. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Tema pembangunan daerah merupakan gambaran untuk menentukan arah pembangunan daerah dalam melaksanakan pembangunan pada tahun

yang ditetapkan. Tema pembangunan dimaksudkan sebagai arah pembangunan yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, serta dengan memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk Tahun 2023. Sdan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yaitu :

“Percepatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

Tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu :

1. Percepatan kemandirian ekonomi : dimaknai sebagai upaya dan hal yang dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan kondisi perekonomian yang sempat mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak pandemi covid-19, secepat mungkin mengembalikan kepada proses pembangunan yang sudah dilaksanakan, mengejar penurunan dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang ingin dicapai di akhir RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.
2. Kesejahteraan Masyarakat : dimaknai sebagai wujud kondisi terbaik bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonominya.

Percepatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman diwujudkan melalui 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

TEMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Pecepatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat	P.1 Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata dan UMKM
	P.2 Peningkatan ketepatan aokas investasi dan sumber-sumber pendanaan
	P.3 Peingkatan kualitas dan kutitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasiskan lingkungan dan tat ruang
	P.4 Peningkatan kualitas sumber dayamanusa yag cerdas dan terampil serta berdaya saing
	P.5 Peningkatan kemandiran masyarat tangguh bencana
	P.6 Peningkatan tata kelola pemerintahan yag efektif, bersih, berkeadilan, demokratis

	P.7 Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat
--	---

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dan mempedomani target serta sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, maka sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Prioritas Dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
P.1 Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, priwisata dan UMKM	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2,862,238.58 (Rp. Juta)
		Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	7.65%
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8.60%
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	13,30%
		Jumlah kunjungan wisatawan	275.000 Orang
	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	
	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	49.46
P.2 Peningkatan ketepatan aokas investasi dan sumber-sumber pendanaan	Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	1
	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	4%
P.3 Peingkatan kualitas dan kutitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	445,4 (Milyar)
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
lingkungan dan tat ruang	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Rasio Konektivitas kabupaten	1:59
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62,72%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan kabupaten	7,95%
		Persentase drainase dalam kondisi baik	70%
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.09
		Persentase areal kawasan kumuh	0.33%
	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Luas Ruang Terbuka Hijau	856 Ha
		Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	52%
		Persentase Ketaatan terhadap RTRW	70.00%
		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya	62.50%
		Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	9%

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92%
	Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87%
	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	0.15
P.4 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18.88
	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	14.12
		Rata-rata lama sekolah	8.16
	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,17%
	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	170 Orang
		Jumlah atlet berprestasi	370 Orang
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,29 Tahun
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	3.29%	
P.5 Peningkatan kemandirian masyarakat	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	17

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
tangguh bencana	Pengurangan resiko kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	14,1 Menit
	Peningkatan penanganan masalah sosial	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	76%
P.6 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Tingkat Kapabilitas APIP	level 3
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	level 3
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	BB
		Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	12%
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	2,800 (tinggi)
	Birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	82
		Indeks E-Government /SPBE	2.76
		Indeks Kearsipan Eksternal	63.95
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4.57

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
P.7 Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	28%
		Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	38%
	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penegakan perda	67,50%
		Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	67,50%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94
		Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	13%

4.2.5. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan pencapaian target yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023.

Tabel 4.6
Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
P.1 Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata dan UMKM	Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman	Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan
	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi dan intensifikasi pangan
	Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
	Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu
	Meningkatkan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan	Peningkatan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan
	Meningkatkan pengembangan UMKM	Peningkatan pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing
	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB Kabupaten Padang Pariaman
	Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan	Pelestarian kawasan wisata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Wisata	
	Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif	Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif	pengoptimalan alokasi dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif
	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif	Pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif
	Menurunkan angka kemiskinan	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan
	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	Peningkatankapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat
	Meningkatkan perekonomian desa/nagari	Peningkatan perekonomian desa sesuai dengan potensi desa
P.2 Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan	Meningkatkan PAD berbasis IT yang terintegrasi	Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi	Peningkatan promosi dan kemitraan investasi
	Meningkatkan pelayanan investasi	Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi
P.3 Peingkatan kualitas dan kutitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat	Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum
	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
	Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir	Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		air
	Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
	Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi
		Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup	Pengembangan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh	Pengurangan luas areal permukiman kumuh
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU
		Peningkatan drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air perumahan tidak tersumbat
	Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi pemukiman	Penyusunan regulasi tentang RTH bagi pemukiman
	Meningkatkan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	Peningkatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan
	Meningkatkan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan	Pengembangan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	
	Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	
	Meningkatkan fasilitasi kepengurusan sertifikat tanah Pemda	Pendataan kepemilikan lahan bersertifikat	
	Meningkatkan akses terhadap layanan air minum		Peningkatan infrastruktur dan teknologi penyediaan air minum
			Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum
	Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	
Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni		
P.4 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing	Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca	Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan	
	Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	
	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	
	Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan	Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD	Peningkatan mutu relevansi dan daya saing	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		PAUD
	Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
		Perluasan kesempatan kerja
	Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan kepemudaan dalam pembangunan	Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial
	meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda	Peningkatan kualitas SDM pemuda
	Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah	Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi;
	Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai standar
	Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Peningkatkan Pemenuhan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
	Meningkatkan budaya hidup sehat	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Menurunkan Total fertility rate (FTR)	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja
		Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
P.5 Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana	Melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan	
	Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran	Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana	
		Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana	
	Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan	Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan	
P.6 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi	
	Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah	Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset	
	Mengoptimalkan peran APIP	Peningkatan kapabilitas APIP	
	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah	Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT	
	Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan		Peningkatan pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien
			Peningkatan penataan Produk Hukum Kab Padang Pariaman
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah		Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief (penerapan			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		kebijakan)
	Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa	Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa
	Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah	Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan
		Peningkatan sistem manajemen kepegawaian
		Peningkatan Budaya kerja yang profesional
	Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi	Peningkatan sarana dan prasarana IT
		Peningkatan Pengamanan data daerah
	Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan	Peningkatan manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
		pengembangan inovasi pelayanan publik
		Peningkatan Tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil
	Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business	Penerapan SOP di sektor pelayanan publik
P.7 Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama	Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda	Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana <i>multy culture</i>
		Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
		Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban
	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender
Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak	

4.2.6. Kebijakan Penurunan Stunting

Prevalensi stunting kabupaten Padang Tahun 2021 sebesar 10,55%, angka ini sudah mengalami penurunan dari tahun 2021. Namun demikian tantangan percepatan penurunan angka stunting masih cukup besar. Kendala dalam percepatan penurunan stunting adalah :

1. Belum efektifnya program-program pencegahan stunting
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif disemua tingkatan terkait dengan perencanaan penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi.
3. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana.
4. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program
5. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting, dan berbagai upaya pencegahannya.

Arah kebijakan Percepatan penurunan stunting kedepannya dapat dilakukan dengan:

1. Intervensi gizi spesifik dengan sasaran prioritas ibu hamil ,ibu menyusui, remaja dan balita.
2. Intervensi gizi sensitif melalui :
 - a. peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi
 - b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Gizi dan Kesehatan
 - c. Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak
 - d. Peningkatan akses pangan bergizi

4.2.7. Kebijakan Responsif Gender

Pengarusutamaan gender erat kaitannya dengan pemenuhan hak bagi semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, status social, keadaan fisik dan lain-lain. Hal ini bertujuan supaya tidak ada satupun ketimpangan dirasakan oleh seseorang dalam melaksanakan aktifitasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah mengamanatkan agar Pengarusutamaan Gender menjadi salah satu tugas mandatory yang harus dilaksanakan didaerah. Sering pada tataran pemerintahan masalah pengarusutamaan gender tidak menjadi sesuatu yang menjadi perhatian, sementara jika ini diabaikan maka akan berpengaruh terhadap kinerja daerah karena akan ada ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pengusutamaan gender di Kabupaten Padang Pariaman ada beberapa arah kebijakan yang perlu ditetapkan yaitu :

1. Memasukkan isu pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan daerah

2. Menjadikan isu pengarusutamaan gender sebagai salah satu dasar dalam menyusun perencanaan program/kegiatan di daerah.
3. Menyiapkan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Pengarusutamaan gender di daerah
4. Membentuk dan mengoptimalkan tugas dan fungsi kelembagaan pengarusutamaan gender di daerah.
5. Memperkuat pemahaman tentang pengusutamaan gender mulai dari tingkat pimpinan daerah, perangkat daerah, dan stakeholder terkait.
6. Menyiapkan instrumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan Pengarusutamaan Gender di daerah.

4.2.8. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdapat pada Bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Urusan Sosial. Target dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Secara lebih teknis tentang pengaturan penghitungan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur dengan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat jenis pelayanan dasar, penerima layanan dasar, dan target, serta mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Lebih jelas sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.7

Jenis Pelayanan Dasar dan target Penerima Layanan Dasar Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
I. Bidang Pendidikan				
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun
II. Bidang Kesehatan				
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
III. Bidang Pekerjaan Umum				
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun
IV. Bidang Perumahan Rakyat				
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
V. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
1.	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada kabupaten/kota	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun
VI. Bidang Sosial				
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korbaan bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun

Sementara itu, upaya pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal terhadap 6 (enam) bidang urusan tersebut yakni :

1. Bidang Pendidikan

Upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan mencakup :

- a. Pemenuhan standar satuan pendidikan yang terdiri atas; standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian.
- b. Pemenuhan standar biaya pribadi Peserta Didik dalam bentuk penyediaan perlengkapan dasar Peserta Didik.
- c. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik meliputi :
 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), berupa 6 (enam) buah buku gambar dan 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
 - Pendidikan Dasar (SD), berupa 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun, dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
 - Pendidikan Dasar (SMP), berupa 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun, dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
 - Pendidikan Kesetaraan, berupa 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun, dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- d. Pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar (SD dan SMP), Pendidikan Kesetaraan.
- e. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan tingkat PAUD yang terdiri atas :
 - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi, serta memiliki sertifikat profesi guru PAUD.
 - Kualitas tenaga kependidikan (kepala satuan pendidikan), memiliki ijazah paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), serta memiliki sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah PAUD untuk pendidikan formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.
- f. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan tingkat pendidikan dasar (SD), yang terdiri atas :
 - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), serta memiliki sertifikat pendidik.

- Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah), memiliki ijazah paling rendah Diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1), dan memiliki sertifikat pendidik, serta memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- Kualitas tenaga kependidikan (tenaga penunjang lainnya) memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- g. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan tingkat pendidikan dasar (SMP), yang terdiri atas :
 - Kualitas pendidik (guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum), paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah), paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), dan memiliki sertifikat pendidik, serta memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Kualitas tenaga kependidikan (tenaga penunjang lainnya), paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- h. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan yang terdiri atas :
 - Kualitas tenaga pendidik atau yang disebut dengan tutor pendidikan kesetaraan, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
 - Kualitas tenaga kependidikan (kepala satuan kesetaraan), paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)
 - Kualitas tenaga kependidikan (tenaga penunjang lainnya), paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

2. Bidang Kesehatan

Upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mencakup :

- a. Pemenuhan standar jumlah dan kualitas personil/Sumber Daya Manusia kesehatan, yang meliputi tenaga Dokter/dokter spesialis kebidanan, bidan, atau perawat, gizi, ATLM, tenaga kesehatan masyarakat
- b. Pemenuhan standar jumlah dan kualitas tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi guru PAUD dan kader kesehatan/dokter kecil/*peer conseor*.
- c. Penyediaan pelayanan kesehatan ibu hamil meliputi :
 - Pemberian vaksin Tetanus Difteri (Td)
 - Pemberian tablet tambah darah
 - Penyediaan alat deteksi resiko ibu hamil yang dapat digunakan untuk tes kehamilan, pemeriksaan Hb, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan glukoprotein urin
 - Penyediaan kartu ibu/rekam medis ibu
 - Penyediaan buku KIA

- d. Penyediaan pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan melaksanakan :
 - Pemantauan persalinan melalui formulir partograf
 - Penyediaan kartu ibu untuk merekam medis bagi ibu
 - Penyediaan buku KIA.
- e. Penyediaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan melaksanakan :
 - Pemberian vaksin hepatitis B0
 - Pemberian vitamin K1 injeksi
 - Pemberian salep/tetes mata antibiotik
 - Penyediaan formulir bayi baru lahir
 - Penyediaan formulir MTBM
 - Penyediaan buku KIA.
- f. Penyediaan pelayanan kesehatan balita meliputi :
 - Penyediaan kuisisioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
 - Penyediaan formulir DDTL
 - Penyediaan buku KIA
 - Pemberian vitamin A biru dan vitamin A merah
 - Pemberian vaksin imunisasi dasar; HB0, BCG, polio, IPV, DPT-HB-Hib, dan campak rubella
 - Pemberian vaksin imunisasi lanjut; DPT-HB-Hib, dan campak rubella
 - Penyediaan jarum suntik BHP
 - Penyediaan peralatan anafilaktik
- g. Penyediaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi :
 - Penyediaan buku rapor kesehatan
 - Penyediaan buku pemantauan kesehatan
 - Penyediaan kuisisioner skrining kesehatan
 - Penyediaan formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah
 - Penyediaan formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah
- h. Penyediaan pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi :
 - Penyediaan pedoman dan media KIE
 - Penyediaan alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes
 - Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM).
- i. Penyediaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut meliputi :
 - Penyediaan strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol
 - Penyediaan instrumen *geriatric depression Scale* (GDS), instrumen *Abbreviated Mental Test* (AMT), dan instrumen *Activity Daily Living* (ADL) dalam paket pengkajian paripurna pasien geriatri (P3G)
 - Penyediaan buku kesehatan lansia.
- j. Penyediaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, meliputi :
 - Penyediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE

- Penyediaan tensimeter
 - Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM
 - k. Penyediaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, meliputi :
 - Penyediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, dan lancet
 - Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SIPTM
 - Penyediaan pedoman dan media KIE
 - l. Penyediaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, meliputi :
 - Penyediaan buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru (bila sudah tersedia)
 - Penyediaan kit berisi 2 alat fiksasi
 - Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan
 - Penyediaan media KIE
 - m. Penyediaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis, meliputi :
 - Penyampaian informasi tentang TBC melalui media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)
 - Penyediaan masker jenis rumah tangga dan masker N95
 - Penyediaan bahan pemeriksaan terduga TBC yang terdiri atas : Penyediaan Reagen Zn TB pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol, lampu spiritus/bunsesn, ose/lidi), rak pengering, serta cadtridge tes cepat molekuler.
 - Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan
 - Penyediaan pedoman/standar operasional prosedur
 - n. Penyediaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV), meliputi :
 - Penyediaan media penyampaian informasi tentang HIV AIDS seperti media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, dan banner
 - Penyediaan alat tes cepat HIV (RDT pertama)
 - Penyediaan bahan medis habis pakai untuk pengambilan darah perifer dan/atau vena seperti handschoen, alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai
 - Penyediaan alat pencatatan dan pelaporan seperti alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.
3. Bidang Pekerjaan Umum
- Upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum mencakup :

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, yang terdiri atas :
 - Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dalam bentuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
5. Bidang Perumahan Rakyat

Upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat mencakup :

 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah berupa :
 - Pendampingan
 - Pembimbingan
 - Penyuluhan
 - Pelayanan informasi
 - Bantuan teknis, yang meliputi;
 - 1) pendampingan penggantian kerugian
 - 2) penyusunan Rencana Tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) rumah susun umum atau rumah khusus
 - 3) pembangunan rumah susun umum
 - 4) pembangunan rumah khusus
 - 5) pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.
6. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mencakup :

 - a. Sub Urusan Trantibum, mencakup :
 - Pemenuhan standar operasional prosedur Satpol PP
 - Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP
 - Pemenuhan standar peningkatan kapasitas Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat
 - Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkara yang meliputi penyediaan pelayanan kerugian materil berupa

kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda nda Perkada, dan pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada.

b. Sub Urusan Kebencanaan, mencakup :

- Penyediaan pelayanan informasi rawan bencana yang paling sedikit memuat :
 - 1) Penyusunan kajian resiko bencana
 - 2) Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang paling sedikit memuat :
 - 1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana
 - 2) Pembuatan rencana kontinjensi
 - 3) Pelatihan pencegahan dan mitigasi
 - 4) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
 - 5) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
 - 6) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat :
 - 1) Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas
 - 2) Respon cepat darurat bencana
 - 3) Aktivasi sisttem komando penanganan darurat bencana
 - 4) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
 - 5) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

c. Sub Urusan Kebakaran, mencakup :

- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, paling sedikit memuat :
 - 1) Pemenuhan layanan respon cepat (*Respon Time*) penanggulangan kejadian kebakaran
 - 2) Pemenuhan layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
 - 3) Pemenuhan layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
 - 4) Pemenuhan layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
 - 5) Pemenuhan layanan pendataan, inspeksi dan ivestigasi pasca kebakaran.

7. Bidang Sosial

Upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mencakup :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar di luar panti sosial, dengan kriteria :

- tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus
- masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus
- b. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dengan kriteria :
 - Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai 60 (enam puluh) tahun
 - Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus
 - Tidak memiliki tempat tinggal tetap
 - Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- c. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana, dengan kriteria :
 - Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang
 - Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah
 - Adanya surat penetapan bencana dari Bupati.

4.2.9. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

Beberapa upaya dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsistensi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten Padang Pariaman.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintah daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2022 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Selanjutnya keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (P.3)	Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM (P.1)
	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital (P.4)	Peningkatan Ketepatan Alokasi Investasi dan Sumber-sumber Pendanaan (P.2)
	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan (P.5)	
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (P.6)	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang (P.3)
meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing (P.1)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing (P.4)
revolusi mental dan pembangunan dan kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah (P.2)	Peningkatan Pengamalan ABS SBK dalam Kehidupan Bermasyarakat (P.7)
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (P.6)	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang (P.3)
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (P.6)	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang (P.3)

		Peningkatan Kemandirian Masyarakat Tangguh Bencana (P.5)
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas (P.7)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis (P.6)

4.2.10. Inovasi Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dewasa ini telah banyak mengubah tatanan kehidupan dunia. Demikian juga dengan pembangunan ekonomi yang saat ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan dunia digital. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat dibutuhkan peran dunia digital dalam perkembangan ekonomi suatu daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, adanya perubahan paradigma dalam pembangunan yang mengarah kepada konsep pembangunan berkelanjutan juga telah menjadi acuan bagi berbagai negara untuk membuat kebijakan dalam perencanaan pembangunan termasuk Indonesia. Terutama dalam hal pembangunan ekonomi. Saat ini pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam (*economic based natural resources*) sudah mulai ditinggalkan. Sebaliknya saat ini pembangunan ekonomi lebih diarahkan kepada pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*economic based knowledge*).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 bertema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah major project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sejalan dengan tema dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) tahun 2023 yaitu "Pecepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat". Dalam penyusunan RKPD tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan daerah untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, yaitu :

- a) Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata dan UMKM.
- b) Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan.
- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasiskan lingkungan dan tata ruang.
- d) Peningkatan kualitas sumber dayamanusa yang cerdas dan terampil serta berdaya saing.
- e) Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana.
- f) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis.
- g) Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu melahirkan berbagai inovasi daerah yang menunjang kinerja pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Semenjak tahun 2009 hingga saat ini, ratusan inovasi daerah sudah dilaksanakan di berbagai bidang dan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Inovasi tersebut terdiri dari bentuk Inovasi yaitu: 1) inovasi pelayanan publik, 2) inovasi tata kelola pemerintahan, dan 3) inovasi dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

INOVASI DAERAH UNGGULAN

Inovasi unggulan adalah inovasi yang dilahirkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menjawab berbagai isu dan permasalahan pembangunan daerah dan secara langsung ataupun tidak langsung mendukung prioritas nasional yang telah tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengambil tema "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan". Dilihat dari disain kerangka pikir tema RKP tersebut terdapat beberapa kata kunci yang membangun kalimat tema tersebut, yaitu 1) Produktivitas, 2) Inklusif, 3) Berkelanjutan, serta 4) transformasi ekonomi. Berikut penterjemahan kata - kata kunci Tema RKP tahun 2023 dan dihubungkan dengan beberapa inovasi unggulan daerah Kabupaten Padang Pariaman yang mendukung tema dan prioritas pembangunan nasional :

1. Produktivitas

- Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- Mendorong pemulihan dunia usaha;
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- Infrastruktur digital dan konektivitas.

Inovasi unggulan yang terkait dengan peningkatan "produktivitas" adalah :

1) SI RIDA (Sistim Informasi Data Riset dan Inovasi Daerah)

Inovasi SI RIDA merupakan inovasi yang digagas oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupten Padang Pariaman. Inovasi SI RIDA adalah aplikasi berbagi pakai berbasis web yang berfungsi sebagai media penyimpanan hasil - hasil penelitian dan bisa diakses oleh publik. Selain itu aplikasi SI RIDA juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan usulan kebutuhan kajian / penelitian yang berhubungan dengan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Kabupetn Padang Pariaman. Selain sebagai media penyimpanan dan penyampaian data usulan secara elektronik, inovasi ini diharapkan mampu menguatkan riset terapan untuk terwujudnya planning based research di Kabupaten Padag Pariaman.

2) PERISAI (Program Perikanan, Pariwisata dan Pertanian Terintegrasi)

Perikanan merupakan salah satu sub sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Padang Pariaman. Namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi adalah dalam pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Padang Pariaman seperti :

- a) Sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha perikanan masih rendah.
- b) Belum maksimalnya pembinaan Kelembagaan pelaku usaha perikanan.
- c) Masih rendahnya peran serta kelompok atau masyarakat tentang penerapan inovasi dan melakukan mata pencaharian alternatif .
- d) Pemanfaatan bantuan oleh kelompok belum optimal sehingga belum berkembang sebagai usaha pokok.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, atau kelompok dalam pengelolaan usaha perikanan yang berkembang dan berkelanjutan melalui penerapan program perikanan, pariwisata dan pertanian terintegrasi pada usaha perikanan, wisata dan pertanian dalam meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan.

Dalam menerapkan program perikanan, pariwisata dan pertanian terintegrasi dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang terintegrasi dna berkelanjutan antara Dinas terkait yaitu Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Melalui inovasi ini ketiga Dinas mengalokasikan kegiatannya masing-masing pada satu lokasi lahan seperti berikut :

Di wilayah pesisir pantai : mengkolaborasikan budidaya lele kolam terpal, wisata kuliner berupa rumah makan dengan menu makanan berbahan baku ikan, serta wisata kolam renang.

Perairan sungai dan irigasi : menjadikan budidaya/pemeliharaan ikan di lubang larangan sebagai wisata edukasi untuk pengenalan ikan dan ekosistem perairan sungai.

Lahan pertanian : mengkolaborasikan kegiatan perikanan dan pertanian secara terpadu (minapadi /budidaya ikan dan padi), kolam ikan dengan

sayuran hidroponik yang memanfaatkan air pemeliharaan kolam sebagai pupuk sayuran, serta budidaya lele kolam terpal dengan tanaman sayuran yang memanfaatkan air media pemeliharaan lele sebagai pupuk sayuran.

Pengembangan program perikanan, pariwisata dan pertanian terintegrasi dapat dilakukan di lahan seperti : pesisir pantai, perairan sungai dan irigasi, serta lahan pertanian.

Dengan adanya program terintegrasi ini diharapkan akan mampu mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat pada sektor unggulan daerah. Dengan demikian juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sektor - sektor tersebut.

3) Bank Pakan Padang Pariaman (BAPAK PAPA)

Pakan merupakan unsur utama penentu harga produk pangan asal ternak, dari data Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) tahun 2017 menunjukkan bahwa porsi biaya pakan terhadap total biaya produksi pada skala usaha peternakan rakyat 70,97% untuk ayam ras petelur; 56,95% ayam ras pedaging; 57,67% sapi potong; dan 67,08% sapi perah. Menyadari peran penting aspek pakan, baik unggas maupun ruminansia dalam efisiensi usaha peternakan yang selanjutnya berpengaruh pada pembentukan harga produk peternakan, maka mendesak untuk didapatkan solusi, antara lain bagi berkembangnya usaha produksi pakan yang dikelola kelompok (masyarakat) secara berkelanjutan dengan menggunakan bahan pakan lokal.

Tersedianya bahan pakan lokal, seperti dedak, bungkil kelapa, bungkil inti sawit, bungkil kopi, bungkil cokelat, dan hasil samping pertanian seperti jerami padi dan jerami jagung menjadi alternatif untuk dimanfaatkan lebih meluas baik sebagai substitusi/pengganti bahan pakan yang masih diimpor maupun bahan pakan lokal utama (yang penyediaanya dipengaruhi oleh banyak faktor).

Bank Pakan ini diharapkan mampu memproduksi pakan bermutu secara berkelanjutan mengumutakan bahan pakan lokal dan mengembangkannya menjadi usaha pakan yang mandiri bagi tersedianya pakan dengan harga yang terjangkau dengan memanfaatkan jerami jagung menjadi pakan silase dengan menggunakan system fermentasi (anaerob) yang bias disimpan sebagai stok penyediaan pakan yang disimpan pada bank Pakan.

4) PADI (Perizinan Langsung Jadi)

Inovasi Padi merupakan inovasi yang dilahirkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) untuk memberikan pelayanan perizinan dengan cepat. Adapun yang menjadi latar belakang DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan Inovasi PADI (Perizinan Langsung Jadi) yaitu :

Karena masyarakat merasa bahwa pengurusan administrasi perizinan membutuhkan waktu yang cukup lama

Masih adanya persepsi masyarakat bahwa pengurusan perizinan itu sulit, berbelit-belit, dan kurang transparan

Besarnya harapan masyarakat tentang dokumen perizinan dapat diselesaikan secara mudah, cepat, akurat

Untuk Menimbulkan minat/ keinginan dari para investor baik didalam negeri maupun luar negeri agar mau berinvestasi di Padang Pariaman.

Dengan adanya inovasi ini diharapkan mampu untuk mendorong percepatan pemulihan dunia usaha pasca pandemi covid - 19 terutama pada sektor UMKM yang memang mendominasi sebagian besar kegiatan perekonomian masyarakat.

5) Integrasi Layanan Berbasis Elektronik (Intan Bernik)

Aplikasi intan bernik adalah sebuah platform digital yang menggabungkan seluruh system informasi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, yang mana dengan aplikasi intan bernik ini, masyarakat tidak perlu lagi banyak-banyak mengakses system informasi dan aplikasi layanan yang ada.

2. Inklusif

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;

Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi.

Inovasi daerah unggulan yang terkait dengan pembangunan yang "Inklusif" adalah :

a) SI DONA (Slapkan DOKumen di NAgari)

Siapkan Dokumen di Nagari merupakan suatu program kerja yang bertujuan agar masyarakat dalam mengurus permasalahan bantuan sosial mereka dan pelayanan bantuan sosial yang mereka inginkan tidak harus pergi jauh jauh dari nagari ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masyarakat yang butuh bantuan dan pelayanan untuk bantuan sosial cukup berurusan sampai di Kantor Wali Nagari saja. Semua Dokumen yang dibutuhkan cukup di scan oleh petugas di nagari lalu di kirim ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui WhatsApp. Dokumen tersebut akan diproses oleh petugas di Pusat Pengaduan dan Pelayanan Bantuan Sosial. Setelah itu akan di kirim kembali ke Nagari bukti bahwa dokumen itu sudah diproses melalui whatsapp. Masyarakat yang berurusan cukup menanya kepetugas nagari apakah dokumen mereka sudah selesai diproses. Dengan demikian diharapkan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan sosial dengan lebih cepat.

b) KOZIO (Konsultasi Gizi Online)

Gizi merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu RSUD Padang Pariaman akan membuat terobosan layanan konsultasi Gizi Online melalui program KOZIO RUPA (Konsultasi Gizi Online Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman). Dalam program ini, bagian gizi akan memberikan layanan konsultasi gizi online bagi pasien yang

berobat ke RSUD Padang Pariaman. Pasien yang berobat ke RSUD Padang Pariaman tidak harus datang ke Rumah Sakit untuk menanyakan perihal pola makan, pantangan, anjuran maupun jenis makanan yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya.

Dengan layanan KOZIO RUPA ini masyarakat dapat mendapatkan layanan gizi dimana saja, baik di rumah, dikantor ataupun sedang di luar kota. Dengan program ini, masyarakat akan tetap mendapatkan layanan gizi yang baik untuk mendukung kesehatan dan pengobatannya.

c) POLIS (Pojok Literasi Sekolah)

Tingkat budaya literasi masyarakat Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya budaya literasi peserta didik, salah satunya yaitu minimnya fasilitas perpustakaan. Pojok literasi merupakan gerakan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan minat baca siswa. Pojok literasi memberikan siswa untuk mengakses bacaan-bacaan dari berbagai genre melalui stand-stand yang tersedia di setiap ruang kelas. Dengan begitu frekuensi siswa untuk membaca akan lebih banyak.

Membaca merupakan jantungnya pendidikan. Semakin tinggi budaya membaca sebuah bangsa, maka semakin baik pula tatanan nilai kehidupan bangsa. Dengan membaca pula akan menambah wawasan, informasi-informasi penting yang terjadi di belahan dunia dan masih banyak lagi. Negara-negara yang mutu pendidikannya baik menjadikan membaca atau budaya literasi sebagai kegiatan yang wajib di sekolah. Karena mereka menanamkan persepsi bahwa membaca adalah kebiasaan yang dibentuk lingkungan. Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dapat memberi pengaruh yang kuat dalam meningkatkan minat membaca.

d) Aplikasi Padang Pariaman Tourism Destination (Padati)

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang membangun perekonomian Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman memiliki lebih kurang 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) daya tarik wisata untuk dikembangkan yang tersebar diberbagai wilayah. Dari 138 daya tarik wisata tersebut, dikelompokkan menjadi 4 jenis wisata, yakni Wisata Minat Khusus, Wisata Alam, Wisata Buatan dan Wisata Religi/Budaya. Sampai saat ini Padang Pariaman memiliki 5 daya tarik wisata unggulan, yakni Wisata Minat Khusus yakni Lubuak Nyarai, Pendakian Gunung Tandikek, Wisata Kuliner Pantai Tiram, Wisata Tracking Mangrove Green Talao Park, Pemandian Rumah Putih, dan Wisata Religi Makam Syech Burhanuddin. Namun, dalam pengembangannya terhambat karena permasalahan lahan yang berstatus tanah ulayat, maka dalam hal itu, Pokdarwis(Kelompok Sadar Wisata) garda terdepan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan daya tarik Pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman. Sampai saat ini lebih kurang 36 Pokdarwis yang sudah berstatus berkembang dan mandiri. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang merupakan fasilitator masyarakat dalam mengembangkan daya tarik wisata tersebut, melihat belum maksimalnya media promosi yang terintegrasi dalam membantu peran

Pokdarwis untuk mengembangkan daya tarik wisata, dengan rancangan Aplikasi PADATI (Padang Pariaman Destination Tourism) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan masih dikembangkan sampai saat ini. Aplikasi PADATI (PadangPariaman Destination Tourism) merupakan aplikasi informasi khusus Pariwisata Padang Pariaman yang mencakup banyak hal mengenai keunikan budaya, karakter ragam seni, daya tarik wisata dan kuliner. Aplikasi PADATI (Padang Pariaman Destination Tourism) dipercaya dapat membantu peran Pokdarwis dalam mengembangkan daya tarik wisata yang ada serta meningkatkan promosi di sektor pariwisata secara efektif dan berbasis digital. Sehingga nantinya Padang Pariaman akan menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang sangat diminati oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan dengan demikian diharapkan sektor pariwisata akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, yang secara tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Transformasi Ekonomi

Dengan mendorong peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi covid 19 terutama pada sektor ekonomi unggulan daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan cara - cara yang inovatif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal maka diharapkan akan terjadinya transformasi ekonomi (baik nasional maupun di daerah) yang inklusif dan berkelanjutan.

RENCANA INOVASI DAERAH TAHUN 2022

Pada tabel berikut ini ditampilkan daftar lengkap rencana inovasi daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dihimpun pada tahun 2022. Inovasi tersebut terdiri dari berbagai bidang yang menjadi urusan pemerintah daerah. Pada umumnya inovasi tersebut lahir sebagai bentuk pemecahan dari berbagai permasalahan dan isu - isu strategis yang ada di daerah sesuai dengan urusan/ bidang tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Beberapa inovasi daerah sudah berada pada tahap implementasi, artinya inovasi tersebut sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Namun sebagian inovasi masih berada pada tahap inisiatif, dimana pada tahap ini inovasi masih membutuhkan uji coba sebelum inovasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun daftar rencana inovasi Perangkat Daerah Tahun 2022 lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.9
Daftar Rencana Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2022

No.	NAMA INOVASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INOVASI	TAHAPAN
1	INI KAWAN (KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN DAN PENGADUAN)	Inspektorat Daerah	Inovasi pelayanan publik	Implementasi / Penerapan
2	BIMASENA" (BIMBINGAN, ASISTENSI, SUPERVISI DAN AUDIT PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA NAGARI)	Inspektorat Daerah	Inovasi pelayanan publik	Uji Coba
3	WBS (WHISTLEBLOWING SYSTEM) SISTEM PENGADUAN TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEGAWAI DI PEMKAB PADANG PARIAMAN)	Inspektorat Daerah	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Implementasi / Penerapan.
4	SKBT ELEKTRONIK (TANDA TANGAN ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN)	Inspektorat Daerah	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Implementasi / Penerapan
5	"JAGA BOS" (JARINGAN PENCEGAHAN KORUPSI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH)	Inspektorat Daerah	Inovasi pelayanan publik	Implementasi / Penerapan
6	"LONTAR" (LOMBA NAGARI TERINTEGRASI ANTI KORUPSI)	Inspektorat Daerah	Inovasi pelayanan publik	Uji Coba
7	Etawa Nagari (Elektronik Register Database Wali Nagari, Bamus Nagari dan Perangkat Nagari)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Inovasi Penataan Database dan Registrasi Data Aparatur Lembaga Nagari	Inisiatif / Rancangan
8	Kita Bekap Nagari (Klinik Layanan Konsultasi Dan Bedah Kasus Semua Pengaduan Aparatur Lembaga Dan Masyarakat Nagari di Padang Pariaman)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Inovasi Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Nagari Secara Sere	Rancangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

No.	NAMA INOVASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INOVASI	TAHAPAN
9	SATRIA NAGARI (Sistim Evaluasi dan Monitoring Rancangan Regulasi dan APB Nagari)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Inovasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Evaluasi Rancangan APB Nagari dengan sistem Kunjungan ke Nagari-Nagari Se-Kecamatan)	Rancangan
10	PRIMADONA ROOM (Ruangan Preventif, Represif, Menampung Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat, Layanan Konsultasi dan Advokasi)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Inovasi Pelayanan Publik	Rancangan
11	POLIS (Pojok Literasi Sekolah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
12	SIKAP GURU (Sistem kenaikan pangkat guru)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintahan	Inisiatif
13	SI DAGUTEK (Sistem Informasi Data Guru dan Tenaga Kependidikan)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Inovasi pelayanan publik	Inisiatif, Uji Coba, Penerapan
14	Si Pintar (Siswa Praktek Ibadah Setia Hari)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Inovasi ini berbentuk inovasi Kewenangan Daerah yang akan diterapkan kepada satuan Pendidikan SMP sebagai Inovasi dalam pengembangan nilai-nilai Iman dan Taqwa.	Inisiatif, Uji Coba, Penerapan
15	Si Berseri (Siswa Bersedekah Setiap Hari)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Inovasi bentuk lainnya	Penerapan
16	Sharing Informasi Seni dan Aktifitas Kebudayaan yang disingkat Padang Pariaman (SISKA PAMAN)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Inovasi ini berupa kegiatan untuk saling berbagi informasi antara pelaku seni baik itu sanggar ataupun masyarakat	Tahap Inovasi masih dalam tahap Proses, artiya kegiatan sedang berlangsung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

No.	NAMA INOVASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INOVASI	TAHAPAN
			langsung terlibat, agar kebudayaan di padang pariaman tetap hidup disetiap daerah melalui sosial media kita promosikan serta memberikan wadah tempat bersatunya pelaku seni di padang pariaman.	dan baru akan diusulkan untuk pembuatan aplikasi dalam bentuk digitalisasi.
17	Nan SIGAB (Nagari Siaga dan Tanggap Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
18	Si SIGAB (Srikandi Siaga Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
19	Lencana (Analisa Rencana Paska Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
20	Siap Aman (Sistem Aplikasi Perumahan Untuk Manajemen Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
21	Pusat Pelaporan Siaga Darurat Bencana (PUSPA SADAR BANA)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
22	SIMUNA V2 (Sistem Informasi Manajemen V2)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
23	Pusat Data Kejadian Bencana Kab Padang Pariaman (PUSDAKA)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
24	SIPEDAPAPA (Sistem Informasi Pelaporan Disiplin Masuk Kerja ASN Padang Pariaman)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Implementasi / Penerapan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

No.	NAMA INOVASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INOVASI	TAHAPAN
25	SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Implementasi/ Penerapan
26	SIPASATU (Sistem Pelayanan Satu Pintu)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inovasi Pelayanan Publik	Implementasi /Penerapan
27	SIMUDAH (Sistem Informasi Mutasi Pindah)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Implementasi /Penerapan
28	KOZIO (Konsultasi Gizi Online)	RSUD	Inovasi Pelayanan Publik	Inisiatif
29	ANTAR PAMAN (Anjungan Daftar Pasien Mandiri)	RSUD	Inovasi Pelayanan Publik	Implementasi
30	PAPA AMPUH (Padang Pariaman Antar Pasien Sembuh)	RSUD	Inovasi Pelayanan Publik	Implementasi
31	POKCA RUSA (Pojoek Baca Rumah Sakit)	RSUD	Inovasi Pelayanan Publik	Inisiatif
32	SIPERJA RUSA (Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Rumah Sakit)	RSUD	Inovasi Pelayanan Publik	Uji Coba
33	PERISAI (Program Perikanan, Pariwisata dan Pertanian Terintegrasi)	Dinas Perikanan	Inovasi bentuk lainnya	Implementasi /Penerapan
34	SISTEM INFORMASI DATA PERIKANAN (SIDATPeri)	Dinas Perikanan	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Inisiatif
35	DIGAS SETWAN (Digital Arsip Sekretariat Dewan)	Sekretariat DPRD	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
36	SIKDA Generik (Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik)	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Implementasi /Penerapan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

No.	NAMA INOVASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INOVASI	TAHAPAN
37	Central Operation City (COC)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah di implementasikan, dan sudah menintegrasikan aplikasi existing untuk di olah data di dashboard COC	Sudah di implementasikan, dan sudah menintegrasikan aplikasi existing untuk di olah data di dashboard COC
38	Integrasi Layanan Berbasis Elektronik (Intan Bernik)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Inovasi Intan Bernik adalah inovasi untuk menunjang layanan publik	Sudah di implementasikan dan sudah terintegrasikan seluruh layanan digital yang berbasis web di padang pariaman
39	Sistem Informasi Administrasi Persuratan Kantor (SiAPKAN)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Inovasi siApkan adalah sebuah inovasi untuk menunjang tata kelola pemerintahan	implementasi
40	Cek pbb online : cek pajak bumi dan bangunan online	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
41	e-bphtb : elektronik bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
42	DUYAN BASO (PengaDUan dan PelaYANan BAntuan SOsial)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inovasi Pelayanan Publik	Ujicoba
43	SI DONA (Slapkan DOKumen di NAgari)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Inovasi Pelayanan Publik	Inisiatif

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

No.	NAMA INOVASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INOVASI	TAHAPAN
		Perlindungan Anak		
44	ANAK PAPA (ASURANSI TERNAK PADANG PARIAMAN)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
45	Bank Pakan Padang Pariaman (BAPAK PAPA)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Inovasi daerah dapat berbentuk Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Penerapan
46	Brigade Alat dan Mesin Pertanian (BriTani)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Inovasi pelayanan publik	Uji coba
47	PESAN PADA PAPA (PElepaSAN KelaPA DALAM PADANG PARIAMAN)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Inovasi bentuk lainnya	Penerapan/ Implementasi
48	PENGEMBANGAN PADI PUTIAH PAPANAI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Inisiatif
49	Sistem Harga Pangan (S-Harp)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Inovasi Pelayanan Publik	Adapun inovasi Sistem Harga Pangan pada tahun 2021 adalah tahap uji coba, di tahun 2020 inovasi ini mulai di inisiasi.
50	Database Peta dan Sebaran Kawasan Kumuh (PERAN KAMU)	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Inovasi bidang urusan kawasan permukiman	Penerapan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

No.	NAMA INOVASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INOVASI	TAHAPAN
51	Database PSU Perumahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Inovasi bidang urusan kawasan permukiman dan perumahan	Penerapan
52	PESAN KAMI (Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kaum Milenial)	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Inovasi Bentuk Lainnya Sesuai Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Inisiatif
53	SIAP BANA (Sistem Informasi Alur Pelayanan, Bersih Amanah Netral Akuntable)	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Inovasi Pelayanan Publik	Implementasi/ Penerapan
54	PKP (Pintu Ke Pintu)	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Inovasi Pelayanan Publik	Implementasi/ Penerapan
55	Gerakan Seribu Penghafal Al-Qur an (GEBU PAFA)	Sekretariat Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
56	SIPA (Sistem Informasi Penghafal Al-Qur an)	Sekretariat Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Implementasi
57	GATUR LANTASSARI (Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas di Pasar Nagari)	Dinas Perhubungan	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
58	PAM EKSTRA ZOSS (Pengamanan Ekstra di Zona Selamat Sekolah)	Dinas Perhubungan	Inovasi Pelayanan Publik	Penerapan
59	AMAK KU (Alih Media Naskah Kuno)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Alih Media Naskah Kuno	* Pendataan * Observasi * Pendekatan * Alih media
60	BOM API (Bimbingan Operasional Manajemen Arsip dan Perpustakaan Interpersonal)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Bimtek Arsip 2. Bimtek Pustaka	* Pendataan * Observasi * Pendekatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

No.	NAMA INOVASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INOVASI	TAHAPAN
				* Alih media
61	Getar Sari (Gerakan Tertib Arsip Sampai Nagari)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Inovasi Tata Kelola Kearsipan	* Pendataan * Observasi * Pendekatan * Alih media
62	SILAKAN (Sistem Pelaporan Perpustakaan)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Inovasi Tata Kelola Perpustakaan	* Perancangan * Pembuatan * Uji Coba * Penerapan
63	SIAP SAPA PAPA (Sistem Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Padang Pariaman)	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Inovasi pelayanan publik	Inisiatif
64	SIPENDEKAR (SISTEM INFORMASI PENDETEKSI DINI KEBAKARAN)	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Inisiatif
65	APLIKASI PADANG PARIAMAN TOURISM DESTINATION (PADATI)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
66	PADI (Perizinan Langsung Jadi)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
67	SIKIM (Suara Industri Kecil Menengah)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Penerapan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

No.	NAMA INOVASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INOVASI	TAHAPAN
68	LAPAO TANAMO (Layanan Pelaporan Online Kegiatan Penanaman Modal)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
69	PALANTA (Pelayanan Langsung Tuntas)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Implementasi
70	CLINK OSS (Consultasi Layanan Investasi Kegiatan Online : Single Submission)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Implementasi
71	LIMOU POS (Menjalin MOU dengan PT. POS Indonesia)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Implementasi
72	Pengaduan Masyarakat Terpantau Oleh Inspektorat	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Implementasi
73	Aplikasi Perizinan di Android	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Implementasi
74	CEPRON PAPA (Cek Proses Izin Padang Pariaman)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Implementasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

No.	NAMA INOVASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INOVASI	TAHAPAN
75	LAJUR (Layanan Antar Jemput Perizinan)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Implementasi
76	AKAN LARIZ (Akhir Pekan Ada Layanan Perizinan)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Implementasi
77	Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial Tanpa Masalah (PAK HITAM)	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Bentuk Inovasi „PAK HITAM adalah Pelayanan Publik	Tahapan Inovasi „PAK HITAM adalah Penerapan
78	Sistem Pemantauan Kebutuhan Bahan Pokok (SIIPE KEPO)	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Bentuk Inovasi „SIIPE KEPO adalah Inovasi Bventuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Tahapan Inovasi „PAK HITAM adalah Penerapan
79	Klinik Koperasi Online (NIKOTIN)	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Bentuk Inovasi „NIKOTIN adalah Pelayanan Publik	Tahapan Inovasi „NIKOTIN adalah Penerapan
80	Inovasi Bola Kaki (Kolaborasi Layanan dengan PKK dalam penerbitan KIA)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Implementasi /Penerapan
81	LAYANGAN PUTUS (LAYANan KunjuNGAN Perekaman Untuk Usia SLTA)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Implementasi /Penerapan
82	MENARI BERSAMA BIDADARI (Membantu akta KElahiran bersama Bldan praktek mandiri)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Penerapan
83	TIMIKA (TIm koMIte etiKA)	Dinas Kependudukan	Inovasi tata kelola	Penerapan

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

No.	NAMA INOVASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INOVASI	TAHAPAN
		dan Pencatatan Sipil	pemerintahan daerah	
84	SIDAK PAPA (Sistem Informasi Data dan Akuntabilitas Kinerja Padang Pariaman)	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Implementasi /Penerapan
85	Klinik konstanova (konsultasi inovasi daerah)	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Penerapan
86	Si Rida (sistem informasi data riset dan inovasi daerah)	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Inisiatif



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan

Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Reviu RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembanunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, apirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Prioritas pembangunan tahun 2023 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian program pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2023. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan dengan berbagai pendekatan.

Program prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah guna mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Rencana program prioritas tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program prioritas dikelompokkan atas : program penunjang urusan Pemerintah Daerah; program urusan pemerintah wajib (pelayanan dasar maupun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar); program prioritas pada urusan pemerintahan pilihan; program prioritas pada unsur penunjang urusan pemerintahan; unsur pengawasan urusan pemerintah; unsur kewilayahan; serta unsur pemerintahan umum. Selanjutnya masing-masing rencana program dan kegiatan prioritas yang menjadi kewenangan kabupaten Padang Pariaman untuk setiap urusan pemerintahan dijabarkan dalam program sebagai berikut :

- A. Program-Program Prioritas Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut:
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - b. Program Pengembangan Kurikulum
 - c. Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c. Program Sediaan Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mencakup 9 (sembilan) program sebagai berikut :
 - a. Program Penyelenggaraan Jalan
 - b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - f. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - g. Program Penataan Bangunan Gedung
 - h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - j. Program Pengembangan Permukiman
 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :
 - a. Program Kawasan Permukiman
 - b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Utilitas Umum (PSU)
 - e. Program Pengelolaan Persampahan
 - f. Program Pengembangan Perumahan
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Diselenggarakan 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- a. Program Penanggulangan Bencana
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- Diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencakup 5 (lima) program sebagai berikut :
- a. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - b. Program Pemberdayaan Sosial
 - c. Program Rehabilitasi Sosial
 - d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - e. Program Penanganan Bencana
- B. Program-Program Prioritas urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja
- Diselenggarakan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :
- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - c. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - d. Program Hubungan Insutrial
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :
- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Program Perlindungan Perempuan
 - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - f. Program Perlindungan Khusus Anak
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
- Diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :
- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
- Diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :
- a. Program Pengelolaan Izin Lokasi
 - b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 - d. Program Redistribusi Tanah dan ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - e. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
 - f. Program Penatagunaan Tanah
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- Diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, mencakup 8 (delapan) program sebagai berikut :
- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - b. Program Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - c. Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati
 - d. Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)
 - f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
 - g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :
 - a. Program Pendaftaran Penduduk
 - b. Program Pencatatan Sipil
 - c. Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :
 - a. Program Penataan Desa
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :
 - a. Program Pengendalian Penduduk
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - b. Program Pengelolaan Perkerataapian
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :
 - a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. Program Pengelolaan Aplikasi informatika
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :
 - a. Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi
 - b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - c. Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian
 - d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- e. Program Pengembangan UMKM
 - f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :
- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Program Promosi Penanaman Modal
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :
- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, melaksanakan 1 (satu) program yaitu :
- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, melaksanakan 1 (satu) program yaitu :
- a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :
- a. Program Pengembangan Kebudayaan
 - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - c. Program Pembinaan Sejarah
 - d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :
- a. Program Pembinaan Perpustakaan
 - b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Arsip
- b. Program Perizinan Penggunaan Arsip
- c. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

C. Program-Program Prioritas Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Diselenggarakan oleh Dinas Perikanan, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- d. Program pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahaga, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- c. Program Pemasaran Pariwisata
- d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- d. Program Perizinan Usaha Pertanian
- e. Program Penyuluhan Pertanian
- f. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- d. Program Pengembangan Ekspor
 - e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Perindustrian, mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :
- a. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- D. Program-Program Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
1. Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
Diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah melalui 3 (tiga) program, yaitu :
- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Unsur Pendukung Sekretariat DPRD
Diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD melalui pelaksanaan program, yaitu :
- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- E. Program-Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Perencanaan
Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui pelaksanaan 2 (dua) program yaitu :
- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Keuangan
Diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui pelaksanaan 3 (tiga) program, yaitu :
- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Program pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Kepegawaian
Diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program :
- a. Program kepegawaian

4. Pendidikan dan Pelatihan

Diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program :

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Penelitian dan Pengembangan

Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui program :

- a. Program Penelitian dan Pengembangan

F. Program-Program Prioritas Unsur Pengawas

Diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah melalui penyelenggaraan 2 (dua) program, yaitu :

- a. Program penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Permususan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

G. Program-Program Prioritas Unsur Kewilayahan

Diselenggarakan oleh Kecamatan, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di seluruh Kabupaten Padang Pariaman, melalui penyelenggaraan 5 (lima) program sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

H. Program-Program Prioritas Urusan Pemerintahan Umum

Diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melalui 5 (lima) program sebagai berikut :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- c. Program pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 maupun Musrenbang RKPD Tahun 2023. Penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, diupayakan mempunyai keberpihakan terhadap permasalahan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman, serta memperhatikan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah sudah disusun sampai ke rincian belanja per sub kegiatan. Secara rinci rencana kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dipaparkan dalam bentuk Matrik Renja pada Lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari dokumen ini. Sedangkan ringkasan rencana program dan pendanaan dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	571.241.347.531
2.	Dinas Kesehatan	142.002.851.145
	a. Puskesmas Sungai Geringging	110.000.000
	b. Puskesmas Koto Bangko	90.000.000
	c. Puskesmas Batu Basa	110.000.000
	d. Puskesmas Ampalu	90.000.000
	e. Puskesmas Sungai Limau	110.000.000
	f. Puskesmas Kampung Dalam	110.000.000
	g. Puskesmas Sikucur	90.000.000
	h. Puskesmas Ulakan	90.000.000
	i. Puskesmas Padang Alai	90.000.000
	j. Puskesmas Pauh Kamar	110.000.000
	k. Puskesmas Gasan Gadang	90.000.000
	l. Puskesmas Sungai Sariak	110.000.000
	m. Puskesmas Kayu Tanam	110.000.000
	n. Puskesmas Padang Sago	90.000.000
	o. Puskesmas Sikabu	90.000.000
	p. Puskesmas Lubuk Alung	110.000.000
	q. Puskesmas Enam Lingkung	90.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

	r. Puskesmas Kampung Guci	90.000.000
	s. Puskesmas Anduring	90.000.000
	t. Puskesmas Sintuk	90.000.000
	u. Puskesmas Ketaping	90.000.000
	v. Puskesmas Limau Purut	90.000.000
	w. Puskesmas Patamuan	90.000.000
	x. Puskesmas Pasar Usang	110.000.000
	y. Puskesmas Sicincin	110.000.000
	z. UPT Labkesda	375.000.000
	aa. UPT IFK	375.000.000
3.	RSUD Padang Pariaman	69.481.955.511
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	319.668.202.548
5.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	26.342.571.878
6.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.796.428.245
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.282.281.234
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.695.594.204
9.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26.554.945.725
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.369.523.439
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.988.667.341
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.818.060.111
13.	Dinas Perhubungan	19.343.045.081
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.756.882.990
15.	Dinas Perdagangan, TenagaKerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12.759.237.301
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	22.850.206.119
17.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	13.659.430.427
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.139.118.946
19.	Dinas Perikanan	9.262.922.629
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.259.100.383
21.	Sekretariat Daerah	39.981.697.719
22.	Sekretariat DPRD	41.899.960.614
23.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.883.363.396
24.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	191.999.571.838
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.518.642.482
26.	Inspektorat Daerah	8.094.449.315
27.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.952.983.304

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman 2023

	17 Kecamatan	
28.	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	740.223.237
29.	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	690.087.447
30.	Kecamatan Batang Gasan	715.260.742
31.	Kecamatan Batang Anai	845.436.971
32.	Kecamatan Enam Lingkung	717.170.587
33.	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	766.626.338
34.	Kecamatan Lubuk Alung	846.210.026
35.	Kecamatan Nan Sabaris	655.544.838
36.	Kecamatan Padang Sago	615.201.833
37.	Kecamatan Patamuan	695.580.337
38.	Kecamatan Sungai Geringging	786.362.957
39.	Kecamatan Sungai Limau	827.657.707
40.	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	702.805.126
41.	Kecamatan Ulakan Tapakis	675.925.953
42.	Kecamatan V Koto Timur	662.485.645
43.	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	787.000.083
44.	Kecamatan VII Koto	774.390.559
	TOTAL	1.631.307.011.842



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama yang tergabung di Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Sasaran dan target capaian selama tahun 2023 menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

6.1 Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

Target capaian Indikator Kinerja Sasaran untuk Tahun 2023 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1.
Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	TAHUN 2023
	Misi 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban		
1.	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Quran yang menghasilkan Hafiz/Hafizah	%	28
2.	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	38
3.	Persentase penegakkan perda	%	67,5
4.	Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	%	67,5
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94
6.	Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	13
	Misi 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang		
1.	persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	69
2.	Rasio Konektivitas Kabupaten		1:59
3.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	62,72
4.	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di wilayah Sungai (WS) kewenangan Kabupaten	%	7,95
5.	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	70

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	TAHUN 2023
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,09
7.	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,33
8.	Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Ha	856
	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	%	52
11.	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	70
12.	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	62,50
13.	Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	%	9
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat			
1.	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	Juta	2.862.238,58
2.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	7,65
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8,60
4.	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	13,3
5.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	275.000
6.	Tingkat Kemiskinan	%	6,87
7.	PDRB/Income Per Kapita ADHB	Rp.	49.46 (Juta)
8.	Indeks Desa Membangun	Indeks	1
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal			
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	18.88
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,12
3.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.16
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,17
5.	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	Orang	170
6.	Jumlah atlet berprestasi	Orang	370
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan			
1.	Opini WTP atas Laporan Keuangan	Opini	WTP
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	indeks	Level 3
3.	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	indeks	Level 3
4.	Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Nilai	BB
5.	Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	%	12

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	TAHUN 2023
6.	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Angka	2.800 (Tinggi)
7.	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82
8.	Indeks E-Government /SPBE	Indeks	2,76
9.	Indeks Kearsipan Eksternal	Indeks	63,95
10.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,57
Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat berkeadilan, demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik			
1.	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,29
	Laju pertumbuhan penduduk	%	3,29
2.	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	92
3.	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	87
4.	Rasio rumah layak huni	Indeks	0,15
5.	Nagari tangguh bencana	Nagari	17
6.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Menit	14,1
7.	Persentase PPKS Mandiri	%	27
8.	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan	%	76
Misi 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.			
1.	Persentase peningkatan PAD	%	4
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	445,4 (Milyar)

6.2 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2023

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Lampiran II dari dokumen RKPD ini.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat

Tabel 6.2
Target Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
	1. Pertumbuhan PDRB Menurut harga konstan	%		6,28	6,35
	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka	2,18	8,36	7,82
	3. Laju inflasi	%	1,40	5,00	4,50
	4. PDRB :				
	1. Atas harga berlaku	Rp. Juta	18.455.088,03	21.628.385,52	25.288.722,97
	2. Atas harga konstan	Rp. Juta	12.199.848,45	12.609.031,67	13.448.211,66
	3. PDRB per kapita Atas harga berlaku (Rp. Juta)	Rp. Juta	42,65	46,98	49,46
	4. PDRB per kapita Atas harga konstan (Rp. Juta)	Rp. Juta	28,17	31,59	33,81
	5. Pertumbuhan PDRB per Kapita	%	1,58	5,45	5,50
	5. Indeks Gini Rasio	%	0,269	0,298	0,294
	6. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	95,78	91,35	91,47
	1. Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	30,41	30,15	29,83
	2. Tingkat kemiskinan	%	7,22	6,99	6,87
	7. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,41	7,81	7,68
	1. Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-Laki	%	6,05	4,36	3,93
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan	%	11,90	3,94	3,08

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
8.	Indek Pembangunan Manusia		70,76	71,53	72,19
1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,88	0,00	0,00
2.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,97	68,99	69,29
3.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,97	14,12
4.	Pengeluaran perkapita yang disesuaikan	Ribu/Rp	NA	11.186,00	11.382,00
9.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,78	93,60	94,00
10.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Milyar)	Ribu	997	403.300.000,00	445.400.000,00
11.	Ekspor (Rp.Juta)	Juta Rp	992.180,48	2.516.637,36	2.969.632,09
12.	Impor	Juta Rp	NA	739.704,69	687.925,36
2	Aspek Daya Saing Daerah				
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Juta Rp.	16,43	51,40	51,25
2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Juta Rp.		48,10	48,15
3.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	0.00*	7,00	7,00
4.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Buah	0.00*	3,00	4,00
5.	Ketersediaan restoran	Buah	74	29,00	30,00
6.	Rumah makan	Buah	0.00*	80,00	85,00
7.	Cafe	Buah	0.00*	12,00	13,00
8.	Hotel Non Bintang	Buah	0.00*	4,00	4,00
9.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	0.00*	73,00	75,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	10. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	129.051	92,04	92,04
	11. Angka kriminalitas	Kasus	10,34	4,00	3,00
	12. Jumlah demo	Kali	0	1,00	1,00
	13. Lama proses perijinan (rata-rata)	Hari	0.00*	7,00	6,00
	14. Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	%	100	100,00	100,00
	15. Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%	100	100,00	100,00
3	Aspek Pelayanan Umum				
	1. Layanan Urusan Wajib Dasar				
	1. Pendidikan				
	1. Pendidikan Dasar				
	1. Angka partisipasi murni SD/SDLB	%	63,00	94,77	94,86
	2. Angka partisipasi kasar SD/SDLB/paket A	Angka	97,40	89,90	91,20
	3. Angka partisipasi murni SMP/SMPLB	Angka	61,00	63,50	66,20
	4. Angka partisipasi kasar SMP/SMPLB/paket B	%	84,00	96,00	97,00
	5. Rasio guru/murid	Rasio	13,00	22,00	23,00
	6. Rasio ruang kelas/rombel	Rasio	0,99	0,95	0,96
	2. Fasilitas Pendidikan				
	1. Sekolah SD/SDLB kondisi bangunan baik	%	54,15	96,00	97,00
	2. Sekolah SMP/SMPLB kondisi bangunan baik	%	77,47	84,00	86,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
	1. Angka Partisipasi kasar PAUD	Angka (%)	56,00	54,80	57,20
	4. Angka Putus Sekolah				
	1. Angka Putus Sekolah SD	Angka (%)	0,51	0,40	0,36
	2. Angka Putus Sekolah SMP	Angka (%)	1,90	1,48	1,34
	5. Mutu Pendidikan				
	1. Angka Kelulusan (AL) SD	Angka (%)	100,00	100,00	100,00
	2. Angka Kelulusan (AL) SMP	Angka (%)	100,00	100,00	100,00
	3. Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	Angka (%)	80,00	87,80	90,70
	4. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Angka (%)	91,00	85,00	87,80
	5. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,42	94,20	95,60
	6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)				
	1. Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	%	63,70	100,00	100,00
	2. Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	119,00	100,00	100,00
	3. Jumlah Warga Negara usia 5. 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	22,40	100,00	100,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	2. Kesehatan				
	1. Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar dari RS (Net Death Rate=NDR=Angka kematian neto)2.5%	Angka/Seribu	0,25	2,36	2,29
	2. Waktu tunggu pasien dirawat jalan <= 60 menit	Menit	50,00	42,20	38,70
	3. Angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar RS (Gross Death Rate=GDR 4.5%	Angka/Seribu	0,45	4,22	4,08
	4. Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%)	Angka(%)	58,98	65,20	68,60
	5. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien (>=90%)	%	99,00	91,60	92,50
	6. Persentase limbah cair & padat RS yang memenuhi baku mutu (BOD <30 mg/l dan PH 6-9) mencapai (100%)	%	100,00	100,00	100,00
	7. Angka pemanfaatan tempat tidur RS (Bed Occupancy Rate=BOR) (60%-85%)	Angka(%)	34,83	58,40	63,20
	8. Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan	%	73,60	85,00	90,00
	9. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka/Seribu	5,00	47,00	46,00
	10. Angka kelangsungan hidup bayi (Jumlah Kelahiran Hidup)	Angka/Seribu	991,61	92,60	95,60
	11. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka/Seribu	4,00	4,00	3,00
	12. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka/Seribu	53,00	15,00	15,00
	13. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka/Seribu	11,00	7,00	6,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	14. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	28,00	47,00	100,00
	15. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00
	16. Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	82,40	100,00	100,00
	17. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	60,72	83,00	87,90
	18. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00
	19. Prevalensi Balita Stunting	%	10,55	18,40	16,00
	20. Cakupan Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	%	100,00	100,00	100,00
	21. Persentase Balita Kurus yang Mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	%	100,00*	100,00	100,00
	22. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	60,70*	83,00	86,00
	23. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	3,00*	4,00	4,00
	24. Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100,00*	100,00	100,00
	25. Cakupan penemuan dan pengobatan TB	%	55,00	90,00	90,00
	26. Case Notifikasi Rate TB per 100.000 penduduk	Angka/Seribu	181	328	324
	27. Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	7,60	9,00	8,00
	28. Persentase Orang terduga TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TB sesuai dengan Standar	%	49,40	100,00	100,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	29. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate)	%	84,20	90,00	90,00
	30. Penemuan kasus DBD per 100.000 pddk (Insiden Rate)	Angka/Seribu	0,48	44	43
	31. Persentase tatalaksanaan Diare sesuai standar	%	100,00	55,00	57,00
	32. Penemuan kasus malaria	Angka/Seribu	0,0002372	1	1
	33. Persentase Orang usia 15-59 Tahun Mendapatkan skreening kesehatan sesuai standar	%	81,40	100,00	100,00
	34. Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke atas mendapatkan skreening kesehatan sesuai standar	%	67,40	100,00	100,00
	35. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Angka/Seribu	0,036	0,20	0,19
	36. Persentase Penderita Hypertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	66,60	100,00	100,00
	37. Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	88,50	100,00	100,00
	38. Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	99,80	100,00	100,00
	39. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	%	89,90	100,00	100,00
	40. Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas	%	100,00	100,00	100,00
	41. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar	%	85,63	100,00	100,00
	42. Cakupan Pelayanan Kunjungan Nifas Lengkap (KF3)	%	82,15	100,00	100,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	43. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00
	44. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	69,60	100,00	100,00
	45. Cakupan Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	%	100,00	100,00	100,00
	46. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	58,00	100,00	100,00
	47. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ter akreditasi	%	100,00	100,00	100,00
	48. Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119 sebanyak 25 Puskesmas	Jumlah	25,00	25,00	25,00
	49. Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100,00	100,00	100,00
	50. Persentase Korong dengan Stop Buang Air Besar	%	34,60	30,00	40,00
	51. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	100,00	100,00	100,00
	52. Persentase Alkes yang sesuai standar permenkes	%	64,57	68,00	70,00
	53. Jumlah Kecamatan Sehat	Kecamatan	17,00	17,00	17,00
	54. Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,10	0,10	0,11
	55. Persentase Rumah Tangga PHBS	%	72,00	74,00	76,00
	56. Jumlah IRTP yang diawasi	Jumlah	105,00	150,00	155,00
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	72,05	90,00	92,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	2. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	79,59	85,00	87,00
	3. Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	63,63	67,00	69,00
	4. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	69,30	58,72	62,72
	5. Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	60,39	68,00	70,00
	6. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	%	1,24	7,43	7,95
	7. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	39,98	60,00	70,00
	8. Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	%	21,74	43,00	52,00
	9. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	33,33	50,00	62,50
	10. Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	%	54.20*	62,87	64,70
	11. Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan rencana tata ruang	Jumlah Kawasan	4,00	9,00	9,00
	12. Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah	%	10,48	29,00	25,00
	13. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	%	95,40	30,00	40,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	14. Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	23,49	35,00	40,00
	15. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	79,59	85,00	87,00
	4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
	1. Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
	2. Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
	3. Persentase areal kawasan kumuh	%	0,00016	0,44	0,33
	4. Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	43,27	854,00	856,00
	5. Rasio rumah layak huni	Angka	0,21	0,14	0,15
	6. Rasio permukiman layak huni	Nilai	NA	0,1	0,11
	7. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	92,80	64,00	64,50
	8. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	NA	20	21
	9. Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	NA	0,65	0,64
	10. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	NA	1,23	3,11
	11. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	NA	1,75	1,72
	12. Persentase pemukiman yang tertata	%	NA	20,00	20,10
	13. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	NA	50	55

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	14. Persentase Pengembang Perumahan yang telah tersertifikasi	%	NA	3,40	6,8
	15. Persentase Pengembang Perumahan yang telah teregistrasi	%	NA	100	100
	16. Timbulan sampah yang ditangani	%	NA	0,0224	0,0223
	17. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	NA	0,417000	0,414000
	18. Persentase cakupan area pelayanan	%	NA	0,30	0,32
	19. Persentase penanganan sampah	%	NA	10,00	12,00
	5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
	1. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	NA	100,00	100,00
	2. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00
	3. Persentase Penegakan Perda	%	68,25	100,00	67,50
	4. Nagari tangguh bencana	Nagari	15,00	16,00	17,00
	5. Penurunan Jumlah Tindak Pidana	Jumlah	453,00	532,00	482,00
	6. Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	%	100,00	62,50	67,50
	7. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15,00	15,80	14,10
	8. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Jumlah	NA	NA	NA
	9. Cakupan patroli petugas Satpol PP	Jam	0,53	2,12	1,43

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	10. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100,00	62,50	75,45
	11. Persentase sarana dan prasarana kebencanaan yang ramah bencana	%	41,84	42,57	43,04
	12. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	%	30,25	40,00	60,00
	13. Persentase warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	70,00	75,00
	14. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	81,54	100,00	98,11
	15. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	Unit	5,00	35,29	8,00
	16. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	9,17	55,00	60,00
	17. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	17,65	20,65	26,30
	18. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	99,90	75,00	80,00
	19. Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	15,00	15,00	15,00
	6. Sosial				
	1. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00
	2. Persentase anak telantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	3. Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00
	4. Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00
	5. Persentase Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00
	6. Tingkat kemiskinan	%	7,22	7,25	6,87
	7. Persentase PPKS Mandiri	%	0,00	2,00	27,00
	8. Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	%	82,00	53,00	78,00
	9. Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	100,00
	10. Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	%	100,00	100,00	82,00
	11. Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	%	82,00	53,00	56,00
	12. Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	%	100,00	100,00	100,00
	13. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	82,00	53,00	90,00
	14. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	100,00
	15. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Jumlah	7,00	8,00	8,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
	1. Tenaga Kerja				
	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,41	7,15	7,17
	2. Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	65,44	70,00	70,00
	3. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	1.636,00	2.400,00	2430,00
	4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	40,00	51,00	51,00
	5. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	1,80	0,90	0,90
	6. Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	Angka	5,00	10,00	10,00
	7. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100,00	64,00	66,00
	8. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	4,80	6,15	6,20
	9. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	58,23	57,77	59,00
	10. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	80,42	73,00	75,00
	11. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Jumlah	0,00	0,00	0,00
	12. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	336,00	700,00	720,00
	13. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah	0,00	60,00	80,00
	14. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah	96,00	100,00	120,00
	15. Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio(%)	59,70	56,86	56,97

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	16. Rasio penduduk yg bekerja	%	85,10	70,92	70,93
	17. Angka partisipasi angkatan kerja	%	70,90	70,92	70,93
	18. Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	Jumlah	5,00	24,00	25,00
	19. Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	1,90	1,60	1,70
	20. Pencari kerja yang ditempatkan	%	1,00	4,00	4,20
	21. Persentase Pengangguran/mencari Pekerjaan	%	19,44	16,54	15,22
	22. Rasio daya serap tenaga kerja	%	112,00	140,00	154,00
	23. Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	Orang	NA	2.700,00	2800,00
	2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,69	93,60	94,00
	2. Presentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	26,01	26,00	13,00
	3. Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	%	100,00	100,00	46,00
	4. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	74,00	66,00	68,00
	5. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	0,00	1,00	0,00
	6. Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	39,00	28,00	33,00
	7. Rasio KDRT	Rasio	0,00	0,74	0,74
	8. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,00	0,00	0,00
	9. Partisipasi angkatan kerja perempuan	Angka	38,80	654,00	55,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	10. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	100,00	100,00
	11. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100,00	100,00	100,00
	12. Cakupan perempuan dan anak korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100,00	100,00	100,00
	13. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00	100,00	100,00
	14. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00	100,00	100,00
	15. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100,00	100,00	100,00
	3. Pangan				
	1. Skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai	79,20	88,90	89,30
	2. Ketersediaan pangan utama (beras) per tahun	Ton	137,262.72*	158.424,00	160.800,00
	3. Ketersediaan energi	Kkal/Kap/Hari	2.440,00	2.400,00	2.400,00
	4. Ketersediaan protein	Gram/Kap/Hari	55,65	55,66	56,47
	5. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	N/A	100,00	100,00
	4. Pertanian				
	1. Persentase luas lahan milik Pemda bersertifikat	%	9,16	8,90	9,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	2. Penyelesaian Izin Lokasi	Izin	0,00	1,00	1,00
	3. Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100,00	100,00	100,00
	4. Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	0,00	65,00	70,00
	5. Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	0,00	5,00	15,00
	6. Cakupan pelayanan pengelolaan izin membuka tanah	%	0,00	5,00	5,00
	5. Lingkungan Hidup				
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,76	67,00	67,09
	2. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		Tidak	ADA	Ada
	3. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota		Tidak	ADA	Ada
	4. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi		Ada	ADA	Ada
	5. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Angka	58,95	55,89	55,99
	6. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Angka	93,54	91,93	92,06
	7. Persentase Keanekaragaman Hayati yang dikelola	%	100,00	100,00	100,00
	8. Cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan		100	N/A	NA
	9. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	%	36,67	40,00	45,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	10. Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	2,00	2,00	3,00
	11. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	NA	1	1
	12. Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Kelompok	0	1	1
	13. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Kelompok	0	1	1
	14. Penetapan hak MHA	Kelompok	0	1	1
	15. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Kelompok	0	1	1
	16. Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana	Kelompok	0	1	1
	17. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	0,00	2,00	2,00
	18. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	Ada	ADA	Ada
	19. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100,00	100,00	100,00
	20. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	0,00	70,00	80,00
	21. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal atau UKL-UPL	%	0,00	24,72	24,73
	22. Penegakan hukum lingkungan	Jumlah	0,00	100,00	100,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1.	Persentase Penerbitan KTP EL	%	99,80	99,00	99,00
2.	Persentase Penerbitan KK	%	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase Penerbitan KIA	%	36,38	35,00	40,00
4.	Persentase penerbitan akta kelahiran	%	97,05	95,00	95,00
5.	Persentase penerbitan akta perkawinan	%	100,00	100,00	100,00
6.	Persentase penerbitan akta kematian	%	100,00	100,00	100,00
7.	Persentase database kependudukan yang disusun	%	100,00	100,00	100,00
8.	Jumlah buku laporan data kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan	Jumlah	3,00	3,00	3,00
9.	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	Ratio	3:2	3:02	3:02
10.	Rasio bayi berakte kelahiran	Ratio	1:1	1:01	1:01
11.	Rasio pasangan berakte nikah	Ratio	1:2	1:02	1:02
12.	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Ada	ada	Ada
13.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.	Indeks Desa Membangun	Indeks	2,00	1,00	1,00
2.	Persentase Nagari yang tertata	%	70,00	100,00	100,00
3.	Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama	%	70,00	100,00	100,00
4.	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	%	70,00	100,00	100,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	5. Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	%	91,00	100,00	100,00
	6. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga berdayaan masyarakat (LPM)	%	75,00	90,00	92,00
	7. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	100,00	100,00	100,00
	8. Persentase LPM aktif	%	72,00	74,00	78,00
	9. Persentase LPM Berprestasi	%	68,00	72,00	75,00
	10. Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00
	11. Persentase Posyandu aktif	%	75,00	80,00	85,00
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,74	3,39	2,31
	2. Total Fertility Rate (TFR)	%	2,28	2,34	2,31
	3. Persentase Pemakaian alat kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate = CPR)	%	65,69	65,75	66,00
	4. Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	6,31	13,00	12,00
	5. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	74,00	13,00	15,00
	6. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	0,00	25,00	30,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	7. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	0,00	1,00	1,00
	8. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	0,00	4,00	6,00
	9. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	2,00	5,00	7,00
	10. Rata-rata jumlah anak perkeluarga	%	2,50	2,50	2,40
	11. Rasio Akseptor KB	%	65,69	65,75	66,00
	12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,00	1,15	1,11
	13. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,55	12,00	11,75
	14. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	17,90	24,90	25,00
	15. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	23,70	34,70	34,90
	16. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	51,12	51,12	51,62
	17. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	41,36	41,36	41,86
	18. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	40,47	40,47	40,97
	19. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	435,00	435,00	447,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	20. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling remaja/Mahasiswa	%	337,00	347,00	358,00
	21. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	16,50	20,00	23,00
	22. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	9,70	44,37	44,57
	23. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	219,40	9,70	9,70
	24. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00
	25. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	52,08	100,00	100,00
	26. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	25,00	22,00	24,00
	27. Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	71,50	71,50	72,00
	28. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	63,40	71,50	72,00
	29. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	22,00	63,04	63,54

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	30. Rata -rata usia kawin pertama wanita	%	25,44	22,50	23,00
	31. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,78	0,14	0,15
	9. Perhubungan				
	1. Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	1:54	1,57	1,59
	2. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	%	88,24	87,00	90,00
	3. Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	Angka	28,00	18,00	16,00
	4. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	54.889,00	5.995.320,00	5.995.325,00
	5. Rasio Izin Trayek	Rasio	2,80	38,00	43,00
	6. Jumlah Uji kir Angkutan Umum	Jumlah	7.016,00	7.000,00	5.900,00
	7. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	Jumlah	3/1/2003	1	1
	8. Persentase Layanan Angkutan Udara	%	43,00	65,00	70,00
	9. Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	%	5.600,00	100,00	3.050,00
	10. Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah	0,00	980,00	985,00
	11. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0,35897		
	12. Jumlah orang /barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	10.630,00	5.995.319,00	5.995.320,00
	13. Jumlah orang /barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	Jumlah	1.078.520,00	5.995.355,00	5.995.360,00
	14. Lama pengujian kelayakan angkutan umum	Menit	25,00	24,00	20,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	(KIR)				
	15. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	16. Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah / Buah	0,00	750,00	825,00
	10. Komunikasi dan Informatika				
	1. Indeks E-Government/SPBE	Indeks	2,60	2,44	2,76
	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	41,00	59,00	88,00
	3. Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	55,00	60,00	62,00
	4. Persentase penduduk yang menggunakan HP / telepon	%	76,00	77,00	78,00
	5. Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	36,00	38,00	40,00
	6. Jumlah jaringan komunikasi	Jumlah	112,00	112,00	112,00
	7. Jumlah penyiaran radio Lokal	Buah	3,00	3,00	3,00
	8. Web site milik pemerintah daerah	Jumlah	1,00	1,00	1,00
	11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah				
	1. Persentase koperasi aktif	%	33,33	41,98	42,80
	2. Persentase koperasi sehat	%	57,33	40,00	40,00
	3. Koperasi mampu melaksanakan RAT tepat waktu	Koperasi	57,33	57,00	57,00
	4. Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	57,33	40,00	40,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	5. Persentase UMKM	%	30,00	64,00	65,00
	6. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	1,80	0,90	0,90
	7. Jumlah UMKM	Orang	47.802,00	11.579,00	11.868,00
	8. Jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom	Unit	31,00	51,00	53,00
	9. Jumlah BPR/LKM	Unit	0,00	18,00	21,00
	10. Jumlah BUMNAG	Unit	0,00	0,00	0,00
	12. Penanaman Modal				
	1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	997,00	403,30	445,40
	2. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Dokumen	1,00	1,00	1,00
	3. Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Dokumen / Event	1/0	1/5	1/5
	4. Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	Angka	83,75	89,00	90,00
	5. Jumlah Objek Perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	Objek	103,00	110,00	110,00
	6. Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan	Aplikasi	1,00	1,00	1,00
	7. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Perusahaan	337,00	91,00	100,00
	8. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi	Rp.(Milyar)	333,00	66,55	73,21
	9. Lama Proses Perizinan (Rata- rata lama proses perizinan)	Hari Kerja	5,00	7,00	7,00
	10. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi	Angka	1,00	2,00	2,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	Daerah				
	11. Jumlah perda yang mendukung iklim investasi	Perda	1,00	1,00	1,00
	13. Kepemudaan dan Olah Raga				
	1. Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	367,00	365,00	370,00
	2. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	18,87	46,29	55,55
	3. Persentase Wirausaha Muda	%	0,13	0,14	0,17
	4. Cakupan pembinaan olahraga	Kegiatan	36,00	36,00	38,00
	5. Jumlah lapangan olahraga	Jumlah	246,00	246,00	247,00
	14. Statistik				
	1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Jumlah	Ada	Ada	Ada
	2. Buku Kabupaten Dalam Angka	Buku	1,00	1,00	1,00
	3. Buku PDRB kabupaten	Buku	1,00	1,00	1,00
	15. Persandian				
	1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	15,91	61,18	68,18
	16. Kebudayaan				
	1. Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	0,00	35,00	38,00
	2. Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya	Rasio	0,00	0,00	7,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	3. Rasio Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya	Rasio	10,00	6,00	7,00
	4. Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	Rasio	0,00	50,00	50,00
	5. Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	5,00	5,00	5,00
	6. Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	4,00	30,00	35,00
	7. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	4,00	4,00	4,00
	8. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	0,00	15,00	18,00
	9. Rasio grup kesenian/10.000 penduduk	%	0,71	0,72	0,83
	10. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	8,00	3,00	3,00
	17. Perpustakaan				
	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	1,84	18,85	18,88
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	Indeks	91,93	90,25	90,30
	3. Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	1,60	2,95	3,00
	4. Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	%	10,38	0,45	0,50
	5. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	0,58	0,20	0,20
	6. Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	0,34	0,40	0,40

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	7. Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	%	0,00	20,00	30,00
	8. Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	10,38	0,06	0,07
	9. Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	0,54	0,53	0,53
	10. Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,27	1,03	1,05
	11. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Jumlah (Org)	51.320,00	19.947,00	21.482,00
	12. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	6.784,00	6.234,00	6.284,00
	13. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0,00	3,00	3,00
	18. Kearsipan				
	1. Indeks kearsipan Eksternal	Indeks	(B)	60,80	63,95
	2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	%	4,00	13,95	18,60
	3. Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan	%	6,00	10,00	15,00
	4. Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	%	46,37	50,00	55,00
	5. Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan	%	33,22	40,00	45,00
	6. Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1,00	50,00	50,00
	3. Layanan Urusan Pilihan				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	1. Pariwisata				
	1. Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Objek Wisata	4,00	5,00	5,00
	2. Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Orang	72,00	45,00	50,00
	3. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	36,00	40,00	45,00
	4. Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	152.207,00	265000,00	275000,00
	2. Pertanian				
	1. Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	Rp./Juta	2,608,426.60*	2.796.247,14	2.862.238,58
	2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	14.13*	15,00	15,00
	3. Produksi tanaman pangan (padi) per tahun	Ton	252,723.26*	291.685,00	296.060,00
	4. Cakupan bina kelompok petani	%	46,77	26,52	27,19
	5. Produktivitas pangan utama (padi) per hektar	Ton/Ha	4.54*	4,92	5,04
	6. Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	Rp/M	236,818.50*	241.554,00	246385,08
	7. Jumlah populasi ternak besar (sapi, kerbau)	Ekor	55.759,00	56.556,00	57647,00
	8. Jumlah populasi ternak kecil (kambing)	Ekor	36.608,00	36.323,00	36868,53
	9. Jumlah populasi ternak unggas (ayam, itik, puyuh)	Ekor	15.861.757,00	15.067.935,00	15293954,93
	10. Jumlah produksi hasil ternak	Daging/Ton	18.667.624,00	17.342,00	17342,21
	11. Jumlah produksi telur	Ton	29.596.599,00	25.101.406,00	25477926,42
	12. Jumlah produksi susu	Liter	52.620,00	125.584,00	127468,19
	13. Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan	%	0,00	6,37	8,37

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	14. Persentase peningkatan fasilitas prasarana peternakan	%	41,00	17,00	23,00
	15. Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	190,00	35,00	40,00
	16. Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Jumlah	1.050,00	675,00	800,00
	17. Jumlah ternak/hewan yang di vaksin	Jumlah	548,00	550,00	600,00
	18. Jumlah penurunan kejadian penyakit jembrana, SE, AI, Rabies	Jumlah	297,00	200,00	150,00
	19. Pendapatan peternak	Rp.(Ribu)	6.27*	6,40	6,25
	20. Persentase pelayanan perizinan bidang peternakan	%	0,00	100,00	100,00
	21. Persentase peningkatan kelas kelompok tani Peternak	%	1,47	0,50	0,50
	3. Kehutanan				
	4. Energi dan Sumber Daya Mineral				
	5. Perdagangan				
	1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,65	8,58	8,60
	2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	45,00	60,00	62,00
	3. Jumlah Pasar yang Kondusif	Pasar	1,00	1,00	1,00
	4. Jumlah pasar yang diawasi	Kecamatan	8,00	17,00	17,00
	5. Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	Pedagang	1,00	1,00	2,00
	6. Pasar tertib ukur	Pasar	0,00	1,00	1,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	7. Terwujudnya pasar BANA	Pasar	0,00	1,00	1,00
	8. Ekspor Perdagangan Bersih	Rp.(Juta)	3.245.685,33	5.250.300,85	5550100,30
	9. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	67,25	67,40	67,70
	6. Perindustrian				
	1. Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	2,51	12,60	13,30
	2. Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Sentra	0,70	1,00	1,00
	3. Peningkatan jumlah Industri kecil dan Menengah yang bersertifikasi	Sertifikasi	Sertifikasi	Sertifikasi	Sertifikasi
	4. Tersedianya data dan Informasi tentang Industri kecil dan Menengah	Dokumen Ranperda	0,70	1,00	1,00
	5. Cakupan bina kelompok pengrajin	Jumlah	155,00	160,00	165,00
	6. Pertumbuhan Industri	%	1,92	2,42	2,45
	7. Transmigrasi				
	8. Kelautan dan Perikanan				
	1. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	%	7,97	7,50	7,65
	2. Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	18.112,50	18.810,73	19.186,93
	3. Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	Ton/ Tahun	53.112,74	54.633,06	55.725,72
	4. Produksi Benih Ikan (ekor/ tahun)	Ekor/ Tahun	694.692.000,00	495.000.000,00	510.000.000,00
	5. Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi (%)	%	33,33	70,00	80,00
	6. Cakupan Pembinaan Pokmaswas (%)	%	25,48	100,00	100,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	7. Konsumsi ikan (kg/ kapita/ tahun)	Kg/ Kapita / Tahun	43.85*	44,45	44,95
	8. Produksi Ikan Olahah (ton/ tahun)	Ton/ Tahun	178,01	183,41	187,07
	9. Cakupan bina kelompok nelayan	%	42,19	31,75	38,46
	10. Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	13.402,50	13.167,51	13.430,85
	11. Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan	%	30,05	41,07	47,19
	12. Jumlah unit pengolah ikan	Unit	193,00	194,00	195,00
	4. Penunjang Urusan				
	1. Perencanaan Pembangunan				
	1. Indeks kualitas perencanaan	%	100.00*	100,00	100,00
	2. Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	%	97,96	92,00	93,00
	3. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada
	4. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada
	5. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada
	6. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	0.00*	80,00	85,00
	7. Persentase Peningkatan kualitas musrenbang	%	0.00*	80,00	85,00
	8. Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	%	0.00*	80,00	85,00
	2. Keuangan				
	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	2. Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Tanggal	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023
	3. Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	%	100,00	100,00	100,00
	4. Persentase kualitas laporan keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00
	5. Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	%	100,00	100,00	100,00
	6. Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat	%	100,00	100,00	100,00
	7. Persentase Peningkatan PAD	%	10,40	3,50	4,00
	8. Persentase Pencapaian Target PAD	%	95,18	100,00	100,00
	9. Persentase Tingkat ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat	%	81,83	82,22	82,31
	10. Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.	Dokumen	3,00	2,00	2,00
	11. Jumlah Perbub tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun	Dokumen	8,00	2,00	2,00
	12. Rasio belanja modal terhadap APBD	Rasio	10,34	22,00	25,00
	13. Persentase kenaikan pajak dan retribusi daerah	%	5,71	5,50	6,00
	14. Rasio PAD terhadap penerimaan APBD	Rasio	8,57	6,94	7,19
	15. Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD	Rasio	8,81	6,98	7,25
	3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				
	1. Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	67,00	80,00	82,00
	2. Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	%	83,00	93,00	93,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	3. Persentase peningkatan terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	%	82,00	92,00	92,00
	4. Persentase peningkatan dokumen ASN yang tersiapkan	%	80,00	75,00	75,00
	5. Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN (Kepegawaian)	%	69,00	73,00	73,00
	6. Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN (Diklat)	%	80,00	90,00	90,00
	7. Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial	%	45,15	81,00	81,00
	8. Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis	%	49,00	25,00	30,00
	9. Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3	%	77,65	41,00	42,00
	10. Tingkat penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai	%	90,00	80,00	85,00
	11. Persentase tingkat kehadiran ASN	%	90,00	80,00	85,00
	12. Persentase prestasi ASN berdasarkan masa kerja PNS	%	90,00	50,00	53,00
	13. Persentase penerbitan SK tepat waktu	%	77,00	69,00	71,00
	14. Persentase pengisian jabatan sesuai formasi dan kompetensi	%	94,12	97,00	97,00
	15. Persentase record data kepegawaian yang akurat	%	80,00	60,00	100,00
	16. Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	%	85,00	70,00	75,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	4. Penelitian dan Pengembangan				
	1. Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	60,00	70,00	75,00
	2. Jumlah Kerjasama Penelitian	Jumlah	2,00	4,00	6,00
	3. Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	55,56	40,00	41,00
	4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	98.51*	35,00	40,00
	5. Pengawasan				
	1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Level	B	B	BB
	2. Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 3	Level 3
	3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3
	4. Persentase pengawasan yang dilakukan	%	50,00	60,00	60,00
	5. Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilakukan	%	50,00	60,00	60,00
	6. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	%	80,00	75,00	75,00
	7. Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD	Jumlah	14,00	12,00	11,00
	8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Nilai	B	B	BB
	9. Jumlah OPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sesuai nilai akuntabilitas kinerja Pemda	Unit	40,00	10,00	12,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	10. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	%	70,00	65,00	70,00
	11. Jumlah OPD yang memperoleh level maturitas sesuai level maturitas Pemda	Unit	24,00	10,00	10,00
	6. Sekretariat Dewan				
	1. Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	Perda	6,00	8,00	8,00
	2. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak	ada	ada	ada
	3. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak	ada	ada	ada
	4. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
	5. Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00
	6. Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	%	100,00	70,00	75,00
	7. Cakupan kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	%	93,38	80,00	82,00
	7. Sekretariat Daerah				
	1. Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	%	26,00	27,00	28,00
	2. PDRB/Income Per Kapita ADHB	Rp Juta	18.455,00	46,98	49,46

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	3. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A	A	A
	4. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Nilai	3,0562	2,700	2800
	5. Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	Orang	1.281,00	1.200,00	1.300,00
	6. Indeks reformasi birokrasi	Indeks	54,32	63,00	63,00
	7. Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	%	75,31	75,83	76,33
	8. Persentase Penggunaan E- Procurement terhadap Belanja Pengadaan	%	8,52	11,00	12,00
	9. Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	%	95,00	100,00	100,00
	10. Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	%	50,00	100,00	100,00
	11. Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E- Procurement terhadap APBD	%	1,62	11,00	12,00
	12. Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	%	95,00	100,00	100,00
	13. Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	%	79,00	75,00	75,00
	14. Perentase Laporan Realisasi kegiatan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	85,00	100,00	100,00
	15. Persentase peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	%	80,00	85,00	90,00
	16. Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan	%	80,00	85,00	90,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	17. Persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	%	80,00	85,00	90,00
	18. Persentase kerjasama informasi dengan mass media	%	80,00	85,00	90,00
8.	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)				
1.	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	99.71	100,00	100,00
2.	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	99.97	100,00	100,00
3.	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100.00	100,00	100,00
4.	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100.00	100,00	100,00
5.	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	99.21	100,00	100,00
6.	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	95,00	100,00	100,00
7.	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	90,00	100,00	100,00
8.	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	85,00	100,00	100,00
9.	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	98,00	100,00	100,00
10.	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	89,00	100,00	100,00
11.	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	99.38	100,00	100,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	12. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	77.11	100,00	100,00
	13. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100.00	100,00	100,00
	14. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	NA	100,00	100,00
	15. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	99.56	100,00	100,00
	16. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	NA	100,00	100,00
	17. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	16.59	100,00	100,00
	18. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	NA	100,00	100,00
	19. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	NA	100,00	100,00
	20. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	NA	100,00	100,00
	21. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	97.00	100,00	100,00
	22. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	94.00	100,00	100,00
	23. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	90.00	100,00	100,00
	24. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	91.00	100,00	100,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	25. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	89.00	100,00	100,00
	26. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	94.37	0,00	100,00
	27. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	98.60	100,00	100,00
	28. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100.00	100,00	100,00
	29. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	68.59	100,00	100,00
	30. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	99.90	100,00	100,00
	31. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100.00	100,00	100,00
	32. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	90.00	100,00	100,00
	33. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	85.00	100,00	100,00
	34. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	85.00	100,00	100,00
	35. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	89.00	100,00	100,00
	36. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100,00	100,00
	37. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100,00	100,00
	378. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	99,42	100,00	100,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	39. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	NA	100,00	100,00
	40. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100,00	100,00
	41. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	NA	100,00	100,00
	42. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	NA	100,00	100,00
	42. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	NA	100,00	100,00
	43. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	NA	100,00	100,00
	44. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	NA	100,00	100,00
	45. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100,00	100,00
	46. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	99,81	100,00	100,00
	47. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100,00	100,00
	48. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100,00	100,00
	49. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100,00	100,00
	50. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	92	100,00	100,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	51. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	99	100,00	100,00
	52. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	99	100,00	100,00
	53. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	97	100,00	100,00
	54. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100,00	100,00
	55. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	95	100,00	100,00
	56. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	69	100,00	100,00
	57. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	91	100,00	100,00
	58. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	33	100,00	100,00
	59. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	56	100,00	100,00
	60. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100,00	100,00
	61. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	99,5	100,00	100,00
	62. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	99	100,00	100,00
	63. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	94,35	100,00	100,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	64. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	97,72	100,00	100,00
	65. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100,00	100,00
	66. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	94,79	100,00	100,00
	67. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	99,5	100,00	100,00
	68. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	99,5	100,00	100,00
	69. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	NA	100,00	100,00
	70. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	NA	100,00	100,00
	71. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	NA	100,00	100,00
	72. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	NA	100,00	100,00
	73. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	NA	100,00	100,00
	74. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	NA	100,00	100,00
	75. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	75	100,00	100,00
	76. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	75	100,00	100,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Padang Pariaman 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET	
				2022	2023
	77. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	75	100,00	100,00
	78. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	75	100,00	100,00
	79. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	75	100,00	100,00
	80. Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00
	81. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
	82. Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100,00	100,00	100,00
	83. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00
	84. Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00
	9. Unsur Pemerintahan Umum				
	1. Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	%	100,00	100,00	100,00
	2. Persentase laporan pertanggungjawaban partai politik tepat waktu	%	90,00	100,00	100,00
	3. Persentase ormas / kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	%	100,00	100,00	100,00
	4. Persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba	%	0,00	100,00	100,00
	5. Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%	100,00	100,00	100,00



BAB VII

PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 disusun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan juga mengacu kepada RPJPD Tahun 2005-2025.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2023, memusatkan pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan nasional.

RKPD Tahun 2023 adalah penyempurnaan RKPD Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Renja seluruh Perangkat Daerah dilingkup Kabupaten Padang Pariaman yang telah diverifikasi. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sebagai berikut :

1. RKPD tahun 2023 merupakan bahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah secara sinergis dan terintegrasi;
2. RKPD Tahun 2023 merupakan dasar bagi penyusunan RKPD setelah dilakukan nya proses verifikasi Renja, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD;
3. RKPD Tahun 2023 selanjutnya akan menjadi landasan penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2023.



LAMPIRAN I

INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017-2021

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
INDIKATOR MAKRO DAERAH														
1	Pertumbuhan PDRB Menurut harga konstan	%	5,52	6,28	5,58	6,35	5,44	6,43	2,40	6,51	-10,60	6,20	2,18	6,58
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka										5,30	0,00	4,27
3	Laju inflasi	%	6,63	5,00	2,11	4,50	2,55	4,50	1,72	3,50	1,68	5,00		3,50
4	PDRB													
4.1	Atas harga berlaku	Rp. Juta	15.845.88 8,20	21.628.385 ,52	19.038.37 9,57	25.288.722 ,97	20.438.31 8,45	29.568.52 7,39	21.255.47 3,34	34.572.6 35,90	17.934.8 14,60	18.497.852 ,21	18.455.088 ,03	40.423, 628.06
4.2	Atas harga konstan	Rp. Juta	11.085.45 0,68	12.609.031 ,67	12.350.18 6,95	13.448.211 ,66	13.021.88 7,79	14.343.24 2,33	13.334.92 4,69	15.297.8 40,77	11.939.4 79,19	11.822.217 ,24	12.199.848 ,45	16.315, 971.44
4.3	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)	Rp. Juta	38,78	47,19	46,32	51,91	49,45	57,10	51,14	62,81	41,65	44,63	42,62	58,72
4.4	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Juta)	Rp. Juta	27,13	28,51	30,05	29,94	31,51	31,43	32,09	33,00	27,73	29,36	28,17	37,40
4.5	Pertumbuhan PDRB per Kapita	%	5,39	5,45	10,76	5,50	4,63	5,56	1,84	5,61	-13,58	5,39	1,58	5,67
5	Indeks Gini Ratio	%	0,33	0,31		0,29		0,27		0,25		0,299000	0,269000	0,2800 00
6	Persentase penduduk	%	91,09	91,35	91,54	91,47	91,96	91,74	92,90	92,46	93,05	91,09	92,78	92,75

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
ASPEK PELAYANAN UMUM														
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR														
1.	URUSAN PENDIDIKAN													
1.1	Pendidikan Dasar													
1.1.1	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	Angka	87,83	90,00	87,71	92,00	101,42	94,00	67,20	96,00		74,80	63,00	85,00
1.1.2	Angka partisipasi kasar SD/SDLB/paket A	Angka	103,39	100,00	101,29	100,00	116,45	100,00	95,70	110,05	100,08	88,70	97,40	95,00
1.1.3	Angka partisipasi murni SMP/SMPLB	Angka	71,00	80,00	56,51	82,00	87,39	84,00	52,05	90,00	58,38	60,90	61,00	75,00
1.1.4	Angka partisipasi kasar SMP/SMPLB/paket B	Angka	90,00	96,00	74,10	97,00	115,44	98,00	67,77	99,00	87,12	95,00	84,00	100,00
1.1.5	Rasio guru/murid	Rasio	13,19	22,00	20,01	23,00	13,14	24,00	7,27	25,00	14,24	21,00	13,00	26,00
1.1.6	Rasio ruang kelas/rombel	Rasio		0,95	0,94	0,98	1,17	0,98	0,99	1,00	1,00	0,94	0,99	1,02
1.1.7	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%			72,11		94,00		67,81		72,92	52,20	63,70	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1 .8	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2,79		72,11		94,00		67,81		72,92	2,87	119,00	1,18
1.1 .9	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%			39,90		33,30		38,06		37,02	70,00	22,40	
1.2	Fasilitas Pendidikan													
1.2 .1	Sekolah SD/SDLB kondisi bangunan baik	%	95.36	96,00	97,00	97,50	90,47	98,00	99,00	99,00	99,00	95,50	54,15	100,00
1.2 .2	Sekolah SMP/SMP LB kondisi bangunan baik	%	80.83	84,00	86,00	88,00	82,61	90,00	96,00	95,00	95,00	82,00	77,47	97,00
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):													
1.3 .1	Angka partisipasi kasar PAUD	Angka (%)	45,00	45,00	46,00	50,00	60,00	55,00	38,06	60,00	20,45	52,50	56,00	65,00
1.4	Angka Putus Sekolah :													
1.4 .1	Angka Putus Sekolah SD	Angka (%)	0,03	0,29	0,12	0,12	0,25	0,27	0,00	0,25	0,51	0,45	0,51	0,25

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4 .2	Angka Putus Sekolah SMP	Angka (%)	0,08	0,18	0,16	0,15	0,10	0,12	0,80	0,10	1,90	1,63	1,90	1,00
1.5	Mutu Pendidikan													
1.5 .1	Angka Kelulusan (AL) SD	Angka (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	99,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5 .2	Angka Kelulusan (AL) SMP	Angka (%)	99,69	100,00	99,89	100,00	98,10	100,00	98,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5 .1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	Angka (%)	98,21	98,40	99,50	98,50	98,40	98,70	93,20	99,00	80,00	85,00	80,00	100,00
1.5 .3	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Angka (%)	88,12								91,00	83,00	91,00	96,80
1.5 .1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	89,23	92,00	94,00	94,00	92,27	96,00	93,21	98,00	92,42	92,80	92,42	100,00
2.	URUSAN KESEHATAN													
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	angka/seribu	21,24	23,06	22,88	23,71	19,86	24,36	19,12	25,01	1,99			
2.2	Rasio puskesmas per satuan penduduk	angka/seribu	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06			
2.3	Rasio pustu per satuan penduduk	angka/seribu	0,16	0,18	0,16	0,19	0,15	0,19	0,19	0,20	0,20		0,20	
2.4	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Jumlah Seluruh Rumah Tangga	%	60,00	80,00	62,49	57,50	66,50	100,00	71,86	100,00	71,95			

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mendapat perawatan													
2.1 4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	74,60	74,60	87,20	74,70	88,40	74,00	89,40	85,90	90,50		55,00	
2.1 5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	132,00	100,00		100,00	
2.1 6	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui pengembangan jamkesmas dan jemkesda	%	386,19	386,19	84,00	382,67	86,00	54,10	88,00	73,80	90,00		73,60	
2.1 7	Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin	%	89,06	89,06	89,00	99,27	90,00	99,30	92,00	95,00	95,00		95,00	
2.1 8	Cakupan kunjungan bayi	%	95,02	95,02	92,00	95,02	94,00	92,71	94,00	98,90	95,00		89,90	
2.1 9	Cakupan puskesmas	%	142,36	142,36	143,53	143,36	145,88	143,53	145,88	143,53	147,06		143,53	
2.2 0	Cakupan pembantu puskesmas	%	39,08	39,08	39,08	39,08	40,08	39,08	40,08	39,08	39,08		39,08	
2.2 1	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar dari RS (Net Death)	%	10,64	2,50	8,16	2,20	3,10	2,10	1,26	2,00	0,45	2,43	0,25	2,10

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rate=NDR= Angka kematian neto) 2.5%													
2.2 2	Waktu Tunggu pasien di rawat jalan ≤ 60 menit	menit	25,00	22,00	20,00	18,00	50,00	16,00	15,00	15,00		45.90	50.00	30,00
2.2 3	Angka kematian Umum untuk setiap 1.000 penderita keluar RS (Gross Death Rate=GDR 4.5%)	%	24,8300	4,5000	22,9000	4,2000	6,0000	4,1000	2,95	4,0000		4.36	0.45	3,70
2.2 4	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%)	%		0,948		0,922	70	0,896	-	0,87		62.00	58.98	80,00
2.2 5	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien (≥90%)	%	90,00	0,78	90,00	0,72	90,00	0,66	90,00	0,60	100,00	90.80	99.00	95,00
2.2 6	Persentase limbah cair & padat RS yang memenuhi baku mutu (BOD <30 mg/l,COD<80 mg/l,TSS < 30 mg/l dan PH 6 - 9) mencapai (100%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100,00
2.2 7	Angka pemanfaatan Tempat Tidur RS (Bed occupancy	%	36,72	65,00	29,24	85,00	55,00	95,00	95,00	95,00	34,83	54.00	34.83	80,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rate=BOR) (60% - 85%)													
2.2 8	Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan	%	N/A									80,00	73,60	100,00
2.2 9	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka/ Seribu	N/A		2,63		2,47		1,16		3,21	48,00	5,00	43,00
2.3 0	Angka kelangsungan hidup bayi (Jumlah Kelahiran Hidup)	Angka/ Seribu	N/A		998,23		993,00		999,96		993,81	993,11	991,61	100,00
2.3 1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka/ Seribu	N/A									6,00	4,00	0,00
2.3 2	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka/ Seribu	N/A									16,00	53,00	11,00
2.3 3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka/ Seribu	N/A									8,00	11,00	3,00
2.3 4	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	N/A									35,00	28,00	83,00
2.3 5	Prevalensi Balita Stunting	%	N/A									21,10	10,55	14,00
2.3 6	Cakupan Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan	%	N/A									100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	tambahan													
2.3 7	Persentase Balita Kurus yang Mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	%	N/A									100,00	100,00	100,00
2.3 8	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	N/A									80,00	60,70	95,00
2.3 9	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	N/A									4,00	3,00	4,00
2.4 0	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
2.4 1	Cakupan penemuan dan pengobatan TB	%	N/A		65,54		68,77		87,40		34,60	90,00	55,00	90,00
2.4 2	Case Notifikasi Rate TB per 100.000 penduduk	%	N/A		182,00		176,00		203,00		137,00	316,00	181,00	324,00
2.4 3	Tingkat Kematian karena Tuberku losis (per 100.000 penduduk)	%	N/A		9,98		2,80		7,70		3,70	10,00	7,60	5,00
2.4 4	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate)	%	N/A		87,98		80,56		80,24		96,30	90,00	84,20	90,00
2.4 5	Penemuan kasus DBD per 100.000 pddk	angka/ seribu	N/A		18,73		23,50		31,80		9,10	45,00	0,48	40,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(Insiden Rate)													
2.4 6	Persentase tatalaksanaan Diare sesuai standar	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	52,00	100,00	60,00
2.4 7	Penemuan kasus malaria	%	N/A		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	0.0002372	1,00
2.4 8	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	%	N/A		0,007		0,008		0,015		0,016	0.21	0,04	0.16
2.4 9	Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
2.5 0	Cakupan Pelayanan Kunjungan Nifas Lengkap (KF3)	%	N/A		88,92		86,70		88,40		80,40	100,00	82,15	100,00
2.5 1	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	N/A		39,50		37,90		34,90		25,00	100,00	26,31	100,00
2.5 2	Cakupan Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahhan	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
2.5 3	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ter akreditasi	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
2.5 4	Jumlah Puskesmas yang	Jumlah	N/A		25,00		25,00		25,00		25,00	25,00	25,00	25,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mengimplementasikan PSC 119 sebanyak 25 Puskesmas													
2.5 5	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	100,00	100,00	100,00
2.5 6	Persentase Korong dengan Stop Buang Air Besar	%	N/A		8,25		8,25		9,03		13,25	20,00	17,55	70,00
2.5 7	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
2.5 8	Persentase Alkes yang sesuai standar permenkes	%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	65,00	64,57	80,00
2.5 9	Jumlah Kecamatan Sehat	Kecamatan	N/A		17,00		17,00		17,00		17,00	12,00	17,00	17,00
2.6 0	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	0,09	0,10	0,14
2.6 1	Persentase Rumah Tangga PHBS	%	N/A		71,34		70,40		70,90		71,00	72,00	80,00	82,00
2.6 2	Jumlah IRT yang diawasi	Jumlah	N/A									130,00	60,00	186,00
	Standar Pelayanan Minimal (SPM)													
2.6 3	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan	%	N/A		80,60		88,90		81,40		82,20	100,00	82,40	100,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	persalinan sesuai standar													
2.6 4	Persentase Orang terduga TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TB sesuai dengan Standar	%	N/A		88,30		100,00		100,00		34,60	100,00	49,40	100,00
2.6 5	Persentase Orang usia 15- 59 Tahun Mendapatkan skreening kesehatan sesuai standar	%	N/A		75,70		76,00		74,80		47,80	100,00	81,35	100,00
2.6 6	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke atas mendapatkan skreening kesehatan sesuai standar	%	N/A		48,50		17,90		56,90		23,20	100,00	67,37	100,00
2.6 7	Persentase Penderita Hypertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	N/A		62,00		37,80		100,00		39,90	100,00	66,65	100,00
2.6 8	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	N/A		62,00		37,80		100,00		71,30	100,00	88,45	100,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.6 9	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	N/A		68,40		100,00		85,70		98,90	100,00	99,77	100,00
2.7 0	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	%	N/A		84,60		95,30		77,90		86,60	100,00	89,89	100,00
2.7 1	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar	%	N/A		82,70		89,30		81,90		80,20	100,00	85,63	100,00
2.7 2	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	N/A		71,50		64,60		80,90		73,40	100,00	69,56	100,00
2.7 3	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	N/A		93,90		99,60		72,00		23,20	100,00	57,98	100,00
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	45,36	57,00	46,71	58,00	62,28	64,00	63,68	67,00	67,00	68,00	63,63	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2	Panjang jalan dilalui Roda 4	km	1.855,50	1.471,00	1.878,10	2.192,54	1.878,60	1.596,00	1.878,00	1.666,00	1.666,00			
3.3	Persentase Jalan Mantap	%	57,75	58	59,47	61	62,28	64	63,68	67,00	64,28			
3.4	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40)KM/Jam)	km	939,25	581,70	973,65	59,00	1053,75	656,70	1.274,06	701,70	701,70			
3.5	Rasio Jaringan Irigasi (%)	%	40,13	42,60	43,00	46,30	47,12	50,60	55,26	54,40	85,37		69,30	
3.6	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	53,40	54,00	57,00	59,00	62,84	66,00	65,98	75,00	75,00			
3.7	Panjang Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (M)	m	N/A	2.088,14		2.192,54		2.302,17		2.417,28	2417,28			
3.8	Persentase Gedung Kantor yang terbangun di kawasan Ibukota Kabupaten	%	0,46		0,56		0,57		0,57		0,57			
3.9	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	N/A									65,3	63,63	75,00
3.10	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	N/A									54,82	69,3	75,54
3.11	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	N/A									63	60,39	90,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1 2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	%	N/A									7,02	1,24	9,94
3.1 3	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	N/A		55,00		55,10		55,10			55	39,98	85,00
3.1 4	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	%	N/A									35	21,74	87,00
3.1 5	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	N/A									37,5	33,33	100,00
3.1 6	Persentase Pemenuhan Infrastruktur	%	N/A									60,65	54,20*	0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2 2	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	N/A									88.00	72.05	100,00
3.2 3	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	N/A									81.00	79.59	100,00
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
4.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	85,50	85,57	95,6	85,64	99,07	85,71	99,09	85,78	99,11	85,85	130,00	
4.2	Lingkungan pemukiman kumuh	ha			3.996,1	5,00	3.996,1	N/A	886,77	N/A	886,85	N/A	864,68	
4.3	Persentase luas pemukiman yang tertata	%		22,00	22,00	24,00	24,00	26,00	26,00	70,00	27,00			
4.4	Rasio rumah layak huni	Angka	0,173	0,175	0,174	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175		0,13	0,21	0.00
4.5	Rumah tangga pengguna air bersih	%		65,00	62,49	75,00	66,50	85,00		95,00				
4.6	Terbangunnya jaringan air bersih	%			43		47,12		55,26		66,70			
4.7	Rumah tangga bersantasi layak	%		57,92	66,87		68,81		68					
4.8	Persentase areal kawasan kumuh	%										0.550000	0.000160	0.000000

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.9	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	N/A									852.00	0.00	0.00
4.1 0	Rasio permukiman layak huni	Nilai	N/A									N/A	0	0.00
4.1 1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	N/A									63.50	92.80	0.00
4.1 2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	N/A									N/A	0	0.00
4.1 3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	1,50	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.66	0.00	0.00
4.1 4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	N/A									N/A	0	0.00
4.1 5	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	N/A									N/A	0	0.00
4.1 6	Persentase pemukiman yang tertata	%	N/A									N/A	0	0.00
4.1 7	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	N/A									N/A	0	0.00
4.1 8	Persentase Pengembang Perumahan yang telah tersertifikasi	%	N/A									N/A	0	0.00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
5.1	Persentase Penegakan Perda	%	81,00	83,00		85,00		87,00		88,00		90,00	68.25	0,00
5.2	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	Jumlah	N/A									562.00	453.00	0,00
5.3	Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	%	N/A									62.50	100.00	0,00
5.4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (MWK)	Menit	15,00	14,00		13,00		12,00		11,00		17.80	15.00	0,00
5.5	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Jumlah	733	734		735		736		737		733.00	0.00	0,00
5.6	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Jam	1,41	1,42		1,43		1,44		1,45		1.46	0.53	0,00
5.7	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	73,64	74,55		75,45		76,36		77,27		73.64	100.00	0,00
5.8	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	%	96,17	97,14		98,11		99,09		100,00		96.17	81.54	0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	kualifikasi													
5.9	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	Unit	6	7		8		9		9		9.00	5.00	0,00
5.10	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,15	0,15		0,15		0,15		0,15		50.00	9.17	0,00
5.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	N/A									20.30	17.65	0,00
5.12	Nagari tangguh bencana	Nagari	N/A									15.00	15.00	21.00
5.13	Persentase sarana dan prasarana kebencanaan yang ramah bencana	%	N/A									41.69	41.84	46.38
	Standar Pelayanan Minimal (SPM) :													
5.14	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	N/A									100.00	0.00	0,00
5.15	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan	%	N/A									100.00	100.00	0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran													
5.1 6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	%	N/A									20.00	30.25	100.00
5.1 7	Persentase warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	N/A									58.00	100.00	100.00
5.1 8	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	N/A									70.00	99.90	100.00
6	URUSAN SOSIAL													
6.1	Tingkat kemiskinan	%	8,91	8,65	8,46	8,53	8,04	8,26	7,10	7,54	6,95	7,11	7,22	6,48
6.2	Persentase PPKS Mandiri	%	N/A		30,00		35,00		40,00		16,00	23,00	0,00	0,00
6.3	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	%	N/A		N/A		N/A		N/A		59,76	74,00	82,00	0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Minimal (SPM) :													
6.1 1	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	0,00
6.1 2	Persentase anak telantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	0,00
6.1 3	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	0,00
6.1 4	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	0,00
6.1 5	Persentase Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Dengan Pelayanan Dasar														
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR														
1	URUSAN TENAGA KERJA													
1.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	60,93	70,92	64,15	70,93	68,79	70,94	48,90	70,95	52,25	70,92	70,90	0,00
1.2	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	Jumlah	121,74	21,00	69,57	80,00	40,00	19,00	6,00	27,00	8,00	24,00	5,00	0,00
1.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%		1,60		1,70	2,56	1,80	2,65	1,90	1,85	1,50	1,90	0,00
1.4	Pencari kerja yang ditempatkan	%	3,20	4,00	60,02	4,20	65,00	4,50	65,00	5,50	5,10	3,20	1,00	0,00
1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,56	7,76	7,25	7,15	7,15	7,68	5,97	7,65	5,97	7,61	8,41	0,00
1.6	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	58,26	55,00	58,26	57,00	50,00	59,00	58,25	60,00	57,70	57,77	58,23	0,00
1.7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0,00	19,00	0,00	18,00	0,00	17,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	N/A		80,25		80,65		81,95		83,24	70,00	65,44	0,00
1.9	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	N/A		2.800		2.801		2.557		3.175	2.400	1.636	0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1 0	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	N/A		52,01		58,26		57,77		51,11	51,00	40,00	0,00
1.1 1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	N/A		100,00 (7 kasus)		100,00 (4 kasus)		100,00 (6 kasus)		100,00 (8 kasus)	62,00	100,00	0,00
1.1 2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	N/A		60,02		65,00		4,40		5,40	6,00	4,80	0,00
1.1 3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	N/A		62,00		65,00		64,75		72,60	71,00	80,42	0,00
1.1 4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	N/A		144,00		496,00		752,00		320,00	670,00	336,00	0,00
1.1 5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah	N/A		16,00		16,00		17,00		0,00	40,00	0,00	0,00
1.1 6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah	N/A		60,00		120,00		120,00		90,00	80,00	96,00	0,00
1.1 7	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio(%)	N/A		75,96		9,83		11,32		N/A	56,86	59,70	0,00
1.1	Rasio penduduk	%	N/A		74,72		70,87		81,06		70,15	70,92	85,10	0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	yang bekerja													
1.19	Persentase pengangguran/mencari pekerjaan	%	N/A		16,00		15,05		13,75		12,05	17,98	19,44	0,00
1.20	Rasio daya serap tenaga kerja	%	N/A		80,00		95,00		97,00		98,65	127,00	112,00	0,00
1.21	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Orang	N/A		1.975		2.065		20.615		3.050	N/A	N/A	0,00
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	8,50	12,95	8,50	13,60	6,62	14,28	14,28	15,00	14,28		74,00	0,00
2.2	Rasio KDRT	%	0,22	0,021	0,7777	0,02	0,00	0,019	0,00	0,018	0,7778			0,00
2.3	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Orang			28,00		18,00		26,00		26,00		0,00	0,00
2.4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	N/A		93,79		93,07		92,92		92,69	93,03	92,78	0,00
2.5	Persentase keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	%	N/A		96,00		97,00		98,00		100,00	40,00	100,00	0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.6	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	N/A		N/A		N/A		N/A		0,020	0,00	0,030	0,00
2.7	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Orang	N/A		N/A		N/A		N/A			0.00	0.00	0,00
2.8	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	N/A		N/A		N/A		22,79		N/A	30.00	39.00	0,00
2.9	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	N/A									0.00	0.00	0,00
2.10	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Angka	N/A		52,00		49,42		60,83		N/A	53.00	38.80	0,00
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	N/A		100.00		100.00		100.00		100.00	100.00	100.00	0,00
2.12	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak	%	N/A		100.00		100.00		100.00		100.00	100.00	100.00	0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu													
2.1 3	Cakupan perempuan dan anak korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	N/A		100.00		100.00		100.00		100.00	100.00	100.00	0,00
2.1 4	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	N/A		100.00		100.00		100.00		100.00	100.00	100.00	0,00
2.1 5	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	N/A		100.00		100.00		100.00		100.00	100.00	100.00	0,00
2.1 6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	N/A		100.00		100.00		100.00		100.00	100.00	100.00	0,00
3	URUSAN PANGAN													
3.1	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp.(Juta)	2.499.408,70	2.399.178,30	2.601.857,26	2.492.026,50	2.624.737,11	2.588.467,93	2.704.567,07	2.736.277,17	2.668.793,70		2.608.426,60	
3.2	Persentase Nilai Tukar Petani	%	96,45	96,60	96,97	96,90	95,16	97,20	95,99	97,50	100,58		107,60	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.3	Jumlah Produksi beras	Ton	155.904,59	139.414,00	174.550,00	142.899,36	152.562,14	146.472,34	159.334,11	150.134,40	283.127,00			
3.4	Regulasi Ketahanan Pangan	Jumlah		2		2	1 (Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2	0	2	0	2	N/A	
3.5	Ketersediaan pangan utama kg/1000 pddk	kg/1000 pndkk	702.490,38	667.457,10	695.430,89	680.806,25	656.413,95	694.422,37	709.848,01	708.310,82	N/A		N/A	168.145,00
3.6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	Ton/ha	5,23	5,09	5,26	5,11	4,51	5,13	4,75	5,15	4,77		4,56	
3.7	Distribusi sektor pertanian Tan. Pangan terhadap PDRB	%	19,9	20,75	19,33	20,78	18,65	20,8	19,18	7,53	22,66		N/A	
3.8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	N/A		84,20		87,50		88,00		88,10	88,50	79,20	90,50
3.9	Ketersediaan energi (Kkal/Kap/Hari)	Kkal/Kap/Hari	N/A		2.856		2.856		2.875		2.431	2.400,00	2.440,00	2.400,00
3.10	Ketersediaan protein (Gram/kap/Hari)	Gram/Kap/Hari	N/A		56,17		56,17		72,63		54,04	54,85	55,65	58,90

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HIDUP													
5.1	Persentase penanganan sampah	%		21,89	43,00	45,37	44,95	49,25	60,85	16,00	55,9			0,00
5.2	Pencemaran status mutu air yang ditangani		DLHPKPP tidak menghitung pencemaran status mutu air, karena bukan merupakan indikator dalam PP no 6 Tahun 2008 maupun permendagri no 86 tahun 2017											
5.3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dan UKL-UPL		DLHPKPP tidak menghitung cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal atau UKL-UPL, karena bukan merupakan indikator yang terdapat pada PP no 6 tahun 2008 maupun Permendagri 86 tahun 2017											
5.4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	%	78,54	78,50	78,91	78,50	78,80	3,00	79,37	3,00	75,77			0,00
5.5	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terpelihara				48,00		48,00		48,00		48,00			0,00
5.6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	59,00	59,50	47,60	60,00	48,70	60,50	49,80	61,00	55,42	55,79	58,95	0,00
5.7	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	86,00	86,30	97,83	87,00	97,83	87,50	94,42	87,50	93,32	91,83	93,54	0,00
5.8	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	%			37,00		46,00		48,78		48,00			0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota													
5.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	N/A		N/A		N/A		62,58		67,38		68,76	0,00
5.10	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		N/A		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	0,00
5.11	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota		N/A		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	0,00
5.12	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi		N/A		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada	Ada	Ada	0,00
5.13	Persentase Keaneekaragaman Hayati yang terkelola		N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	%	100	0,00
5.14	Cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan		N/A		100,00		100,00		100,00		100,00		100	0,00
5.15	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	%	N/A		37,00		46,00		48,78		48,00	35,00	36,67	0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH													
5.1 6	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	N/A		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	2,00	0,00
5.1 7	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	N/A		0,00		0,00		0,00		0,00	N/A	0,00	0,00
5.1 8	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Kelompok	N/A		0,00		0,00		0,00		0,00	N/A	0,00	0,00
5.1 9	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Kelompok	N/A		0,00		0,00		0,00		0,00	N/A	0,00	0,00
5.2 0	Penetapan hak MHA	Kelompok	N/A		0,00		0,00		0,00		0,00	N/A	0,00	0,00
5.2 1	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Kelompok	N/A		Terlaksana		Terlaksana		Terlaksana		Terlaksana	N/A	0,00	0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.1	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	%	79,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	98,00	100,00	98,68		99,80	
6.2	Persentase Kepemilikan akte kelahiran	%	65,00	70,00	71,00	85,00	85,00	90,00	85,00	90,00	91,73			
6.3	Persentase penerbitan akta kematian	%	100,00	90,00	78,00	94,00	94,00	95,00	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4	Persentase ketersediaan elemen data per NIK pada database kependudukan	%	83,00	75,00	80,00	78,00	78,00	80,00	80,60	82,00	85		N/A	
6.5	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	ikm	B	B	B	B	B	A	B	87,00	A		A	
6.6	Persentase Penerbitan KTP EL	%	N/A									99,00	99,8	99,00
6.7	Persentase Penerbitan KK	%	N/A									100,00	100	100,00
6.8	Persentase Penerbitan KIA	%	N/A									30,00	36,38	50,00
6.9	Persentase penerbitan akta kelahiran	%	N/A									93,00	97,05	99,00
6.10	Persentase penerbitan akta perkawinan	%	N/A									100,00	100	100,00
6.11	Persentase database kependudukan yang disusun	%	N/A									100,00	100	100,00
6.12	Jumlah buku laporan data kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan	Jumlah	N/A									3,00	3	3,00
6.1	Rasio penduduk	Ratio	N/A									3:02	3:02	3:02

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ber- KTP per satuan penduduk													
6.1 4	Rasio bayi berakte kelahiran	Ratio	N/A									1:01	1:01	1:01
6.1 5	Rasio pasangan berakte nikah	Ratio	N/A									1:02	1:02	1:02
6.1 6	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	Ada/Ti dak	N/A									Ada	Ada	Ada
6.1 7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	N/A									Sudah	Sudah	Sudah
7	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
7.1	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Jumlah	60,00	70,00	70,00	90,00	90,00	103,00	100,00	103,00	95			
7.2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Swadaya terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	33,00	35,00	45			
7.3	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%			0,70		0,70		0,70		0,75			
7.4	Persentase peningkatan kemampuan Nagari dan Pengurus	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	19,00	20,00	50			

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nagari													
7.5	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yang terbentuk dan berfungsi dengan baik	Posyantekdes	9,00	20,00	20,00	61,00	61,00	20,00	18,00	20,00	55			
7.6	Persentase PKK Aktif	%	42,31	51,28	51,28	70,00	70,00	70,51	68,6	83,33	75	100,00	100,00	100,00
7.7	Persentase Posyandu aktif	%	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	68,50	70,70	70	75,00	75,00	100,00
7.8	Posyandu Purnama dan Mandiri	%	38,89	42,43	42,48	70,72	70,72	84,86	82,35	100,00	81,5			
7.9	Indeks Desa Membangun	Indeks	N/A									4,00	2,00	1,00
7.10	Persentase Nagari yang tertata	%	N/A									100,00	70,00	100,00
7.11	Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama	%	N/A									100,00	70,00	100,00
7.12	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	%	N/A									100,00	70,00	100,00
7.13	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	%	N/A									100,00	91,00	100,00
7.14	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga	%	N/A									90,00	75,00	98,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pemberdayaan Masyarakat (LPM)													
7.1 5	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	N/A									100.00	100.00	100.00
7.1 6	Persentase LPM aktif	%	N/A									72.00	72.00	95.00
7.1 7	Persentase LPM Berprestasi	%	N/A									68.00	68.00	95.00
8	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,50	2,50	2,59	2,59	2,48	2,42	2,68	2,20	1,19	2,10		
8.2	Rasio akseptor KB	%	64	64	64,38	65,22	66,1	66	65,31	67	65,56	65,50	65,69	66,75
8.3	Cakupan peserta KB aktif	%	64	64	64,38	65,22	66,1	66	65,31	67	65,56	68,00	N/A	
8.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	32,00	30,00	27,52	28,00	23,84	26,00	23,46	24,00	23,64	22,00	N/A	
8.5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	N/A		0,59		0,55		4,34		0,79	3,50	0,74	3,00
8.6	Total Fertility Rate (TFR)	%	N/A		2,59		2,48		3,13		3,13	2,38	2,28	2,22
8.7	Persentase Pemakaian alat kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate = CPR)	%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	65,50	65,69	66,75
8.8	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15-19) per 1.000	Angka	N/A									14,00	6,31	9,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)													
8.9	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	N/A									11.00	74,00	22.00
8.1 0	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	N/A									20.00	0,00	45.00
8.1 1	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peratur an Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	N/A									0.00	0,00	4.00
8.1 2	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan	Jumlah	N/A									2.00	0,00	12.00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan													
8.1 3	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	N/A									3.00	2,00	15.00
8.1 4	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	%	N/A									2.60	2,50	2.10
8.1 5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	N/A									0.00	0,00	1.00
8.1 6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	N/A									12.50	15,55	11.00
8.1 7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	N/A									24.75	17,90	25.50
8.1 8	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	N/A									34.50	23,70	35.25

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.1 9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	N/A									50.62	51,12	53.16
8.2 0	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	N/A									40.86	41,36	43.36
8.2 1	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	N/A									39.97	40,47	42.47
8.2 2	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	N/A									423.00	435,00	482.00
8.2 3	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling remaja/Mahasiswa	%	N/A									335.00	337,00	394.00
8.2 4	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	N/A									44.37	16,50	51.00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.2 5	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	N/A									9.70	9,70	44.87
8.2 6	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	N/A									100.00	219,40	9.70
8.2 7	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	N/A									100.00	100,00	100.00
8.2 8	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	N/A									100.00	52,08	100.00
8.2 9	Cakupan penyediaan Informasi Data	%	N/A									20.00	25,00	30.00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	URUSAN PERHUBUNGAN													
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	5.425.599,00	5.178.981,62	5.696.879	5.437.930,70	5.719.287,00	5.709.827,24	5.803.000,50	5.995.318,60	5.995.318,00	5.995.318,00	54.889,00	5.995,340,00
9.2	Rasio ijin trayek	%	33,00	38,00	38,00	43,00	43,00	46,00	48,00	50,00	17,00	33,00	2,80	50,00
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	5.266,00	5.300,00	5,42	5.400,00	6.309,00	5.500,00	5.510,00	5.600,00	4.093,00	5.600,00	7.016,00	6.450,00
9.4	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	
9.5	Jumlah Pelabuhan Laut	Jumlah	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	
9.6	Jumlah Bandar Udara (Bandara)	Jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
9.7	Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100%	Jumlah	15,00	15,50	15,50	16,00	16,00	16,50	16,70	17,00	17,20		40,00	
9.8	Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah	2.634,00	2.650,00	2.650,00	2.700,00	2.132,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00	3.282,00		34,53	
9.9	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) dan berlaku selama 6 bulan	menit	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00	
9.10	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00		70.000,00	
9.11	Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah	750,00	750,00	750,00	825,00	908,00	900,00	900,00	975,00	975,00	975,00	0,00	995,00
9.12	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	N/A									1:54	0,08	1.64

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	MENENGAH													
11.1	Persentase koperasi aktif	%	75,75	75,75	60,65	75,87	75,00	75,99	40,00	76,11	33,33	41,50	33,33	0,00
11.2	Jumlah UMKM	Jumlah	11.579,00	11.579,00	11.656,00	11.868,00	13.261,00	12.165,00	12.936,00	12.469,00	47.802	11,297.00	47,802.00	0,00
11.3	Jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom	Unit	51,00	51,00	51,00	53,00	31,00	55,00	31,00	57,00	31	49,00	31,00	0,00
11.4	Persentase koperasi sehat	%	N/A		60,65		54,00		40,00		61,45	40,00	57,33	0,00
11.5	Koperasi mampu melaksanakan RAT tepat waktu	Koperasi	N/A		50,00		43,00		86,00		55,00	57,00	57,33	0,00
11.6	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	N/A									40,00	57,33	0,00
11.7	Persentase UMKM	%	N/A		97,92		97,90		97,88		98,01	62,00	30	0,00
11.8	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	N/A		0,80		0,95		1,07		1,78	0,90	1,8	0,00
11.9	Jumlah BPR/LKM	Unit	N/A		18,00		18,00		10,00		0,00	15,00	0,00	0,00
11.10	Jumlah BUMNAG	Unit	N/A		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	URUSAN PENANAMAN MODAL													
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	45,00	45,00	45,00	23,00	52,00	65,00	73,00	75,00	117	83,00	337,00	133,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	145,00	145,00	183,00	200,00	192,20	155,00	53,20	160,00	1.330,30	365.10	997.00	600.00
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	110,00	0,00	115,00	100		120,00	
12.4	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	orang	2.700,00	2.700,00	1.983,00	2.000,00	-	2.900,00	0,00	3.000,00	3.039,00		3.100	
12.5	Penyusunan Rencana umum Penanaman Modal Daerah	Dokumen	N/A		1,00		1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
12.6	Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Dokumen / Event	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	1/4	1/0	1/7
12.7	Indeks Kepuasan Masyarakat perangkat daerah	Angka	N/A		72,90		77,24		80,70		88,52	88.00	83.75	93.00
12.8	Jumlah Objek Perizinan dan Non Perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	Objek	N/A		87,00		91,00		115,00		96,00	100.00	103.00	130.00
12.9	Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan	Aplikasi	N/A		1.00		1.00		1.00		1.00	1.00	1.00	1.00
12.10	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi	Rp.(Milyar)	40,00	40,00	57,00	45,00	51,00	50,00	-	55,00		60.50	333.00	97,44
12.11	Lama Proses Perizinan (Rata-rata lama proses perizinan)	Hari Kerja	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	7,00	5,00	7,00		7.00	5.00	5.00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.12	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	Angka	N/A		2,00		1,00		1,00		1,00	2,00	1,00	2,00
12.13	Jumlah Perda yang mendukung iklim investasi	Perda	N/A		0,00		1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA													
13.1	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	51,00	56,00	52,00	52,00	52,00	56,00	52,00	56,00	10,00		10,00	
13.2	Jumlah organisasi olahraga	Jumlah	35,00	41,00	41,00	36,00	35,00	45,00	35,00	45,00	36,00		36,00	
13.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	17,00	18,00	18,00	18,00	22,00	20,00	20,00	20,00	2,00		2,00	
13.4	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	35,00	10,00	10,00	35,00	36,00	36,00	36,00	11,00	36,00		36,00	
13.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Gelanggang	104,00	108,00	108,00	110,00	110,00	112,00	112,00	114,00	112,00		112,00	
13.6	Lapangan olahraga	Jumlah	270,00	259,00	270,00	259,00	279,00	259,00	279,00	259,00	246,00	246,00	246,00	0,00
13.7	Rasio klub olahraga/penduduk	Angka	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
13.8	Jumlah atlet berprestasi	Orang	46,13	50,00	46,66	50,00	50,22	50,00	50,22	50,00		360,00	367,00	0,00
13.9	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	N/A		18,86		18,86		18,86		18,87	37,03	18,87	0,00
13.	Persentase	%	N/A		0,14		0,14		0,14		0,14	0,14	0,13	0,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	wirausaha muda													
13. 11	Cakupan pembinaan olahraga	Kegiata n	N/A		36,00		36,00		36,00		36,00	36,00	36,00	0,00
14	URUSAN STATISTIK													
14. 1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Jumlah	N/A	Ada	Ada	Ada								
14. 2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Buku	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14. 3	Buku PDRB Kabupaten	Buku	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	URUSAN PERSANDIAN													
15. 1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10,00	9,09	15,91	15,91	100,00
16	URUSAN KEBUDAYAAN													
16. 1	Penyelenggaraa n festival seni dan budaya (Kali)	Jumlah			0,00		4,00		57,00		5,00	3,00	5,00	5,00
16. 2	Jumlah Sarana penyelenggaraa n seni dan budaya	Jumlah	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	19,00	4,00	4,00	2,00	8,00	4,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah			25,00		24,00		25,00		45,00	25,00	4,00	50,00
16.4	Rasio grup kesenian/10.000 penduduk	Rasio	0,61	0,72	0,50	0,83	1,20	0,94	1,35	1,05	1,05	1,16	0,71	1,16
16.5	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	N/A									35,00	0,00	42,00
16.6	Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya	Rasio	5,00									6,00	0,00	7,00
16.7	Rasio Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya	Rasio	5,00									6,00	10,00	7,00
16.8	Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Peetapan Cagar Budaya	Rasio	45,00									50,00	0,00	50,00
16.9	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah										4,00	4,00	5,00
16.10	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah										12,00	0,00	26,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	URUSAN PERPUSTAKAAN													
17.1	Jumlah perpustakaan	Jumlah	1 Pustaka daerah, 60 pustaka nagari, 6 Perpustakaan TBM, 9 Perpustakaan Pesantrean, 13 Perpustakaan mesjid, 23 Perpustakaan Sekolah	1 Pustaka daerah, 60 pustaka nagari, 5 Perpustakaan TBM, 7 Perpustakaan Pesantrean, 11 Perpustakaan mesjid, 17 Perpustakaan Sekolah	1 Pustaka daerah, 60 pustaka nagari, 5 Perpustakaan TBM, 7 Perpustakaan Pesantrean, 11 Perpustakaan mesjid, 17 Perpustakaan Sekolah	1 Pustaka daerah, 60 pustaka nagari, 8 Perpustakaan TBM, 9 Perpustakaan Pesantrean, 14 Perpustakaan mesjid, 19 Perpustakaan Sekolah	65 (1 Perpustakaan Daerah; 54 Perpustakaan Nagari; 10 TBM)	85 (1 Pustaka daerah, 64 pustaka nagari, 10 Perpustakaan TBM, 10 Perpustakaan Sekolah	85 (1 Perpustakaan Daerah; 74 Perpustakaan Nagari; 10 TBM) Perpustakaan Sekolah	85 (1 Perpustakaan Daerah; 74 Perpustakaan Nagari; 10 TBM)	117 (1 pustaka daerah; 99 pustaka sekolah; dan 17 pustaka nagari)	1 Pustaka daerah, 60 pustaka nagari, 12 Perpustakaan TBM, 13 Perpustakaan Pesantrean, 20 Perpustakaan mesjid, 26 Perpustakaan Sekolah	117 (1 pustaka daerah; 99 pustaka sekolah; dan 17 pustaka nagari)	
17.2	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	1,70	1,70	1,70	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	10,38		10,38	
17.3	Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	13,33	14,7	15,6	15,38	24,17	15,55	42,86	19,23	0,54		0,54	
17.4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	18,62									18,80	1,84	19,36
17.5	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	Indeks	90,17		76,85		80,00		82,50		90,17	90,20	91,93	91,00
17.6	Rasio Ketercukupan Koleksi	Rasio	2,87									2,90	1,60	4,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Perpustakaan dengan Penduduk													
17. 7	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	%	0,3									0,40	10,38	0,80
17. 8	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	0,14		N/A		N/A		N/A		0,04	0,15	0,58	0,45
17. 9	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	0,33									0,35	0,34	0,55
17. 10	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialih media (Digitalisasi)/Te rdaftar	%	0									10,00	0,00	60,00
17. 11	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%										0,06(6)	10,38	0,08
17. 12	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio										1,01	0,27	1,13
17. 13	Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan/t ahun	Jumlah (Org)			5.217,00		9.206,00		12.275,00		15.344,0 0	18,413.00	51320,00	26,085. 00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Usuran/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.14	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah			5.490,00		5.500,00		5.547,00		5.809,00	6,184.00	6.784,00	6,434.00
17.15	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang			N/A		N/A		N/A		N/A	3.00	0,00	6.00
18	URUSAN KEARSIPAN													
18.1	Persentase Pengelolaan arsip secara baku	%	2,72	2,72	2,72	4,76	4,76	6,80	6,80	8,84	8,84	72,73	N/A	
18.2	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	7,00	8,00	8,00	20,00	20,00	30,00	30,00	40,00	40,00		1,00	
18.3	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	%	8,84		2,72		4,76		6,80		8,84	10,88	4,00	23,25
18.4	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan	%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	5,00	6,00	30,00
18.5	Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	%	40		20,00		25,00		30,55		55,55	45,00	46,37	70,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.6	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan	%	20		N/A		25,00		33,55		38,05	30,00	33,22	70,00
18.7	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	35	45	N/A	55	N/A	65	N/A	60	N/A	75	1,00	
LAYANAN URUSAN PILIHAN														
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
1	URUSAN PARIWISATA													
1.1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	48.000,00	55.000,00	156.445,00	180.000,00	183.600,00	200.000,00	396,79	220.000,00		250.000,00	152.207,00	0,00
1.2	Nilai PDRB sektor Pariwisata	Rp./Juta	1.759.000,00		7.012.354,04		7.012.354,04		7.095.497,65		7.095.497,65			
1.3	Jumlah Destinasi Wisata sesuai Standar	Objek Wisata	4,00	5,00	2,00	5,00	2,00	6,00	3,00	6,00	4,00	4,00	4,00	0,00
1.4	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Orang	41,00	45,00	N/A	50,00	N/A	55,00	N/A	60,00	41,00	60,00	72,00	0,00
1.5	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	36,00	40,00	4,00	45,00	32,00	50,00	32,00	55,00	36,00	36,00	36,00	0,00
2.	URUSAN PERTANIAN													
2.1	Produktivitas pangan utama (padi) per hektar	Ton/Ha	5,23	5,09	5,26	5,11	4,51	5,13	4,75	5,15	5,15	4,00	4,54	5,43
2.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	10,06**	11,07	9,74**	11,07		11,07		11,07	11,07	15,00	14,13	15,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Distribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	%	19,90	20,75	19,33	20,78	18,65	20,80	19,18	7,53				
2.4	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	3,23**	3,54	3,20**	3,54		3,54		3,54	3,54			
2.5	Regulasi ketahanan pangan			2,00		2,00	1 (Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2,00	0,00	2,00	0			
2.6	Ketersediaan pangan utama (kg/1000 pddk)	kg/1000 pddk	702.490,38	667.457,10	695.430,89	680.806,25	656.413,95	694.422,37	709.848,01	708.310,82	708310,82			
2.7	Tumbuhnya kelembagaan ekonomi petani	%	30,00	35,00	-	45,00		55,00	Tidak ada data	70,00	70			
2.8	Jumlah produksi beras (Kg)	kg	155.904,59	139.414,00	174.550,00	142.899,36	152.562,14	146.472,34	159.334,11	150.134,40	150134,4			
2.9	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rasio		48,10	-			48,17	Tidak ada data	48,19	48,19			
2.10	Nilai tukar petani	%	96,45	96,60	96,97	96,90	95,16	97,20	95,99	97,50	97,5			

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1 1	Nilai PDRB sektor pertanian (Rp. Jutaan)	Rp (Jutaan)	2.499.408, 70	2.399.178, 30	2.624.586, 70	2.492.026, 50	3.812.952, 29	2.588.467, 93	4.082.657, 32	2.736.277 ,17	2.736.27 7,17		2.608.426, 60	
2.1 2	Kontribusi ekonomi pertanian/perke bunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	Rp./Juta			2.624.586 ,70		3.812.952, 29		4.082.657, 32		2.736.27 7,17	2.731.777. 20	2.608.426, 60	3.069,7 05.15
2.1 3	Produksi tanaman pangan (padi) per tahun	Ton			321.376,0 0		280.892,0 0		293.360,3 1		283.127, 00	287.374.00	252.723,36	309,58 3.00
2.1 4	Cakupan bina kelompok petani	%										25.88	46,77	29,28
2.1 5	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	Rp/M			190.297,6 0		199.738,3 8		199.654,4 0		232.175, 46	236.818.50	236.818,50	0.00
2.1 6	Jumlah Populasi ternak besar (sapi, kerbau)	Ekor			52.496		55.528		56.588		58.582	55.447.00	55.759,00	0.00
2.1 7	Jumlah Populasi ternak kecil (kambing)	Ekor			32.479		33.840		34.090		35.005	35.786.87	36.608,00	0.00
2.1 8	Jumlah populasi ternak unggas (ayam, itik, puyuh)	Ekor			9.639.196		9.041.301		9.361.982		9.361.98 2	14,845,257 .04	15.861.757 ,00	0.00
2.1 9	Jumlah produksi hasil ternak	Daging /Ton										17,338.31	18.667.624 ,00	0.00
2.2 0	Jumlah produksi telur	Ton			16.741.96 6		17.058.35 4		18.989.38 9		21.939.8 74	24,730,448 .61	29.596.599 ,00	0.00
2.2 1	Jumlah produksi susu	Liter										123,728.50	52.620,00	0.00
2.2 2	Persentase peningkatan fasilitasi sarana peternakan	%									2,05	4.37	0,00	0.00
2.2 3	Persentase peningkatan	%									6,00	12.00	41,00	0.00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	fasilitasi prasarana peternakan													
2.2 4	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%									25,00	30,00	190,00	0.00
2.2 5	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Jumlah									350,00	550,00	1050,00	0.00
2.2 6	Jumlah ternak/hewan yang di vaksin	Jumlah									300,00	500,00	548,00	0.00
2.2 7	Jumlah penurunan kejadian penyakit jembrana, SE, AI, Rabies	Jumlah									300,00	250,00	297,00	0.00
2.2 8	Pendapatan peternak (Rp. Ribu)	Rp.(Ribu)									6,15	6,27	6,27	0.00
2.2 9	Persentase pelayanan perizinan bidang peternakan	%									100,00	100,00	0,00	0.00
2.3 0	Persentase peningkatan kelas kelompok tani Peternak	%									0,30	0,50	1,47	0.00
3	URUSAN PERDAGANGAN													
3.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8,42	8,40	8,27	8,45	8,28	8,50	8,92	8,55	8,55	8,52	10,65	0.00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	11,93	11,94	11,95	11,97	2,71	11,99	2,71	12,02	11,9	11,80	2,51	16,00
4.2	Pertumbuhan Industri	%	3,00	2,42	2,80	2,45	3,76	2,47	1,15	2,50	1,92	2,40	1,92	2,55
4.3	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Sentra										1,00	0,7	1,00
4.4	Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah yang bersertifikasi	Sertifikasi										Sertifikasi	Sertifikasi	Sertifikasi
4.5	Tersedianya data dan informasi tentang industri kecil dan menengah	Dokumen Ranperda											0,7	1,00
4.6	Cakupan bina kelompok pengrajin	Jumlah										1,00	155	180,00
5	URUSAN PERIKANAN													
5.1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%			5,198		5,346		5,978		7,199	7,35	7,97	8,10
5.2	Produksi Perikanan tangkap	Ton	26.604,60	24.103,97	25.472,20	24.827,09	23.080,10	25.571,90	22.298,90	26.339,05	26339,05	18,441.90	18.112,50	20,361.29
5.3	Produksi perikanan budidaya	Ton/ Tahun	54.677,49	57.573,06	57.239,70	53.578,30	58.211,18	61.079,26	54.079,33	62.911,63	62911,63	53,561.83	53.112,74	59,136.57
5.4	Produksi benih ikan (ekor/tahun)	Ekor/ Tahun			904.480.720		922.560.000		847.385.934		687.828.935	480,000.000	694.692.000	555,000,000.00
5.5	Persentase lubuk larangan yang diawasi	%		25,00	30,00	25,00	33,33	25,00	33,33	25,00	33,33	60,00	33,33	100,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DA													
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Ti dak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	93,00		93,00	93,00	80,00	0,00	95,00
1.5	Persentase Peningkatan kualitas musrenbang	%	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	93,00	93,00	93,00	93,00	80,00	0,00	95,00
1.6	Kesesuaian program kerja RKPD dengan RPJMD	%	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	93,00	93,00	93,00	93,00	80,00	0,00	95,00
1.7	Indeks kualitas perencanaan	%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	100,00	100,00	100,00
1.8	persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	%	N/A		92,00		96,63		95,07		97,62	90,00	97,96	95,00
2	KEUANGAN													
2.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Tanggal			20/11/20 17		20/11/20 18		20/11/20 19		20/11/2 020	30/11/202 1	30/11/202 1	30/11/ 2026
2.3	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	%			100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100	100,00
2.4	Persentase	%			100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100	100,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kualitas Laporan Keuangan Daerah													
2.5	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	%			100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100	100,00
2.6	Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat	%			100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100	100,00
2.7	Persentase Peningkatan PAD	%			93,95		-40,20		20,24		4,21	3,00	10,4	5,50
2.8	Persentase Pencapaian Target PAD	%			89,36		78,24		101,35		94,39	100,00	95,18	100,00
2.9	Persentase Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat	%			87,03		87,51		92,06		84,47	81,81	81,83	82,23
2.10	Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun	Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3	2,00
2.11	Jumlah perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun	Dokumen	5,00	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8	2,00
2.12	Rasio belanja modal terhadap APBD	Rasio	5,00	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	30,20	20,50	10,34	33,10
2.13	Persentase kenaikan pajak dan retribusi daerah	%	16,79	7,90	36,84	6,93	-16,00	10,01	15,01	10,01	10,01	5,00	5,71	7,50
2.14	Rasio PAD terhadap penerimaan APBD	Rasio	5,38	6,94	10,18	8,12	8,12	8,45	6,04	9,72	9,72	6,33	8,57	10,01

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1 5	Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD	Rasio	-35,45%	6,98	9,99	7,94	7,94	8,64	6,95	9,87	9,87	6.48	8,81	10.53
3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai										78.00	67.00	88.00
3.2	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	%										93.00	83.00	93.00
3.3	Persentase peningkatan terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	%										92.00	82.00	92.00
3.4	Persentase peningkatan dokumen ASN yang terarsipkan	%										75.00	80.00	75.00
3.5	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN (Kepegawaian)	%										73.00	69.00	73.00
3.6	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN (Diklat)	%										90.00	80.00	90.00
3.7	Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial	%			28,18		37,33		44,03	N/A		81.00	45.15	81.00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	AN													
4.1 .1	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%			60,00		75,00		89,00		90,00	65,00	60,00	90,00
4.1 .2	Jumlah Kerjasama Penelitian	Jumlah			0,00		0,00		1,00		2,00	1,00	2,00	12,00
4.1 .3	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%			0,00		31,82		40,91		27,27	35,00	55,56	44,00
4.1 .4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%			N/A		N/A		N/A		N/A	25,00	98,51	55,00
5	PENGAWASAN													
5.1	Nilai SAKIP pemerintah daerah hasil evaluasi kemenpan RB	Level			B		B		B		B	B	B	BB
5.2	Tingkat kapabilitas APIP	Level			Level 3		Level 2+		Level 2+		Level 2+	Level 3	Level 2	Level 3
5.3	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level			Level 3		Level 3		Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5.4	Persentase pengawasan yang dilakukan	%										60,00	50	60,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.5	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilakukan	%										60.00	50	60.00
5.6	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	%			50,00		50,09		62,97		94,50	70.00	80	80.00
5.7	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD	Jumlah										12.00	14	10.00
5.8	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Nilai										B	B	BB
5.9	Jumlah OPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sesuai nilai akuntabilitas kinerja Pemda	Unit			12,00		26,00		26,00		24,00	6.00	40	18.00
5.10	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	%			93,98		96,19		96,21		93,00	65.00	70	75.00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1 1	Jumlah OPD yang memperoleh level maturitas sesuai level maturitas Pemda	Unit			10,00		7,00		12,00		12,00	10,00	24	15,00
6	SEKRETARIAT DEWAN													
6.1	Jumlah produk peraturan daerah yang dihasilkan	Perda			10,00		10,00		8,00		11,00	8,00	6,00	8,00
6.2	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak			N/A		N/A		N/A		N/A	ada	Ada	
6.3	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada / Tidak			N/A		N/A		N/A		N/A	ada	Ada	

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.4	Keputusan DPRD yang ditindaklanuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
6.5	Persetujuan DPRD terhadap ranperda APBD dan APBD perubahan yang dilakukan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
6.6	Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	%	70,00	72,00	72,00	75,00	100,00	77,00		80,00		70,00	100,00	80,00
6.7	Cakupan kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	%	80,00	81,00	81,00	82,00	100,00	83,00		85,00		80,00	93,38	85,00
7	SEKRETARIAT DAERAH													
7.1	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	%			N/A		N/A		N/A		N/A	26,00	26,00	31,00
7.2	PDRB/Income Per Kapita ADHB	Rp Juta			46,32		49,45		51,14		41,65	44,63	18455,00	58,72
7.3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks			C		C		B		B	A	A	5,00
7.4	Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi	Nilai			B		B		B		B	2.600	B	3050

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kemenpan RB													
7.5	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Orang	3,068	3,2	3,1217	3,25	3,0475	3,3	3,127	3,25	2,990	1,100.00	3,0562	1,600.00
7.6	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	Indeks										60.00	1281,00	66.00
7.7	Indeks reformasi birokrasi	%										75.33	54,32	78.16
7.8	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	%										10.00	75,31	15.00
7.9	Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan												8,52	
7.10	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	%										100.00	95,00	100.00
7.11	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	%										100.00	50,00	100.00
7.12	Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-	%										10.00	1,62	15.00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Procurement terhadap APBD													
7.1 3	Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	%										100.00	95,00	100.00
7.1 4	Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	%										70.00	79,00	85.00
7.1 5	Persentase Laporan Realisasi kegiatan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%										100.00	85,00	100.00
7.1 6	Persentase peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	%										80.00	80,00	100.00
7.1 7	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan	%										80.00	80,00	100.00
7.1 8	Persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	%										80.00	80,00	100.00
7.1 9	Persentase kerjasama informasi	%										80.00	80,00	100.00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	dengan mass media													
7	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)													
7.1	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100,00									100,00	100,00	100,00
7.2	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100,00									100,00	100,00	100,00
7.3	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100,00									100,00	100,00	100,00
7.4	Persentase terselenggarany a urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100,00									100,00	100,00	100,00
7.5	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00									100,00	100,00	100,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)													
8.1	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
				Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020	Capaian Realisasi Kinerja 2020	Target Capaian Kinerja 2021	Capaian Realisasi Kinerja 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.2	persentase laporan pertanggungjawaban partai politik tepat waktu	%	100,00		90,00		90,00		90,00		90,00	100,00	90,00	100,00
8.3	persentase ormas / kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	%	100,00		93,00		96,00		98,00		100,00	100,00	100,00	100,00
8.4	persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba	%	N/A		N/A		100,00		100,00		100,00	100,00	N/A	100,00
8.5	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%	N/A		90,00		92,00		94,00		95,00	100,00	100,00	100,00

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR



LAMPIRAN II

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										568,407,472,531		593,436,234,159		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										461,847,720,531		472,370,661,992	
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										261,075,000		215,000,000
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil evaluasi Kemenpan RB Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Data Sekolah Peserta Didik, Guru, dan Tenaga Kependidikan, Serta sara Prasarana Sekolah	100 % 100 % 100,00,100 %	6 Dokumen %Nilai.%	100 %	81,075,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil evaluasi Kemenpan RB Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 % 100 % 100,00,100 %	80,000,000 %Nilai.%
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil evaluasi Kemenpan RB Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Data Sekolah Peserta Didik, Guru, dan Tenaga Kependidikan, Serta sara Prasarana Sekolah	100 % 100 % 100,00,100 %	10 Laporan %Nilai.%	180,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil evaluasi Kemenpan RB Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 % 100 % 100,00,100 %	135,000,000 %Nilai.%	
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										459,237,919,419		469,881,811,992
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD) Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah 97%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi kemenpan RB A, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji/Tunjangan/Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SK(PD)	100 A 100 % Nilai % 100 %	3834 Orang 100%		458,258,755,769	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD) Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah 97%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi kemenpan RB A, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100 A 100 % Nilai % 100 %	468,768,811,992

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD) Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah 97%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi kementerian RB A, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji/Tunjangan/Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SK(PD)		100 A 100 % Nilai % 100 %	18 Dokumen	100 %	814,163,650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD) Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah 97%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi kementerian RB A, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100 A 100 % Nilai % 100 %	945,000,000
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD) Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah 97%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi kementerian RB A, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji/Tunjangan/Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SK(PD)		100 A 100 % Nilai % 100 %	1 Laporan	100 %	165,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD) Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah 97%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi kementerian RB A, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100 A 100 % Nilai % 100 %	168,000,000
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								70,000,000					130,000,000
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rasio Untuk mengikuti Pelatihan / Bim tek / TOT		100 A 100 % Nilai %	700 Dokumen	94 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	100 A 100 % Nilai %	80,000,000
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rasio Untuk mengikuti Pelatihan / Bim tek / TOT		100 A 100 % Nilai %	10 Orang	94 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	100 A 100 % Nilai %	50,000,000
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								104,910,000					152,500,000
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rasio Administrasi Umum Pemerintahan Daerah		100 A 100 % Nilai %	0 Paket	93 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	100 A 100 % Nilai %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Rasio Administrasi Umum Pemerintahan Daerah		100 A 100 % Nilai %	2 Dokumen	93 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	100 A 100 % Nilai %	12,500,000
1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rasio Administrasi Umum Pemerintahan Daerah		100 A 100 % Nilai %	1 Laporan	93 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	100 A 100 % Nilai %	45,000,000
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rasio Administrasi Umum Pemerintahan Daerah		100 A 100 % Nilai %	1 Laporan	93 %	59,910,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)	100 A 100 % Nilai %	95,000,000
1.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								537,098,130					665,600,000
1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.		100 A 100 % Nilai %	7 Unit	92 %	468,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 % Nilai %	615,600,000
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.		100 A 100 % Nilai %	13 Unit	92 %	69,098,130	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 % Nilai %	50,000,000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,581,733,500					1,175,750,000
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rasio Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		100 A 100 % Nilai %	1 Laporan	100 %	34,933,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 % Nilai %	60,000,000
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rasio Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		100 A 100 % Nilai %	12 Laporan	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 % Nilai %	65,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Perorangan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rasio Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		100 A 100 % Nilai %	65 Laporan	100 %	1,486,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 % Nilai %	1,050,750,000
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								54,984,482					150,000,000
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rasio Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		100 A 100 Nilai %	7 Unit	100 %	29,991,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 Nilai %	100,000,000
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rasio Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		100 A 100 Nilai %	7 Unit	100 %	9,992,982	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 Nilai %	25,000,000
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rasio Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		100 A 100 Nilai %	1 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 A 100 Nilai %	25,000,000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								106,354,752,000					120,875,572,167
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								64,726,591,600					76,065,449,000
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	3 Ruang	58,27 %	1,075,234,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	2,106,170,000
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	0 Ruang 2 Ruang	58,27 %	774,319,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	1,053,085,000
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	3 Ruang	58,27 %	850,290,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	1,608,688,000
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	43 Unit	58,27 %	1,830,796,600	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	4,216,266,000
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	85 Ruang	58,27 %	850,100,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	3,971,100,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	9 Ruang	58,27 %	476,968,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	754,590,000
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	1 Ruang	58,27 %	544,564,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	350,000,000
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	3 Unit	58,27 %	311,220,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	450,000,000
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	20 Paket	58,27 %	310,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	750,000,000
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	23 Paket	58,27 %	270,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	242,500,000
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	47284 Peserta Didik	58,27 %	46,663,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	47,193,300,000
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	413 Satuan Pendidikan	58,27 %	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	82,000,000
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	799 Peserta Didik	58,27 %	125,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	130,000,000
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	2101 Orang	58,27 %	10,505,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	13,032,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	413 Orang	58,27 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	50,000,000
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar		56,31 %	413 Satuan Pendidikan	58,27 %	55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	75,750,000
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								29,802,760,400					30,940,423,167
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	2 Ruang	62,56 %	1,350,924,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	650,000,000
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	1 Ruang	62,56 %	806,207,400	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	650,000,000
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	4 Ruang	62,56 %	986,054,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	1,500,000,000
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	3 Unit	62,56 %	1,400,015,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	1,365,000,000
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	19 Ruang	62,56 %	885,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	2,040,815,365
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	0 Ruang	62,56 %	0	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	0 Ruang	62,56 %		0	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	0
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	4 Ruang	62,56 %	485,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	315,000,000
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	11 Unit	62,56 %	370,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	561,857,802
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	2 Paket	62,56 %	310,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	145,750,000
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	2 Paket	62,56 %	200,380,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	350,500,000
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	17184 Peserta Didik	62,56 %	19,108,300,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	18,846,300,000
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	8 Paket	62,56 %	345,380,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	250,000,000
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	16428 Peserta Didik	62,56 %	45,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	45,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	62 Satuan Pendidikan	62,56 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	47,000,000
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	300 Peserta Didik	62,56 %	860,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Hibah		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	1,020,000,000
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	415 Orang	62,56 %	2,085,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	2,551,950,000
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	1100 Orang	62,56 %	350,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	350,750,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		56,31 %	12 Satuan Pendidikan	62,56 %	180,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	250,000,000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								9,288,800,000					8,933,600,000
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI		56,31 %	3 Unit	52,2 %	350,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	350,000,000
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI		56,31 %	1 Unit	52,2 %	616,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	406,000,000
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI		56,31 %	2 Unit	52,2 %	685,000,000			Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI		56.31 %	2 Unit	52.2 %	400,000,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	450,000,000
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI		56.31 %	1 Paket	52.2 %	225,000,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	231,000,000
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI		56.31 %	8038 Peserta Didik	52.2 %	4,822,800,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	4,799,100,000
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI		56.31 %	0 Paket 60 Paket	52.2 %	385,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	242,500,000
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI		56.31 %	0 Peserta Didik	52.2 %	130,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	190,000,000
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI		56.31 %	375 Satuan Pendidikan	52.2 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	50,000,000
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI		56.31 %	495 Orang	52.2 %	1,475,000,000			Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	1,845,000,000
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI		56.31 %	495 Orang	52.2 %	140,000,000			Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	160,000,000
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI		56.31 %	375 Satuan Pendidikan	52.2 %	30,000,000			Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	60,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					2,536,600,000				4,936,100,000					
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendd Nonformal/Kesetaraan		56.31 %	3 Unit	52.2 %	850,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	165,000,000
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendd Nonformal/Kesetaraan		56.31 %	3 Unit	52.2 %	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	425,000,000
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendd Nonformal/Kesetaraan		56.31 %	1 Paket	52.2 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	37,500,000
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendd Nonformal/Kesetaraan		56.31 %	1 Paket	52.2 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	350,000,000
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendd Nonformal/Kesetaraan		56.31 %	1432 Peserta Didik	52.2 %	1,074,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	2,713,600,000
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendd Nonformal/Kesetaraan		56.31 %	2 Paket	52.2 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	200,000,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendd Nonformal/Kesetaraan		56.31 %	1432 Peserta Didik	52.2 %	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	95,000,000
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendd Nonformal/Kesetaraan		56.31 %	33 Satuan Pendidikan	52.2 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendid Nonformal/Kesetaraan		56.31 %	88 Orang	52.2 %		1,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	450,000,000
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendid Nonformal/Kesetaraan		56.31 %	88 Orang	52.2 %		1,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56.31 %	450,000,000
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								135,000,000					120,000,000
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								90,000,000					80,000,000
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rasio Pelatihan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Pelatihan/Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		58.89 %	33 Orang	60.57 %		90,000,000		Rasio Pelatihan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Formal dan Non Formal	58.89 %	80,000,000
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								45,000,000					40,000,000
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rasio Pelatihan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Rasio Penyusunan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Nonformal/Kesetaraan		58.89 %	1 Dokumen	57.2 %		45,000,000		Rasio Pelatihan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Formal dan Non Formal	58.89 %	40,000,000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								70,000,000					70,000,000
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								70,000,000					70,000,000
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendidikan. Nonformal/Kesetaraan. Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendidikan. Nonformal/Kesetaraan.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Penghitungan dan Pemetaan / Panetapan PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 % 52,2 %	2 Laporan	52 %		70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendidikan. Nonformal/Kesetaraan. Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendidikan. Nonformal/Kesetaraan.	52 % 52,2 %	70,000,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								2,833,875,000					2,165,000,000
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								2,160,000,000					1,295,000,000
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,295,000,000					900,000,000
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya.	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Fasilitas Sanggar yang Dibina		7 %	2 Objek	7 %		215,000,000		Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya.	7 %	650,000,000
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya.	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Fasilitas Sanggar yang Dibina		7 %	2 Laporan	7 %		1,080,000,000		Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya.	7 %	250,000,000
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								865,000,000					395,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kab./Kota.		7 %	1 Unit	7 %	865,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya.	7 %	395,000,000
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						370,000,000				380,000,000			
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						370,000,000				380,000,000			
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rasio Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya.	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Rasio Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya.		7 %	66 Orang	7 %	370,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya.	7 %	380,000,000
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						80,000,000				95,000,000			
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						80,000,000				95,000,000			
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Rasio Pembinaan Sejarah Lokal	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal		50 %	2 Dokumen	50 %	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pembinaan Sejarah Lokal	50 %	95,000,000
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						223,875,000				395,000,000			
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						150,000,000				45,000,000			
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Penetapan Cagar Budaya		50 rasio 50 % 50 rasio	20 Objek	50 rasio	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	50 rasio 50 % 50 rasio	45,000,000
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Penetapan Cagar Budaya		50 rasio 50 % 50 rasio	10 Objek	50 rasio	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	50 rasio 50 % 50 rasio	0
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						73,875,000				350,000,000			
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah cagar budaya yang dikelola/terpelihara		50 %	5 Objek	50 %	73,875,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	50 %	350,000,000
TOTAL											571,241,347,531				595,601,234,159			



DINAS KESEHATAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1																		
1	02																	
1	02	01																
1	02	01	2.01															
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	Nilai Dokumen	94 %	81,197,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 89,317,800
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	Nilai Dokumen	94 %	151,042,755	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 166,107,680
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	Nilai Dokumen	94 %	82,197,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 90,417,800
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	Nilai Dokumen	94 %	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 93,500,000
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	Nilai Dokumen	94 %	80,119,980	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 88,132,000
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	Nilai Laporan	94 %	79,393,980	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 87,333,400
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	Nilai Laporan	94 %	82,983,780	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 91,282,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				86,581,152,695				95,238,815,342					
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	100,000	100 %	85,648,847,045	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai: 94,213,373,342
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	100,000	100 %	497,340,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai: 546,942,000
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	100,000	100 %	69,998,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai: 77,000,000
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	100,000	100 %	69,967,550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai: 77,000,000
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	100,000	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai: 82,500,000
1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	100,000	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai: 82,500,000
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	100,000	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai: 77,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A,100%	Nilai Dokumen	100%	74,999,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A,100%	Nilai.% 82,500,000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								79,000,000					86,900,000
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A,100%	Nilai Unit	94%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A,100%	Nilai.% 0
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A,100%	Nilai Paket	94%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A,100%	Nilai.% 0
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A,100%	Nilai Dokumen	94%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A,100%	Nilai.% 0
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A,100%	Nilai Dokumen	94%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A,100%	Nilai.% 0
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A,100%	Nilai Dokumen	94%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A,100%	Nilai.% 0
1.02.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A,100%	Nilai Pegawai	94%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A,100%	Nilai.% 0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1.02.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,100%	Nilai	94%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,100%	Nilai, %	0
1.02.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,100%	200,0%	94%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,100%	Nilai, %	0
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,100%	Nilai	94%	29,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,100%	Nilai, %	32,450,000
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,100%	Nilai	94%	24,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,100%	Nilai, %	26,950,000
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,100%	Nilai	94%	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,100%	Nilai, %	27,500,000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								196,871,365						216,650,455
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,100%	Nilai	100%	14,999,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,100%	Nilai, %	16,500,000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,100%	Nilai	100%	50,272,265	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,100%	Nilai, %	55,390,455

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	A	100	100	9,999,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100	A	100	11,000,000
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	A	100	100	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100	A	100	11,000,000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	A	100	100	11,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100	A	100	12,760,000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	A	100	100	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100	A	100	11,000,000
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	A	100	100	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100	A	100	0
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	A	100	100	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100	A	100	22,000,000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	A	100	100	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100	A	100	77,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan		100,A,100 %	100 Dokumen	100 %		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai, %	0
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan		100,A,100 %	100 Dokumen	100 %		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai, %	0
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								63,212,745						69,611,696
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan		100,A,100 %	Nilai, %	84 %		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai, %	0
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan		100,A,100 %	Nilai, %	84 %		0		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai, %	0
1.02.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan		100,A,100 %	Nilai, %	84 %		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai, %	0
1.02.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan		100,A,100 %	Nilai, %	84 %		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai, %	0
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	Nilai, %	84 %		39,090,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai, %	43,032,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan		100.A.100%	Nilai.%	84 %		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	0
1.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan		100.A.100%	Nilai.%	84 %		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	0
1.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan		100.A.100%	Nilai.%	84 %		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	0
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan		100.A.100%	Nilai.%	84 %		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	0
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A.100%	Nilai.%	84 %	24,122,745		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	26,579,696
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,748,976,363							1,923,914,039
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A.100%	100%	100 %	14,950,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	16,445,000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A.100%	100%	100 %	135,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	148,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	Nilai	100 %	19,150,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 21,065,000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	Nilai	100 %	1,579,876,363	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 7,737,904,039
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								191,699,953					210,870,000
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	Nilai	100 %	119,999,953	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 132,000,000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,A,100 %	Nilai	100 %	41,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 45,870,000
1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100,A,100 %	Nilai	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 0
1.02.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100,A,100 %	Nilai	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 0
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100,A,100 %	Nilai	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %	Nilai.% 0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
																			Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
																								Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100.A.100%	100%	100%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	0													
1	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100.A.100%	100%	100%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	0													
1	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100.A.100%	100%	100%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	0													
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100.A.100%	100%	100%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	0													
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A.100%	100%	100%	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	16,500,000													
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A.100%	100%	100%	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	16,500,000													
1	02	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100.A.100%	100%	100%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100%	Nilai.%	0													
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD															18,271,900,000			20,099,090,000									

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100A,100%	25 Unit Kerja	100 %	18,271,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100A,100 %	Nilai 20,099,090,000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							32,953,916,859					36,177,479,184	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							6,607,172,274					7,292,619,400	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	1 Unit	85 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	1 Unit	85 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	1 Unit	85 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	1 Unit	85 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	1 Unit	85 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3 Unit	85 %	3,436,036,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	3,779,640,223

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	1 Unit	85 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	1 Unit	85 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	5 Unit	85 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	2 Unit	85 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	5 Unit	85 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	2 Unit	85 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	3 Unit	85 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	5 Unit	85 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	4 Unit	85 %	52,518,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	82,500,000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Paket	85 %	1,831,711,274	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	2,014,882,577
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Paket	85 %	1,100,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	1,210,000,000
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	2 Unit	85 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	2 Unit	85 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	0
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	25 Unit	85 %	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	66,000,000
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	25 Paket	85 %	126,906,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	139,596,600
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								25,657,165,745					28,345,859,784

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	8220 Orang	85 %	321,259,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	66,000,000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	7847 Orang	85 %	112,499,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	33,000,000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	6913 Orang	85 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	30,404,000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	29809 Orang	85 %	30,470,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	33,517,000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	76631 Orang	85 %	21,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	23,100,000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	245753 Orang	85 %	33,640,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	37,004,000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	57026 Orang	85 %	32,008,560	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	35,209,416
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	66611 Orang	85 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	55,000,000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	5147 Orang	85 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	55,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	890 Orang	85 %	17,749,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	19,525,000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	15590 Orang	85 %	64,999,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	71,500,000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	9312 Orang	85 %	64,999,965	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	71,500,000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	1 Dokumen	85 %	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	66,000,000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	1 Dokumen	85 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	44,000,000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	1 Dokumen	85 %	567,065,440	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	623,771,918
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	1 Dokumen	85 %	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	82,500,000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	1 Dokumen	85 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	77,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	1 Dokumen	85 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	77,000,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	1 Dokumen	85 %	24,956,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	27,451,875	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	0 Dokumen 25 Dokumen	85 %	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	82,500,000	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jwa (ODMK)	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	6 Orang	85 %	44,999,770	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	49,500,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jwa dan NAPZA	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	6 Orang	85 %	45,009,820	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	49,511,000	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	5 Dokumen	85 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	55,000,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	2 Dokumen	85 %	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	71,500,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	2 Dokumen	85 %	6,500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	5,341,444,625	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	5 Orang	85 %	34,487,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	37,936,250
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	0 Paket 5 Paket	85 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	44,000,000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	2 Dokumen	85 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	77,000,000
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 % 85 %	10 Unit	85 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	0
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 % 85 %	5 Dokumen	85 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	0
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 % 85 %	1 Dokumen	85 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	25 Dokumen	85 %	16,375,521,740	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	20,057,660,700

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 85 %	3 Dokumen	85 %	546,497,150	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	341,000,000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 % 85 %	10 Unit	85 %	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	522,324,000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 % 85 %	5 Laporan	85 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	44,000,000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 % 85 %	2 Dokumen	85 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	44,000,000
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 % 85 %	1 Unit	85 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	0
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								234,578,840					258,500,000
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	77,000,000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	5 Dokumen	100 %	69,999,935	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	77,000,000
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	25 Unit	100 %	94,578,905	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	104,500,000
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								455,000,000					280,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Unit	75 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	55,000,000
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Unit	75 %	55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	60,500,000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	25 Unit	75 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	110,000,000
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	75 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	55,000,000
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								248,400,000					273,240,000
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								85,000,000					93,500,000
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang diberikan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	850 Dokumen	70 %	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	70 %	49,500,000
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang diberikan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	75 Dokumen	70 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	70 %	44,000,000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								118,400,000					130,240,000
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	70 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	70 %	44,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	0 Orang 10 Orang	70 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	70 %	44,000,000
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	70 %	38,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	70 %	42,240,000
1.02.03.2.03	Pembangunan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								45,000,000					49,500,000
1.02.03.2.03.01	Pembangunan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Cakupan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya kesehatan di dinas kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	35 Orang	70 %	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	70 %	49,500,000
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								98,777,750					108,655,800
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								61,502,750					67,653,300
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	60 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	100 %	44,000,000
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Sarana	60 %	21,502,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	100 %	23,653,300
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Cakupan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		100 %	35 Sarana	60 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	100 %	0
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								0					0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produkis ALat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan		100 %	3 Dokumen	3 Lokasi		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	0
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produkis ALat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan		100 %	3 Dokumen	3 Lokasi		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	0
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								0					0
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, unuj Produk Makanan minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan		100 %	3 Dokumen	3 Lokasi		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	100 %	0
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								37,275,000					41,002,500
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	70 %	37,275,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	41,002,500
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan, jajanan dan Sentra Makanan, jajanan								0					0
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan, jajanan dan Sentra Makanan, jajanan	Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan, jajanan dan Sentra Makanan, jajanan	Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan, jajanan dan Sentra Makanan, jajanan yang diterbitkan		100 %	2 Dokumen	20 Stiker		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	0
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								0					0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		100 %	2 Unit	20 Post Market		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	0
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		100 %	2 Dokumen	20 Post Market		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100 %	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								927,007,220					390,029,200
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								759,840,620					324,029,200
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	3 Dokumen	60 %	759,840,620	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	76 %	324,029,200
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								137,166,600					33,000,000
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Cakupan PHBS	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	3 Dokumen	74 %	137,166,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	76 %	33,000,000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								30,000,000					33,000,000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	25 Dokumen	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	76 %	33,000,000
TOTAL									142,002,851,145					155,501,346,796



PUSKESMAS SUNGAI GERINGGING

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Puskesmas Sungai Geringging

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02									110,000,000					121,000,000		
1	02	02								110,000,000					121,000,000		
1	02	02	2.02							110,000,000					121,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Malai III Koto	85 %	1 Dokumen	85 %	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	121,000,000
TOTAL										110,000,000					121,000,000		



PUSKESMAS KOTO BANGKO

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Koto Bangko

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL												90,000,000				99,000,000	



PUSKESMAS BATU BASA

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Batu Basa

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					110,000,000				121,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					110,000,000				121,000,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					110,000,000				121,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	121,000,000
TOTAL										110,000,000				121,000,000			



PUSKESMAS AMPALU

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Ampalu

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lurah Ampalu	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL												90,000,000			99,000,000		



PUSKESMAS SUNGAI LIMAU

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Sungai Limau

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					110,000,000				121,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					110,000,000				121,000,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					110,000,000				121,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	121,000,000
TOTAL										110,000,000				121,000,000			



PUSKESMAS KAMPUNG DALAM

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Kampung Dalam

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					110,000,000				121,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					110,000,000				121,000,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					110,000,000				121,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	121,000,000
									TOTAL	110,000,000				121,000,000			



PUSKESMAS SIKUCUR

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Sikucur

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02									90,000,000				99,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
									TOTAL	90,000,000					99,000,000		



PUSKESMAS ULAKAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Ulakan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02									90,000,000					99,000,000		
1	02	02								90,000,000					99,000,000		
1	02	02	2.02							90,000,000					99,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL										90,000,000					99,000,000		



PUSKESMAS PADANG ALAI

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Padang Alai

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02									90,000,000				90,000,000			
1	02	02								90,000,000				90,000,000			
1	02	02	2.02							90,000,000				90,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	90,000,000
TOTAL										90,000,000				90,000,000			



PUSKESMAS PAUH KAMBAR

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Pauh Kamar

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	121,000,000
TOTAL												110,000,000			121,000,000		



PUSKESMAS GASAN GADANG

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Gasan Gadang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02									90,000,000				99,000,000			
1	02	02								90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02							90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Gasan Gadang	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL										90,000,000				99,000,000			



PUSKESMAS SUNGAI SARIAK

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Sungai Sariak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
1	02									110,000,000					121,000,000		
1	02	02								110,000,000					121,000,000		
1	02	02	2.02							110,000,000					121,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	121,000,000
TOTAL										110,000,000					121,000,000		



PUSKESMAS KAYU TANAM

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Kayu Tanam

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					110,000,000				121,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					110,000,000				121,000,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					110,000,000				121,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	121,000,000
TOTAL										110,000,000				121,000,000			



PUSKESMAS PADANG SAGO

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Padang Sago

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02									90,000,000				99,000,000			
1	02	02								90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02							90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL										90,000,000				99,000,000			



PUSKESMAS SIKABU

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Sikabu

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02													99,000,000			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	02	02												99,000,000			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
1	02	02	2.02											99,000,000			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL												90,000,000				99,000,000	



PUSKESMAS LUBUK ALUNG

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Lubuk Alung

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02													121,000,000			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	02	02												121,000,000			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
1	02	02	2.02											121,000,000			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 %	1 Dokumen	85 %	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	121,000,000
TOTAL													110,000,000				121,000,000



PUSKESMAS ENAM LINGKUNG

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Enam Lingkungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					90,000,000				99,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkungan, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL										90,000,000				99,000,000			



PUSKESMAS KAMPUNG GUCI

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Kampung Guci

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL													90,000,000			99,000,000	



PUSKESMAS ANDURING

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Anduring

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02									90,000,000				99,000,000			
1	02	02								90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02							90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Andurlang	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL										90,000,000				99,000,000			



PUSKESMAS SINTUK

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Sintuk

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02									90,000,000					99,000,000		
1	02	02								90,000,000					99,000,000		
1	02	02	2.02							90,000,000					99,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Sintuak	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL										90,000,000					99,000,000		



PUSKESMAS KATAPING

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Kataping

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					90,000,000				99,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL										90,000,000				99,000,000			



PUSKESMAS LIMAU PURUT

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Limau Purut

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02									90,000,000				99,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					90,000,000				99,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL										90,000,000				99,000,000			



PUSKESMAS SICINCIN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Sicincin

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02													121,000,000			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	02	02												121,000,000			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
1	02	02	2.02											121,000,000			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	85 %	1 Dokumen	85 %	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	121,000,000
TOTAL												110,000,000				121,000,000	



PUSKESMAS PASAR USANG

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Pasar Usang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	85 %	1 Dokumen	85 %	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	121,000,000
TOTAL												110,000,000				121,000,000	



PUSKESMAS PATAMUAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Patamuan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Tandikek Selatan	85 %	1 Dokumen	85 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	99,000,000
TOTAL											90,000,000				99,000,000	



UPTD LABKESDA

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD LABKESDA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02													412,500,000			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	02	02												412,500,000			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
1	02	02	2.02											412,500,000			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Parit Malintang	85 %	1 Dokumen	85 %	375,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 %	412,500,000
TOTAL												375,000,000				412,500,000	



UPTD IFK

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD IFK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02													412,500,000			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	02	02												412,500,000			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
1	02	02	2.02											412,500,000			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Parit Malintang	85 % 85 %	1 Dokumen	85 %	375,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	85 % 85 %	412,500,000
TOTAL												375,000,000			412,500,000		



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.1.02.0.00.01.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.02.0.00.01.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1																		
1	02																	
1	02	01																
1	02	01	2.02															
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (RSUD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	132 Orang	100 %	25,214,349,451			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (RSUD)	100 %	25,844,708,187
1	02	02																
1	02	02	2.01															
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit		68 %	0 Unit 1 Unit	68 %	5,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	68 %	20,000,000,000
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit		68 %	2 Unit	68 %	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	68 %	550,000,000
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit		68 %	1 Unit	68 %	1,000,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	68 %	1,100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.1.02.0.00.01.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.02.0.00.01.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit		68 %	1 Unit	68 %	5,029,880,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	68 %	5,532,868,000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit		68 %	1 Paket	68 %	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	68 %	2,200,000,000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								30,737,726,060					33,811,498,666
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase penyediaan operasional BLUD Rumah Sakit		68 %	1 Dokumen	100 %	30,737,726,060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	68 %	33,811,498,666
TOTAL									69,481,955,511					89,039,074,853



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	2 Dokumen	95 %	55,150,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	60,773,900
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Dokumen	95 %	37,970,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	41,908,966
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Dokumen	95 %	33,367,270	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	36,733,576
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Dokumen	95 %	40,175,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	44,271,656
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Dokumen	95 %	34,206,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	37,675,220
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	2 Laporan	95 %	61,223,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	67,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Laporan	95 %	250,078,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	275,000,000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,709,366,986			8,479,184,526		
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	79 Orang/bulan	100 %	7,022,184,526	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	7,722,184,526	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	641,680,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	707,000,000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	45,502,460	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	50,000,000	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								0			35,000,000		
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terpenuhi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	4 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	35,000,000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								164,743,000			312,000,000		
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	20 Orang	75 %	80,368,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	92,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	100 Orang	75 %	84,375,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	220,000,000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								701,320,035			776,000,000		
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Paket	100 %	7,315,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	8,000,000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Paket	100 %	286,766,535	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	320,000,000	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Paket	100 %	114,877,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	127,000,000	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	26,000,000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	100 Laporan	100 %	268,361,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	295,000,000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,064,050,350			3,250,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	2 Unit	80 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	2.000.000.000	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	10 Unit	80 %	845.950.350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	1.000.000.000	
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	5 Unit	80 %	218.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	250.000.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.804.965.600				4.073.000.000	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	72.480.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	77.000.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	290.785.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	320.000.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	48.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	76.000.000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	3,392,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	3,600,000,000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,546,230,910					2,490,000,000	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	37 Unit	100 %	312,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	350,000,000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	15 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	170,000,000	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	12 Unit	100 %	2,020,112,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	1,500,000,000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	20 Unit	100 %	213,668,160	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	220,000,000	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A 100 % 100 %	2 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A 100 % 100 %	250,000,000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							47,995,211,090					26,501,000,000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							16,487,578,000					6,001,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.72 %	1 KM	7.95 %	16,487,578,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58.72 %	6,000,000,000
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.72 %	0.5 KM	7.95 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58.72 %	1,000,000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								31,507,633,090					20,500,000,000
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi baik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.72 %	4 Dokumen	58.72 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58.72 %	1,000,000,000
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi baik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.72 %	2 KM	58.72 %	21,583,190,880	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58.72 %	11,000,000,000
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi baik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.72 %	3 KM	58.72 %	8,443,622,210	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58.72 %	7,000,000,000
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi baik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.72 %	0.5 KM	58.72 %	1,480,820,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58.72 %	1,500,000,000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								3,651,177,200					75,250,000,000
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								3,651,177,200					75,250,000,000
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	1 Dokumen	92 %	300,756,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92 %	250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	800 SR	92 %	3.350.421.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92 %	70.000.000.000
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah sambungan rumah Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 %	800 SR	92 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92 %	5.000.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								3.395.669.400					13.500.000.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								3.395.669.400					13.500.000.000
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1 Dokumen	87 %	439.049.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87 %	1.500.000.000
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	1429 Rumah Tangga	87 %	2.956.620.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87 %	7.000.000.000
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kapasitas IPLT Terbangun	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	10 M ³ /Hari	87 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87 %	5.000.000.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								3.372.925.540					15.500.000.000
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								3.372.925.540					15.500.000.000
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1000 M	70 %	2.424.719.240	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	70 %	15.000.000.000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	70 %	948,206,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	70 %	500,000,000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								51,565,574,240					16,300,000,000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								51,565,574,240					16,300,000,000
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	1 Dokumen	40 %	1,289,712,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	40 %	1,300,000,000
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	10 Dokumen	40 %	50,275,862,240	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	40 %	5,000,000,000
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsua Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsua	Persentase terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	10 Unit	40 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	40 %	10,000,000,000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								190,681,327,299					122,350,000,000
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								190,681,327,299					122,350,000,000
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	2 Dokumen	69 %	610,330,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69 %	1,650,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	29.98 KM	69 %	128,972,005,299	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69 %	30,000,000,000
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	25.69 KM	69 %	47,944,748,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69 %	40,000,000,000
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	26.73 KM	69 %	1,496,493,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69 %	1,700,000,000
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	Panjang Jembatan yang Dibangun	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	100 M	69 %	7,375,625,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69 %	30,000,000,000
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	190 M	69 %	4,282,125,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69 %	19,000,000,000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								2,503,470,928					4,100,000,000
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								1,199,824,280					1,750,000,000
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.50 %	2 Dokumen	62.5 %	999,824,280	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	62.50 %	1,500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Persentase terpenuhinya rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.50 %	4 Dokumen	62.5 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	62.50 %	250,000,000
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							951,572,928						1,500,000,000
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.50 %	2 Dokumen	90 %	951,572,928	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	62.50 %	1,500,000,000
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							152,076,400						600,000,000
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.50 %	50 Dokumen	90 %	25,050,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	62.50 %	350,000,000
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.50 %	1 Dokumen	90 %	127,026,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	62.50 %	250,000,000
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							199,997,320						250,000,000
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.50 %	1 Dokumen	95 %	199,997,320	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	62.50 %	250,000,000
TOTAL									319,668,202,548					293,479,547,844



DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							100,000,000			100,000,000		
1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Tersusunnya Dokumen Kerjasama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Pemukiman dari Pengembang		100 persen	1 Laporan	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 persen	100,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN												
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota												
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	1 Dokumen	100 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	64,779,285
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN												
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Belanja Modal Tanah Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah		100 persen	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	13,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terlaksananya program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	146,764,489
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH												
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota												
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program penatagunaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terlaksananya Program penatagunaan Tanah	100 Persen	146,764,489
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhny pelayanan pemerintah Dawrah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti (DLHPKPP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja		100 A 100 % Nilai % 100 Persen	1 Dokumen	100 persen	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhny pelayanan pemerintah Dawrah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti (DLHPKPP)	100 A 100 % Nilai % 100 Persen	20,000,000
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhny pelayanan pemerintah Dawrah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti (DLHPKPP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja		100 A 100 % Nilai % 100 Persen	1 Laporan	100 persen	12,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhny pelayanan pemerintah Dawrah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti (DLHPKPP)	100 A 100 % Nilai % 100 Persen	20,000,000
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhny pelayanan pemerintah Dawrah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti (DLHPKPP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja		100 A 100 % Nilai % 100 Persen	4 Laporan	100 persen	12,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhny pelayanan pemerintah Dawrah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti (DLHPKPP)	100 A 100 % Nilai % 100 Persen	5,000,000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,889,958,057					0
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase terpenuhny pelayanan pemerintahan daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektora, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase terlaksananya administrasi keunagan perangkat daerah		100 persen	105 Orang	100 persen	3,889,958,057	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhny pelayanan pemerintahan daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektora, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	100 persen	0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								190,553,407					160,000,000
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektora, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 persen	1 Paket	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektora, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	100 persen	7,000,000
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektora, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 persen	1 Paket	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektora, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	100 persen	8,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	persentase terlaksananya administarasi umum perangkat daerah		100 persen	1 Paket	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	100 persen	10,000,000
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase terlaksananya administarasi umum perangkat daerah		100 persen	1 Laporan	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	100 persen	15,000,000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase terlaksananya administarasi umum perangkat daerah		100 persen	1 Laporan	100 persen	145,553,407	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	100 persen	120,000,000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,950,960,416					1,731,000,000
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase terpenuhny pelayanan, pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	1 Laporan	100 persen	12,856,896	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhny pelayanan, pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	100 persen	15,000,000
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase terpenuhny pelayanan, pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	1 Laporan	100 persen	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhny pelayanan, pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	100 persen	67,200,000
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase terpenuhny pelayanan, pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	1 Laporan	100 persen	1,848,103,520			persentase terpenuhny pelayanan, pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	100 persen	1,648,800,000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								89,500,000					60,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah,nilai saki perangkat daerah daerah hasil evaluasi inspektora, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	persentase terlaksanya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	2 Unit	100 persen	66,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah,nilai saki perangkat daerah daerah hasil evaluasi inspektora, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	100 persen	40,000,000
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah,nilai saki perangkat daerah daerah hasil evaluasi inspektora, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	persentase terlaksanya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	1 Unit	100 persen	3,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah,nilai saki perangkat daerah daerah hasil evaluasi inspektora, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	100 persen	20,000,000
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah,nilai saki perangkat daerah daerah hasil evaluasi inspektora, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase terlaksanya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	1 Unit	100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhny pelayanan pemerintah daerah,nilai saki perangkat daerah daerah hasil evaluasi inspektora, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)	100 persen	0
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								250,000,000					900,000,000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								100,000,000					250,000,000
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Pencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten /Kota yang Disusun	Terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	250,000,000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								150,000,000					650,000,000
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPPD/RPMD		Jumlah Dokumen KLHS RPPD/RPMD Kabupaten /Kota yang Disusun				0.2 Dokumen		150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				650,000,000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								1,594,999,998					353,297,973
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								215,000,000					253,297,973
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100 Persen	2 Dokumen	100 persen	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	53,297,973
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Buku Data DIKPLHD	Terlaksananya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Dokumen	100 persen	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Terlaksananya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100 Persen	5 Dokumen	100 persen	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	100,000,000
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								1,379,999,998					100,000,000
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Laporan	100 persen	1,379,999,998	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Terlaksananya Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 Persen	100,000,000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								100,000,000					218,543,774
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								100,000,000					218,543,774
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		100 Persen	10 Ha	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati	100 Persen	218,543,774
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								10,000,000					7,853,067
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3								10,000,000					7,853,067
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Terlaksananya verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan limbah B3		100 Persen	1 Laporan	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3	100 Persen	7,853,067
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								90,000,000					95,596,942
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								90,000,000					95,596,942
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman		100 Persen 100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen 100 Persen	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman		100 Persen 100 Persen	1 Laporan	100 Persen	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen 100 Persen	75,596,942
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								165,000,000				250,000,000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								165,000,000				250,000,000	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Lembaga	5 Persen	55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 Persen	70,000,000
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Dokumen	5 Persen	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 Persen	80,000,000
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	15 Orang	5 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 Persen	100,000,000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								40,000,000				180,000,000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								40,000,000				180,000,000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	terlaksananya program pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	terlaksananya program pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota		1 entitas	1 Entitas	100 persen	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		terlaksananya program pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	1 entitas	180,000,000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								2,115,000,000				20,814,101,198	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah								2,115,000,000				20,814,101,198	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah		2 Persen	30 Ton	100 persen	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	2 Persen	807,101,198
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah		2 Persen	1 Kelompok	100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	2 Persen	7,000,000
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah		2 Persen	300 Ton 4 Unit	100 persen	1,695,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	2 Persen	20,000,000,000
TOTAL									26,342,571,878					29,447,601,217



DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		100 A 100 % Nilai %	6 Dokumen	92 %	68,696,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	75,556,535
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		100 A 100 % Nilai %	3 Laporan	92 %	34,644,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	38,109,478
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 A 100 % Nilai %	42 Orang/bulan	100 %	4,179,914,607	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	4,599,556,067
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 A 100 % Nilai %	11 orang	100 %	97,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	0
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 A 100 % Nilai %	250 Paket	100 %	194,995,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	214,500,000
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 A 100 % Nilai %	0 Orang 2 Orang	100 %	12,640,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	13,909,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Orang yang Mengiku ti Bim bingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 A 100 % Nilai %	8 Orang	100 %	9,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	9,960,000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								321,966,000					354,169,200
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 A 100 % Nilai %	12 Laporan	100 %	22,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	24,200,000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 A 100 % Nilai %	12 Laporan	100 %	299,966,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	329,969,200
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								76,878,700					84,586,518
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kasubbag. Program)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		100 A 100 % Nilai %	1 Unit	10 unit	34,440,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	37,884,000
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		100 A 100 % Nilai %	4 Unit	10 unit	42,438,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	46,702,518
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,653,688,498					6,410,406,852
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 A 100 % Nilai %	12 Laporan	3 paket	41,065,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	45,172,376

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 A 100 % Nilai %	12 Laporan	3 paket	33,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	36,300,000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 A 100 % Nilai %	12 Laporan	3 paket	5,579,622,798	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	6,328,934,476
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								190,385,300				209,440,000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara		100 A 100 % Nilai %	7 Unit	66 unit	130,489,050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	143,550,000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara		100 A 100 % Nilai %	42 Unit	66 unit	20,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	22,000,000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara		100 A 100 % Nilai %	3 Unit	66 unit	39,796,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)	100 A 100 % Nilai %	43,890,000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								545,536,860				537,513,713	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								333,153,110				333,298,713	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus yang ditindak lanjuti		67.5 %	23 Kasus	23 kasus	75,545,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas	67.5 %	72,281,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah PPNS yang ditingkatkan pengetahuannya		67.5 %	2 Laporan	2 orang	82,910,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	67.5 %	88,715,000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								409,321,780				428,963,458	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								389,351,780				406,996,458	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran yang ditindak lanjuti		85 %	60 Laporan	60 kejadian	139,998,810	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85 %	153,999,791
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah kejadian kebakaran yang ditindak lanjuti		85 %	6 Dokumen	60 kejadian	249,352,970	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85 %	252,996,667
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia								19,970,000				21,967,000	
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelamatan jiwa manusia dari peristiwa yang menimpa, membahayakan dan mengancam keselamatan manusia		85 %	8 Laporan	8 kasus	19,970,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85 %	21,967,000
TOTAL									11,796,428,245				26,872,261,821	



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A 100 % 100 %	600 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	30,000,000
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A 100 % 100 %	5 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	20,000,000
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A 100 % 100 %	370 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	8,000,000
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A 100 % 100 %	30 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	15,000,000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A 100 % 100 %	150 Laporan	100 %	345,404,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	245,115,200
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								37,750,000					99,825,000
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		A 100 % 100 %	10 Unit	84 %	37,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	99,825,000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,633,125,980					1,760,644,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		A 100 % 100 %	300 Laporan	100 %		21,949,340	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	30,027,000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		A 100 % 100 %	12 Laporan	100 %		264,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	287,126,400
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		A 100 % 100 %	1 Laporan	100 %		19,880,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	16,091,000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		A 100 % 100 %	12 Laporan	100 %		1,327,296,640	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	1,427,400,000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									213,445,160				540,000,000
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		A 100 % 100 %	6 Unit	100 %		67,697,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	155,000,000
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		A 100 % 100 %	8 Unit	100 %		60,493,150	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	135,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		A 100 % 100 %	1 Unit	100 %	46,849,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	100,000,000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		A 100 % 100 %	34 Unit	100 %	38,404,360	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 %	150,000,000
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							1,823,490,400					2,766,848,819
1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							53,708,900					206,027,213
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Persentase Informasi kejadian bencana yang ditindaklanjuti		30 Nagari 82 % 29.12 %	2000 Orang	100 %	53,708,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	30 Nagari 82 % 29.12 %	206,027,213
1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							776,344,250					1,303,040,686
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Persentase nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		30 Nagari 82 % 29.12 %	1 Dokumen	90 %	145,399,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	30 Nagari 82 % 29.12 %	360,931,660
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		30 Nagari 82 % 29.12 %	500 Orang	90 %	223,792,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	30 Nagari 82 % 29.12 %	147,573,366

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		30 Nagari 82 % 29,12 %	1 Dokumen	90 %	11,435,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	30 Nagari 82 % 29,12 %	397,267,830
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Persentase nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		30 Nagari 82 % 29,12 %	46 Unit	90 %	370,466,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	30 Nagari 82 % 29,12 %	397,267,830
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Persentase nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		30 Nagari 82 % 29,12 %	500 Orang	90 %	25,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	30 Nagari 82 % 29,12 %	0
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								664,509,250					552,488,613
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang Ditangani		30 Nagari 82 % 29,12 %	5000 Orang	100 %	536,023,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	30 Nagari 82 % 29,12 %	287,308,456

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang Ditangani		30 Nagari 82 % 29,12 %	150 Orang	100 %	128,485,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	30 Nagari 82 % 29,12 %	265,180,157
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								328,928,000				705,292,307	
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Persentase ketersediaannya dokumen regulasi penanggulangan bencana		30 Nagari 82 % 29,12 %	1 Dokumen	100 %	19,005,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	30 Nagari 82 % 29,12 %	220,968,488
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaannya dokumen regulasi penanggulangan bencana		30 Nagari 82 % 29,12 %	3 Laporan	100 %	74,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	30 Nagari 82 % 29,12 %	265,202,457
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JTU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Persentase ketersediaannya dokumen regulasi penanggulangan bencana		30 Nagari 82 % 29,12 %	1 Dokumen	100 %	235,923,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	30 Nagari 82 % 29,12 %	219,121,362
TOTAL									6,282,281,234				8,203,664,057	



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan		100 %	8 Dokumen	90 %	41,130,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	100 %	41,130,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan		100 %	4 Laporan	90 %	39,870,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	100 %	39,731,000
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kebutuhan administrasi keuangan yang terpenuhi		95 %	29 Orang/bulan	100 100	3,479,017,879	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	95 %	4,933,304,947
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kebutuhan administrasi keuangan yang terpenuhi		95 %	12 Dokumen	100 100	133,560,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	95 %	145,664,640
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhinya Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 % 0,-0 %	12 Paket	90 %	5,685,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhinya Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 % 0,-0 %	40,000,000
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhinya Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 % 0,-0 %		90 %	13,775,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhinya Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 % 0,-0 %	70,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 % 0,-0 %,Nilai,%	3 Dokumen	90 %	3.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 % 0,-0 %,Nilai,%	14.000.000
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 % 0,-0 %,Nilai,%	6 Laporan	90 %	11.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 % 0,-0 %,Nilai,%	40.000.000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 % 0,-0 %,Nilai,%	205 Laporan	90 %	85.204.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 % 0,-0 %,Nilai,%	100.000.000
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								92.909.925					250.000.000
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100 %	3 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	100 %	100.000.000
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100 %	6 Unit	100 %	92.909.925	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	100 %	150.000.000
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								719.170.164					629.000.000
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		00 %	2500 Laporan	100 %	32.232.964	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	00 %	35.000.000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		00 %	12 Laporan	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	00 %	90,000,000
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		00 %	12 Laporan	100 %	14,010,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	00 %	60,000,000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		00 %	19 Laporan	100 %	592,927,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	00 %	444,000,000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								207,376,250					235,000,000
1.06.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100 %	10 Unit	100 %	155,896,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	100 %	160,000,000
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100 %	1 Unit	100 %	51,480,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	100 %	75,000,000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								277,793,120					443,000,000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								277,793,120					443,000,000
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktifa		65 %	103 Orang	100 %	129,998,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	65 %	50,000,000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktifa		65 %	17 Orang	100 %	18,490,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	65 %	81,000,000
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktifa		65 %	20 Keluarga	100 %	78,979,050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	65 %	232,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif		65 %	30 Lembaga	100 %	39,370,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	65 %	50,000,000
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif		65 %	30 Sertifikat	100 %	10,954,770	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	65 %	30,000,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								436,330,456					390,000,000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								365,787,906					310,000,000
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar		100 %	61 Orang	100 %	178,970,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	100 %	80,000,000
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar		100 %	30 Orang	100 %	101,723,500			Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	100 %	80,000,000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar		100 %	30 Orang	100 %	32,774,750			Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	100 %	30,000,000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar		100 %	10 Orang	100 %	7,820,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	100 %	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar		100 %	30 Orang	100 %		32,935,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	100 %	70,000,000
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar		100 %	6000 Orang	100 %		11,564,156	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	100 %	20,000,000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								70,542,550						80,000,000
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		100 %	2 Dokumen	2 dokumen		70,542,550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang direhabilitasi dan diberikan Bim tek	100 %	80,000,000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								335,978,730						350,000,000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								335,978,730						350,000,000
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana		100 %	216157 Orang	100 %		228,988,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	100 %	200,000,000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana		100 %	67.733 Keluarga	100 %		106,989,980	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	100 %	150,000,000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								243,554,990						474,000,000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								189,399,235						434,000,000
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Persentase Tertanggung Korban Bencana Alam	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial		100 %	50 Orang	100 %		83,862,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tertanggung Korban Bencana Alam	100 %	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial		100 %	50 Orang	100 %		28,231,600		Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	100 %	150,000,000
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial		100 %	10 Orang	100 %		77,305,535	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	100 %	134,000,000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								54,155,755					40,000,000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota yang terlaksana		100 %	23 Orang	100 %		54,155,755	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	100 %	40,000,000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								8,823,900					132,127,000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								8,823,900					132,127,000
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional yang telah dilaksanakan		100 %	3 Makam	100 %		8,823,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	100 %	132,127,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								560,413,190					395,475,809
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								236,983,220					264,043,651
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								105,177,000					74,043,651
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		100 %	27 Dokumen	100 %		40,177,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	100 %	37,043,651
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		100 %	27 Perangkat Daerah	100 %		65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	100 %	37,000,000
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								131,806,220					190,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		100 %	30 Orang	100 %	131,806,220	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	100 %	190,000,000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								26,945,000					30,000,000
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								26,945,000					30,000,000
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus kekerasan dan Perlindungan terhadap perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana		35 %	6 Perangkat Daerah	100 %	26,945,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Kasus kekerasan dan Perlindungan terhadap perempuan	35 %	30,000,000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								133,729,850					16,414,599
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								133,729,850					16,414,599
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana		100 %	5 Dokumen	100 %	133,729,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	16,414,599
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								39,000,000					0
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								39,000,000					0
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhi Data Gender Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		100 %	1 Dokumen	60 buku	39,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Data Gender Perempuan dan Anak	100 %	0
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								75,005,000					70,017,559
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								75,005,000					70,017,559
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Hak Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Persentase Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang dilaksanakan		40 %	36 Organisasi	40 %	75,005,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Hak Anak	40 %	70,017,559
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								48,750,120					15,000,000
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								48,750,120					15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Anak	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan		100 % 100 %	30 Orang	100 %	48,750,120	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0 Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Anak	100 % 100 %	15,000,000
TOTAL									6,695,594,204					8,722,433,396



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
2	09									801,998,590								601,998,860
2	09	03								741,999,010								541,999,010
2	09	03	2.01							69,999,010								69,999,010
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Stabilisasi nilai koefisien harga pangan pokok		2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	10,000,000	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	Jumlah pasar yang dipantau dan dianalisis Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi nilai koefisien harga pangan pokok		2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	100 %	39,999,010	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	39,999,010	
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Stabilisasi nilai koefisien harga pangan pokok		2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	20,000,000	
2	09	03	2.02							100,000,000								100,000,000
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan rasio cadangan pangan		2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	20 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	100,000,000	
2	09	03	2.04							572,000,000								372,000,000
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	Laporan pola pangan harapan (PPH) Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Skor pola pangan harapan (PPH) yang ideal		2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	89,3 %	12,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	12,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.04	02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	Jumlah Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dihadiri Jumlah jambore PKK yang dilaksanakan Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan P2L Jumlah lomba cipta menu yang dilaksanakan Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor pola pangan harapan (PPH) yang ideal		2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	1 Kali 1 Kali 3 KWT 1 Kali 0 Laporan 1 Laporan	89,3 %	560.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	660.000.000
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							19.999,730					19.999,850	
2	09	04	2.01			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							19.999,730					19.999,850	
2	09	04	2.01	01		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Persentase dokumen kerentanan dan ketahanan pangan yang disusun		1 nagari	3 Dokumen	100 %	19.999,730	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan	1 nagari	19.999,850
2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							39.999,850					40.000,000	
2	09	05	2.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							39.999,850					40.000,000	
2	09	05	2.01	01		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi	Jumlah pasar dan sekolah yang uji sampel jajanan Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan jajanan anak sekolah Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Persentase terawasinya keamanan pangan segar asal tumbuhan		85 %	4 Dokumen 4 Sekolah dasar (SD) 0 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi	85 %	10.000.000
2	09	05	2.01	02		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi	Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji keamanan pangan Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terawasinya keamanan pangan segar asal tumbuhan		85 %	25 Sampel 0 Sertifikat	100 %	29.999,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi	85 %	30.000,000
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							25,752,947,135					18,762,946,927	
3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							11,734,586,295					11,631,681,477	
3	27	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							106,068,940					100,248,790	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselrasaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat		A Nilai 94 % 100 %	7 Dokumen	94 %	46,544,870	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya	A Nilai 94 % 100 %	40,720,770
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselrasaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat		A Nilai 94 % 100 %	5 Laporan	94 %	59,524,070	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya	A Nilai 94 % 100 %	59,528,020
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							10,073,174,175				10,084,574,785	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		A Nilai 94 % 100 %	107 Orang	100 %	9,928,066,425	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya	A Nilai 94 % 100 %	9,928,066,425
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		A Nilai 94 % 100 %	12 Dokumen	100 %	135,120,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya	A Nilai 94 % 100 %	146,520,000
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		A Nilai 94 % 100 %	19 Laporan	100 %	9,987,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya	A Nilai 94 % 100 %	9,988,360
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							156,129,000				145,810,000	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	135 Paket	94 %	54,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya	A Nilai 100 % 100 %	54,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	2 Orang	94 %	92,140,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	81,810,000
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	10 Orang	94 %	9,989,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	10,000,000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							364,679,260					326,226,002
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 94 % 100 %	1 Paket	100 %	5,838,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah	A Nilai 94 % 100 %	5,838,000
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 94 % 100 %	1 Paket	100 %	139,474,760	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah	A Nilai 94 % 100 %	101,025,502
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 94 % 100 %	1 Paket	100 %	19,928,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah	A Nilai 94 % 100 %	19,862,500
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 94 % 100 %	1800 Dokumen	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah	A Nilai 94 % 100 %	12,000,000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 94 % 100 %	12 Laporan	100 %	7,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah	A Nilai 94 % 100 %	7,425,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan</p>	<p>Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti</p> <p>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>	<p>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</p>		<p>A Nilai</p> <p>94 %</p> <p>100 %</p>	<p>175 Kali</p> <p>12 Laporan</p>	<p>100 %</p>	180,238,000	<p>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</p>	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan</p>	<p>A Nilai</p> <p>94 %</p> <p>100 %</p>	180,075,000
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140,194,250			53,278,000				
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</p>	<p>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</p>		<p>A Nilai</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>5 Unit</p>	<p>84 %</p>	122,594,250	<p>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</p>	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	<p>A Nilai</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	0
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</p>	<p>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</p>		<p>A Nilai</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>0 Unit</p>	<p>84 %</p>	0	<p>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</p>	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	<p>A Nilai</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	14,918,000
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</p>	<p>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</p>		<p>A Nilai</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>0 Unit</p>	<p>84 %</p>	0	<p>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</p>	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	<p>A Nilai</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	20,900,000
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</p>	<p>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</p>		<p>A Nilai</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>30 Unit</p>	<p>84 %</p>	17,600,000	<p>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</p>	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	<p>A Nilai</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	17,460,000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					762,507,420			789,703,900				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				24,836,220	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	A Nilai 100 %	24,836,220
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	A Nilai 100 %	31,000,000
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21,920,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	A Nilai 100 %	21,920,000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				684,751,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	A Nilai 100 %	711,947,680
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131,833,250			131,840,000		
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				131,833,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</p> <p>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</p>	A Nilai 100 %	131,840,000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						4,413,739,250			1,364,378,140		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						2,689,378,050			564,378,140		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan	Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan yang dipelihara Jumlah pemurnian varietas tanaman pangan dan hortikultura Jumlah pemurnian varietas tanaman perkebunan Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Jumlah sidang pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan	Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan		85 %	1 Unit 1 Kali 1 Kali 1 VUB 1 Kali	85 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan	85 %	150,000,000
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan	Jumlah areal tanaman pangan yang diterapkan teknologi budidaya untuk peningkatan produksi Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan	85 %	27 Ha 1 Dokumen	85 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan	85 %	100,000,000	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan	Jumlah areal tanaman pangan yang difasilitasi sarana produksi budidaya Jumlah areal tanaman perkebunan yang dikembangkan Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan	85 %	60 Ha 40 Ha 1 Dokumen	85 %	1,474,361,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan	85 %	550,000,000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							8,683,308,730				5,176,181,290		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							112,036,940				114,929,290		
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola Pengendalian perda LP2B	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan	35,2 % 93 % 5 %	1 Dokumen 1 Paket	85 %	27,035,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	35,2 % 93 % 5 %	29,929,290	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan	35,2 % 93 % 5 %	1 Laporan 1 Kegiatan	85 %	85,001,940	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	35,2 % 93 % 5 %	85,000,000	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							8,571,271,790				5,061,252,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Persentase pembangunan prasarana pertanian		35,20 % 93 % 5 %	2 Unit	70 %	6,521,252,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	35,20 % 93 % 5 %	4,561,252,000
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Persentase pembangunan prasarana pertanian		35,20 % 93 % 5 %	0 Unit	70 %	150,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	35,20 % 93 % 5 %	0
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Persentase pembangunan prasarana pertanian		35,20 % 93 % 5 %	2 Unit	70 %	1,350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	35,20 % 93 % 5 %	250,000,000
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah BPP yang terfasilitasi kebutuhan operasionalnya	Persentase pembangunan prasarana pertanian		35,20 % 93 % 5 %	17 Unit 17 BPP	70 %	249,999,790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	35,20 % 93 % 5 %	250,000,000
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase pembangunan prasarana pertanian		35,20 % 93 % 5 %	0 Unit	70 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	35,20 % 93 % 5 %	0
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							204,522,840				158,921,500	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							204,522,840				158,921,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan	Jumlah areal lahan sawah yang terfasilitasi utk mengikuti program AUTP Jumlah hama tanaman perkebunan (tupal) yang dikendalikan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah obat-obatan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diadakan	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan		400 Ha	1000 Ha 5000 Ekor 400 Ha 1 Paket	400 Ha	204,522,840	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan	400 Ha	158,921.500
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					8,502,500				8,525,000			
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					8,502,500				8,525,000			
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses		100 %	5 Dokumen	100 %	8,502,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses	100 %	8,525,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					708,287,520				423,259,520			
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					708,287,520				423,259,520			
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan penyuluhan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih Jumlah Pos Penyuluhan Pertanian Nagari (Posluhnag) yang dikembangkan Jumlah program penyuluhan yang tersusun	Peningkatan kelas kelompok tani		34 poktan	4 Kategori 17 Unit 60 Orang 10 Posluhnag 18 Dokumen	34 poktan	152,559,520	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan kelas kelompok tani	34 poktan	152,559,520

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan petani Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Penas Tani dan Hari Krida Pertanian yang dilaksanakan Jumlah petani yang dilatih	Peningkatan kelas kelompok tani		34 poktan	3 Kategori 34 Unit 2 Kali 50 Petani	34 poktan	235,028,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kelas kelompok tani	34 poktan	150,000,000
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah laporan konstratani (DAK Non Fisik) Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas kelompok tani		34 poktan	204 Dokumen 0 Unit	34 poktan	320,700,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kelas kelompok tani	34 poktan	120,700,000
TOTAL												26,554,945,725				19,364,945,787		



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										6,369,523,439		6,539,644,473		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,662,573,325		5,767,404,359	
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										69,270,000		69,270,000
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselaikannya laporan tepat waktu	0,-,0 %,Nilai, % 100 A 100 % Nilai %	5 Dokumen	98 %	54,970,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDUKCAPIL)	0,-,0 %,Nilai, % 100 A 100 % Nilai %	54,970,000
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselaikannya laporan tepat waktu	0,-,0 %,Nilai, % 100 A 100 % Nilai %	6 Dokumen	98 %	14,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDUKCAPIL)	0,-,0 %,Nilai, % 100 A 100 % Nilai %	14,300,000
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,802,905,288		2,802,905,288
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Padang Pariaman	0,-,0 %,Nilai, % 100 A 100 % Nilai %	24 Orang/Bulan	100 %	2,700,905,288	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDUKCAPIL)	0,-,0 %,Nilai, % 100 A 100 % Nilai %	2,700,905,288

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDUKCAPIL)	Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan	Kabupaten Padang Pariaman		0,-,0 %,Nilai, % 100 A 100 % Nilai %	1 Tahun	100 %	102,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDUKCAPIL)	0,-,0 %,Nilai, % 100 A 100 % Nilai %	102,000,000
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								51,280,000					55,980,000
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya kemampuan aparatur		0,-,0 %,Nilai, % 1 Tahun	100 %	22,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,-,0 %,Nilai, %	22,000,000	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan aparatur		0,-,0 %,Nilai, % 30 Orang	100 %	5,280,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,-,0 %,Nilai, %	5,980,000	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan aparatur		0,-,0 %,Nilai, % 24 Orang	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,-,0 %,Nilai, %	28,000,000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,069,900,000					1,101,000,000
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		0,-,0 %,Nilai, % 20 Instalasi	100 %	10,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,-,0 %,Nilai, %	12,000,000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		0,-,0 %,Nilai, % 2 Paket	100 %	776,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,-,0 %,Nilai, %	784,800,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
													Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
																		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		0,-0 %	Nilai	200 Buah	100 %	27,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,-0 %	Nilai	30,000,000						
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		0,-0 %	Nilai	180 Eksemplar	100 %	7,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,-0 %	Nilai	7,200,000						
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		0,-0 %	Nilai	40 Laporan	100 %	36,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,-0 %	Nilai	36,000,000						
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		0,-0 %	Nilai	80 Laporan	100 %	211,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,-0 %	Nilai	231,000,000						
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															309,031,037			373,062,071			
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		0,-0 %	Nilai	2 Unit	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,-0 %	Nilai	18,000,000						
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		0,-0 %	Nilai	3 Paket	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,-0 %	Nilai	18,000,000						
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		0,-0 %	Nilai	3 Unit	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,-0 %	Nilai	291,031,035						

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah			100 %	46,031,037	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,0 %	46,031,036	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,175,612,000				1,175,612,000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		12 Bulan	100 %	101,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,0 %	101,000,000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		30 Laporan	100 %	151,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,0 %	151,200,000	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		12 Bulan	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,0 %	24,000,000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		36 Orang	100 %	899,412,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,0 %	899,412,000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								184,575,000				189,575,000	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya barang milik daerah		12 Bulan	90 %	119,445,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,0 %	123,445,000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah		3 Gedung	90 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0,0 %	31,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.12.02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		99 40 %	1 Kali	100 %	7,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	99 40 %	12,500,000
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		99 40 %	103 Nagari	100 %	38,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	99 40 %	62,100,000
2.12.02.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		99 40 %	1 PKS	100 %	8,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	99 40 %	8,600,000
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		99 40 %	1 Tahun	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	99 40 %	27,650,000
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								25,730,000					33,010,000
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		99 40 %	103 Nagari	100 %	11,405,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	99 40 %	11,405,000
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		99 40 %	30 Orang	100 %	14,325,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	99 40 %	21,605,000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								195,505,000					213,185,000
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil								94,400,000					99,990,000
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil		95 100 %	17000 Dokumen	100 %	9,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 %	13,800,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil		95 100 100 % % %	3220 Dokumen	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 100 % % %	70,000,000
2	12	03	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil		95 100 100 % % %	1 Dokumen	100 %	14,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 100 % % %	16,190,000
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								63,950,000					71,840,000
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Terlaksananya penyelenggaraan Pencatatan Sipil		95 100 100 % % %	1 Tahun	100 %	8,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 100 % % %	8,100,000
2	12	03	2.02	03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya penyelenggaraan Pencatatan Sipil		95 100 100 % % %	2 Kali	100 %	9,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 100 % % %	12,000,000
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya penyelenggaraan Pencatatan Sipil		95 100 100 % % %	103 Nagari	100 %	18,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 100 % % %	23,690,000
2	12	03	2.02	06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Terlaksananya penyelenggaraan Pencatatan Sipil		95 100 100 % % %	8 OPD/Lembaga	100 %	9,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 100 % % %	9,400,000
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Terlaksananya penyelenggaraan Pencatatan Sipil		95 100 100 % % %	140 Orang	100 %	18,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 100 % % %	18,650,000
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									37,155,000				41,355,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil		95 100 100 % %	1 Kali	90 %	16,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 100 % %	16,500,000
2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil		95 100 100 % %	17 KUA	90 %	11,555,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 100 % %	11,555,000
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil		95 100 100 % %	8 Orang	90 %	9,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 100 % %	13,300,000
2.12.04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						299,525,000					308,525,000
2.12.04.2.01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						9,480,000					9,480,000
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Buku data agregat kependudukan semester 1 dan 2		100 %	2 Dokumen	2 Buku	9,480,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	9,480,000
2.12.04.2.02			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						4,650,000					8,650,000
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adm induk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adm induk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Terlaksananya penataan PIAK		100 %	18 SOP	100 %	4,650,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	8,650,000
2.12.04.2.03			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						87,485,000					92,485,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan PIAK		100 %	26 OPD	100 %	5,640,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	5,640,000
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan PIAK		100 %	24 Laporan	100 %	64,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	69,250,000
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan PIAK		100 %	1 Laporan	100 %	17,595,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	17,595,000
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								197,910,000					197,910,000
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan SIAK		100 %	103 Laporan	100 %	17,940,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	17,940,000
2.12.04.2.04.02	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan SIAK		100 %	3000 Dokumen	100 %	4,720,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	4,720,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah petugas yang mengikuti Bimbingan teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diikuti/dilaksanakan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan SIAK		100 %	1 Laporan 6 Orang	100 %	175,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	175,250,000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								30,510,114					21,510,114
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan								30,510,114					21,510,114
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase database kependudukan yang disusun	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersusunnya profil kependudukan		90 %	1 Dokumen 1 Buku		9,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase database kependudukan yang disusun	90 %	0
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase database kependudukan yang disusun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Tersusunnya profil kependudukan		90 %	1 Dokumen 1 Buku		21,510,114	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase database kependudukan yang disusun	90 %	21,510,114
TOTAL									6,369,523,439					6,539,644,473



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										6,988,667,341		10,241,232,508			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,209,674,901		5,998,974,426		
2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										40,000,000		70,000,000	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		100 %	2 Laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	30,000,000
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		100 %	2 Laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	40,000,000
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,422,873,176		4,858,874,426	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	23 Orang/bulan	100 %	4,322,913,176	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4,755,194,426
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	5 Dokumen	100 %	99,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	103,680,000
2	13	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										4,950,000		20,000,000	
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 %	5 Orang	100 %	4,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	20,000,000
2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										194,852,750		353,500,000	
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	4 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	70,000,000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	2 Dokumen	100 %		5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	8,500,000
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %		8,860,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	15,000,000
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %		150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	200,000,000
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	100 %		20,992,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	50,000,000
2.13.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									19,918,225					80,000,000
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		100 %	4 Unit	100 %		19,918,225	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	80,000,000
2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									415,600,000					456,600,000
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		100 %	1 Laporan	100 %		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	25,000,000
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		100 %	1 Laporan	100 %		41,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	41,000,000
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		100 %	1 Laporan	100 %		8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		100 %	1 Laporan	100 %	351,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	375,600,000
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								111,480,750					160,000,000
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	3 Unit	100 %	86,990,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	110,000,000
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	1 Unit	100 %	24,490,000			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	50,000,000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA								70,000,000					171,195,092
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa								70,000,000					171,195,092
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase Nagari yang tertata	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah penyelenggaraan penataan Nagari		100 %	5 Desa	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang tertata	100 %	80,000,000
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase Nagari yang tertata	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Jumlah penyelenggaraan penataan Nagari		100 %	5 Desa	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang tertata	100 %	33,062,500
2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Persentase Nagari yang tertata	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah penyelenggaraan penataan Nagari		100 %	5 Desa	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang tertata	100 %	25,000,000
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Persentase Nagari yang tertata	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Jumlah penyelenggaraan penataan Nagari		100 %	1 Unit	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang tertata	100 %	33,132,592
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								20,000,000					61,000,000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa								20,000,000					61,000,000
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Nagari yang menjalin kejasama antar Nagari	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Nagari yang menjalin kejasama antar Nagari		100 %	4 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang menjalin kejasama antar Nagari	100 %	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0Persentase Nagari yang menjalin kejasama antar Nagari	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase Nagari yang menjalin kejasama antar Nagari		100 %	4 Dokumen	100 %		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0Persentase Nagari yang menjalin kejasama antar Nagari	100 %	26,000,000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								510,000,000						2,468,118,755
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								510,000,000						2,468,118,755
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Nagari yang telah dibina		100 %	4 Dokumen	100 %	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	44,634,375
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Nagari yang telah dibina		100 %	2 Dokumen	100 %	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	52,222,880
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Nagari yang telah dibina		100 %	4 Dokumen	100 %	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	129,340,500
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase Nagari yang telah dibina		100 %	1 Dokumen	100 %	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	54,222,500
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Nagari yang telah dibina		100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	28,830,500
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Nagari yang telah dibina		100 %	1 Laporan	100 %		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	1,850,000,000
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Nagari yang telah dibina		100 %	1 laporan	100 %	70,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	22,150,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Persentase Nagari yang telah dibina		100 %	1 Dokumen	100 %	170,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	33,062,500
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Nagari yang telah dibina		100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	26,450,000
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Nagari yang telah dibina	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Nagari yang telah dibina		100 %	25 Orang	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	204,061,750
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Nagari yang telah dibina	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Nagari yang telah dibina		100 %	1 Dokumen	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	23,143,750
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1,178,992,440					1,541,944,235
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,178,992,440					1,541,944,235
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Iden tifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat		103 Nagari	2 Dokumen	103 Nagari	14,992,105	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	103 Nagari	26,448,677
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat		103 Nagari	2 Dokumen	103 Nagari	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	103 Nagari	25,126,178
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat		103 Nagari	3 Lembaga	103 Nagari	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	103 Nagari	59,442,144

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat		103 Nagari	5 Unit	103 Nagari		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	103 Nagari	64,802,368
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat		103 Nagari	5 Dokumen	103 Nagari	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	103 Nagari	66,124,868
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat		103 Nagari	1 Laporan	103 Nagari	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	103 Nagari	50,000,000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat		103 Nagari	1 Laporan	103 Nagari	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	103 Nagari	50,000,000
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat		103 Nagari	1 Dokumen	103 Nagari	1,074,000,335	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	103 Nagari	1,200,000,000
TOTAL									6,988,667,341					10,241,232,508



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan		100 %	5 Orang	100 %	6,980,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	15,980,000
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							157,600,808						215,340,805
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Umum Kantor Disiapkan		100 %	1 Tahun	100 %	23,740,808	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	34,480,805
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Umum Kantor Disiapkan		100 %	1 Paket	100 %	9,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	15,500,000
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Umum Kantor Disiapkan		100 %	0 Dokumen 1 Tahun	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	7,500,000
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Umum Kantor Disiapkan		100 %	0 Laporan 1 Tahun	100 %	1,860,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	1,860,000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Umum Kantor Disiapkan		100 %	0 Laporan 1 Tahun	100 %	116,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	156,000,000
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								24,490,000					35,490,000
2	14	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah		100 %	0 Unit 1 Paket	100 %	24,490,000			Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	35,490,000
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								360,587,615					374,587,615

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan		100 %	0 Laporan 1 Tahun	100 %	15,644,815	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	22,644,815
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan		100 %	0 Laporan 1 Tahun	100 %	51,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	53,800,000
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan		100 %	0 Laporan 1 Dokumen	100 %	9,620,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	14,620,000
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan		100 %	0 Laporan 12 Orang	100 %	283,522,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	283,522,800
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								108,618,898					137,618,898
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Aset Kantor Disiapkan		100 %	0 Unit 1 Tahun	100 %	48,432,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	55,432,250
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Aset Kantor Disiapkan		100 %	0 Unit 1 Tahun	100 %	60,186,648	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	82,186,648

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					178,345,000			212,320,000				
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					62,750,000			85,325,000				
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kebijakan yang disusun		2.34 %	0 Dokumen 15 Orang	60 %	17,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	2.34 %	22,500,000
2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kebijakan yang disusun		2.34 %	0 Dokumen 1 Kelompok PIK-R	60 %	12,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	2.34 %	17,500,000
2	14	02	2.01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kebijakan yang disusun		2.34 %	0 Dokumen 1 Kelompok PIK-R	60 %	11,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	2.34 %	14,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase dokumen kebijakan yang disusun		2.34 %	0 Organisasi 1 kali	60 %	11,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Total Fertility Rate (TFR)	2.34 %	16,325,000
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Persentase dokumen kebijakan yang disusun		2.34 %	0 Laporan 35 Orang	60 %	9,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Total Fertility Rate (TFR)	2.34 %	14,500,000
2.14.02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								115,595,000					126,995,000
2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah orang yang tersosialisasi tentang Pengendalian Total Fertility Rate (TFR)	Persentase dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun		2.34 %	35 Orang	50 %	15,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Total Fertility Rate (TFR)	2.34 %	20,650,000
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Persentase dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun		2.34 %	0 Dokumen 71 Orang RT	50 %	3,995,000	DAK Non Fisik - BOKB-KB		Persentase Total Fertility Rate (TFR)	2.34 %	3,995,000
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun		2.34 %	0 Dokumen 12 Kali Evaluasi	50 %	96,350,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Total Fertility Rate (TFR)	2.34 %	102,350,000
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								4,327,574,400					3,833,614,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					1,263,215,000				703,415,000				
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPB kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		65.75 %	0 Organisasi 1 Kali	100 %	4,375,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	4,375,000
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah dukungan bahan media KIE (Momentum dan kearifan lokal) Jumlah Pertemuan Penyuluhan KB Yang dilaksanakan	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		65.75 %	0 Dokumen 1 Kali 1 Kali	100 %	38,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	42,500,000
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPB Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		65.75 %	0 Dokumen 1 Kali	100 %	70,640,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	70,640,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		65.75 %	0 Laporan 17 Kali	100 %	265,200,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	265,200,000
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang disediakan jasa Listrik dan Air Jumlah Balai Penyuluhan KB Terpuhinya biaya Operasional Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Orang Kader Pengelolaan data Jumlah Pertemuan dalam pembinaan Kader KB Jumlah Pertemuan Orientasi Tenaga Lini Lapangan Yang Dilaksanakan Jumlah Pertemuan Penyuluhan KB Yang dilaksanakan Jumlah Tenaga keamanan dan pramusaji di balai penyuluhan yang disediakan	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		65.75 %	17 Balai Penyuluhan 17 Buah 0 Laporan 408 Orang 68 Kali 6 Kali 68 Kali 34 Orang	100 %	833,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	265,200,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Audit stanting Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen, program KB Nasional	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		65.75 %	2 Kali 0 Laporan 40 Orang	100 %	51,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	55,500,000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								517,150,000					529,340,000
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Pembinaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		65.75 %	0 Organisas 34 Orang	100 %	11,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	17,690,000
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)		Persentase Pembinaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		65.75 %		100 %	505,650,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	511,650,000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								2,112,209,400					2,143,859,400
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB		65.75 %	0 Laporan 44 Klinik	100 %	19,800,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	19,800,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Akseptor Cabut Implan Jumlah Akseptor Implan Jumlah Akseptor IUD Jumlah Akseptor MOW Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB		65.75 %	33 Orang 1602 Orang 551 Orang 178 Orang 0 Orang	100 %	966,539,400	DAK Non Fisik- BOKB-KB		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	966,539,400
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Persentase PUS Keluarga miskin yang mendapatkan Pelayanan dan Alat kontrasepsi KB	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB		65.75 %	0 Dokumen 65 %	100 %	12,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	18,500,000
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Gudang Obat kontrasepsi KB beserta jaringannya yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan KB Jumlah Operasional Pendamping DAK Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB		65.75 %	8 Balai Penyuluhan 1 Tahun 0 Unit	100 %	1,055,670,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	1,058,320,000
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah klinik KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang mendapat pembinaan Jumlah koordinasi pelayanan KB di faskes Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah pembinaan pelayanan pelayanan KB di faskes	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB		65.75 %	47 Klinik 1 Kali 0 Laporan 22 Klinik	100 %	26,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	31,450,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB		65.75 %	75 Orang	100 %	10,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	15,500,000
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah pelayanan KB MKJP Non Kontrap bagi PUS (safari KB di Kecamatan)	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB		65.75 %	0 Laporan 211 Orang	100 %	10,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	17,500,000
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB		65.75 %	17 Orang	100 %	10,250,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	16,250,000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							435,000,000			457,000,000				
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah kegiatan gerakan IBI KB KES, TNI KB KES dan PKK KB KES yang dilaksanakan Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		65.75 %	4 Kali 0 Organisasi	13 %	36,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	44,500,000
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Orang Pertemuan Lintas Sektoral di Kampung KB	Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		65.75 %	0 Dokumen 1 Kali	13 %	11,250,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	18,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Jumlah pertemuan kelompok berbasis tribina keluarga yang dilaksanakan Jumlah Pertemuan Kelompok Kerja di Wilayah Kampung KB	Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		65.75 %	0 Kampung 21 Kali 21 Kali	13 %	362,250,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	362,250,000
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Sergab Kakab dilaksanakan	Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		65.75 %	0 Laporan 3 Kali	13 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65.75 %	32,000,000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								1,927,580,000					1,970,850,000
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								1,927,580,000					1,970,850,000
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk Jumlah pertemuan kelompok UPPKS yang dilaksanakan	Persentase kelompok Keluarga yang dibina		12 Per 1000	0 Kelompok 1 Kali	72 %	9,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	12 Per 1000	13,200,000
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Pertemuan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga	Persentase kelompok Keluarga yang dibina		12 Per 1000	0 Laporan 1 Kali	72 %	9,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	12 Per 1000	14,600,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah orang tenaga kader yang dilatih	Persentase kelompok Keluarga yang dibina		12 Per 1000	0 Orang 35 Orang	72 %	9,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	12 Per 1000	14,350,000
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)		Persentase kelompok Keluarga yang dibina		12 Per 1000		72 %	1,841,330,000			Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	12 Per 1000	1,846,330,000
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)		Persentase kelompok Keluarga yang dibina		12 Per 1000		72 %	8,750,000			Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	12 Per 1000	14,450,000
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	Jumlah kegiatan Perlombaan Program KKBPK yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok Keluarga yang dibina		12 Per 1000	17 Lomba 0 Laporan	72 %	9,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	12 Per 1000	13,750,000
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah orang Duta Remaja Mahasiswa yang terpilih bidang KB tingkat Kabupaten, Propinsi dan Tingkat Nasional	Persentase kelompok Keluarga yang dibina		12 Per 1000	0 Laporan 42 Orang	72 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	12 Per 1000	54,170,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
TOTAL											11,818,060,111				11,410,585,108



DINAS PERHUBUNGAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2																			
2	15																		
2	15	01																	
2	15	01	2.01																
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	5 Dokumen	1 Tahun	112,644,776	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	123,909,253	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	3 Dokumen	1 Tahun	120,413,289	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	132,454,617	
2	15	01	2.02																
2	15	01	2.02																
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	25 Orang/bulan 25 Orang/bulan	1 Tahun	2,563,644,771	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	2,820,009,248	
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	0 Dokumen 12 Bulan	1 Tahun	140,040,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	154,044,000	
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	2 Dokumen	1 Tahun	39,845,415	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	43,829,956	
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	2 Laporan	1 Tahun	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	16,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	2 Laporan	1 Tahun	16,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	17,600,000
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								64,940,000				71,434,000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	100 Paket	1 Tahun	55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	60,500,000
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	14 Orang	1 Tahun	9,940,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	10,934,000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								148,597,000				163,456,700	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	1 Paket	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	11,000,000
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	0 Dokumen 1 Tahun	1 Tahun	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	4,400,000
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	1 Thn 0 Laporan	1 Tahun	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	16,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	0 Laporan 1 Thn	1 Tahun	119,597,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	131,556,700
2.15.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								132,461,740					145,707,914
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	1 Paket 0 Unit	1 Tahun	87,124,360	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	95,836,796
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	1 Thn 0 Unit	1 Tahun	45,337,380	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	49,871,118
2.15.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,860,924,900					2,047,017,390
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan ATK, Prangko, Material, Benda Pos Lainnya cetak dan Penggandaan yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	0 Laporan 1 Thn	1 Tahun	16,280,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	17,908,550
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	0 Laporan 1 Thn	1 Tahun	158,350,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	174,185,000
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	0 Laporan 1 Thn	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	11,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	70 org/thn	1 Tahun	1,676,294,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	1,843,923,840
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								250,395,000				210,468,500	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	6 Unit	1 Tahun	225,395,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	182,968,500
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	0 Unit 1 Thn	1 Tahun	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	16,500,000
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	Jumlah penyediaan rehabilitas sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 A 100 % Nilai %	1 Thn 0 Unit	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	11,000,000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA J)								13,818,138,190				15,264,918,009	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLA JKabupaten/Kota								103,199,900				113,519,890	
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLA J Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLA J Kabupaten/Kota Terciptanya Pelaksanaan Rencana induk jaringan LLA J	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLA JKabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Laporan 27 Kegiatan	1 Tahun	103,199,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	113,519,890
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								10,874,471,690				14,822,256,119	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Unit 100 %	1 Tahun	2,169,769,720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	1,946,746,692

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Unit 1 Thn	1 Tahun	8,549,762,580	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	12,705,076,098
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Penyediaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Thn 0 Unit	1 Tahun	154,939,390	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	170,433,329
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								2,729,306,600					206,866,000
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Unit 1 Thn	1 Tahun	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	55,000,000
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Dokumen 1 Thn	1 Tahun	2,679,306,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	151,866,000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								26,160,000					28,776,000
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Unit 1 Paket	1 Tahun	7,070,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	7,777,000
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Laporan 1 Paket	1 Tahun	19,090,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	20,999,000
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								25,000,000					27,500,000
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Dokumen 1 Thn	1 Tahun	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	22,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi terlasananya fungsi sesuai dengan keterikatan kerja	Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Laporan 1 Thn	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	5,500,000
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLA Jdi Jalan							50,000,000		55,000,000				
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terciptanya Pengawasan Terhadap Turun Naiknya Angkutan Orang dan Barang	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Laporan 1 Thn	1 Tahun	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	55,000,000
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							10,000,000		11,000,000				
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terciptanya Pelayanan Angkutan Orang dan Barang yang Lancar	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Laporan 1 Paket	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	11,000,000
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							60,000,000		66,000,000				
2	15	05	2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian							45,000,000		49,500,000				
2	15	05	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Terciptanya Aturan untuk Mendorong Kelancaran Rencana Kerja di Bidang Perkeretaapian		16 Angka (Jumlah Kecelakaan)	0 Dokumen 1 Paket	1 Tahun	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	16 Angka (Jumlah Kecelakaan)	49,500,000
2	15	05	2.03		Penetapan Jaluran Jalur Kereta Api yang Bringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							15,000,000		16,500,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	05	2.03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		16 Angka (Jumlah Kecelakaan)	0 Dokumen 1 Thn	1 Tahun	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	16 Angka (Jumlah Kecelakaan)	16,500,000
TOTAL											19,343,045,081			21,277,349,587				



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										7,687,452,080		12,093,833,645		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,224,006,807		5,210,642,578		
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										104,875,000		112,745,625	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	4 Dokumen 2 Dokumen	98 %	69,150,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	75,245,625
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	2 Laporan	98 %	35,725,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	37,500,000
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,835,188,237		3,174,547,600	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 A, 100 % 100 A 100 % %	Nilai, Nilai orang/bulan	100 %	2,731,388,237	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	100 A, 100 % 100 A 100 % %	Nilai, Nilai 3,002,050,000
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 A, 100 % 100 A 100 % %	Nilai, Nilai Dokumen	100 %	103,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoraat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	100 A, 100 % 100 A 100 % %	Nilai, Nilai 172,497,600
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										131,180,400		167,080,871	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	5 Item 5 Paket	100 %		3,006,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	1,996,500
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Item Perlatan dan Mesin Lainnya	100 %		7,490,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	9,075,000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jangka waktu kebutuhan cetak dan Penggandaan Dokumen Perkantoran	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	12 Bulan	100 %		2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	4,480,000
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah porsi makanan dan Minuman Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	100 Porsi	100 %		3,495,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	5,724,371
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah penyediaan logistik makan/minum rapat Dinas	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan 1000 Porsi	100 %		114,689,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	145,805,000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								90,932,170						563,825,000
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100 A, 100 % 100 A 100 %	Nilai, % Nilai	100 %		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	100 A, 100 % 100 A 100 %	Nilai, % Nilai 400,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (DISKOMINFO)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100.A,100 %	Nilai,%	100 %	68,880.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (DISKOMINFO)	100.A,100 %	Nilai,%	64,000.000
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (DISKOMINFO)	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100.A,100 %	Nilai,%	100 %	22,052,170	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (DISKOMINFO)	100.A,100 %	Nilai,%	99,825.000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								953,163,800						1,009,501,503
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (DISKOMINFO)	Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materai, benda pos lainnya	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.A,100 %	Nilai,%	100 %	21,364,760	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (DISKOMINFO)	100.A,100 %	Nilai,%	32,302,463

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	Jumlah tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.A,100 % 100 A 100 %	Nilai,% 28 orang	100 %	931,799,040			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	100.A,100 % 100 A 100 %	Nilai,% 977,199,040
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								108,667,200			182,941,979		
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.A,100 % 100 A 100 %	Nilai,% 12 Unit	100 %	72,037,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	100.A,100 % 100 A 100 %	Nilai,% 113,572,800
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	Jangka waktu Pemeliharaan berkala peralatan kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100.A,100 % 100 A 100 %	Nilai,% 12 Bulan 6 Unit	100 %	12,140,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	100.A,100 % 100 A 100 %	Nilai,% 14,919,179

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,100 % 100 A 100 %	Nilai, Nilai	100 %	24,490,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)	100,100 % 100 A 100 %	Nilai, Nilai	54,450,000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								888,201,650						1,859,560,118
2.16.02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								888,201,650						1,859,560,118
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah sarana informasi pembangunan daerah yang dikelola	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	1 Dokumen 6 Media	95 %	54,393,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	88 %		100,669,919
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Terlaksananya layanan informasi dan dokumentasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	2 Dokumen 81 PPID	95 %	54,513,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	88 %		157,757,919
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Masyarakat Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	5 Kelompok 50 Orang	95 %	139,357,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	88 %		102,932,280
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	40 Dokumen 45 Kerjasama	95 %	639,937,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	88 %		1,498,200,000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								2,575,243,623						5,023,630,949
2.16.03	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1,954,188,146						4,055,874,335

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Kapasitas Bandwith/Internet Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang TIK serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana komunikasi dan informasi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62 %	500 Mbps 72 Unit	70 %	1,954,188,146	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	62 %	4,055,874,335
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								621,055,477				967,756,614	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E-Government)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62 %	57 % 1 Dokumen	80 %	28,878,350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	62 %	52,633,639
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah pengelolaan Akses Disaster Recovery Server/Mirroring Server Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Persentase pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E-Government)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62 %	4 Rak Server 4 Unit	80 %	262,388,217	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	62 %	216,128,965
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Pengelolaan data Padang Pariaman Dalam Sebuah Sistem Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E-Government)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62 %	1 Pusdatin Pemda 32 Perangkat Daerah	80 %	23,847,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	62 %	187,629,750
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Persentase Aplikasi Interaktif dan Integrasi utk mewujudkan E-Government dalam rangka menuju Smart City di Kabupaten Padang Pariaman yang terwujud	Persentase pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E-Government)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62 %	7 Unit 57 %	80 %	32,171,810	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	62 %	159,605,292
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City Persentase Kematangan Smart City	Persentase pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E-Government)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62 %	7 Dokumen 84 %	80 %	209,954,660	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	62 %	193,135,137

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah pengawasan retribusi menara telekomunikasi, Sistem mapping menara telekomunikasi dan identifikasi menara telekomunikasi	Persentase pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E-Government)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62 %	1 Dokumen 160 Menara	80 %	63,814,940	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	62 %	158,623,831
2.20.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							28,600,000					56,464,246
2.20.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							28,600,000					56,464,246
2.20.02.2.01.		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							28,600,000					56,464,246
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Jumlah Buku/Laporan data Statistik sektoral Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Persentase ketersediaan Data Sektoral	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ada Tersedia	2 Buku 1 Dokumen	100 %	28,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada Tersedia	56,464,246
2.21.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							40,830,910					73,380,904
2.21.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							40,830,910					73,380,904
2.21.02.2.01.		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							40,830,910					73,380,904
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Operasional dan dukungan persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	1 Laporan 20 %	2 Indeks Keamanan	40,830,910	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	15 %	73,380,904
TOTAL									7,756,882,990					12,223,678,795



DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	terlaksananya perjanjian kerja sama bagi perusahaan		51 %	27 Perusahaan	27 perusahaan	81,077,213	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	51 %	50,000,000
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jam sostek serta Pengupahan	terlaksananya perjanjian kerja sama bagi perusahaan		51 %	1 Laporan	27 perusahaan	27,941,149	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	51 %	70,000,000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								79,998,420					90,000,000
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	terlaksananya pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 daerah kabupaten/kota		51 %	10 Perkara	10 perkara	33,420,084	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	51 %	50,000,000
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	terlaksananya pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 daerah kabupaten/kota		51 %	1 Lembaga	10 perkara	46,578,336	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	51 %	40,000,000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								4,917,034,100					905,800,000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								85,000,000					100,000,000
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								85,000,000					100,000,000
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota		40 %	45 Unit Usaha	45 unit usaha	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi aktif	40 %	50,000,000
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	terlaksananya pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota		40 %	45 Unit Usaha	45 unit usaha	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi aktif	40 %	50,000,000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								76,999,800					85,000,000
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								76,999,800					85,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase koperasi sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kota/kabupaten		40 %	50 Unit Usaha	50 unit	41,999,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase koperasi sehat	40 %	45,000,000
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase koperasi sehat	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kota/kabupaten		40 %	30 Unit Usaha	50 unit	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase koperasi sehat	40 %	40,000,000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								2,480,699,750					400,800,000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								2,480,699,750					400,800,000
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	persentase koperasi yang berkualitas	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	terlaksananya koperasi dan UKM yang dilatih wilayah keanggotaannya di kota/kabupaten		40 %	160 Orang	96 unit usaha	2,480,699,750	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		persentase koperasi yang berkualitas	40 %	400,800,000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								35,000,000					40,000,000
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								35,000,000					40,000,000
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan Koperasi serta Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dan Kewirausahaan		40 %	35 Orang	30 unit usaha	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase koperasi yang melaksanakan RAT	40 %	40,000,000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								143,000,000					160,000,000
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								143,000,000					160,000,000
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah Unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	meningkatnya produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota		0.9 %	36000 Unit Usaha	36000 unit usaha	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0.9 %	55,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.17.07.2.01.02	Pembudayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	meningkatkan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota		0.9 %	30 Unit Usaha	36000 unit usaha	48,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0.9 %	55,000,000
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	meningkatkan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota		0.9 %	30 Unit Usaha	36000 unit usaha	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0.9 %	50,000,000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								2,096,334,550					120,000,000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								2,096,334,550					120,000,000
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase UMKM	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan Teknologi		97.44 %	160 Unit Usaha	160 unit usaha	2,096,334,550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM	97.44 %	120,000,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								7,174,987,149					7,306,841,493
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,136,996,914					6,411,841,493
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								95,000,000					100,000,000
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100 A 100 % Nilai %	5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	60,000,000
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100 A 100 % Nilai %	3 Laporan	5 Dokumen	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	40,000,000
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,002,649,193					5,316,841,493

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 A 100 % Nilai %	48 Orang/bulan 48 orang	4,853,821,493	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	5,123,841,493	
3	30	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 A 100 % Nilai %	1 Dokumen	48 orang	123,835,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	166,000,000
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 A 100 % Nilai %	2 Laporan	48 orang	24,992,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	27,000,000
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah						50,000,000						45,000,000	
3	30	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100 A 100 % Nilai %	10 Orang	10 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	45,000,000
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						131,939,000						150,000,000	
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100 A 100 % Nilai %	12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	3,000,000
3	30	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100 A 100 % Nilai %	12 Laporan	12 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	17,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100 A 100 % Nilai %	12 Laporan	12 Dokumen	104,939,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	130,000,000
3 30 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								76,585,694				40,000,000	
3 30 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100 A 100 % Nilai %	4 Unit	4 unit	76,585,694	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	40,000,000
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								594,221,890				560,000,000	
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100 A 100 % Nilai %	12 Laporan	12 Laporan	24,995,310	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	30,000,000
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100 A 100 % Nilai %	12 Laporan	12 Laporan	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	80,000,000
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100 A 100 % Nilai %	12 Laporan	12 Laporan	479,226,580	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	450,000,000
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								186,601,137				200,000,000	
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100 A 100 % Nilai %	16 Unit	16 Unit	99,996,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	130,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100 A 100 % Nilai %	63 Unit	16 Unit	46,317,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	30,000,000
3	30	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100 A 100 % Nilai %	6 Unit	16 Unit	40,286,837	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	40,000,000
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								549,997,925					350,000,000
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								399,999,840					200,000,000
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang Kondusif	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan		1 Pasar	2 Unit	2 Unit	399,999,840	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Pasar yang Kondusif	1 Pasar	200,000,000
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								149,998,085					150,000,000
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang Kondusif	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Pasar	1 Dokumen	1 Dokumen	149,998,085	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Pasar yang Kondusif	1 Pasar	150,000,000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								117,999,880					130,000,000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								57,999,910					65,000,000
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		42 %	1 Laporan	1 Dokumen	57,999,910	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	42 %	65,000,000
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								59,999,970					65,000,000
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		42 %	1 Laporan	1 Laporan	59,999,970	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	42 %	65,000,000
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								69,992,615					75,000,000
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								69,992,615					75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.2.07.13.0000 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Terbinanya dan Berkembangnya Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		2 Pedagang	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku usaha	69,992,615	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	2 Pedagang	75,000,000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								199,999,865					220,000,000
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								199,999,865					220,000,000
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pasar tertib ukur	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku		1 Pasar	1500 Unit	12.9 %	199,999,865	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pasar tertib ukur	1 Pasar	220,000,000
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								99,999,950					120,000,000
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								99,999,950					120,000,000
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terwujudnya pasar BANA	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		1 Pasar	15 UMKM	15 UMKM	99,999,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pasar BANA	1 Pasar	120,000,000
TOTAL									12,759,237,301					8,982,641,493



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
DAN PERINDUSTRIAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											5,596,349,119	4,655,353,744	
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,877,960,029	4,000,560,879	
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											92,464,250	27,923,000
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan Jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPPT (Lppd, Lakip) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	5 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	5 Dokumen	8 Dokumen	49,684,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan Jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPPT (Lppd, Lakip) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	13,923,000
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan Jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPPT (Lppd, Lakip) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	5 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	3 Laporan	8 Dokumen	42,780,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan Jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPPT (Lppd, Lakip) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	14,000,000
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,365,416,979	3,569,363,999
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan 1 Dokumen	12 Orang/bulan	1 Laporan	3,360,416,979	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan 1 Dokumen	3,562,363,999
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan 1 Dokumen	7,000,000
2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											112,940,000	23,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bim tek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pakaet pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		6 orang 6 orang 40 Paket 40 Paket	40 Paket	6 orang	65,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bim tek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pakaet pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 orang 6 orang 40 Paket 40 Paket	8,300,000
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bim tek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pakaet pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		6 orang 6 orang 40 Paket 40 Paket	6 Orang	6 orang	47,840,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bim tek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pakaet pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 orang 6 orang 40 Paket 40 Paket	15,200,000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								542,446,970					134,523,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	5 Paket	5 paket	205,409,970	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	8,000,000
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	180 Paket	5 paket	67,150,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	9,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	1 Paket	5 paket	7,877,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	10,000,000
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	1 Dokumen	5 paket	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	8,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	1 Laporan	5 paket	15,550,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	9,523,000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	12 Laporan	5 paket	236,079,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	85,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	1 Dokumen	5 paket	5,381.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD	1800 exemplar 5000 lembar 180 buah 20 orang 700 porsi 5 paket 1 Arsip OPD	5,000,000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								468,730,780			177,250,880		
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Jumlah penyediaan jasa surat menyurat Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 bulan 12 bulan 12 bulan	1 Laporan	100 %	37,060,160	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Jumlah penyediaan jasa surat menyurat Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	12 bulan 12 bulan 12 bulan	30,100,000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Jumlah penyediaan jasa surat menyurat Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 bulan 12 bulan 12 bulan	1 Laporan	100 %	84,135,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Jumlah penyediaan jasa surat menyurat Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	12 bulan 12 bulan 12 bulan	42,000,000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Jumlah penyediaan jasa surat menyurat Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 Laporan	100 %	347,535,120	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Jumlah penyediaan jasa surat menyurat Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	12 bulan 12 bulan 12 bulan	105,150,880
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								295,961,050			68,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	5 Unit	94 %	198,329,350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	31,000,000
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1 Unit	94 %	81,551,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	24,000,000
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1 Unit	94 %	16,080,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	13,000,000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								81,180,000				112,811,640	
2.18.02	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								11,180,000				41,934,920	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah bulan dan dokumen Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		3 Perbup	2 Dokumen	1 Dokumen		11,180,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Perbup	41,934,920
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								70,000,000						70,876,720
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bulan dan dokumen Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Kegiatan Usaha 1 Dokumen	1 Dokumen		35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,500,000
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1. Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	jumlah bulan dan dokumen Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,376,720
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								35,000,000						144,293,958
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								35,000,000						144,293,958
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Event Promosi Investasi Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan dokumen dan Event Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		4 Event 4 Event 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Event Promosi Investasi Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal	4 Event 4 Event 1 Dokumen 1 Dokumen	54,293,958

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Event Promosi Investasi Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah bulan dokumen dan Event Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		4 Event 4 Event 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Event Promosi Investasi Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal	4 Event 4 Event 1 Dokumen 1 Dokumen	90,000,000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								173,563,840				154,132,183	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								173,563,840				154,132,183	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah bulan terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1000 Pelaku usaha	1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku usaha	108,968,590	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku usaha	54,132,183
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah bulan terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1000 Pelaku usaha	1 Kegiatan Usaha	1000 Pelaku usaha	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku usaha	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah bulan terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1 Kegiatan 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha 1 Kegiatan 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	1 Kegiatan Usaha.	1 kegiatan	48.300.000	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan	1 Kegiatan 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha 1 Kegiatan 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	50.000.000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah bulan terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1 Kegiatan 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha 1 Kegiatan 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	103 Pelaku Usaha	1 kegiatan	248.494.000	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan	1 Kegiatan 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha 1 Kegiatan 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	123.740.000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah bulan terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1 Kegiatan 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha 1 Kegiatan 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	1 Kegiatan Usaha 1 kegiatan	96.600.000	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan	1 Kegiatan usaha 1000 Pelaku usaha 1 Kegiatan usaha 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	40,300,411	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					35,251,250			29,514,673				
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					35,251,250				29,514,673			
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah bulan terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		1 Dok 1 Dokumen	1 Dokumen 1 dokumen	1 dokumen	35,251,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dok 1 Dokumen	29,514,673
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					17,253,857,000				14,621,307,054			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					17,243,857,000				14,457,336,647			
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					17,243,857,000				14,457,336,647			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda Jumlah IKM yang disertifikasi Persentase pembangunan sentra IKM cokelat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Sentra	1 Dokumen	1 Sentra	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda Jumlah IKM yang disertifikasi Persentase pembangunan sentra IKM cokelat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan	1 Dokumen 1 Sentra	0
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda Jumlah IKM yang disertifikasi Persentase pembangunan sentra IKM cokelat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Sentra	1 Dokumen	1 Sentra	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda Jumlah IKM yang disertifikasi Persentase pembangunan sentra IKM cokelat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan	1 Dokumen 1 Sentra	200,000,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda Jumlah IKM yang disertifikasi Persentase pembangunan sentra IKM cokelat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Sentra	1 Dokumen	1 Sentra	17,188,857,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Industri Kecil dan Menengah - Penugasan - Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda Jumlah IKM yang disertifikasi Persentase pembangunan sentra IKM cokelat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan	1 Dokumen 1 Sentra	14,257,336,647
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						5,000,000			113,970,407		
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						5,000,000			113,970,407		
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi. Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS Jumlah IKM yang bersertifikat di bidang industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi. Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Jumlah bulan terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi. Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS Jumlah IKM yang bersertifikat di bidang industri	1 Dokumen 1 Dokumen	113,970,407
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						5,000,000			50,000,000		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						5,000,000			50,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Data Industri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah bulan terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Data Industri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000
TOTAL											22,850,206,119			19,276,660,798				



DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
2	19									5,077,200,000						3,036,481,017		
2	19	02								1,500,000,000						413,613,700		
2	19	02	2.01							1,350,000,000						413,613,700		
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri		55.55 % 00,17 %	40 Orang	170 Orang	140,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55.55 % 00,17 %	15,000,000
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Wirausaha Muda yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri		55.55 % 00,17 %	40 Orang	170 Orang	165,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55.55 % 00,17 %	15,000,000
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Pemuda Kader Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri		55.55 % 00,17 %	40 Orang	170 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55.55 % 00,17 %	0
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri		55.55 % 00,17 %	40 Orang	170 Orang	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55.55 % 00,17 %	0
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri		55.55 % 00,17 %	4 Unit	170 Orang	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55.55 % 00,17 %	0
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri		55.55 % 00,17 %	40 Orang	170 Orang	295,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55.55 % 00,17 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	02	2.01	09		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Jumlah Pemuda Berkarakter Mandiri		55.55 % 00,17 %	34 Orang	170 Orang	450,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55.55 % 00,17 %	368,613,700
2	19	02	2.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							150,000,000						0
2	19	02	2.02	02		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Organisasi Pemuda Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Organisasi Pemuda Aktif	1 Dokumen	0
2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							3,577,200,000						2,622,867,317
2	19	03	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							1,842,200,000						602,867,317
2	19	03	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikat		370 Orang	0 Unit	100 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	0
2	19	03	2.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikat		370 Orang	30 Unit	100 Orang	1,742,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	602,867,317
2	19	03	2.02			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							895,000,000						1,350,000,000
2	19	03	2.02	01		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang mewakili daerah ke tingkat provinsi		370 Orang	1 Dokumen	5 Cabang Olahraga	125,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	300,000,000
2	19	03	2.02	02		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang mewakili daerah ke tingkat provinsi		370 Orang	5 Dokumen	5 Cabang Olahraga	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	550,000,000
2	19	03	2.02	03		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang Olahraga yang mewakili daerah ke tingkat provinsi		370 Orang	800 Orang	5 Cabang Olahraga	660,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	500,000,000
2	19	03	2.03			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							80,000,000						270,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
																						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
																											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Jumlah pengembangan atlet dibina di daerah dan provinsi termasuk kebutuhan khusus		370 Orang	150 Orang	5 Cabang Olahraga	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	250,000,000																	
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Jumlah pengembangan atlet dibina di daerah dan provinsi termasuk kebutuhan khusus		370 Orang	600 Orang	5 Cabang Olahraga	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	0																	
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah pengembangan atlet dibina di daerah dan provinsi termasuk kebutuhan khusus		370 Orang	3 Dokumen	5 Cabang Olahraga	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	20,000,000																	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										700,000,000			50,000,000																	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang berprestasi		370 Orang	2 Organisasi	38 Cabang Olahraga	700,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	0																	
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Olahraga yang berprestasi		370 Orang	1 Dokumen	38 Cabang Olahraga	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	50,000,000																	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										60,000,000			350,000,000																	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pengembangan olahraga masyarakat		370 Orang	1 Dokumen	6 Kegiatan	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	100,000,000																	
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pengembangan olahraga masyarakat		370 Orang	1 Laporan	6 Kegiatan	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	50,000,000																	
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Jumlah Pengembangan olahraga masyarakat		370 Orang	2 Dokumen	6 Kegiatan	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	200,000,000																	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																														
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	8,582,230,427		7,757,617,469											
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	4,278,035,577		4,056,075,568											

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								102,331,770			106,345,520		
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD yang tersusun		BB Huruf	6 Dokumen	11 Dokumen	78,170,760	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	80,480,000
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD yang tersusun		BB Huruf	5 Laporan	11 Dokumen	24,161,010	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	25,865,520
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,139,738,186			3,151,058,186		
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ersentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		BB Huruf	14 Orang/bulan	100 %	3,035,978,186	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	3,035,978,186
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ersentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		BB Huruf	12 Dokumen	100 %	103,760,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	115,080,000
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								11,660,000			10,000,000		
3	26	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		BB Huruf	15 Orang	100 %	11,660,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	10,000,000
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								225,313,350			141,493,740		
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		BB Huruf	12 Paket	100 %	9,423,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	9,500,000
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		BB Huruf	15 Paket	100 %	20,184,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	8,267,700
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		BB Huruf	2 Dokumen	100 %	3,500,000			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	3,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		BB Huruf	6 Laporan	100 %	9,990,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	5,650,000
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		BB Huruf	30 Laporan	100 %	182,216,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	115,076,040
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								97,760,000					25,000,000
3 26 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		BB Huruf	5 Unit	100 %	20,000,000			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	5,000,000
3 26 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		BB Huruf	5 Unit	100 %	68,880,000			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	15,000,000
3 26 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		BB Huruf	2 Unit	100 %	8,880,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	5,000,000
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								522,700,770					509,012,074
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		BB Huruf	35 Laporan	100 %	19,998,270	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	26,365,900
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		BB Huruf	12 Laporan	100 %	43,102,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	22,133,694
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		BB Huruf	20 Laporan	100 %	459,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	460,512,480
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								178,531,501					113,166,048
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		BB Huruf	6 Unit	100 %	149,571,501	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	100,166,048

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		BB Huruf	1 Unit	100 %	13,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	5,000,000
3 26 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		BB Huruf	10 Unit	100 %	7,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	5,000,000
3 26 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		BB Huruf	5 Unit	100 %	7,930,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Huruf	3,000,000
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								2,500,000,000					1,865,000,000
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								431,500,000					1,750,000,000
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan		5 DTW	1 Dokumen	2 DTW	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	250,000,000
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan		5 DTW	2 DTW	2 DTW	401,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	1,500,000,000
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								1,383,500,000					80,000,000
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan		5 DTW	5 Unit	6 Kawasan	1,300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	50,000,000
3 26 02 2.02 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan		5 DTW	1 Dokumen	6 Kawasan	83,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	30,000,000
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								665,000,000					0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Destinasi Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemanfaatan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan		5 DTW	0 Lokasi	7 DTW		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	0
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan		5 DTW	8 Unit	7 DTW	665,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	0
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								20,000,000					35,000,000
3 26 02 2.04 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah TDUP yang diterbitkan		5 DTW	1 Laporan	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	20,000,000
3 26 02 2.04 05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Jumlah TDUP yang diterbitkan		5 DTW	1 Unit Usaha	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	15,000,000
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								419,999,850					926,541,901
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								419,999,850					926,541,901
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan		275000 Orang	9 Dokumen	275000 Orang		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	350,000,000
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan		275000 Orang	9 Laporan	275000 Orang	370,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	476,541,901
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan		275000 Orang	9 Dokumen	275000 Orang	49,999,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	100,000,000
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								200,000,000					0
3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								200,000,000					0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	26	04	2.02	04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Jumlah Bantuan untuk Pelaku Ekonomi Kreatif		5 Unit	5 Unit	5 Unit	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Unit	0
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							1,184,195,000		910,000,000				
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							814,195,000		660,000,000				
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Tersertifikasi		280 Orang	280 Orang	280 Orang	599,195,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	280 Orang	600,000,000
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Tersertifikasi		280 Orang	50 Orang	280 Orang	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	280 Orang	0
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Tersertifikasi		280 Orang	1 Dokumen	280 Orang	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	280 Orang	60,000,000
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif							370,000,000		250,000,000				
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pelaku Ekonomi Kreatif yang dilatih		50 Orang 45 Orang	600 Orang	45 Orang	370,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	50 Orang 45 Orang	250,000,000
TOTAL												13,659,430,427		10,794,098,486				



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
2																
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	23									240,000,800				240,000,800		
2	23	02								202,130,800				202,130,800		
2	23	02	2.01							123,245,800				123,245,800		
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO 20000 (TSM : Information Technology Service Management)	persentase Perpustakaan Umum Yang menggunakan Aplikasi berbasis IT Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka Terlaksananya kunjungan Pemustaka ke perpustakaan Tersedianya Jumlah Perpustakaan yang sesuai standar Tersedianya Jumlah Kunjungan Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Meningkatnya Nilai tingkat kegemaran membaca	90,30 % 0,50 % 0,40 % 3 0 0,20 0	40 Layanan	90.3 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	90,30 % 0,50 % 0,40 % 3 0 0,20 0	30,000,000
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kewenangannya Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kewenangannya	persentase Perpustakaan Umum Yang menggunakan Aplikasi berbasis IT Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka Terlaksananya kunjungan Pemustaka ke perpustakaan Tersedianya Jumlah Perpustakaan yang sesuai standar Tersedianya Jumlah Kunjungan Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Meningkatnya Nilai tingkat kegemaran membaca	90,30 % 0,50 % 0,40 % 3 0 0,20 0	0 Perpustakaan 50 Perpustakaan	90.3 %	24,785,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	90,30 % 0,50 % 0,40 % 3 0 0,20 0	24,785,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	02	2.02	01		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Kemanafaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegeraman Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan sosialisasi budaya baca dan literasi	Tersedianya pengelola perpustakaan yang bersertifikasi Meningkatnya Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan		90,30 % 0,50 % 0,40 % 3 0 0,20 0	5 Lokus 50 Peserta	1,15 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Kemanafaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	90,30 % 0,50 % 0,40 % 3 0 0,20 0	30,000,000
2	23	02	2.02	03		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Kemanafaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Tersedianya pengelola perpustakaan yang bersertifikasi Meningkatnya Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan		90,30 % 0,50 % 0,40 % 3 0 0,20 0	6 Orang	1,15 %	21,585,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Kemanafaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	90,30 % 0,50 % 0,40 % 3 0 0,20 0	21,585,000
2	23	02	2.02	04		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Kemanafaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan pelatihan keterampilan inklusi sosial	Tersedianya pengelola perpustakaan yang bersertifikasi Meningkatnya Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan		90,30 % 0,50 % 0,40 % 3 0 0,20 0	0 Perpustakaan 5 Perpustakaan 50 Peserta	1,15 %	27,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Kemanafaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	90,30 % 0,50 % 0,40 % 3 0 0,20 0	27,300,000
2	23	03				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO												37,870,000	37,870,000
2	23	03	2.01			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota												37,870,000	37,870,000
2	23	03	2.01	01		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Tersedianya Naskah Kuno yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar		30 %	30 Orang	5 Persen	19,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	30 %	19,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Tersedianya Naskah Kuno yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar		30 %	0 Eksemplar 20 Naskah Kuno	5 Persen	18,870,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	30 %	18,870,000
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								4,899,118,146					3,470,516,146
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,643,452,776					3,214,850,776
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								75,275,250					75,275,250
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		100 A, 100 %	Nilai, % 100 Dokumen	100 %	26,658,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKEARPUS)	100 A, 100 %	Nilai, % 26,658,750
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKEARPUS)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		100 A, 100 %	Nilai, % 100 Laporan	100 %	48,616,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKEARPUS)	100 A, 100 %	Nilai, % 48,616,500
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,451,193,186					2,535,853,186
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	23 Orang/bulan	100 persen	2,344,168,186	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	2,428,648,186
2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	1 Dokumen	100 persen	84,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	84,480,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	1 Laporan	100 persen		22,725,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	22,725,000
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									19,850,000					20,000,000
2.24.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100.A.100 %	100 orang	100 %		19,850,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100 %	Nilai.% 20,000,000
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									187,510,000					187,510,000
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100.A.100 %	Nilai Rp	100 %		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100 %	Nilai.% 15,000,000
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100.A.100 %	Nilai Paket	100 %		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100 %	Nilai.% 10,000,000
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100.A.100 %	1 Tahun Nilai.% 0 Dokumen	100 %		7,500,000			Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100 %	Nilai.% 7,500,000
2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100.A.100 %	Nilai Laporan	100 %		5,010,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100 %	Nilai.% 5,010,000
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100.A.100 %	Nilai Laporan	100 %		150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100.A.100 %	Nilai.% 150,000,000
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									238,931,470					238,932,840

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	24	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100A,100%	Nilai,%	100%	12,998,630	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100A,100%	Nilai,% 13,000,000
2	24	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100A,100%	Nilai,%	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100A,100%	Nilai,% 25,000,000
2	24	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100A,100%	Nilai,%	100%	200,932,840	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100A,100%	Nilai,% 200,932,840
2	24	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,670,692,870				157,279,500	
2	24	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKEARPUS)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100A,100%	Nilai,%	100%	97,629,370	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKEARPUS)	100A,100%	Nilai,% 97,298,000
2	24	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKEARPUS)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100A,100%	Nilai,%	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKEARPUS)	100A,100%	Nilai,% 25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (DISKEARPUS)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100,100 % 100 A 100 %	Nilai, % Nilai	100 %	9,981.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (DISKEARPUS)	100,100 % 100 A 100 %	Nilai, % Nilai	9,981.500
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (DISKEARPUS)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100,100 % 100 A 100 %	Nilai, % Nilai	100 %	1,538,082.000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanju ti (DISKEARPUS)	100,100 % 100 A 100 %	Nilai, % Nilai	25,000,000
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							129,760,000						129,760,000
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								80,110,000					80,110,000
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Nilai Indeks Pengelola Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Jumlah OPD yang Dibina dalam Pengelolaan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku 2.Persentase pengelola Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 3.Persentase peningkatan peserta bim tek yang lulus ujian sertifikasi		63,95 Nilai 16,27 %	0 Berkas 25000 Berkas 25 OPD	95 %	27,660,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Indeks Pengelola Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	63,95 Nilai 16,27 %		27,660,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	<p>Nilai Indeks Pengelola Kearsipan</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik</p>	<p>Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan</p> <p>Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan</p> <p>Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengelolaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis OPD</p>	<p>1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku</p> <p>2. Persentase pengelola Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis</p> <p>3. Persentase peningkatan peserta bim tek yang lulus ujian sertifikasi</p>		63,95 Nilai 16,27 %	0 Berkas 50 Berkas 40 Peserta	85 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		<p>Nilai Indeks Pengelola Kearsipan</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik</p>	63,95 Nilai 16,27 %	25,000,000
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	<p>Nilai Indeks Pengelola Kearsipan</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku</p> <p>2. Persentase pengelola Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis</p> <p>3. Persentase peningkatan peserta bim tek yang lulus ujian sertifikasi</p>		63,95 Nilai 16,27 %	26 Laporan	85 %	27,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		<p>Nilai Indeks Pengelola Kearsipan</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik</p>	63,95 Nilai 16,27 %	27,450,000
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						25,450,000			25,450,000				
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	<p>Nilai Indeks Pengelola Kearsipan</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik</p>	<p>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</p>	<p>1. Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi</p>		63,95 Nilai 16,27 %	100 Arsip	10 %	25,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		<p>Nilai Indeks Pengelola Kearsipan</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik</p>	63,95 Nilai 16,27 %	25,450,000
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						24,200,000			24,200,000				
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	<p>Nilai Indeks Pengelola Kearsipan</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik</p>	<p>Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JKN</p> <p>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN</p> <p>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN</p>	<p>Meningkatnya layanan SIKN /JKN</p>		63,95 Nilai 16,27 %	20 Arsip 0 Pengguna 30 Pengguna	10 %	24,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		<p>Nilai Indeks Pengelola Kearsipan</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik</p>	63,95 Nilai 16,27 %	24,200,000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						103,405,370			103,405,370				
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						27,065,000			27,065,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1. Jumlah Peraturan Bupati tentang Kearsipan 2. Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK		45 % 55 %	10 Arsip	2.8 %	27,065,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	45 % 55 %	27,065,000
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan							27,110,370			27,110,370			
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Jumlah Nagari Pemekaran yang dibina tata kelola kearsipannya	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan		45 % 55 %	0 Arsip 50 Arsip 25 Nagari	25 Nagari	27,110,370	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	45 % 55 %	27,110,370
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota							49,230,000			49,230,000			
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Tersedianya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		45 % 55 %	50 Arsip	400 Berkas Arsip	24,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	45 % 55 %	24,230,000
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tersedianya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		45 % 55 %	350 Arsip	400 Berkas Arsip	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	45 % 55 %	25,000,000
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP							22,500,000			22,500,000			
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota							22,500,000			22,500,000			
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Tersusunnya SOP Kearsipan		10 %	10 SOP	10 %	22,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan	10 %	22,500,000
TOTAL											5,139,118,946			3,710,516,946				



DINAS PERIKANAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
3																					
3	25																				4,128,048,092
3	25	01																			899,800,000
3	25	01	2.01																		90,000,000
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	A Nilai 100 % 100 %	2 Dokumen	92 %	26,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %					20,000,000
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	A Nilai 100 % 100 %	1 Dokumen	92 %	8,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %					12,500,000
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	A Nilai 100 % 100 %	1 Dokumen	92 %	8,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %					12,500,000
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	A Nilai 100 % 100 %	1 Dokumen	92 %	8,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %					12,500,000
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	A Nilai 100 % 100 %	1 Dokumen	92 %	8,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %					12,500,000
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	A Nilai 100 % 100 %	2 Laporan	92 %	16,799,880	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %					20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,812,602,364				14,800,000				
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		A Nilai 100 % 100 %	24 Orang/bulan	100 %	2,684,690,114	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	0
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		A Nilai 100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	109,260,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	0
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		A Nilai 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	4,800,000
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		A Nilai 100 % 100 %	16 Laporan	100 %	11,652,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	10,000,000
3	25	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20,000,000				15,000,000				
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	15 Orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	15,000,000
3	25	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					227,043,800				130,000,000				
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	2 Paket	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	1,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	4 Paket	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	10,000,000
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	1 Paket	100 %	9,999,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	0
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	4 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	8,000,000
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	684 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	6,000,000
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	5 Laporan	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	5,000,000
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	140 Laporan	100 %	170,544,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	100,000,000
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							85,000,000					0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur		A Nilai 100 % 100 %	1 Unit	1 unit	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	0
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							568,470,880		525,000,000				
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran		A Nilai 100 % 100 %	4 Laporan	100 %	12,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	10,000,000
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran		A Nilai 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	60,000,000
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran		A Nilai 100 % 100 %	4 Laporan	100 %	9,380,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	5,000,000
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran		A Nilai 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	486,890,880	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	450,000,000
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							134,913,450		125,000,000				
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik		A Nilai 100 % 100 %	29 Unit	100 %	79,944,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik		A Nilai 100 % 100 %	1 Unit	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	20,000,000
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik		A Nilai 100 % 100 %	1 Unit	100 %	14,969,450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	5,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							2,981,690,400				1,271,601,482	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							2,901,690,400				1,171,601,482	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		19,186,93 ton/tahun	15 Unit	19186.93 ton/tahun	665,040,400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Produksi Perikanan Tangkap	19,186,93 ton/tahun	200,000,000
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		19,186,93 ton/tahun	18 Unit	19186.93 ton/tahun	236,650,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Produksi Perikanan Tangkap	19,186,93 ton/tahun	971,601,482
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							55,000,000				60,000,000	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persentase Kelompok Nelayan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan		19,186,93 ton/tahun	34 Orang	53.85 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus Fisik	Produksi Perikanan Tangkap	19,186,93 ton/tahun	30,000,000
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Persentase Kelompok Nelayan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan		19,186,93 ton/tahun	100 Unit Usaha	53.85 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Produksi Perikanan Tangkap	19,186,93 ton/tahun	30,000,000
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							25,000,000				40,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang operasional		19.186,93 ton/tahun	1 Layanan	100 %		25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Produksi Perikanan Tangkap	19.186,93 ton/tahun	40.000.000
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								2.119.401.855				1.725.000.000	
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								679.999.960				250.000.000	
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Benih Ikan Produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan		510.000.000 ekor/tahun 55.725,72 ton/tahun	6 Kelompok	45.11 %		620.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Produksi Benih Ikan Produksi perikanan budidaya	510.000.000 ekor/tahun 55.725,72 ton/tahun	50.000.000
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi Benih Ikan Produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan		510.000.000 ekor/tahun 55.725,72 ton/tahun	100 Kelompok	45.11 %		59.999.960	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Produksi Benih Ikan Produksi perikanan budidaya	510.000.000 ekor/tahun 55.725,72 ton/tahun	200.000.000
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								1.439.401.895				1.475.000.000	
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		55.725,72 ton/tahun 510.000.000 ekor/ tahun	Terdapat	55725,72 ton/tahun		1.079.402.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	55.725,72 ton/tahun 510.000.000 ekor/ tahun	100.000.000
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		55.725,72 ton/tahun 510.000.000 ekor/ tahun	Terdapat	55725,72 ton/tahun		299.999.965	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus Fisik	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	55.725,72 ton/tahun 510.000.000 ekor/ tahun	100.000.000
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		55.725,72 ton/tahun 510.000.000 ekor/ tahun	Terdapat	55725,72 ton/tahun		59.999.930	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	55.725,72 ton/tahun 510.000.000 ekor/ tahun	75.000.000
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								97.000.000				127.896.918	
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								97.000.000				127.896.918	



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN & petugas ikut pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00 100%	10 Orang	20 Orang	115,880,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	00 100%	115,911,000	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							171,563,777					159,241,450	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00 1 Tahun	10 Paket	100%	12,950,027	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	00 1 Tahun	625,000	
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00 1 Tahun	1 Paket/tahun	100%	18,363,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	00 1 Tahun	18,371,200	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00 1 Tahun	1 Tahun	100%	12,865,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	00 1 Tahun	12,865,250	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00 1 Tahun	2 Dokumen	100%	9,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	00 1 Tahun	9,600,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00 1 Tahun	1 Tahun	100 %	6,380,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	00 1 Tahun	6,375,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00 1 Tahun	1 Tahun	100 %	111,405,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	00 1 Tahun	111,405,000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							397,470,090		386,580,620			
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Laporan	100 %	29,503,130	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	29,503,660
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelayanan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Laporan	100 %	35,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	35,400,000
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Laporan	100 %	15,020,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	12,130,000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Laporan	100 %	317,546,960	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	309,546,960
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							92,553,950		92,556,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pelayanan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 12 Unit	100 %	92,553,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 %	92,556,000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						4,030,007,839			900,442,031			
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						503,403,971			203,405,521			
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan Persentase peningkatan jumlah produksi daging	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 % 17 %	3 Kelompok Tani	3 kelompok	393,875,450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan Persentase peningkatan jumlah produksi daging	17 % 17 %	93,875,000
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan Persentase peningkatan jumlah produksi daging	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 % 17 %	2 Kelompok	3 kelompok	109,528,521	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan Persentase peningkatan jumlah produksi daging	17 % 17 %	109,530,521
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						3,281,530,038			551,946,960			
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah populas teranak besar	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.647 (1.5%) ekor	6 ekor	60 ekor	2,340,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah populas teranak besar	57.647 (1.5%) ekor	100,000,000
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah populas teranak besar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.647 (1.5%) ekor	10 ekor	60 ekor	260,990,040	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah populas teranak besar	57.647 (1.5%) ekor	326,946,960
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah populas teranak besar	Jumlah Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan / Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.647 (1.5%) ekor	2 kelompok	60 ekor	680,539,998	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah populas teranak besar	57.647 (1.5%) ekor	125,000,000
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						22,500,000			22,500,000			
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Persentase peningkatan jumlah produksi daging Persentase peningkatan jumlah produksi daging	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Persentase pengawasan peredaran pakan ternak	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17342.21 ton 2 %	30 Kelompok Tani	7,7 %	22,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan jumlah produksi daging Persentase peningkatan jumlah produksi daging	17342.21 ton 2 %	22,500,000
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						144,984,280			45,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Persentase peningkatan jumlah produksi daging	Jumlah Benih /Bibit Ternak dan HPT, Bahan yang Beredar	Jumlah bahan pakan/pakan HPT yang diawasi dan jumlah kelompok yang dikendalikan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	3 jenis	2 Kelompok	26,984,890	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan jumlah produksi daging	2 %	27,000,000
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase peningkatan jumlah produksi daging	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah bahan pakan/pakan HPT yang diawasi dan jumlah kelompok yang dikendalikan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	1 Laporan	2 Kelompok	117,999,390	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan jumlah produksi daging	2 %	18,000,000
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							77,589,550				77,589,550	
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase peningkatan jumlah produksi daging	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit HPT	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 Kelompok Tani	3 Ha /jenis	77,589,550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan jumlah produksi daging	2 %	77,589,550
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							798,862,000				619,157,000	
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota							798,862,000				619,157,000	
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase peningkatan fasilitas prasarana peternakan	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 %	1 unit	1 unit	798,862,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan fasilitas prasarana peternakan	23 %	619,157,000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							253,026,525				290,075,500	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							173,874,825				173,875,000	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	20 Nagari	20 Nagari	32,875,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	40 %	32,875,000
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Jumlah Pemusnahan Endemik (HPR)	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	17 Kecamatan	20 Nagari	65,999,825	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	40 %	66,000,000
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	17 Kecamatan	20 Nagari	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	40 %	75,000,000
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota							30,230,980				30,600,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Persentase pengendalian penyakit hewan (PHMS)	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Keamanan Pangan asal Hewan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	200 Laporan	100 %	20,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengendalian penyakit hewan (PHMS)	40 %	20,400,000
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase pengendalian penyakit hewan (PHMS)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Keamanan Pangan asal Hewan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	100 Laporan	100 %	9,830,980	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengendalian penyakit hewan (PHMS)	40 %	10,200,000
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							18,529,190				57,600,500		
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah penurunan kejadian penyakit jembrana,SE,AI,Rabies	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah layanan kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 ekor	50 Laporan	800 ekor	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah penurunan kejadian penyakit jembrana,SE,AI,Rabies	150 ekor	10,000,000
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah penurunan kejadian penyakit jembrana,SE,AI,Rabies	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah layanan kesehatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 ekor	450 Laporan	800 ekor	8,529,190	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah penurunan kejadian penyakit jembrana,SE,AI,Rabies	150 ekor	47,600,500
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							30,391,530				28,000,000		
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah penerbitan Pra NKV	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	5 Laporan	1 Unit	17,957,630	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	35 %	18,000,000
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerbitan Pra NKV	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	114 Laporan	1 Unit	12,433,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	35 %	10,000,000
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							56,878,250				56,878,450		
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan							56,878,250				56,878,450		
3	27	06	2.02	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Jumlah ternak yang diurusansikan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 ekor	500 ekor	56,878,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan	100 %	56,878,450
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							150,000,000				150,000,000		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							150,000,000				150,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase peningkatan kelas kelompok	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50 %	17 Kecamatan	0.5 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	0.50 %	50,000,000
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.50 %	1 Dokumen	0.5 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	0.50 %	100,000,000
TOTAL												10,259,100,383			6,967,100,383		



SEKRETARIAT DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4																		
4	01																	
4	01	01																
4	01	01	2.01															
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		A Nilai	0 Dokumen 1 Dokumen	100 persen	45,220,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A Nilai	49,500,000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		A Nilai	1 Dokumen	100 persen	16,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A Nilai	18,150,000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		A Nilai	1 Dokumen	100 persen	7,002,342	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A Nilai	7,700,000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		A Nilai	1 Dokumen	100 persen	9,002,150	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A Nilai	9,350,000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		A Nilai	1 Dokumen	100 persen	19,999,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A Nilai	22,000,000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		A Nilai	2 Laporan	100 persen	34,999,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A Nilai	38,500,000
4	01	01	2.02															
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	260 Orang	100 persen	22,347,926,720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100 persen	24,582,719,402

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	12 Dokumen	100 persen		385,560,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100 persen	412,500,000
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	150 Dokumen	100 persen		22,499,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100 persen	24,750,000
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	2 Laporan	100 persen		24,999,780	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100 persen	27,500,000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									309,840,650					341,000,000
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 persen	65 Paket	100 persen		34,850,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	38,500,000
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 persen	3 Dokumen	100 persen		114,994,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	126,500,000
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 persen	60 Orang	100 persen		40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	44,000,000
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100 persen	90 Orang	100 persen		119,996,650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	132,000,000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,148,203,980					1,265,000,000
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 persen	12 Paket	100 persen		35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	38,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 persen	2 Paket	100 persen		154,900,980	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	170,500,000
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 persen	2 Paket	100 persen		29,943,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	33,000,000
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 persen	12 Paket	100 persen		30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	33,000,000
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 persen	12 Paket	100 persen		174,975,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	192,500,000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 persen	1 Laporan	100 persen		375,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	412,500,000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 persen	275 Laporan	100 persen		348,385,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	385,000,000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									2,145,892,570					275,000,000
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100 persen 100 persen	4 Unit	100 persen		1,996,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen 100 persen	110,000,000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100 persen 100 persen	2 Unit	100 persen		40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen 100 persen	44,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100 persen 100 persen	2 Unit	100 persen		34,916,350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen 100 persen	38,500,000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100 persen 100 persen	6 Unit	100 persen		74,976,220	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen 100 persen	82,500,000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,854,476,020					4,244,520,720
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	2 Laporan	100 persen		34,993,220	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	38,500,000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	12 Laporan	100 persen		669,950,000		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	737,000,000
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	1 Laporan	100 persen		150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	165,000,000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	12 Laporan	100 persen		2,999,532,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	3,304,020,720
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								934,112,100					1,028,675,597
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 persen	35 Unit	100 persen		800,116,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	880,175,597
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 persen	10 Unit	100 persen		14,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	16,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 persen	50 Unit	100 persen		44,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	49,500,000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 persen	1 Unit	100 persen		74,695,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	82,500,000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									681,956,517					750,152,504
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan KDH/WKDH dan persentase terpenuhinya kebutuhan sandang dan kesehatan KDH/WKDH		100 persen	2 Orang/Bulan	100 persen		616,956,517	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	678,652,504
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan KDH/WKDH dan persentase terpenuhinya kebutuhan sandang dan kesehatan KDH/WKDH		100 persen	2 Paket	100 persen		35,000,000			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	38,500,000
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan KDH/WKDH dan persentase terpenuhinya kebutuhan sandang dan kesehatan KDH/WKDH		100 persen	2 Orang	100 persen		30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	33,000,000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah									1,099,999,800					1,210,000,000
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH		100 persen	1 Paket	100 persen		659,999,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	726,000,000
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH		100 persen	1 Paket	100 persen		440,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	484,000,000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi									442,505,130					486,750,000
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		BB Nilai bb kategori	1 Dokumen	83.45 nilai		79,998,330	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	BB Nilai bb kategori	88,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		BB Nilai bb kategori	5 Laporan	83.45 nilai	175,011,925	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	BB Nilai bb kategori	192,500,000
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		BB Nilai bb kategori	1 Dokumen	83.45 nilai	82,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	BB Nilai bb kategori	90,750,000
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		BB Nilai bb kategori	4 Dokumen	83.45 nilai	29,994,875	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	BB Nilai bb kategori	33,000,000
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		BB Nilai bb kategori	1 Dokumen	83.45 nilai	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	BB Nilai bb kategori	82,500,000
4.01.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								475,000,000					522,500,000
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase kegiatan KDH/WKDH yang sesuai standar keprotokoleran dan Persentase kegiatan KDH/WKDH yang terdokumen tasi dengan baik		100 persen	1 Laporan	85 persen	225,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	247,500,000
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan KDH/WKDH yang sesuai standar keprotokoleran dan Persentase kegiatan KDH/WKDH yang terdokumen tasi dengan baik		100 persen	1 Laporan	85 persen	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	220,000,000
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase kegiatan KDH/WKDH yang sesuai standar keprotokoleran dan Persentase kegiatan KDH/WKDH yang terdokumen tasi dengan baik		100 persen	1 Laporan	85 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 persen	55,000,000
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								5,201,000,820					3,327,500,000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan								255,000,000					280,500,000
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indikator Kinerja tinggi		2800 nilai	3 Dokumen	30 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	2800 nilai	55,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indikator Kinerja tinggi		2800 nilai	1 Dokumen	30 persen		40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	2800 nilai	44,000,000
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indikator Kinerja tinggi		2800 nilai	2 Dokumen	30 persen		165,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	2800 nilai	181,500,000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									4,526,000,820					2,585,000,000
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi Persentase akm mesjid yg dikunjungi tim safari ramadhan Pemda Persentase peningkatan hafiz dan hafizah di Padang Pariaman		100 persen	10 Dokumen	36010 peringkat % %		4,326,000,820	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 persen	2,365,000,000
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi Persentase akm mesjid yg dikunjungi tim safari ramadhan Pemda Persentase peningkatan hafiz dan hafizah di Padang Pariaman		100 persen	2 Dokumen	36010 peringkat % %		100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 persen	110,000,000
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transtibum Linmas	Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi Persentase akm mesjid yg dikunjungi tim safari ramadhan Pemda Persentase peningkatan hafiz dan hafizah di Padang Pariaman		100 persen	2 Dokumen	36010 peringkat % %		100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 persen	110,000,000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									385,000,000					423,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase terlaksananya fasilitasi dan bantuan hukum, serta penyelesaian kasus		75 persen	5 perda 5 ranperda 40 perbup 400 sk	90 persen	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah	75 persen	82,500,000
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase terlaksananya fasilitasi dan bantuan hukum, serta penyelesaian kasus		75 persen	3 Kasus	90 persen	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah	75 persen	275,000,000
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase terlaksananya fasilitasi dan bantuan hukum, serta penyelesaian kasus		75 persen	2 Dokumen	90 persen	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah	75 persen	66,000,000
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah								35,000,000					38,500,000
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kerjasama Pemerintah Daerah yang Difasilitasi		2800 nilai	5 Dokumen	85 persen	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	2800 nilai	38,500,000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								774,999,690					852,500,000
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								154,999,890					170,500,000
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian		100 persen	2 Dokumen	100 persen	55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	60,500,000
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian		100 persen	5 Laporan	100 persen	59,999,890	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	66,000,000
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian		100 persen	1 Dokumen	100 persen	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	44,000,000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								175,000,000					192,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten padang pariaman		100 persen	3 Dokumen	100 persen	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu	100 persen	71,500,000
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten padang pariaman		100 persen	1 Laporan	100 persen	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu	100 persen	66,000,000
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten padang pariaman		100 persen	12 Laporan	100 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu	100 persen	55,000,000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								399,999,800					440,000,000
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa		12 persen 100 persen	101 Dokumen	97 persen	229,999,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	12 persen 100 persen	253,000,000
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa		12 persen 100 persen	200 Dokumen	97 persen	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	12 persen 100 persen	93,500,000
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa		12 persen 100 persen	65 Orang	97 persen	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	12 persen 100 persen	93,500,000
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								45,000,000					49,500,000
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam		100 persen	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	100 persen	16,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam		100 persen	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	100 persen	16,500,000
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam		100 persen	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	100 persen	16,500,000
TOTAL									39,981,697,719					39,496,268,223



SEKRETARIAT DPRD

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4																		
4	02																	
4	02	01																
4	02	01	2.01															
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja APBD, Renja Perubahan, RKA APBD, RKA Perubahan, DPA APBD dan DPA Perubahan Perangkat Daerah, Dokumen , LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun		94 Persentase	7 Dokumen	9 Dokumen	69,014,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	94 Persentase	78,999,850
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Renstra, Renja APBD, Renja Perubahan, RKA APBD, RKA Perubahan, DPA APBD dan DPA Perubahan Perangkat Daerah, Dokumen , LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun		94 Persentase	8 Laporan	9 Dokumen	28,383,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	94 Persentase	38,383,000
4	02	01	2.02															
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan, Honor Pengelola Keuangan yang dibayarkan		100 Persen	14 Bulan 0 Orang/bulan 28 Orang/bulan	14 Bulan	2,528,457,892	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,028,457,892
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN jumlah honorarium Pengelola Keuangan yang dibayarkan	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan, Honor Pengelola Keuangan yang dibayarkan		100 Persen	0 Dokumen 12 Bulan	14 Bulan	205,280,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	255,305,000
4	02	01	2.05															
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Yang mengikuti Bim tek		94 Persen	28 Orang	30 Orang	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	94 Persen	150,000,000
4	02	01	2.06															
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah			100 Persen		12 Bulan	50,864,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 Persen	60,865,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah PC, Laptop, Printer, AC, Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 Persen	0 Paket 6 Paket	12 Bulan		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 Persen	549,802,000
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang disediakan	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 Persen	0 Laporan 12 Bulan	12 Bulan	55,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 Persen	65,000,000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan	139,681,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 Persen	149,711,000
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,200,560,000						1,522,369,500
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kendaraan Dinas Jabatan		84 Persen	5 Unit	2 Unit	1,200,560,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	84 Persen	1,462,863,500
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kendaraan Dinas Jabatan		84 Persen	2 Unit	2 Unit		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	84 Persen	59,506,000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,359,652,470						1,379,754,838
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ATK, Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya, Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan	89,996,680		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	99,996,808
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	0 Laporan 12 Bulan	12 Bulan	161,900,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	172,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Honor Pegawai Non PNS (31 orang tenaga administrasi kantor, 1 orang sopir sekwan, 4 orang pramusaji rumah dinas ketua, sespri ketua, ajudan ketua dan sopir ketua, 6 orang Cleaning Service) yg dibayarkan dan jumlah alat pembersih yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	12 Bulan 0 Laporan	12 Bulan	1,107,755,790	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,107,758,030
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								403,010,950					595,590,500
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional yang dibayarkan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 Persen	12 Bulan 0 Unit	12 Bulan	124,280,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	134,340,000
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 Persen	12 Bulan 0 Unit	12 Bulan	99,980,450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	110,000,000
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 Persen	0 Unit 12 Bulan	12 Bulan	178,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	351,250,500
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								17,227,126,157					18,923,076,157
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD yang disediakan	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 Persen	0 Orang/Bulan 40 Orang/Bulan 14 Bulan	14 Bulan	16,651,501,157	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	18,151,501,157

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 Persen	0 Paket	14 Bulan	450,660,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	546,600,000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 Persen	40 Orang	14 Bulan	124,965,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	224,975,000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							1,349,939,200				1,648,891,750		
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD		88 Persen	0 Laporan	12 Bulan	759,787,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi DPRD	88 Persen	859,788,000
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang disediakan	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD		88 Persen	0 Paket 12 Bulan	12 Bulan	590,151,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi DPRD	88 Persen	789,103,750
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							17,207,990,645				15,362,478,900		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							410,515,000				500,000,000		
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Penyusunan Ranperda yang disetujui	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Pengawasan Kode Etik DPRD Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan, Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda, Penyusunan Kode Etik DPRD, Ranperda yang disetujui oleh DPRD, Penyusunan RKT	Jumlah dokumen perda yang dihasilkan		82 %	8 Dokumen 12 Bulan	8 dokumen	410,515,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan Ranperda yang disetujui	82 %	500,000,000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							1,015,554,470				2,500,000,000		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Frekuensi pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran		100 Persen	1 Kali/Tahun 0 Dokumen	5 Kali/Tahun	234,999,840	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen	500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Frekuensi pembahasan KUA dan PPAS Perubahan yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran		100 Persen	1 Kali/Tahun 0 Dokumen	5 Kali/Tahun	235,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen	500,000,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Frekuensi Pembahasan APBD yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran		100 Persen	1 Kali/Tahun 0 Dokumen	5 Kali/Tahun	234,999,740	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen	500,000,000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Frekuensi Pembahasan APBD Perubahan yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran		100 Persen	1 Kali/Tahun 0 Dokumen	5 Kali/Tahun	234,999,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen	500,000,000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Pembahasan Laporan Semester, Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang disediakan	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran		100 Persen	0 Dokumen 12 Bulan	5 Kali/Tahun	75,554,990	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen	500,000,000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							1,541,850,150				1,832,890,900		
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Frekuensi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		84 Persen	12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan	1,541,850,150	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	84 Persen	1,832,890,900
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							2,235,663,800				1,859,853,000		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Frekuensi Bim tek dan Workshop Anggota DPRD yang difasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD		84 Persen	6 Kali/Tahun 0 Dokumen	12 Bulan	1,705,264,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	84 Persen	1,179,453,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD		84 Persen	0 Dokumen 12 Bulan	12 Bulan	249,999,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	84 Persen	300,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Honor Tenaga Ahli Fraksi yang dibayarkan Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD		84 Persen	12 Bulan 0 Orang	12 Bulan	280,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	84 Persen	380,400,000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							769,999,695						980,000,000
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Frekuensi Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 Persen	3 Kali/Tahun 0 Laporan	3 Kali/Tahun	49,999,770			Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	60,000,000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Jumlah Reses Dapil anggota DPRD yang difasilitasi	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 Persen	0 Dokumen 3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	719,999,925	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	920,000,000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD							11,234,407,530						7,689,735,000
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Luar Propinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD		88 Persen	23 Kali/Tahun 0 Dokumen	12 Bulan	8,999,999,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	88 Persen	3,306,600,000
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Frekuensi Rapat Bamus dan Konsultasi Bamus dalam dan Luar daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD		88 Persen	39 Kali/Tahun 0 Dokumen	12 Bulan	1,133,099,930	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	88 Persen	2,133,100,000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Frekuensi Bimbingan Teknis, Workshop dan ADKASI Ketua DPRD, Jumlah koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD yang disediakan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD		88 Persen	12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan	1,101,308,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	88 Persen	2,250,035,000
TOTAL												41,899,960,614				43,808,685,387		



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	4 Orang	94 %		21,780,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	26,235,265
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	60 Orang	94 %		80,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	118,058,693
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									337,560,075				212,053,089
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	200 Paket	100 %		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	6,558,816
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	6 Paket	100 %		79,654,075	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	45,911,714
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	200 Paket	100 %		12,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	7,870,580
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	1800 Dokumen	100 %		9,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	8,729,784

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	7 Laporan	100 %		30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	19,676,449
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	12 Laporan	100 %		196,306,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	123,305,746
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								196,535,000					101,674,081
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	2 Unit	84 %		66,285,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	68,880,000
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	2 Unit	84 %		95,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	26,235,265
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	2 Unit	84 %		34,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	6,558,816
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								973,459,354					364,014,304
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		A Nilai 100 % 100 %	12 Laporan	100 %		85,410,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	16,397,041

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		A Nilai 100 % 100 %	12 Laporan	100 %		184,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	98,382,244
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		A Nilai 100 % 100 %	12 Laporan	100 %		30,049,354	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	19,676,449
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		A Nilai 100 % 100 %	12 Laporan	100 %		673,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	229,558,570
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									157,080,884				118,058,693
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		A Nilai 100 % 100 %	14 Unit	100 %		82,810,404	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	59,029,347
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		A Nilai 100 % 100 %	1 Unit	100 %		34,620,480	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	32,794,081
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		A Nilai 100 % 100 %	15 Unit	100 %		39,650,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	26,235,265
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									1,134,074,305				890,775,526
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									969,288,265				698,628,444

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Indeks kualitas perencanaan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah tepat waktu		100 %	1 Dokumen	100 %	49,999,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks kualitas perencanaan	100 %	32,794,081
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Indeks kualitas perencanaan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah tepat waktu		100 %	1 Berita Acara	100 %	49,999,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks kualitas perencanaan	100 %	39,352,898
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Indeks kualitas perencanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah tepat waktu		100 %	1 Berita Acara	100 %	79,999,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks kualitas perencanaan	100 %	52,470,530
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Indeks kualitas perencanaan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah tepat waktu		100 %	1 Berita Acara	100 %	79,999,665	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks kualitas perencanaan	100 %	52,470,530
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kualitas perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RP,PD,RPJMD,RPJPD)	Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah tepat waktu		100 %	3 Dokumen	100 %	709,289,350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks kualitas perencanaan	100 %	521,540,405
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								94,795,290					87,389,668
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase ketersediaan database yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan		100 %	1 Dokumen	90 %	44,241,640	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks kualitas perencanaan	100 %	34,919,138
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Indeks kualitas perencanaan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan database yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan		100 %	44 Orang	90 %	50,553,650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks kualitas perencanaan	100 %	52,470,530
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								69,990,750					104,757,414
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian target sasaran program pada dokumen perencanaan		100 %	2 Laporan	90 %	69,990,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks kualitas perencanaan	100 %	104,757,414
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								552,971,775					742,031,682
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								251,984,250					392,840,305

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP,PD, RPJMD dan RKPd)	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP,PD, RPJMD dan RKPd)	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		93 %	8 Dokumen	100 %	49,994,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	87,297,849
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		93 %	8 Laporan	100 %	19,996,670	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	26,189,353
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		93 %	8 Laporan	100 %	29,998,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	43,648,922
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RP,MD pada Bidang Pemerintahan	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		93 %	8 Laporan	100 %	21,995,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	17,459,569
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP,PD, RPJMD dan RKPd)	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RP,PD, RPJMD dan RKPd)	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		93 %	9 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	87,297,845
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		93 %	9 Laporan	100 %	20,000,230	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	69,838,276
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		93 %	9 Laporan	100 %	29,999,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	26,189,353

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP.MD pada Bidang Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		93 %	9 Laporan	100 %		29,999,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	34,919,138
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								129,999,370						165,865,904
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RP.PD, RP.MD dan RKPD)	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RP.PD, RP.MD dan RKPD)	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		93 %	6 Dokumen	100 %		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	87,297,845
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		93 %	6 Laporan	100 %		20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	26,189,353
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		93 %	6 Laporan	100 %		29,999,370	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	26,189,353
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP.MD pada Bidang Perekonomian	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		93 %	6 Laporan	100 %		30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	26,189,353
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								170,988,155						183,325,473
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP.PD, RP.MD dan RKPD)	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RP.PD, RP.MD dan RKPD)	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		93 %	5 Dokumen	100 %		74,988,670	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	87,297,845
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		93 %	5 Laporan	100 %		32,999,785	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	26,189,353

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		93 %	5 Laporan	100 %		29,999,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	43,648,922
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP.MD pada Bidang Infrastruktur	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		93 %	5 Laporan	100 %		32,999,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	26,189,353
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									358,433,505					686,302,033
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									358,433,505					686,302,033
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan									29,966,995					39,352,896
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk pembangunan daerah		75 %	1 Laporan	100 %		29,966,995	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	75 %	39,352,896
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan									134,976,130					430,508,199
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Sosial dan Kependudukan untuk pembangunan daerah		75 %	1 Dokumen	100 %		29,976,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	75 %	39,352,896
5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Sosial dan Kependudukan untuk pembangunan daerah		75 %	1 Dokumen	100 %		34,999,890	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	75 %	130,385,101
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Sosial dan Kependudukan untuk pembangunan daerah		75 %	1 Dokumen	100 %		35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	75 %	130,385,101
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Sosial dan Kependudukan untuk pembangunan daerah		75 %	1 Dokumen	100 %		34,999,990	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	75 %	130,385,101
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									64,975,000					0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk pembangunan daerah		75 %	1 Dokumen	100 %	64,975,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	75 %	0
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi							128,515,380						216,440,938
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		75 %	1 Laporan	100 %	78,750,570	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	75 %	104,941,061
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		75 %	1 Laporan	100 %	49,764,810	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	75 %	111,499,877
TOTAL									6,883,363,396					6,464,829,003



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Paket	100 %		9,082,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	10,012,905
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Paket	100 %		14,793,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	16,309,503
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	3 Dokumen	100 %		14,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	15,435,000
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %		14,760,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	16,272,900
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %		119,516,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	225,478,890
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									28,447,085					21,779,888
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100 %	20 Unit	100 %		28,447,085	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	21,779,888
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,332,935,720					1,861,952,274
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Laporan	100 %		80,000,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	208,202,274
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %		175,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 %	193,819,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 %		1,077,135,120	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 %	1,459,930,500
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								172,046,847						246,245,272
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	10 Unit	100 %		116,158,127	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 %	140,527,958
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	1 Unit	100 %		25,998,720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 %	61,738,589
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	20 Unit	100 %		29,890,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 %	43,978,725
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									180,607,748,330					143,797,348,654
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									734,348,000					1,505,147,334
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah		30 Nov 2023 tanggal	4 Dokumen	100 %		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30 Nov 2023 tanggal	55,125,000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah		30 Nov 2023 tanggal	4 Dokumen	100 %		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30 Nov 2023 tanggal	55,125,000
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah		30 Nov 2023 tanggal	44 Dokumen	100 %		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30 Nov 2023 tanggal	55,125,000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah		30 Nov 2023 tanggal	44 Dokumen	100 %		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30 Nov 2023 tanggal	55,125,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Jumlah DPA - SKPD yang Diverifikasi	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah		30 Nov 2023	44 Dokumen	100 %	32,909,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30 Nov 2023	36,282,173
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah		30 Nov 2023	44 Dokumen	100 %	24,758,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30 Nov 2023	27,295,695
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah		30 Nov 2023	4 Dokumen	100 %	321,926,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30 Nov 2023	1,050,452,078
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah		30 Nov 2023	4 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30 Nov 2023	110,250,000
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah		30 Nov 2023	2 Dokumen	100 %	54,755,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30 Nov 2023	60,367,388
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								339,050,000					694,575,000
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	60,550,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	121,275,000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	32,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	60,637,500
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembayaan Daerah	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	21,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	82,687,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	31,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	88,200,000
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	60,637,500
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah		100 %	1 Laporan	100 %	23,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	44,100,000
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	55,125,000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah		100 %	1 Dokumen	100 %	27,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	55,125,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah		100 %	1 Dokumen	100 %		27,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	55,125,000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah		100 %	205 Orang	100 %		62,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	71,662,500
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								398,681,230						600,862,500
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		100 %	12 Laporan	100 %		47,071,350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100 %	44,100,000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		100 %	46 Laporan	100 %		99,905,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100 %	132,300,000
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		100 %	4 Dokumen	100 %		64,577,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100 %	165,375,000
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		100 %	5 Dokumen	100 %		17,999,710	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100 %	22,050,000
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		100 %	2 Dokumen	100 %		74,195,050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100 %	71,662,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		100 %	547 Orang	100 %		94,932,870	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100 %	165,375,000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								179,064,170,600						140,832,823,172
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penyaluran keuangan daerah		100 %	1 Laporan	100 %		166,691,793,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	122,986,129,228
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase penyaluran keuangan daerah		100 %	1 Laporan	100 %		7,524,977,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	11,080,099,643
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran keuangan daerah		100 %	1 Laporan	100 %		4,847,400,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %	6,766,594,301
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								71,498,500					163,940,648	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah		100 %	44 Dokumen	100 %		71,498,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100 %	163,940,648
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								888,208,630					294,163,986	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah								888,208,630					294,163,986	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang term anfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah		100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	1 dokumen		44,493,060	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang term anfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	100 % 100 % 100 %	25,375,000
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang term anfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah		100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	1 dokumen		21,343,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang term anfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	100 % 100 % 100 %	11,357,955

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah		100 % 100 % 100 %	22 Laporan	1 dokumen	567,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	100 % 100 % 100 %	22,050,000
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah		100 % 100 % 100 %	4 Laporan	1 dokumen	56,712,500			Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	100 % 100 % 100 %	55,125,000
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemantapan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemantapan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah		100 % 100 % 100 %	7 Dokumen	1 dokumen	56,825,010	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	100 % 100 % 100 %	96,047,595
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah		100 % 100 % 100 %	556 Laporan	1 dokumen	49,683,260	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	100 % 100 % 100 %	60,461,651
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah		100 % 100 % 100 %	1200 Orang	1 dokumen	92,051,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase BMD yang tercatat dengan akurat Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat Persentase BMD yang tertib	100 % 100 % 100 %	23,746,785
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								607,368,660					811,341,008
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								607,368,660					811,341,008
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak dan Persentase Penerimaan PAD		95 % 100 %	1 Dokumen	1100 dokumen	11,113,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	95 % 100 %	12,252,083
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak dan Persentase Penerimaan PAD		95 % 100 %	33 Laporan	1100 dokumen	38,645,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	95 % 100 %	54,954,113

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak dan Persentase Penerimaan PAD		95 % 100 %	3 Unit	1100 dokumen		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	95 % 100 %	55,125,000
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak dan Persentase Penerimaan PAD		95 % 100 %	1 Laporan	1100 dokumen		60,435,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	95 % 100 %	213,003,000
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan N.J.P nya	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak dan Persentase Penerimaan PAD		95 % 100 %	8 Obyek Pajak	1100 dokumen		28,035,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	95 % 100 %	127,377,338
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak dan Persentase Penerimaan PAD		95 % 100 %	3 Dokumen	1100 dokumen		79,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	95 % 100 %	77,175,000
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak dan Persentase Penerimaan PAD		95 % 100 %	2620 Layanan	1100 dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	95 % 100 %	20,125,000
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak dan Persentase Penerimaan PAD		95 % 100 %	1 Dokumen	1100 dokumen		33,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	95 % 100 %	66,150,000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak dan Persentase Penerimaan PAD		95 % 100 %	7 Dokumen	1100 dokumen		243,890,410	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	95 % 100 %	124,478,099
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak dan Persentase Penerimaan PAD		95 % 100 %	2 Dokumen	1100 dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	95 % 100 %	20,125,000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak dan Persentase Penerimaan PAD		95 % 100 %	7 Dokumen	1100 dokumen		72,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	95 % 100 %	20,451,375
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak dan Persentase Penerimaan PAD		95 % 100 %	1 Laporan	1100 dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD Persentase Pencapaian Target PAD	95 % 100 %	20,125,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
TOTAL											191,999,571,838				152,415,604,784



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target									
5																						
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
5	03																		16,387,190,745		16,736,242,376	
5	03	01																		14,799,145,886		14,984,626,015
5	03	01	2.01																	135,992,360		149,591,750
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Jumlah Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	5 Dokumen	100 %	76,369,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %				84,006,450	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, Lap Capkin, Lap Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulanan yang disusun)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	5 Laporan	100 %	59,622,860	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %					65,585,300	
5	03	01	2.02																	14,022,166,946		14,131,382,949
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN selama 14 Bulan (60 PNS, 53 CPNS 2021)	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	113 Orang/bulan	100 %	13,878,341,946	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %						13,982,141,949
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Jumlah Honor Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayarkan)	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	23 Dokumen	100 %	98,880,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %						103,800,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD)	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	4 Laporan	100 %		44,945,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	45,441,000
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									134,374,000				139,424,279
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jumlah tagihan komponen listrik yang dibayarkan)	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	12 paket	100 %		6,814,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	7,495,400
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana)	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	5 Paket	100 %		8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	8,800,000
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan)	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	600 Dokumen	100 %		3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	3,300,000
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia)	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	285 Porsi	100 %		8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	8,800,000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang terlaksana)	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		A Nilai 100 % 100 %	400 Laporan	100 %		108,560,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	111,028,879
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									53,651,020				59,134,966

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor)	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100 % A Nilai 100 %	11 Unit	82 %	53,651,020	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 % A Nilai 100 %	59,134,966
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								368,372,810					405,267,071
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Tulis Kantor, Materai, Benda Pos Lainnya, cetak Dan Penggandaan Jumlah pelayanan antar produk Kepegawaian	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		A Nilai 100 % 100 %	4 Paket/lembar 500 Dokumen	100 %	20,690,780	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	22,739,398
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor)	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		A Nilai 100 % 100 %	4 Kali	100 %	6,940,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	7,711,000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bahan-bahan Penunjang Kebersihan kantor Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Novice Programmer/It Support Jumlah Pembayaran honor Tenaga Sopir Jumlah Pembayaran honor Tenaga Swakelola umum	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		A Nilai 100 % 100 %	12 Bulan 2 Orang 1 orang 1 Orang 10 Orang	100 %	340,742,030	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	374,816,673
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								84,588,750					99,825,000
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas)	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		A Nilai 100 % 100 %	6 Unit	100 %	84,588,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	93,060,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		A Nilai 100 % 100 %	20 Unit	100 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai 100 % 100 %	6,765,000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								1,588,044,859					1,751,616,361
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								879,095,720					967,005,545
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	OPersentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Jumlah Usulan Formasi)	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		73 % 93 % 75 % 92 %	1 Formasi	82 %	52,620,230	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		OPersentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	73 % 93 % 75 % 92 %	57,882,253
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	OPersentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah pengadaan CPNS Jumlah SK PNS yang diterbitkan tepat waktu, 150 SK CPNS, 165 SK PNS, 150 SK PPPK	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 % 93 % 75 % 92 %	300 Orang 465 SK	82 %	694,251,460	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		OPersentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	73 % 93 % 75 % 92 %	763,676,606
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	OPersentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Jumlah SK Pemberhentian ASN)	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		73 % 93 % 75 % 92 %	220 Dokumen	82 %	28,952,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		OPersentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	73 % 93 % 75 % 92 %	31,847,200

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	<p>OPersentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN</p> <p>Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek</p> <p>Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang tersampaikan</p> <p>Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS</p>	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Jumlah kegiatan KORPRI yang terselenggara)	<p>Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</p>		73 % 93 % 75 % 92 %	2 Lembaga	82 %	16,416,030	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		<p>OPersentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN</p> <p>Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek</p> <p>Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang tersampaikan</p> <p>Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS</p>	73 % 93 % 75 % 92 %	18,057,886	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	<p>OPersentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN</p> <p>Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek</p> <p>Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang tersampaikan</p> <p>Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS</p>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Jumlah dokumen dan data ASN yg di update secara continue)	<p>Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</p>		73 % 93 % 75 % 92 %	6058 ASN	82 %	62,040,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		<p>OPersentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN</p> <p>Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek</p> <p>Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang tersampaikan</p> <p>Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS</p>	73 % 93 % 75 % 92 %	68,244,000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	<p>OPersentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN</p> <p>Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek</p> <p>Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang tersampaikan</p> <p>Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS</p>	Jumlah arsip kepegawaian kab. padang pariaman yg terkelola Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan	<p>Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</p>		73 % 93 % 75 % 92 %	6058 ASN 300 Kartu	82 %	24,816,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		<p>OPersentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN</p> <p>Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek</p> <p>Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang tersampaikan</p> <p>Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS</p>	73 % 93 % 75 % 92 %	27,297,600	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN								273,129,890						300,442,879
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	<p>Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek</p> <p>Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang tersampaikan</p> <p>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN</p> <p>Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS</p>	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah SK ASN (1500 SK Pelaksana, 150 SK Pindah Dalam, 50 SK Penempatan, 50 SK Melepas , 50 SK Menerima))	<p>Persentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN</p>		93 % 75 % 73 % 92 %	1800 SK	83 %	35,155,890	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		<p>Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek</p> <p>Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang tersampaikan</p> <p>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN</p> <p>Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS</p>	93 % 75 % 73 % 92 %	38,671,479	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah ASN yg mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional Yang Diterbitkan Jumlah SK Kenaikan pangkat Struktural ASN yang diterbitkan tepat waktu	Persentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN		93 % 75 % 73 % 92 %	80 SK 800 SK 500 SK	83 %	81,094,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	93 % 75 % 73 % 92 %	89,203,400
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ASN Jumlah Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama yang dilaksanakan	Persentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN		93 % 75 % 73 % 92 %	4 Kali 3 Kali	83 %	156,880,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	93 % 75 % 73 % 92 %	172,568,000
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN							217,880,380						239,668,737
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Sosio Kultural)	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN		93 % 75 % 73 % 92 %	30 Orang	86 %	110,825,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	93 % 75 % 73 % 92 %	121,908,237
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Jumlah Pelaksanaan Assessment Center bagi ASN Kab. Padang Parلمان)	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN		93 % 75 % 73 % 92 %	1 Dokumen	86 %	76,125,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	93 % 75 % 73 % 92 %	83,737,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Jumlah SK tubel dan izin belajar yang diterbitkan)	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN		93 % 75 % 73 % 92 %	50 Orang	86 %	10,249,880	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	93 % 75 % 73 % 92 %	11,275,000
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Jumlah SK penetapan pengangkatan pertama kali, kenaikan jenjang karir dan pemberhentian jabatan fungsional PNS)	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN		93 % 75 % 73 % 92 %	500 Orang	86 %	20,680,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	93 % 75 % 73 % 92 %	22,748,000
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								217,938,869					244,499,200
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Terlaksananya Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur		93 % 75 % 73 % 92 %	40 Orang 2 Perbub	85 %	45,118,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	93 % 75 % 73 % 92 %	49,629,800
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah ASN yang terukur Indeks Profesionalitas ASN Jumlah ASN yg penilaian kinerjanya secara online Jumlah PAK ASN Fungsional yang diterbitkan	Terlaksananya Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur		93 % 75 % 73 % 92 %	920 Orang 6057 Orang 4000 PAK	85 %	94,722,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	93 % 75 % 73 % 92 %	104,194,200

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lancana karya Satya Jumlah Fasilitasi Pemberian TPP Jumlah Sertifikat Penghargaan kepada ASN pensiun	Terlaksananya Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur		93 % 75 % 73 % 92 %	200 Orang 6057 Orang 220 SK	85 %	24,816,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	93 % 75 % 73 % 92 %	27,297,600
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Jumlah Laporan Monitoring dan Pembinaan Disiplin ASN)	Terlaksananya Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur		93 % 75 % 73 % 92 %	4 Orang	85 %	20,499,360	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	93 % 75 % 73 % 92 %	27,297,600
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN yg tertangani Jumlah pelaksanaan sidang MPP	Terlaksananya Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur		93 % 75 % 73 % 92 %	5 Laporan 4 Kali	85 %	20,483,689	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	93 % 75 % 73 % 92 %	22,550,000
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Jumlah pembinaan perkawinan dan perceraian ASN yang dilaksanakan)	Terlaksananya Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur		93 % 75 % 73 % 92 %	10 Kasus	85 %	12,299,820	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bim tek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	93 % 75 % 73 % 92 %	13,530,000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1,131,451,737				1,244,597,472
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									1,131,451,737			1,244,597,472
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis									258,839,190			284,723,670

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis		90 %	1 Dokumen	92 %	135,745,440	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN	90 %	149,320,545
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Jumlah ASN yg mengikuti Diklat Teknis)	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis		90 %	30 Orang	92 %	123,093,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN	90 %	135,403,125
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							872,612,547						959,873,802
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan penjurangan struktural kepemimpinan Jumlah CPNS yg mengikuti diklat prajabatan CPNS Gol II dan III	Persentase Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional		90 %	26 Orang 43 Orang 60 Orang	92 %	872,612,547	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN	90 %	959,873,802
TOTAL									17,518,642,482					17,980,839,848



INSPEKTORAT DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
6																		
6	01																	
6	01	01																
6	01	01	2.01															
6	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		90 A 100 % Nilai %	5 Laporan	90 %	64,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	85,446,000	
6	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		90 A 100 % Nilai %	1 Laporan	90 %	14,268,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	23,235,000	
6	01	01	2.02															
6	01	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	42 Orang/bulan	100 %	5,042,761,264	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	5,325,243,207	
6	01	01	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	1 Dokumen	100 %	85,080,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	85,680,000	
6	01	01	2.05															
6	01	01	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		90 A 100 % Nilai %	1 Paket	70 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	75,000,000	
6	01	01	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		90 A 100 % Nilai %	28 Orang	70 %	139,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	325,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		90 A 100 % Nilai %	10 Orang	70 %	21,497,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	50,000,000
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		90 A 100 % Nilai %	10 Orang	70 %	21,497,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	50,000,000
6.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								330,454,750					438,546,857
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	1 Paket	100 %	16,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	19,496,857
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	1 Paket	100 %	13,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	22,800,000
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	1 Paket	100 %	23,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	38,000,000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	1 Paket	100 %	22,504,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora t, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	23,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	24 Dokumen	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	12,500,000
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	1 Laporan	100 %	51,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	68,000,000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	1 Laporan	100 %	192,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	254,750,000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								392,570,351					355,000,000
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	4 Unit	50 %	144,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	0
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	78 Unit	50 %	118,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	125,000,000
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	5 Unit	50 %	33,325,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah		90 A 100 % Nilai %	10 Unit	50 %	96,294,601	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	180,000,000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								340,014,500					333,264,560
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		90 A 100 % Nilai %	1 Laporan	90 %	52,499,940	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	53,750,000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		90 A 100 % Nilai %	12 Bulan	90 %	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	72,000,000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		90 A 100 % Nilai %	8 Orang	90 %	207,514,560	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	207,514,560
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								366,497,600					260,904,596
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah		90 A 100 % Nilai %	6 Unit	90 %	199,747,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	160,904,596
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah		90 A 100 % Nilai %	5 Paket	90 %	122,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah		90 A 100 % Nilai %	29 Unit	90 %	17,690,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	22,500,000
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah		90 A 100 % Nilai %	37 Unit	90 %	26,610,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektora, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	27,500,000
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								914,370,000					2,176,215,244
6.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								713,970,000					1,868,715,244
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pengawasan yang dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal		60 %	16 Laporan	60 %	127,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan yang dilakukan	60 %	255,465,244
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase pengawasan yang dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal		60 %	1 Laporan	60 %	62,510,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan yang dilakukan	60 %	215,750,000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase pengawasan yang dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal		60 %	1 Laporan	60 %	56,935,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan yang dilakukan	60 %	225,000,000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase pengawasan yang dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal		60 %	1 Laporan	60 %	64,925,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan yang dilakukan	60 %	127,500,000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Persentase pengawasan yang dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal		60 %	1 Laporan	60 %	78,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan yang dilakukan	60 %	175,000,000
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase pengawasan yang dilakukan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal		60 %	1 Kesepakatan	60 %	215,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan yang dilakukan	60 %	655,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase pengawasan yang dilakukan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal		60 %	1 Dokumen	60 %		108,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan yang dilakukan	60 %	215,000,000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								200,400,000						307,500,000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase pengawasan yang dilakukan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu		60 %	1 Laporan	60 %		34,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan yang dilakukan	60 %	72,500,000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan yang dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu		60 %	1 Laporan	60 %		165,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan yang dilakukan	60 %	235,000,000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								362,188,850						725,080,420
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan								73,909,000						160,492,380
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang dibuat sesuai anggaran		60 %	2 Rekomendasi	60 %		40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	60 %	91,492,380
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang dibuat sesuai anggaran		60 %	0 Rekomendasi 1 Rekomendasi	60 %		33,909,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	60 %	69,000,000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi								288,279,850						564,588,040
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan		60 %	2 perangkat daerah	60 %		43,279,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	60 %	70,000,000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan		60 %	10 perangkat daerah	60 %		45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	60 %	119,588,040

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan		60 %	1 Kegiatan	60 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	60 %	175,000,000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan		60 %	10 perangkat daerah	60 %	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	60 %	200,000,000
TOTAL									8,094,449,315					10,308,615,884



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
8																		
8	01										2,952,983,304							2,994,334,260
8	01	01									1,332,948,754							807,824,260
8	01	01	2.01								80,000,000							135,000,000
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah		100 persen	2 Dokumen	9 dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	20,000,000
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah		100 persen	1 Dokumen	9 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	20,000,000
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah		100 persen	1 Dokumen	9 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	20,000,000
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	jumlah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah		100 persen	1 Dokumen	9 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	20,000,000
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah		100 persen	1 Dokumen	9 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	20,000,000
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah		100 persen	3 Laporan	9 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	35,000,000
8	01	01	2.02									788,856,980						53,640,000
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN		100 persen	6 Orang/bulan	1 perangkat daerah	725,616,980	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	0
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN		100 persen	12 bulan	1 perangkat daerah	63,240,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi-nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	53,640,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								23,990,000				100,000,000	
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah peningkatan kapasitas yang terpenuhi		100 persen	5 Orang	11 orang	8,320,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	50,000,000
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peningkatan kapasitas yang terpenuhi		100 persen	6 Orang	11 orang	15,670,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintahan Daerah	100 persen	50,000,000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								77,200,000				120,000,000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		100 persen	300 porsi	300 porsi	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	20,000,000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		100 persen	250 Laporan	300 porsi	62,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	100,000,000
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								24,980,450				0	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	jumlah peralatan dan mesin		100 persen	3 Unit	3 unit	24,980,450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	0
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								285,064,274				324,184,260	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah surat menyurat yang di arsipkan	jumlah penunjang urusan pemerintahan yang tersedia		100 persen	750 arsip surat	12 bulan	30,001,914	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	40,000,000
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah penunjang urusan pemerintahan yang tersedia		100 persen	12 bulan	12 bulan	10,880,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	40,000,000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	jumlah penunjang urusan pemerintahan yang tersedia		100 persen	12 Laporan	12 bulan	244,182,360	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	244,184,260
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								52,857,050				75,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100 persen	12 bulan	12 bulan	52,857,050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	75,000,000
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								50,000,000					80,000,000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								50,000,000					80,000,000
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	persentase gangguan keamanan yang dapat di redam	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		100 persen	100 Orang	100 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase gangguan keamanan yang dapat di redam	100 persen	80,000,000
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik								1,115,535,000					1,161,510,000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								1,115,535,000					1,161,510,000
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	persentase laporan pertanggungjawaban parpol tepat waktu	Jumlah Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		100 persen	10 partai politik	10 dokumen	989,540,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase laporan pertanggungjawaban parpol tepat waktu	100 persen	1,006,510,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	persentase laporan pertanggungjawaban parpol tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Peserta Workshop/Bim tek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan pemilu	jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		100 persen	130 orang 30 orang 100 orang	10 dokumen	125,995,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase laporan pertanggungjawaban parpol tepat waktu	100 persen	155,000,000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								19,266,250					25,000,000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								19,266,250					25,000,000
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah laporan hasil monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100 persen	1 Laporan	1 laporan	19,266,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	100 persen	25,000,000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								204,991,500					170,000,000
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								204,991,500					170,000,000
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	persentase pelaksanaan penanganan jumlah kasus narkoba menurun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidangKetahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah		100 persen	100 Orang	100 orang	154,441,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase pelaksanaan penanganan jumlah kasus narkoba menurun	100 persen	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	persentase pelaksanaan penanganan jumlah kasus narkoba menurun	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		100 persen	100 Orang	100 orang	50,550,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase pelaksanaan penanganan jumlah kasus narkoba menurun	100 persen	120,000,000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								230,241,800					750,000,000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								230,241,800					750,000,000
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		100 persen	100 Orang	100 orang	40,536,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100 persen	450,000,000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		100 persen	1 Dokumen	100 orang	189,705,050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100 persen	300,000,000
TOTAL									2,952,983,304					2,994,334,260



KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01																	
7	01	01																
7	01	01	2.01															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dik RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dik RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun		4 dokumen	4 Dokumen	4 Dok	2,640,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah dik RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun	4 dokumen	6,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dik RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dik RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kelurahan	4 dokumen	5 Laporan	4 Dok	2,820,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah dik RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun	4 dokumen	5,000,000
7	01	01	2.02															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kelurahan		12 Orang/bulan		384,728,465	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				434,121,496
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		34,560,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				36,000,000
7	01	01	2.05															
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kelurahan	1 tahun	11 Orang	1000 %	2,420,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran yang dipenuhi	1 tahun	6,050,000
7	01	01	2.06															
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kelurahan		1 Paket		1,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,650,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kelurahan		1 Paket		1,255,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2,200,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingskuang, Semua Kelurahan		350 Laporan		2,805,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3,847,800	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingskuang, Semua Kelurahan		1 Laporan		32,984,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			55,000,000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								32,657,332				53,000,000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit		32,657,332	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			53,000,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								143,943,440				160,317,440	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingskuang, Semua Kelurahan		1 Laporan		13,876,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			25,250,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingskuang, Semua Kelurahan		1 Laporan		11,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			16,800,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingskuang, Semua Kelurahan		5 Laporan		118,267,440	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			118,267,440	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								41,615,000				80,619,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingskuang, Semua Kelurahan		2 Unit		30,285,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			38,500,000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingskuang, Semua Kelurahan		10 Unit		4,790,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			9,119,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kelurahan		15 Dokumen		4,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				18,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								12,060,000					33,000,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								12,060,000					33,000,000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	persentase terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kelurahan	1 tahun	9 Dokumen	3 Nagari	4,020,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	1 tahun	11,000,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	persentase terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kelurahan	1 tahun	3 Dokumen	3 Nagari	4,020,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	1 tahun	11,000,000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	persentase terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan		jumlah pembinaan administrasi nagari	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kelurahan	1 tahun		3 Nagari	4,020,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	1 tahun	11,000,000
TOTAL									740,223,237				972,905,736	



KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7		UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01	KECAMATAN										690,087,447		1,073,858,288					
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										616,302,397		960,181,527					
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										13,536,190		9,000,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dik RKA,DPA,RK-PDPA-P yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dik RKD,DPA,RK-PDPA-P yang di susun	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kelurahan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah dik RKA,DPA,RK-PDPA-P yang disusun	5 Dokumen	6,000,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dik RKA,DPA,RK-PDPA-P yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dik RKD,DPA,RK-PDPA-P yang di susun	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kelurahan	5 Dokumen	2 Laporan	5 dokumen	9,536,190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah dik RKA,DPA,RK-PDPA-P yang disusun	5 Dokumen	3,000,000		
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										298,666,462		540,259,262			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhi Asministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kelurahan	1 Tahun	13 Orang/bulan	1tahun	254,021,462	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhi Asministrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	502,259,262		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhi Asministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Dokumen	1 tahun	34,560,000		Persentase terpenuhi Asministrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	35,000,000		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terpenuhi Asministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah		1 Tahun	1 Laporan	1 tahun	10,085,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhi Asministrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	3,000,000		
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										10,037,500		11,000,001			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknjs Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan		1 tahun	1 Orang	1 tahun	10,037,500		tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan	1 tahun	11,000,001		
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										78,838,500		130,500,000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kelurahan	00	200 buah	10 Paket	200 buah	2,498,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	00	200 buah	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kelurahan	00 200 buah	1 Paket	200 buah	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	00 200 buah	6,500,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kelurahan	00 200 buah	1 Laporan	200 buah	11,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	00 200 buah	7,000,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		00 200 buah	1 Laporan	200 buah	62,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	00 200 buah	112,000,000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								19,893,725					11,000,000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan yang di bayarkan pajaknya		4 buah	1 Unit	4 buah	19,893,725		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 buah	11,000,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								153,217,220					165,422,264
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		1 tahun	1 tahun	1 tahun	22,118,100		tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan	1 tahun	27,309,464	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		1 tahun	1 Laporan	1 tahun	11,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan	1 tahun	30,000,000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		1 tahun	1 Laporan	1 tahun	6,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan	1 tahun	15,000,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kelurahan	1 tahun	1 Laporan	1 tahun	113,209,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan	1 tahun	93,112,800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								42,112,800				93,000,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan		1 tahun	4 Unit	1 tahun	35,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 tahun	60,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan		1 tahun	1 Unit	1 tahun		6,262,800			jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 tahun	33,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								26,042,500						35,100,000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								20,736,250						25,100,000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dgn perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah laporan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		1 laporan	1 Laporan	1 laporan		20,736,250			Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dgn perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 laporan	25,100,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								5,306,250						10,000,000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan		1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen		5,306,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1 dokumen	10,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								30,398,800						29,547,414
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								30,398,800						29,547,414
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan		1 Dokumen 1 tahun	1 tahun	1 tahun		15,393,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan	1 Dokumen 1 tahun	18,547,414
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan		1 Dokumen 1 tahun	1 Laporan	1 tahun		15,005,000			Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan	1 Dokumen 1 tahun	11,000,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4,990,000						39,029,347
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								4,990,000						39,029,347
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor ,dievaluasi dan dilaporkan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor ,dievaluasi dan dilaporkan		1 tahun	1 Laporan	1 tahun		4,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor ,dievaluasi dan dilaporkan	1 tahun	39,029,347
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								5,730,000						0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								5,730,000						0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	persentase semua urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan umum	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	persentase semua urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan umum		1 tahun	0 Dokumen 1 Laporan	1 tahun	5,730,000			persentase semua urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan umum	1 tahun	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								6,623,750					10,000,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								6,623,750					10,000,000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan administrasi nagari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari		1 tahun	1 Dokumen	1 tahun	6,623,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pembinaan administrasi nagari	1 tahun	10,000,000
TOTAL									690,087,447					1,073,858,288



KECAMATAN BATANG GASAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01																	
7	01	01																
7	01	01	2.01															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat		9 dokumen 9 dokumen	6 Dokumen	9 dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat	9 dokumen 9 dokumen	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat		9 dokumen 9 dokumen	3 Laporan	9 dokumen	7,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat	9 dokumen 9 dokumen	
7	01	01	2.02															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhi administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat		12 orang	11 Orang/bulan	12 orang	345,768,995	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhi administrasi keuangan perangkat daerah	12 orang	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhi administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat		12 orang	11 Dokumen	12 orang	30,240,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhi administrasi keuangan perangkat daerah	12 orang	
7	01	01	2.06															
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		1 tahun	12 Paket	1 tahun	2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		1 tahun	150 Paket	1 tahun	1,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		1 tahun	1000 Paket	1 tahun	2,375,227	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		1 tahun	140 Laporan	1 tahun		4,625,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		1 tahun	80 Laporan	1 tahun		46,832,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									29,500,000					0
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terdinya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase terdinya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah		1 paket	1 Unit	1 Paket		29,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terdinya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah	1 paket	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									105,609,520					0
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terdinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terdinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1 tahun	600 Laporan	1 tahun		7,580,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terdinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 tahun	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terdinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terdinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1 tahun	12 Laporan	1 tahun		8,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terdinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 tahun	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terdinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terdinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1 tahun	4 Laporan	1 tahun		89,279,520	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terdinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 tahun	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									72,110,000					0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		2 unit	2 Unit	2 unit		62,110,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		2 unit	2 Unit	2 unit		8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		2 unit	16 Unit	2 unit	2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								3.650.000				0	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1.000.000				0	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan		100 persen	10 Dokumen	100 Persen	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan	100 persen	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								2.650.000				0	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat		500 dokumen	0 Laporan 900 Laporan	500 dokumen	2.650.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	500 dokumen	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								13.150.000				0	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								13.150.000				0	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa		12 usulan	1 kali	12 usulan	3.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	12 usulan	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa		12 usulan	0 Laporan 4 Laporan	12 usulan	10.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	12 usulan	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								2.500.000				0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								2.500.000				0	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Perentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Perentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		12 kali	10 Laporan	12 kali	2.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 kali	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								45.000.000				0	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								45.000.000				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terelenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terelenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan		1 Kali	1 Orang	1 Kali		4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terelenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	1 Kali	0
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terelenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terelenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan		1 Kali	40 Dokumen	1 Kali		41,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terelenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	1 Kali	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									1,000,000					0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									1,000,000					0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa		1 tahun	3 Dokumen	1 tahun		1,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	1 tahun	0
TOTAL										715,260,742					0



KECAMATAN BATANG ANAI

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01																	
7	01	01																
7	01	01	2.01															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 6 Dokumen	94 %	8.426.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	9.270.000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	94 %	8.079.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	8.290.000
7	01	01	2.02															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	18 Orang	100 %	412.097.581	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	658.292.604
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	34.560.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	50.000.000
7	01	01	2.05															
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	18 Paket	94 %	9.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	14.000.000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	94 %	2.480.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	8.500.000
7	01	01	2.06															
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	50 Paket	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	12.000.000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	25,322,310	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	30,000,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	55 Paket	100 %	6,338,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	18,000,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	360 Dokumen	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	5,000,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	18,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	400 Laporan	100 %	65,388,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	70,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95,180,640					99,449,920
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	13,230,720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	17,500,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	16,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	16,800,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	65,149,920	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	65,149,920
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60,204,000					80,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	38,284,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	14,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	20,000,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	7,920,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								24,865,000					49,720,000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								16,730,000					32,220,000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	100 %	9,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100 %	14,220,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	7,530,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100 %	18,000,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								8,135,000					17,500,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	8,135,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100 %	17,500,000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								38,760,240					65,650,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								38,760,240					65,650,000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah		persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %		100 %	17,398,240	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 %	28,400,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	21,362,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 %	37,250,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								9,210,000				20,500,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								9,210,000				20,500,000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	7,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100 %	11,000,000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	2,010,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100 %	9,500,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								18,785,000				41,000,000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								18,785,000				41,000,000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	100 %	8,345,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %	19,000,000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	10,440,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %	22,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								15,890,000				26,500,000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								15,890,000				26,500,000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	1 tahun	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	1 tahun	11,890,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	17,500,000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	1 tahun	1,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	4,000,000
TOTAL									845,436,971					1,284,172,524



KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01									717,170,587								1,091,838,287
7	01	01								656,051,587								938,861,526
7	01	01	2.01							6,500,000								6,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kelurahan	5 Dokumen		4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					3,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan		2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3,000,000
7	01	01	2.02									399,851,587						536,939,262
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan		364,671,587	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					502,259,262
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kelurahan	0 Dokumen		31,680,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					31,680,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen		3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3,000,000
7	01	01	2.06									79,916,770						150,500,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket		1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket		15,831,770	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					20,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket		5,011,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6,500,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan		1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
7.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan		56,074,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			112,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								131,981,230				165,422,264
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		17,598,750				27,309,464
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan		18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan		3,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan		92,892,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			93,112,800
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37,802,000				80,000,000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit		32,802,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			20,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								20,250,000				42,500,000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								17,250,000				32,500,000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan		12,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,100,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,400,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								3,000,000				10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen		1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan		2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								30.869.000					61.447.414
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								30.869.000					61.447.414
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								15.890.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18.547.414
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan		14.979.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42.900.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								5.000.000					39.029.347
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								5.000.000					39.029.347
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				39.029.347
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								5.000.000					10.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								5.000.000					10.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10.000.000
TOTAL									717.170.587					1.091.838.287



KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01																	
7	01	01																
7	01	01	2.01															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen	94 %	10,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	15,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP dan SAKIP	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	94 %	2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	5,000,000
7	01	01	2.02															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	9 Orang/Bulan	100 %	325,324,538	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	325,324,539
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran PA, KPA, PPK dan PPTK serta bendahara	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	37,440,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	40,000,000
7	01	01	2.05															
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Tersediannya pinger print online	Tersediannya pinger print online	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	96 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN (Perencana) yang mengikuti Bim tek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya pinger print online	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	96 %	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	8,000,000
7	01	01	2.06															
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	1,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	4,999,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman Yang disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 1 Tahun	100 %	7,650,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	6,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan Dalam Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	46,880,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	60,000,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								34,262,510					50,000,000
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset tetap Lainnya yang terpenuhi	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	84 %	34,262,510	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								159,239,190					162,009,120
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 1 Tahun	100 %	13,039,190	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	16,000,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	11,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	11,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Swakelola, Tenaga IT Sopir dan Kebersihan Perkantoran	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 6 Orang/Bulan	100 %	134,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	135,009,120
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								69,193,750					75,225,135
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	21,162,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase kantran tibtmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Jumlah Kantram tibtmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang di monitor ,di evaluasi dan dilaporkan	Jumlah Kantram tibtmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	2,682,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Presentase kantran tibtmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100 %	5,000,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								16,382,500					43,000,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								16,382,500					43,000,000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan		100 %	1 Tahun	100 %	12,382,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %	15,000,000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Jumlah MTO, Pendampingan safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %	25,000,000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan		100 %	1 Tahun	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %	3,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								2,447,500					2,500,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								2,447,500					2,500,000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	1 Tahun	100 %	2,447,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000
TOTAL									766,626,338					973,102,494



KECAMATAN LUBUK ALUNG

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7																
7	01									846,260,026						1,298,326,320
7	01	01								772,760,026						1,171,576,320
7	01	01	2.01							8,550,000						15,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung		4 Dokumen		3,550,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan		4 Laporan		3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4,500,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP, LPPD, Laporan Keuangan				4 dokumen		2,000,000			3,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								437,683,313			656,524,970
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								400,683,313			601,024,970
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Pembayaran honorarium Pengelola Keuangan (PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara)		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan		11 orang/tahun		35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		52,500,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan		1 Laporan		2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15,000,000			22,500,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan		11 Orang		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		22,500,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								102,500,000			162,750,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan		1 Paket		3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan		1 Paket		5,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			22,500,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan		2 Paket		15,000,000					22,500,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan		1 tahun		19,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			22,500,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67 Laporan		60,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			90,000,000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								39,000,000					54,500,000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit		33,000,000					45,000,000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit		6,000,000					9,500,000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								123,026,713					183,801,350
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				950 Laporan		16,476,713		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			23,976,350
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan		24 Laporan		9,950,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			14,925,000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan		15 Laporan		3,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					12,000,000				27,000,000		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perna dan Perwana yang diverifikasi		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan		18 dokumen /tahun	8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12,000,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan administrasi nagari		Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 kali/tahun	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			15,000,000
TOTAL										846,260,026				1,298,326,320	



KECAMATAN NAN SABARIS

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7																	
7	01									655,544,838							998,528,287
7	01	01								566,888,982							850,551,526
7	01	01	2.01							5,000,000							6,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen		3,000,000					3,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan		2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							319,232,457					515,229,262
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					10 Orang/bulan		281,672,457	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				442,229,262
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					5 Dokumen		34,560,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				70,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan		3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							93,259,600					131,500,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket		2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket		9,994,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				7,500,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan		4,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				7,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan		1 Laporan		76,465,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				112,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							105,616,675						137,822,264
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan		1 Laporan		24,450,275	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				27,309,464
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan		1 Laporan		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				30,000,000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan		1 Laporan		6,010,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				15,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan		1 Laporan		65,156,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				65,512,800
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							43,780,250						60,000,000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan		2 Unit		43,780,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				60,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							47,209,506						37,500,000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							42,209,506						27,500,000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase pelaksanaan pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan		26,412,006	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pelayanan Kecamatan	100 persen	25,100,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen		15,797,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pelayanan Kecamatan	100 persen	2,400,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5,000,000				10,000,000	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan	1	Laporan		5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10,000,000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							28,146,350				61,447,414	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						28,146,350				61,447,414	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan			14,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		18,547,414	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan	1	Laporan	13,196,350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		42,900,000	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							7,300,000				39,029,347	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum						7,300,000				39,029,347	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan	1	Laporan	7,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		39,029,347	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							6,000,000				10,000,000	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6,000,000				10,000,000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kelurahan	1	Dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10,000,000	
TOTAL										655,544,838				998,528,287	



KECAMATAN PADANG SAGO

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01																	
7	01	01																
7	01	01	2.01															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kelurahan		6 Dokumen		11,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kelurahan		2 Laporan		3,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kelurahan		1 Laporan		5,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				7,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kelurahan		11 Orang/bulan		311,050,918					342,156,010
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen		48,380,000					53,218,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan		2,220,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2,442,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kelurahan		200 Paket		6,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				6,900,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kelurahan		12 Laporan		8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				9,200,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kelurahan		12 Dokumen		1,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								1,500,000					18,150,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								1,500,000					18,150,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kelurahan		12 Dokumen		1,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			18,150,000
TOTAL									615,201,833				975,737,518	



KECAMATAN PATAMUAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Perawatan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Perawatan Kendaraan Dinas	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kelurahan	1 tahun	3 Unit	1 tahun	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Perawatan Kendaraan Dinas	1 tahun	42,500,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								93,607,300				95,607,300	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	butuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kelurahan	1 tahun	0 Laporan	1 tahun	14,418,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	1 tahun	14,418,500
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	butuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kelurahan	1 tahun	0 Laporan	1 tahun	6,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	1 tahun	8,800,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	butuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kelurahan	1 tahun	3 Orang/Tahun	1 tahun	72,388,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	1 tahun	72,388,800
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								39,742,500				41,150,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Perawatan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Perawatan Kendaraan Dinas	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kelurahan	1 tahun	3 Unit	1 tahun	36,202,500			Persentase Perawatan Kendaraan Dinas	1 tahun	39,000,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Perawatan Kendaraan Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Perawatan Kendaraan Dinas	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kelurahan	1 tahun	3 Unit	1 tahun	3,540,000			Persentase Perawatan Kendaraan Dinas	1 tahun	2,150,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								2,540,000				2,540,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								0				0	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kelurahan	100 %	2 uks	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100 %	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								2,540,000				2,540,000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kelurahan	1 tahun	11 Orang/Tahun	1 tahun	2,540,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan	1 tahun	2,540,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								13,160,000				15,160,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					13,160,000				15,160,000				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 usulan	7 usulan	3,240,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 %	3,240,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 6 Laporan	7 usulan	9,920,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 %	11,920,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2,540,000				2,540,000			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					2,540,000				2,540,000			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kelurahan	1 tahun	6 Laporan	6 bulan	2,540,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	1 tahun	2,540,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					9,050,000				9,050,000			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					9,050,000				9,050,000			
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan urusan pemerintahan Kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan urusan pemerintahan Kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kelurahan	100 %	1 tahun	1 tahun	9,050,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	9,050,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					2,540,000				2,540,000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					2,540,000				2,540,000			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Keuangan Nagari yang dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kelurahan	1 tahun	6 Dokumen	1 tahun	2,540,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	1 tahun	2,540,000
								TOTAL				695,580,337				726,707,837	



KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01																	
7	01	01																
7	01	01	2.01															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		6 Dokumen		10,462,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,100,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		1 Laporan		4,839,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		12 Orang/bulan		358,806,953	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				598,950,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		1 Laporan		37,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		1 Unit		7,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		12 Paket		8,935,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		650 Laporan		7,797,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		400 Laporan		56,612,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							29,685,374					45,000,000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		4 Unit		29,685,374	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							119,541,800					131,166,560	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan		14,061,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		12 Laporan		14,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,300,000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		12 Laporan		4,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan				86,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86,866,560	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							63,696,000					95,600,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		12 Unit		53,551,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,000,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		1 Unit		4,665,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		1 Unit		5,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,600,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								17,536,780				43,400,000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								17,536,780				43,400,000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		3 Laporan		5,506,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		15 Dokumen		12,030,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,400,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								33,422,750				81,100,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								33,422,750				81,100,000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan				7,067,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,700,000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		12 Dokumen		14,434,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,500,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		7 Laporan		11,921,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37,900,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4,254,800				8,500,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								4,254,800				8,500,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kelurahan		6 Laporan		4,254,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,500,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								13,542,500				14,800,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					13,542,500				14,800,000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kelurahan		5 Orang	13,542,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,800,000
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					12,070,000					24,400,000	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					12,070,000				24,400,000	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kelurahan		12 Dokumen	2,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kelurahan		8 Dokumen	2,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kelurahan		1 Dokumen	4,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,400,000
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kelurahan		6 Dokumen	2,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000
							TOTAL			786,362,957				1,154,016,560



KECAMATAN SUNGAI LIMAU

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01	KECAMATAN															
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											827,657,707		830,857,707	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											4,600,000		4,600,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 % 6 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	100 % 6 Dokumen	2,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 % 6 Dokumen	5 Laporan	6 Dokumen	2,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	100 % 6 Dokumen	2,600,000
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											408,218,107		408,217,910
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	13 Orang/bulan	100 %	370,778,107	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	370,777,910
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	37,440,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	37,440,000
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											105,767,000		105,375,227
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	3,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	5,767,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	5,375,227
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	20,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	62,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	62,000,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								38,615,450					41,000,000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	38,615,450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 %	41,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								145,263,450					137,164,570
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	14,615,450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,665,610
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	120,648,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	120,498,960
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60,800,000					61,500,000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	49,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	56,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	6,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	5,000,000
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							2,056,000					2,000,000
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							1,063,000					1,000,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,063,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							993,000					1,000,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	5 UKS	1 Laporan	5 UKS	993,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah UKS yang dapat dibina	5 UKS	1,000,000
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							20,331,500					23,500,000
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							20,331,500					23,500,000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Lembaga Masyarakat	100 %	8,506,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	100 %	8,500,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	11,825,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	100 %	15,000,000
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							0					1,000,000
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0					1,000,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	1,000,000
7.01.05.		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							42,006,200					45,500,000
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							42,006,200					45,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
																			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %	11,500,000													
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	34,006,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %	34,000,000													
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								0					1,000,000													
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								0					1,000,000													
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	1,000,000													
TOTAL													827,657,707						830,857,707												



KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		8 Paket		500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		50 Paket		5,000,000				10,000,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				80 Laporan		2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		100 Laporan		31,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20,000,000				50,000,000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		4 Unit		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								123,018,455				137,000,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		600 Laporan		25,075,975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,000,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		5 Laporan		91,692,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								49,500,000				120,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		2 Unit		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
7.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		1 Unit		7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
7.01.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		5 Unit		2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								17,500,000				80,000,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								12,500,000				65,000,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		3 Laporan		7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		0 Dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								5,000,000				15,000,000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		800 Laporan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								32,500,000				45,000,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								32,500,000				45,000,000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan				7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan				25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								3,000,000				10,000,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								3,000,000				10,000,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		0 Laporan		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								10,000,000				25,000,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								10,000,000				25,000,000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		50 Orang		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								4,000,000				30,000,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								4,000,000				30,000,000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000
TOTAL												702.805.126				1.036.000.000	



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Paket	100 Persen	5,048,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7,000,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen	90 Laporan	100 Persen	6,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	100 Persen	6,832,188
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen	200 Laporan	100 Persen	36,424,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	100 Persen	50,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								126,299,360					157,292,480
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	14,776,880	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	20,000,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	21,000,000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	4,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	24,600,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	91,692,480	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	91,692,480
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,827,500					89,500,000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Unit	100 Persen	45,827,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	89,500,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								29,590,000					45,000,000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								4,000,000					7,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	OPersentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	OPersentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen	49 Laporan	100 Persen	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		OPersentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 Persen	7,500,000
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							25,590,000						37,500,000
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	OPersentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	OPersentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	25,590,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		OPersentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 Persen	37,500,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							36,065,500						30,510,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							36,065,500						30,510,000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	OPersentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah		OPersentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen		100 Persen	5,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		OPersentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 Persen	6,200,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	OPersentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	OPersentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan 5 Laporan	100 Persen	30,865,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		OPersentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 Persen	24,310,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							9,000,000						30,000,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							9,000,000						30,000,000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen	14 Orang	100 Persen	9,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	100 Persen	30,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							4,000,000						12,015,878
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							4,000,000						12,015,878

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	12,015,878
TOTAL									675,925,953				869,405,969	



KECAMATAN V KOTO TIMUR

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01																	
7	01	01																
7	01	01	2.01															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah dok RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun	4 Dokumen	3,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan	4 Dokumen	250 Laporan	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah dok RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun	4 Dokumen	6,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Tunjangan Kinerja ASN	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan	100 % 1 Dokumen 100 %	13 Orang/bulan	100 %	301,439,060	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 1 Dokumen 100 %	521,438,993
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Honorarium Pelaksana Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Tunjangan Kinerja ASN	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan	100 % 1 Dokumen 100 %	1 Tahun	100 %	34,560,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 1 Dokumen 100 %	40,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhinya Tunjangan Kinerja ASN	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan	100 % 1 Dokumen 100 %	4 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 1 Dokumen 100 %	2,250,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran yang dipenuhi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan	1 Tahun	10 Orang	100 %	2,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran yang dipenuhi	1 Tahun	4,400,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						69,006,000				12,500,000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan	100 %	20 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	100 %	7,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan	100 %	1000 Paket	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	100 %	0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah		100 %	30 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1000 Laporan	100 %	45,006,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian umum Perangkat daerah	100 %	0
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0				0			
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan		1 Unit		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						134,791,210				0			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan		5000 Laporan		10,692,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan		50 Laporan		7,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan		50 Laporan		116,898,960	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56,008,900				0	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan		2 Unit		46,019,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan		5 Unit		4,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan		1 Unit		5,159,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								6,180,000				0	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								3,980,000				0	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan		500 Dokumen		3,980,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								2,200,000				0	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan		1000 Laporan		2,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								20,500,000				0	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								20,500,000				0	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kelurahan				5,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	



KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	5 Paket	1 Tahun	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3,500,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	15 Paket	1 Tahun	2,438,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	5,438,600
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	100 Laporan	1 Tahun	6,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	10,250,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	120 Laporan	1 Tahun	43,310,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Pengadm inistrasian Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	85,310,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20,000,000					30,000,000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhi nya Belanja Modal Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Terpenuhi nya Belanja Modal Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	3 Unit	1 Tahun	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi nya Belanja Modal Barang Milik Daerah	1 Tahun	30,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								167,523,133					178,323,133
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya ATK Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	25 paket	1 Tahun	17,650,333	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	17,650,333
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 tahun	1 Tahun	13,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	13,300,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	20 unit	1 Tahun	3,860,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	9,860,000
7.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya jasa pelayanan kantor	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	6 orang	1 Tahun	132,712,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	137,512,800
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								92,598,200					105,598,200
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	3 Unit	1 Tahun	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	63,000,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Unit	1 Tahun	42,598,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	42,598,200
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								3,660,000					6,330,000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,830,000					4,500,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	10 Dokumen	1 Tahun	1,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan	1 Tahun	4,500,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								1,830,000					1,830,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	10 Laporan	1 Tahun	1,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat	1 Tahun	1,830,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								18,330,000					22,030,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								18,330,000					22,030,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Paket	1 Tahun	9,530,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	1 Tahun	10,530,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	10 Laporan	1 Tahun	8,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	1 Tahun	11,500,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								2,190,000					5,000,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								2,190,000					5,000,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Laporan	1 Tahun	2,190,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun	5,000,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								41,200,000					48,700,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								41,200,000					48,700,000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	25 Orang	1 Tahun	3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	1 Tahun	7,000,000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	pelaksanaan MTO Kecamatan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 paket	1 Tahun	37,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	1 Tahun	41,700,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								1,930,000					1,930,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								1,930,000					1,930,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kelurahan	1 Tahun	120 Dokumen	1 Tahun	1,930,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Tahun	1,930,000
TOTAL									787,000,083					858,720,082



KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01	KECAMATAN													
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7,000,000					10,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		6 Dokumen		3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		2 Laporan		3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5,000,000
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					373,619,783					463,560,807	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		10 Orang/bulan		339,059,783	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		423,560,807
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		5 Dokumen		34,560,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		40,000,000
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					480,000					3,000,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		25 Orang		480,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3,000,000
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					70,766,000					100,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		1 Paket		2,105,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		35 Paket		3,664,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		1 Unit		37,877,685	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			100,000,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								7,000,000				15,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								3,500,000				8,000,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		42 Dokumen		3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			8,000,000	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								3,500,000				7,000,000	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		1600 Laporan		3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			7,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								30,000,000				47,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								30,000,000				47,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Forum Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		0 Lembaga Masyarakat		8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12,000,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		13 Laporan		22,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			35,000,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								3,500,000				8,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								3,500,000				8,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		12 Laporan		3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			8,000,000	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								3,500,000				15,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								3,500,000				15,000,000	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen		3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			15,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								15,000,000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					7,000,000			15,000,000			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kelurahan		12 Dokumen		7,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15,000,000
TOTAL										774,390,559			1,010,253,287			